

Diversifikasi dari AS, UEA Janjikan Investasi Rp809 T ke Jerman

Jumat, 11 September 2026 15:40 WIB

Abeer Abu Omar, Arne Delfs dan Alex Dooler

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121279/diversifikasi-dari-as-uea-janjikan-investasi-rp809-t-ke-jerman/2>

Bloomberg, Uni Emirat Arab (UEA) berjanji menginvestasikan 40 miliar euro atau sekitar Rp809 triliun di Jerman pada sektor mulai dari kecerdasan buatan hingga energi dan pertahanan. Investasi tersebut akan memperdalam hubungan UEA dengan Eropa sekaligus semakin mendiversifikasi hubungan dagang negara Teluk itu secara global.

“Kami sangat ingin memastikan bahwa ekonomi, perdagangan, dan investasi kami terhubung dengan pusat-pusat ekonomi di seluruh dunia,” kata Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA Thani Al Zeyoudi dalam wawancara dengan Bloomberg TV di Berlin pada Kamis. “Pesan utama di sini, sekali lagi, adalah keberagaman, memastikan bahwa kami memiliki alternatif dan pasar-pasar baru.”

Ia menyebut komitmen awal tersebut, yang sekitar sepertiganya dialokasikan untuk Bayern, sebagai “baru permulaan”, yang mengindikasikan nilai investasi pada akhirnya bisa lebih besar. “Kami akan mencari peluang-peluang besar untuk membawa hubungan ini ke tingkat berikutnya.”

Al Zeyoudi berada di Jerman bersama Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang melakukan kunjungan kenegaraan resmi pertamanya ke negara tersebut sejak 2019, ketika ia masih menjabat sebagai Putra Mahkota Abu Dhabi.

Pemimpin UEA itu bertemu Kanselir Friedrich Merz dan menghadiri jamuan kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Frank-Walter Steinmeier di tengah penutupan sejumlah ruas jalan dan gangguan transportasi di Berlin. Ia mendapat tingkat pengamanan tertinggi di Jerman, dengan sekitar 1.300 personel polisi dikerahkan dalam pengamanan tersebut.

Lebih dari enam bulan sejak pecahnya konflik yang sebelumnya dikatakan Presiden Donald Trump akan berakhir dalam hitungan minggu, AS dan Iran masih terjebak dalam siklus serangan balasan dan jeda yang rapuh. Sementara itu, negara-negara Teluk menghadapi dampak gangguan perdagangan melalui Selat Hormuz yang menekan ekspor energi dan mengganggu rantai pasok.

Di tengah situasi tersebut, memperluas kerja sama pertahanan di luar Washington, sekutu utama UEA, menjadi fokus bagi negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah, dan Jerman merupakan salah satu mitra penting.

Jerman telah berjanji membangun angkatan bersenjata terkuat di Eropa pada 2039 untuk menghadapi ancaman Rusia. Dalam kunjungannya ke kawasan Teluk pada Februari, sebelum perang Iran pecah, Merz mengatakan terbuka untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan kawasan tersebut.

Janji investasi UEA juga dapat menjadi dorongan bagi Merz dan pemerintahannya, beberapa hari setelah mereka mendapat pukulan akibat melonjaknya dukungan terhadap partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman atau Alternative for Germany (AfD) dalam pemilihan negara bagian Saxony-Anhalt.

“Ada peluang penjualan yang sangat besar bagi banyak perusahaan pertahanan kami,” kata Al Zeyoudi. “Ini bukan hanya soal membeli dan mengembangkan peralatan industri atau pertahanan dari pasar Jerman, tetapi juga memasok mereka dengan sejumlah teknologi terbaru yang telah kami terapkan selama konflik dalam beberapa bulan terakhir.”

Rencana terbaru UEA tersebut menambah investasi senilai 34 miliar euro yang telah ditanamkan negara itu di Jerman. Di negara-negara Eropa lainnya, UEA telah menjanjikan investasi dalam jumlah serupa

untuk Italia dan hingga 50 miliar euro untuk Prancis. Negara yang menjadi salah satu sekutu kuat Trump itu juga telah berkomitmen menginvestasikan US\$1,4 triliun di AS.

Ibu kota UEA, Abu Dhabi, memiliki sekitar 6% cadangan minyak dunia dan sejumlah dana kekayaan negara yang mengelola aset hampir US\$2 triliun. Komitmen terbaru ini menjadi indikasi lain keinginan negara tersebut memanfaatkan kekuatan investasinya untuk memperkuat hubungan pertahanan sekaligus mengamankan kemampuan pasokan dan produksi guna mengatasi kemungkinan pembatasan ekspor.

“Konflik adalah sesuatu yang sedang kami hadapi,” kata Al Zeyoudi. “Kami berupaya menghadapi berbagai tantangan dan dampak dari geopolitik serta situasi di kawasan.”

Artikel ini diperbarui dengan gambar dari pertukaran perjanjian bilateral antara kedua negara pada 10 September.

Sekitar 10 miliar euro akan dialokasikan untuk Bayern, sementara sisanya akan diinvestasikan “di mana pun terdapat bidang kerja sama,” kata Al Zeyoudi. Ia secara khusus menyoroti digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), serta logistik dan pengembangan industri dalam rencana investasi UEA di Jerman.

Pusat data dan AI menjadi salah satu pilar utama langkah UEA untuk mendiversifikasi perekonomian dan memperluas pengaruh politiknya. MGX, perusahaan investasi AI utama Abu Dhabi, berencana menginvestasikan hingga US\$10 miliar per tahun pada sejumlah perusahaan terpilih dalam beberapa tahun mendatang, dengan target mengelola aset lebih dari US\$100 miliar.

Kunjungan pemimpin UEA itu berlangsung pada saat yang penting. Para pemimpin UEA dan Arab Saudi berupaya memperkuat pijakan diplomatik di ibu kota negara-negara Eropa, meski Washington tetap menjadi sekutu utama negara-negara Teluk.

Dalam kunjungannya ke Paris bulan lalu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengumumkan sejumlah kesepakatan mulai dari teknologi hingga pertahanan, termasuk proyek taman hiburan senilai 6 miliar euro. Hal itu terjadi sekitar 18 bulan setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat berpelukan dengan pemimpin UEA Sheikh Mohamed di Istana Elysee.

Inflasi IHP AS Melonjak, Suku Bunga The Fed Berpotensi Naik

Jumat, 11 September 2026 06:15 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/121206/inflasi-ihp-as-melonjak-suku-bunga-the-fed-berpotensi-naik/2>

Bloomberg, Tekanan inflasi harga produsen kembali meningkat akibat kenaikan harga energi pada bulan lalu, yang berpotensi memperkuat alasan bagi Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga pada pertemuannya pekan depan.

Indeks harga produsen (IHP) naik 0,4% pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, tertinggi sejak Mei, dan meningkat 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis Kamis (10/9). Di luar komponen pangan dan energi, indeks tersebut naik 0,2% pada bulan lalu dan 4,6% secara tahunan.

Data pada Kamis ini dirilis sehari sebelum pembaruan terbaru indeks harga konsumen (IHK), yang diperkirakan menunjukkan inflasi inti relatif moderat meski kenaikan harga bensin mendorong inflasi

utama. Sejumlah pejabat The Fed mengisyaratkan keputusan suku bunga dalam pertemuan 15-16 September akan bergantung pada hasil laporan data pekan ini.

Gubernur The Fed Kevin Warsh dalam pidatonya bulan lalu mengatakan bank sentral AS masih memiliki “pekerjaan yang harus dilakukan” jika para pembuat kebijakan belum dapat yakin bahwa tren inflasi yang mendasari benar-benar membaik secara berarti. Data Kamis menunjukkan biaya energi serta transportasi dan pergudangan melonjak pada Agustus setelah turun selama dua bulan, sementara konflik yang masih berlangsung antara AS dan Iran dapat semakin memperumit prospek tersebut.

Saham AS dibuka melemah dan imbal hasil obligasi pemerintah naik setelah investor meningkatkan taruhan terhadap kenaikan suku bunga The Fed.

“Dengan data IHP secara keseluruhan yang masih relatif tinggi, The Fed tampaknya akan menaikkan suku bunga tahun ini meskipun tidak melakukannya bulan ini,” kata Stephen Brown, kepala ekonom Amerika Utara di Capital Economics, dalam sebuah catatan.

Laporan tersebut menunjukkan harga tiket pesawat serta layanan perawatan rumah sakit rawat inap dan rawat jalan mencatat kenaikan kuat pada Agustus, sementara indeks jasa hukum melonjak 1,7%, kenaikan terbesar sejak data tersebut mulai dicatat pada 2009. Komponen-komponen tersebut menjadi perhatian khusus The Fed karena berkontribusi terhadap indikator inflasi pilihannya, yakni indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures (PCE).

Biro Analisis Ekonomi AS (Bureau of Economic Analysis/BEA) dijadwalkan merilis data harga PCE Agustus, bersama dengan data pendapatan dan pengeluaran, pada 30 September. Mulai laporan tersebut, BEA akan mengubah metode pengukuran harga untuk sejumlah kategori, termasuk jasa hukum, perangkat lunak komputer, dan jasa konsultasi investasi, yang menurut banyak ekonom diperkirakan akan menghasilkan angka PCE yang lebih rendah.

Pembangunan pusat data juga menjadi salah satu sumber tekanan harga tahun ini. Biaya komponen dan aksesoris elektronik naik 3,4%, meskipun harga komputer dan peralatan komputer hanya meningkat 0,2%, sementara indeks biaya konstruksi yang lebih luas relatif tidak berubah.

Rincian dalam laporan IHP mengenai margin jasa perdagangan grosir dan ritel menjadi sorotan untuk melihat sejauh mana perusahaan menanggung biaya terkait tarif atau meneruskannya kepada konsumen. Pada Agustus, margin tersebut turun 0,2%.

Meskipun banyak pungutan tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agung awal tahun ini, pemerintahan Trump menggunakan kewenangan lain untuk mengenakan tarif terhadap impor. Perundingan antara AS dan Kanada mengenai gencatan perang dagang gagal pada Agustus, yang mendorong pemerintahan Trump menerapkan tarif 50% terhadap barang-barang Kanada senilai miliaran dolar AS. Kanada membalas dengan mengenakan bea sebesar 15% hingga 50% terhadap ratusan produk AS.

Laporan pemerintah terpisah yang juga dirilis Kamis menunjukkan jumlah pengajuan tunjangan pengangguran relatif tidak berubah di level 206.000.

Inflasi Paksa Bank Sentral Dunia Ambil Langkah Hawkish

Jumat, 11 September 2026 10:44 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121252/inflasi-paksa-bank-sentral-dunia-ambil-langkah-hawkish/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Inflasi kembali meningkat, membuat sejumlah bank sentral negara-negara maju mempertimbangkan langkah pengetatan.

Kenaikan harga minyak Brent yang disebabkan oleh ketidakpastian resolusi konflik di Timur Tengah menjadi pemicunya. Harga minyak Brent kembali naik ke atas US\$100/barel, tepatnya US\$108/barel. Sedangkan, West Texas Intermediate (WTI) naik ke US\$102,7/barel.

Di Amerika Serikat (AS), pelaku pasar mulai bertaruh bahwa bank sentral Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan dalam rapat pekan depan setelah indeks harga produsen (PPI) mencatat kenaikan tertinggi sejak Mei.

PPI AS naik 0,4% pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, dan meningkat 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara di Eropa, inflasi naik menjadi 3,3% pada Agustus, laju tercepat dalam hampir tiga tahun. Data ini membuat Bank sentral Eropa (ECB) telah lebih dulu mengambil langkah hawkish dan menaikkan suku bunga acuan menjadi 2,5%.

Presiden ECB Christine Lagarde memperingatkan bahwa inflasi hanya akan kembali ke target jangka menengah bank sentral sebesar 2% pada akhir 2027. ECB memperkirakan tingkat inflasi rata-rata tahun depan sebesar 2,5%, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,3%, seiring ketegangan di Timur Tengah mendorong harga energi.

Sementara, Bank of Japan (BOJ) juga diproyeksi akan menaikkan suku bunga ke 1,25% untuk menahan laju inflasi. Ini akan menjadi langkah hawkish kedua BOJ setelah menaikkan suku bunga pada Juni menjadi sekitar 1%.

Risiko inflasi di Jepang cukup tinggi, dengan harga barang korporasi tercatat naik 7,6% pada Agustus, dan menjadi kenaikan tercepat sejak Februari 2023.

Gelombang hawkish akibat kenaikan harga minyak itu tak berhenti di negara-negara maju. Indonesia juga menghadapi risiko yang sama lewat jalur berbeda, yakni imported inflation, tekanan rupiah, dan ekspektasi inflasi.

Meski Indonesia memiliki instrumen untuk meredam transmisi kenaikan biaya energi lewat kebijakan harga BBM dan subsidi, harga minyak yang terlalu tinggi membuat biaya itu jadi lebih mahal.

Inflasi Agustus yang tercatat lebih 'hangat' 3,19%, dari Juli yang hanya 2,88% menjadi indikator bahwa Indonesia juga punya risiko yang sama. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang BI untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk menopang pertumbuhan.

Terlebih, langkah hawkish lebih dulu diambil negara-negara maju juga dapat membuat investor global semakin sensitif terhadap selisih imbal hasil dan risiko.

Namun, bukan berarti BI otomatis mengikuti langkah yang sama dengan ECB dan BOJ pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan depan. Terlebih, keputusan The Fed masih akan bergantung pada hasil data inflasi dari sisi konsumen atau indeks harga konsumen (CPI) yang akan dirilis malam ini waktu Indonesia.

Bloomberg Economics memperkirakan inflasi versi CPI lebih rendah dan dapat membuat The Fed masih dapat mempertahankan suku bunga acuannya.

Begitu juga dengan bank sentral Inggris atau Bank of England (BOE) yang diperkirakan tetap akan mempertahankan suku bunga acuan hingga akhir 2026, sebelum menaikannya pada Februari 2027.

Yield Surat Utang

Respons pasar terhadap gelombang hawkish ini terlihat pada pergerakan di pasar surat utang. Aksi jual meluas di pasar US Treasury akibat kekhawatiran inflasi itu belum sepenuhnya merembet ke pasar domestik.

Meski tekanan jual terlihat pada sebagian tenor Surat Utang Negara (SUN), tetapi kenaikan yield di tenor acuan 10 tahun relatif terjaga di 7,1%.

Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson menilai posisi fundamental Indonesia berbeda dari AS membuat reaksi pasar lebih terbatas. Ia menyebut, angka defisit anggaran Indonesia relatif terjaga di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai batas dalam undang-undang, sementara AS melebar hingga 5,3% PDB.

Selain itu, inflasi di Indonesia memang berkali-kali menghangat, tetapi masih berada di kisaran target BI di 1,5-3,5%, dengan rata-rata inflasi bergerak di 2,7%.

Sedangkan inflasi AS meningkat, dan rata-rata 3,4% secara tahunan, jauh di atas target yang ditetapkan The Fed yakni 2%. Bloomberg Economics juga memperkirakan defisit anggaran AS akan melampaui 6% dari PDB pada 2026-2028.

Inflasi AS Naik 3,4% pada Agustus (YoY), Peluang The Fed Naikkan Bunga Menguat

Jumat, 11 September 2026 20:07 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-as-naik-34-pada-agustus-yoy-peluang-the-fed-naikkan-bunga-menguat>

KONTAN.CO.ID - Inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) kembali meningkat pada Agustus 2026. Kenaikan harga bensin menjadi salah satu pendorong utama, memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve atau The Fed berpotensi menaikkan suku bunga pada pekan depan.

Melansir Reuters berdasarkan data Bureau of Labor Statistics (BLS), indeks harga konsumen (CPI) AS naik 0,4% pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya.

Angka tersebut meningkat dari kenaikan 0,1% pada Juli dan sesuai dengan konsensus ekonom yang disurvei Reuters.

Secara tahunan, inflasi AS tercatat 3,4% pada Agustus, sama seperti pada Juli dan sesuai dengan perkiraan ekonom.

Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan komponen harga makanan dan energi yang bergejolak meningkat 0,3% secara bulanan pada Agustus, setelah naik 0,2% pada Juli.

Secara tahunan, inflasi inti mencapai 2,4%, melambat dari 2,5% pada Juli.

Meski The Fed menggunakan indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE) sebagai acuan utama target inflasi 2%, data CPI terbaru menjadi perhatian pasar menjelang pertemuan kebijakan moneter pada 15-16 September.

Data inflasi tersebut juga mengikuti laporan Producer Price Index (PPI) yang menunjukkan kenaikan harga produsen pada Agustus.

Sejumlah komponen yang berkontribusi terhadap perhitungan inflasi PCE juga mencatat kenaikan kuat.

Kombinasi data PPI dan laporan ketenagakerjaan AS yang solid pada Agustus membuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed kembali menguat.

Harga energi jadi perhatian

Tekanan inflasi juga berpotensi bertahan akibat kenaikan harga energi. Harga minyak dunia kembali menembus US\$100 per barel pada Kamis (10/9), sementara harga diesel mencapai rekor tertinggi.

Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa tekanan inflasi tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi.

Sejumlah ekonom juga memperkirakan tarif impor menjadi faktor lain yang menjaga tekanan harga di AS tetap tinggi, terutama setelah kebijakan tarif terhadap Kanada, salah satu mitra dagang utama AS.

Kenaikan harga barang kebutuhan, khususnya bensin dan makanan, juga menjadi persoalan politik bagi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Tekanan harga yang tinggi berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap Trump menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm election pada November.

Pasar mulai bertaruh The Fed naikan bunga

Sebelum data CPI dirilis, pasar keuangan memperkirakan peluang sekitar 70% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan The Fed pada 15-16 September, berdasarkan CME FedWatch.

Saat ini, suku bunga acuan The Fed berada di kisaran 3,50%-3,75%.

Ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut sempat melemah setelah Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan ia cenderung mendukung keputusan mempertahankan suku bunga apabila data menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda.

Namun, data inflasi dan harga produsen terbaru kembali mengubah ekspektasi pasar.

Ketua The Fed Kevin Warsh sebelumnya mengatakan bank sentral masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan jika para pembuat kebijakan belum memperoleh keyakinan bahwa inflasi bergerak menuju target 2%.

Di sisi lain, Trump terus mendesak The Fed untuk menurunkan suku bunga. Tekanan politik tersebut dinilai sejumlah ekonom turut berkontribusi terhadap kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS tenor panjang.

Sebagian pelaku pasar bahkan memperkirakan The Fed dapat memilih memperketat kebijakan moneter pada pekan depan untuk menegaskan independensi bank sentral di tengah tekanan politik tersebut.

Ekonomi Inggris Tumbuh 1,6% pada Juli, Tertinggi dalam 18 Bulan

Jumat, 11 September 2026 19:08 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-inggris-tumbuh-16-pada-juli-tertinggi-dalam-18-bulan>

KONTAN.CO.ID - Perekonomian Inggris tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada Juli 2026, didorong oleh sektor jasa dan bisnis yang terkait dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Data Office for National Statistics (ONS) menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) Inggris tumbuh 1,6% secara tahunan pada Juli, menjadi pertumbuhan tercepat dalam 18 bulan sejak Februari 2025.

Angka tersebut juga melampaui proyeksi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 1,2%.

Secara bulanan, ekonomi Inggris tumbuh 0,4% pada Juli, berbalik dari ekspektasi ekonom yang memperkirakan tidak ada pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan hingga Juli juga mencapai 0,4%, lebih tinggi dari perkiraan.

Pertumbuhan tersebut memberikan angin segar bagi Menteri Keuangan Inggris yang baru, John Healey, menjelang penyusunan anggaran pertamanya pada 28 Oktober.

Namun, kenaikan biaya pinjaman pemerintah dan lonjakan harga minyak berpotensi menjadi tantangan.

James Smith, ekonom pasar negara maju di ING, menilai ekonomi Inggris menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan meski menghadapi dampak perang Iran.

Sektor AI dorong pertumbuhan Inggris

ONS menyebut sebagian besar pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan terakhir berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang pemrograman komputer dan mendapat manfaat dari booming AI.

Direktur Statistik Ekonomi ONS Liz McKeown mengatakan, sektor jasa kembali menjadi pendorong utama pertumbuhan pada Juli. Bisnis pemrograman komputer memberikan kontribusi terbesar.

Selain perkembangan AI, sejumlah perusahaan juga mendapat dorongan dari gelaran Piala Dunia sepak bola putra serta cuaca panas yang tidak biasa pada Juli.

Healey menyambut data tersebut dengan menyebut ekonomi Inggris menunjukkan "ketahanan yang menggembirakan". Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih rapuh.

Pada paruh pertama 2026, ekonomi Inggris tumbuh sekitar 1%, menjadi pertumbuhan tercepat di antara negara-negara G7.

Meski demikian, sejumlah analis menilai angka tersebut kemungkinan dipengaruhi faktor musiman yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penyesuaian data.

Matt Swannell, kepala penasihat ekonomi ITEM Club, memperkirakan pertumbuhan Inggris mulai melambat menjelang akhir tahun.

Sebaliknya, Sanjay Raja, Kepala Ekonom Inggris Deutsche Bank, menilai momentum pertumbuhan Inggris semakin sulit diabaikan.

Ia memperkirakan, sejumlah lembaga peramal ekonomi akan menaikkan proyeksi pertumbuhan Inggris tahun ini sekitar 0,1 poin persentase setelah rilis data tersebut.

Sejumlah ekonom juga mulai melihat tanda-tanda pemulihan produktivitas Inggris, yang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup dalam jangka panjang.

Namun, pemulihan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum ada konsensus mengenai penyebabnya.

Bayang-bayang perang Iran

Bank of England (BoE) sebelumnya memperkirakan ekonomi Inggris akan tumbuh 1,1% sepanjang 2026.

Gubernur BoE Andrew Bailey mengatakan data ekonomi terbaru ternyata menunjukkan kinerja yang sedikit lebih kuat dari perkiraan sebelumnya.

Namun, konflik AS-Israel dengan Iran tetap menjadi risiko bagi perekonomian Inggris. Harga minyak dunia telah menembus US\$105 per barel setelah eskalasi konflik, sehingga meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan biaya pinjaman pemerintah.

BoE memperkirakan inflasi Inggris dapat meningkat menjadi sekitar 3,2% pada akhir tahun.

Hampir seluruh ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan BoE akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan pekan depan dan sepanjang sisa tahun.

Namun, pasar keuangan kini memperkirakan kenaikan suku bunga hampir pasti terjadi pada November karena tekanan inflasi yang semakin kuat.

Inflasi Produsen Melebihi Proyeksi, Potensi Bank of Japan Naikkan Suku Bunga Menguat

Jumat, 11 September 2026 12:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-produsen-melebihi-proyeksi-potensi-bank-of-japan-naikkan-suku-bunga-menguat>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Tekanan inflasi di tingkat produsen Jepang masih tinggi pada Agustus 2026. Kondisi ini memperkuat perhatian Bank of Japan (BOJ) terhadap risiko kenaikan harga ke depan.

Berdasarkan data awal yang dirilis BOJ, Jumat (11/9/2026), indeks harga produsen atau Producer Price Index (PPI) Jepang naik 7,6% secara tahunan pada Agustus. Angka tersebut sedikit melandai dari kenaikan 7,7% pada Juli.

Akan tetapi, realisasi tersebut lebih tinggi dari konsensus proyeksi ekonom, yang memprediksi inflasi produsen hanya akan naik 7,4% di Agustus. Realisasi tersebut menunjukkan tekanan harga yang kuat di tingkat produsen. Secara bulanan, PPI turun 0,2%.

Tekanan harga terutama terlihat pada sejumlah komoditas. Harga produk logam nonbesi melonjak 43,3% secara tahunan, produk informasi dan komunikasi naik 19,5%, produk minyak bumi dan batubara meningkat 14,7%. Sedangkan produk plastik naik 11,2%.

Harga listrik, gas dan air juga meningkat 8,0% secara tahunan. Namun, sejumlah komponen mengalami penurunan harga pada Agustus, antara lain produk minyak bumi dan batubara yang turun 1,7% secara bulanan, serta produk pertanian, kehutanan dan perikanan yang turun 2,3%.

Tekanan harga produsen tersebut berpotensi menjadi perhatian BOJ karena kenaikan biaya di tingkat perusahaan dapat diteruskan kepada konsumen melalui harga barang dan jasa. Seberapa besar perusahaan meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada rumah tangga menjadi salah satu faktor yang akan menentukan arah inflasi konsumen dan kebijakan moneter berikutnya.

Reuters melaporkan, Jumat (11/9/2026), mengutip sumber, BOJ diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 17-18 September mendatang menjadi 1,25%. Jika terealisasi, tingkat suku bunga acuan tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam 31 tahun.

Sumber yang mengetahui rencana BOJ tersebut mengatakan, bank sentral Jepang juga dapat memberikan sinyal percepatan kenaikan suku bunga berikutnya apabila tekanan harga meningkatkan risiko inflasi melampaui target. Namun, BOJ diperkirakan tetap memilih kenaikan 25 basis poin dan kemudian menunggu data berikutnya untuk menilai apakah diperlukan kenaikan lebih lanjut.

Tekanan inflasi menjadi semakin penting karena BOJ memperkirakan inflasi konsumen akan kembali berada di atas target 2% dalam beberapa bulan mendatang. Dalam proyeksi kuartalan yang dibuat pada Juli, BOJ memperkirakan inflasi konsumen inti mencapai 2,5% pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2027 dan 2,4% pada tahun fiskal berikutnya, sebelum melambat menjadi 2,0% pada tahun setelahnya.

Sumber Reuters tersebut juga menyebut kondisi ekonomi Jepang berada di jalur pemulihan moderat, sementara tekanan harga terus terbentuk. BOJ juga menilai kondisi keuangan akan tetap longgar meskipun suku bunga dinaikkan menjadi 1,25%.

Risiko inflasi juga datang dari harga energi. Penguatan yen dalam beberapa waktu terakhir memang berpotensi menekan biaya impor. Tetapi kenaikan harga minyak mentah Brent hingga di atas US\$ 100 per barel menimbulkan kekhawatiran baru terhadap tekanan harga.

Kondisi tersebut membuat BOJ menghadapi dilema antara menjaga proses normalisasi kebijakan moneter dan memastikan inflasi tidak kembali meningkat terlalu jauh. Salah satu sumber mengatakan, inflasi dasar Jepang sudah mendekati 2%, sehingga BOJ perlu lebih memperhatikan risiko kenaikan harga.

Pasar juga telah sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada September. Sejumlah pelaku pasar bahkan sempat memperkirakan BOJ dapat mengejutkan pasar dengan kenaikan 50 basis poin. Namun, analis menilai tidak terdapat risiko langsung terhadap lonjakan tajam pertumbuhan upah dan harga, sehingga kenaikan 25 basis poin dinilai lebih mungkin.

Dolar Australia Tertekan Jumat (11/9), Yield Obligasi Tembus Level Tertinggi 15 Tahun

Jumat, 11 September 2026 09:13 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-australia-tertekan-jumat-11-9-yield-obligasi-tembus-level-tertinggi-15-tahun>

KONTAN.CO.ID - Dolar Australia dan dolar Selandia Baru tertekan pada perdagangan Jumat (11/9/2026), seiring lonjakan harga minyak yang menekan aset berisiko dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga global.

Tekanan terhadap inflasi yang berpotensi bertahan lebih lama membuat pasar kini memperkirakan peluang Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga pada akhir September mencapai 90%.

Ekspektasi tersebut mendorong yield obligasi pemerintah Australia ke level tertinggi dalam 15 tahun.

"Menurut pandangan kami, RBA perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk mengantisipasi inflasi. Kami kini memperkirakan dua kali kenaikan suku bunga lagi tahun ini, sehingga proyeksi suku bunga terminal menjadi 4,85%," kata Josh Williamson, Kepala Ekonom Australia di Citi.

Citi juga menilai pasar masih terlalu rendah memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga RBA secara berturut-turut. Kebijakan tersebut dinilai diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Karena itu, Citi menggeser proyeksi pemangkasan suku bunga pertama RBA menjadi kuartal IV 2027.

Pasar swap saat ini memperhitungkan kenaikan suku bunga sekitar 33 basis poin hingga November dan 40 basis poin hingga Desember.

Ekspektasi tersebut masih dapat meningkat jika RBA menaikkan suku bunga acuan dari level 4,35% pada rapat 29 September mendatang.

Yield obligasi Australia melonjak

Pasar obligasi Australia merespons tajam perubahan ekspektasi kebijakan moneter tersebut. Yield obligasi pemerintah Australia tenor tiga tahun melonjak 18 basis poin menjadi 5,050%.

Sementara itu, yield obligasi tenor 10 tahun naik menjadi 5,256%, level tertinggi sejak pertengahan 2011.

Tekanan juga datang dari Amerika Serikat (AS). Investor meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada pertemuan pekan depan. Ekspektasi tersebut memberikan dukungan lebih luas terhadap dolar AS.

Dolar Australia berada di level US\$ 0,7161, relatif stabil setelah merosot 0,8% pada perdagangan sebelumnya. Mata uang tersebut sebelumnya sempat mencapai level tertinggi dalam empat bulan di US\$ 0,7238.

Sementara itu, dolar Selandia Baru bertahan di US\$ 0,5811 setelah turun 0,7% dan sempat menyentuh level terendah dalam enam pekan di US\$ 0,5795.

Tekanan juga melanda pasar obligasi Selandia Baru. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak 13 basis poin menjadi 5,055%, level tertinggi sejak akhir 2023.

Yield swap tenor dua tahun bahkan melonjak 21 basis poin menjadi 4,024%, seiring meningkatnya taruhan bahwa Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) harus memperketat kebijakan moneter lebih agresif.

RBNZ sebelumnya memperkirakan hanya akan menaikkan suku bunga satu atau dua kali lagi masing-masing sebesar 25 basis poin dari level suku bunga acuan 2,75%.

Namun, pasar kini memperhitungkan empat kali kenaikan suku bunga. Kenaikan harga minyak menjadi salah satu faktor utama yang memperbesar risiko inflasi dan mendorong investor memperkirakan suku bunga global akan bertahan lebih tinggi dalam waktu lebih lama.

Rupiah dan Ringgit Tertekan Jumat (11/9), Dolar AS Kembali Menguat

Jumat, 11 September 2026 09:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-dan-ringgit-tertekan-jumat-119-dolar-as-kembali-menguat>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar rupiah dan sejumlah mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (11/9/2026).

Tekanan terhadap mata uang regional terjadi di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga global akibat lonjakan harga minyak dan risiko inflasi.

Mengacu pada data Reuters pukul 02.04 GMT, rupiah berada di level Rp 17.580 per dolar AS, melemah 0,28% dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya di Rp 17.530 per dolar AS.

Rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang mengalami pelemahan pada perdagangan tersebut.

Ringgit Malaysia turun 0,22% ke level 4,070 per dolar AS, sedangkan dolar Taiwan melemah 0,24% menjadi 31,625 per dolar AS.

Peso Filipina juga turun 0,19% ke 62,707 per dolar AS. Baht Thailand melemah 0,08% menjadi 33,135 per dolar AS.

Di sisi lain, won Korea Selatan menguat 0,13% menjadi 1.347,67 per dolar AS. Yen Jepang juga menguat tipis 0,03% menjadi 154,37 per dolar AS.

Tekanan terhadap mata uang Asia terjadi ketika dolar AS mendapatkan dukungan dari kenaikan yield obligasi pemerintah AS.

Investor meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi.

Lonjakan harga minyak juga menjadi perhatian pasar. Harga minyak Brent telah menembus US\$ 100 per barel dan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global apabila gangguan pasokan energi di Timur Tengah berlangsung lebih lama.

Kondisi tersebut dapat membatasi ruang bank sentral untuk menurunkan suku bunga dan bahkan mendorong sejumlah bank sentral mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter.

Rupiah melemah 5,18% sepanjang 2026

Secara kumulatif sejak awal 2026, rupiah tercatat melemah 5,18% terhadap dolar AS. Pada akhir 2025, rupiah berada di level Rp 16.670 per dolar AS.

Dengan posisi Rp 17.580, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang mengalami pelemahan cukup dalam sepanjang tahun berjalan.

Peso Filipina menjadi mata uang yang mengalami pelemahan terbesar dalam daftar tersebut, yakni 6,23%. Rupee India melemah 5,84%, sedangkan baht Thailand turun 5,09%.

Won Korea Selatan justru menjadi salah satu mata uang dengan penguatan terbesar, mencapai 6,89% sejak akhir 2025.

Yuan China menguat 4,12%, sementara yen Jepang naik 1,48%. Dolar Singapura menguat 1,38%.

Ringgit Malaysia relatif stabil dengan pelemahan 0,34%, sedangkan dolar Taiwan melemah 0,59% sejak akhir 2025.

Pergerakan mata uang Asia selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan The Fed, data inflasi AS, perkembangan harga minyak serta eskalasi konflik di Timur Tengah.

Suku Bunga Global Tak Lagi Seragam, ke Mana Arah BI Rate?

Jumat, 11 September 2026 16:23 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/121293/suku-bunga-global-tak-lagi-seragam-ke-mana-arrah-bi-rate/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Arah suku bunga global mulai memasuki fase yang berbeda dengan kebijakan moneter yang diperkirakan akan lebih beragam.

Ancaman inflasi global dengan kenaikan harga minyak Brent ke US\$108/barel, membuat sebagian bank sentral mengambil langkah taktis dan tegas dengan mengerek suku bunga acuan, seperti yang bank sentral Eropa (ECB).

Bank sentral Jepang/Bank of Japan (BoJ) diproyeksikan mengikuti jejak ECB. Sekitar 46% responden memperkirakan laju kenaikan BoJ akan meningkat menjadi sekali setiap kuartal.

Hal ini didorong oleh risiko inflasi di Jepang dengan harga barang-barang korporasi naik 7,6% pada Agustus. BoJ diperkirakan akan menaikkan suku bunga ke 1,25% untuk menahan laju inflasi. Ini akan menjadi langkah hawkish kedua BoJ setelah menaikkan suku bunga pada Juni menjadi sekitar 1%.

"BoJ kemungkinan akan menyampaikan kepada pasar bahwa kenaikan suku bunga secara umum dapat dilakukan dengan interval sekitar tiga bulan," tulis Izuru Kato, kepala ekonom Totan Research Institute, dalam tanggapan surveinya, seperti dikutip Bloomberg News.

Ia menambahkan, bank sentral akan merespons inflasi lebih sering jika kondisi mengharuskan. Sekitar 82% responden dalam survei berbeda mengatakan akan sulit bagi pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk menentang kenaikan suku bunga BoJ bulan ini setelah intervensi yen yang dikoordinasikan AS dan Jepang.

Ruang Pelonggaran

Di tengah tekanan inflasi global yang sama, sebagian bank sentral lainnya masih menunggu data ekonomi rilis untuk memastikan bahwa pengetatan itu akan sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan terhadap arah pertumbuhan ekonomi domestiknya.

Amerika Serikat (AS), misalnya, masih akan menunggu data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) meski data Indeks Harga Produsen (PPI) sudah sedikit menghangat, naik 0,4% pada Agustus.

Bloomberg Economics memperkirakan CPI AS akan naik 0,39% pada Agustus, dibandingkan 0,07% bulan sebelumnya. Meski begitu, CPI secara tahunan akan bertahan di 3,4% seperti bulan sebelumnya. Sedangkan CPI inti diperkirakan turun menjadi 2,4% dari 2,5%.

Jika inflasi inti itu terealisasi, maka akan menjadi level terendah sejak Maret 2021, dan berpotensi memberi ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga.

"Untuk saat ini, kita dapat berpegang pada pernyataan para anggota FOMC bahwa mereka bersedia mempertahankan suku bunga jika proses disinflasi terus berlanjut," sebut Anna Wong, Ekonom Bloomberg Economics, dalam catatannya.

Begitu juga dengan Bank of England (BoE) yang diperkirakan tetap akan mempertahankan suku bunga acuan hingga akhir 2026, sebelum menaikannya pada Februari 2027. Ekspektasi itu ditopang oleh perkiraan angka inflasi Inggris yang akan landai ke 3,2% pada Juli, turun dari 4% pada Mei. Sementara pertumbuhan ekonomi domestiknya relatif terjaga di 0,4% pada Juli.

"Lonjakan PDB pada Juli yang di luar perkiraan menunjukkan bahwa momentum ekonomi Inggris masih bertahan, meskipun pasar tenaga kerja mulai mendingin dan pendapatan riil rumah tangga tertekan akibat guncangan energi," sebut Ekonom Bloomberg Economics, termasuk Matt Bunney dan Ana Andrade.

Menurut Megan O'Neil, Ekonom Bloomberg Intelligence, mayoritas pembuat kebijakan di Komite Kebijakan Moneter BoE tampaknya meyakini bahwa mempertahankan suku bunga pada level saat ini sudah cukup untuk mengatasi risiko inflasi yang berasal dari konflik di Timur Tengah.

Arah BI Rate

Kebijakan moneter global yang terbelah menyisakan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan BI Rate pada level saat ini, 5,75%. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), Josua Pardede menilai, tingkat BI Rate saat ini masih relevan untuk dipertahankan. Bahkan Josua memperkirakan BI Rate berada di level sama hingga akhir 2026.

"Dari sisi domestik, BI sebenarnya tidak membutuhkan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan permintaan. Inflasi Agustus naik dari 2,88% menjadi 3,19% secara tahunan, tetapi masih berada dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$," kata Josua.

Inflasi yang didorong oleh kenaikan harga pangan ini juga termasuk komponen musiman. Sehingga, Josua menilai ekonomi tidak terlalu panas, tetapi juga belum membutuhkan pertolongan berupa penurunan suku bunga.

Terlebih, ia menilai langkah hawkish yang diambil ECB semakin memangkas ruang pelonggaran BI untuk menurunkan suku bunga.

"Yang perlu dicermati adalah tekanan harga dari sisi produksi. Inflasi harga produsen dan perdagangan besar sudah berada di atas inflasi konsumen, sehingga terdapat risiko kenaikan biaya produksi secara bertahap diteruskan ke harga konsumen," katanya.

Josua memperkirakan BI akan mempertahankan BI Rate di 5,75% pada pertemuan Rapat Dewan Gubernur pada 23 September mendatang. Ia menambahkan, BI sebaiknya tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga mengikuti bank sentral Eropa. Sebab, struktur Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia kini jauh lebih banyak ditopang investor domestik.

Menurut Josua, hubungan BI Rate dengan imbal hasil SBN saat ini bahkan lebih kuat daripada hubungan suku bunga AS dengan SBN.

"Artinya, kenaikan BI Rate mempunyai biaya domestik yang nyata yakni berpotensi mendorong biaya SBN, biaya dana perbankan dan bunga kredit lebih tinggi. Oleh karena itu kenaikan harus menjadi garis pertahanan terakhir, bukan respons otomatis setiap kali bank sentral negara maju menaikkan bunga," katanya.

Rupiah Menutup Pekan di Rp17.600/US\$

Jumat, 11 September 2026 15:39 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121287/rupiah-menutup-pekan-di-rp17-600-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan spot pekan ini dengan dengan pelemahan 0,35% ke Rp17.600/US\$, menyusul aksi jual di pasar surat utang pemerintah.

Meski begitu, secara mingguan rupiah tercatat menguat 0,21%, dan jika ditarik sepanjang bulan ini rupiah masih bertahan dengan apresiasi 0,68%.

Tekanan harga minyak yang melambung ke US\$108/barel juga menekan sebagian besar mata uang Asia. Baht Thailand terdepresiasi paling dalam, disusul rupiah, dolar Taiwan, rupee India, peso Filipina, dan ringgit Malaysia.

Sebaliknya, yen Jepang, won Korea Selatan, yuan offshore dan yuan China serta dolar Singapura bergerak menguat.

Di pasar surat utang, tekanan mulai terasa dengan kenaikan yield di sebagian besar tenor. Kenaikan yield paling tinggi terjadi pada tenor 4 tahun yang naik 8,4 basis poin (bps) ke 6,99%. Lalu, disusul tenor 6 tahun naik 6,6 bps ke 7,05%, dan tenor 5 tahun naik 6,3 bps ke 7%.

Yield tenor acuan 10 tahun juga ikut naik 5,3 bps ke 7,16%, seiring sentimen hawkish yang melanda pasar dan meningkatnya kekhawatiran inflasi global akibat kenaikan harga minyak mentah yang berada di US\$108/barel.

Lonjakan yield ini juga terjadi di pasar obligasi kawasan Asia. Data Bloomberg menunjukkan, yield obligasi acuan negara berkembang terkerek naik, menyusul kenaikan pada yield obligasi pemerintah AS, US Treasury, dengan yield tenor 2 tahun melonjak 25 bps, sementara tenor 10 tahun naik ke 4,95%.

Yield obligasi 10 tahun India naik 4,2 bps ke 7,01%, Singapura naik 6,8 bps ke 2,43%, Jepang naik 6,4 bps 2,96%, dan Malaysia 11,2 bps ke 4,17%.

Sementara, yield obligasi Thailand naik lebih terbatas 3 bps ke 2,29%, China 0,8 bps jadi 1,68%, dan Indonesia naik 0,8 bps jadi 7,08%.

Pelaku pasar akan mencermati data inflasi indeks harga konsumen (CPI) AS yang akan dirilis malam ini waktu Indonesia.

Survei Bloomberg terhadap para ekonom memperkirakan CPI inti, yang tidak memasukkan harga makanan dan energi, akan meningkat sekitar 0,2% secara bulanan pada Agustus.

Namun begitu, versi Bloomberg Economics sedikit berbeda. Tekanan CPI versi Bloomberg Economics relatif lebih terkendali, sehingga memberi ruang bagi The Fed menahan suku bunga pada posisi saat ini.

Untuk diketahui, berdasarkan CME Fed Watch, sekitar 69,6% pelaku pasar memperkirakan suku bunga AS akan naik pada pertemuan 16 September mendatang, sedangkan sisanya memperkirakan The Fed masih punya ruang cukup untuk mempertahankan FFR.

Dalam skenario itu, BI mungkin akan tetap berhati-hati, bahkan ketika perekonomian domestik masih membutuhkan stimulus.

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Hingga Telur Naik, Beras Stagnan

Jumat, 11 September 2026 16:20 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121283/harga-pangan-hari-ini-cabai-hingga-telur-naik-beras-stagnan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas harga komoditas pangan nasional masih mengalami kenaikan per hari ini, Jumat (11/9/2026), mulai dari cabai-cabaian, telur ayam ras segar, hingga daging sapi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Stragis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 14.15 WIB, rata-rata harga cabai merah besar secara nasional naik 1,14% menjadi Rp53.400/kg secara harian.

Harga cabai merah keriting juga melonjak 8,4% menjadi Rp62.600/kg, diikuti harga caba rawit hijau yang juga naik 2,97% menjadi Rp64.100/kg. Harga cabai rawit merah naik 6,67% menjadi Rp89.600/kg.

Kemudian, daging sapi kualitas I dan II masing-masing naik 0,03% dan 0,32% menjadi Rp151.950 dan Rp143.200/kg. Sementara, harga daging ayam ras turun 0,82% menjadi Rp42.350/kg, namun telurnya naik 0,84% menjadi Rp29.000/kg.

Harga minyak goreng curah juga naik 0,24% menjadi Rp20.500/kg. Begitu juga minyak goreng kemasan bermerk 2 yang naik 0,21% menjadi Rp23.500/kg. Hanya minyak goreng kemasan bermerk 1 yang turun 0,21% menjadi Rp24.300/kg.

Sementara itu, harga mayoritas jenis beras tidak mengalami perubahan atau tetap dari hari sebelumnya. Beras kualitas medium I dan II masih dibanderol Rp16.550 dan Rp16.350/kg. Begitu juga beras kualitas super I dan II tetap di Rp17.850 dan Rp17.300/kg.

Hanya beras kualitas bawah I yang turun 0,67% menjadi Rp14.750/kg. Sementara, harga beras kualitas bawah II tetap di Rp14.650/kg.

Harga bawang merah ukuran sedang mengalami penurunan 1,44% menjadi Rp37.550/kg. Sementara itu, harga bawang putih ukuran sedang masih naik 0,13% menjadi Rp39.350/kg.

Harga gula pasir premium naik 0,25% menjadi Rp20.350/kg. Sementara, gula pasir lokal tidak mengalami perubahan atau tetap di Rp19.100/kg.

Pusaka Jateng hasilkan 537 gagasan rujukan APBD 2027

Sabtu, 12 September 2026 01:18 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/644952/pusaka-jateng-hasilkan-537-gagasan-rujukan-apbd-2027>

Semarang (ANTARA) - Ajang Forum Perumusan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Jawa Tengah (Pusaka Jateng) 2026 menghasilkan 537 gagasan yang berpotensi menjadi rujukan Pemerintah Provinsi Jateng dalam merumuskan kebijakan pembangunan lewat APBD 2027.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Jumat, mengatakan, berbagai gagasan tersebut dapat memperkaya referensi Pemprov Jateng dalam menentukan arah kebijakan, khususnya terkait pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Ekonomi Puncak Pusaka Jateng 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Bank Indonesia (BI) Jateng.

Pusaka Jateng tahun ini mengangkat tema "Transformasi Pariwisata Jawa Tengah sebagai Sumber Pertumbuhan Baru yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jateng pada 2027 yang akan mendorong pariwisata berkelanjutan dan ramah Muslim, sekaligus pengembangan ekonomi syariah.

Menurut dia, gagasan dari Pusaka Jateng perlu dilihat sebagai sumber masukan untuk membuat kebijakan lebih tepat sasaran, salah satunya dalam mengukur dampak pariwisata yang tidak cukup hanya dilihat dari jumlah wisatawan.

Ia menilai wisatawan yang datang kembali ke Jateng merupakan salah satu indikator penting, sebab kunjungan berulang menunjukkan adanya ketertarikan dan pengalaman positif.

Dampak ekonomi dari kunjungan tersebut juga diharapkan tidak berhenti di destinasi wisata, namun Pemprov Jateng ingin pergerakan wisatawan ikut menghidupkan UMKM dan potensi ekonomi di desa-desa.

"Sesungguhnya wisata ini hanya pemantik. Yang paling utama adalah mereka akan membelanjakan, beli oleh-olehnya di UMKM yang ada di desa-desa," katanya.

Selain destinasi alam dan wahana, Pemprov Jateng juga akan memperluas daya tarik wisata dengan menawarkan potensi wisata industri untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang investasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jateng Mohamad Noor Nugroho mengatakan Pusaka Jateng merupakan forum yang diselenggarakan untuk memformulasikan rekomendasi kebijakan kepada Pemprov Jateng, sejalan dengan fungsi BI sebagai advisor bagi pemerintah.

Pusaka Jateng 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kelima, yang rangkaian kegiatannya diawali dengan call for paper yang menghasilkan lebih dari 537 abstrak.

Selanjutnya, karya-karya tersebut diseleksi menjadi 100 paper dan 30 paper untuk tahap penjurian hingga terpilih enam pemenang.

"Mudah-mudahan paper-paper ini bisa dimanfaatkan untuk kita semua, baik Pemprov maupun stakeholder lainnya untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan perekonomian dan khususnya pariwisata," katanya.

Dalam ajang tersebut terpilih juara pertama Bayu Dwi Kurniawan, Yohanes Eki, dan Dede Yoga melalui paper "Transformasi Industri Menuju Ekonomi Sirkular: Identifikasi Sumber Pertumbuhan Baru untuk Mendorong Produktivitas Hijau di Pantura Jawa Tengah".

Juara kedua diraih Regina Arva Salsabila, Daffa Rahmad Nabil, dan Sandira Ulma Yassar melalui paper "Jelajah LEREP: Evaluasi Ex-Ante Kebijakan Integrasi Lima Atraksi Desa Wisata Lerep Berbasis Jejak Digital, Deep Learning, dan Agent-Based Modeling".

Sementara juara ketiga diraih Manuel Exaudi Hutajulu, Firda Putri Kurniasari, dan Patricia Eunike Vanuela Simarmata melalui paper "Mampukah Pariwisata Mendorong Sektor Riil dan Pendapatan Fiskal Daerah? Analisis Heterogenitas Dampak Pengembangan Desa Wisata di Jawa Tengah".

Dinnakerin Banyumas memperluas peluang kerja bagi pencari kerja

Jumat, 11 September 2026 14:44 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/644901/dinnakerin-banyumas-memperluas-peluang-kerja-bagi-pencari-kerja>

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinnakerin) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memperluas peluang kerja bagi pencari kerja melalui pelatihan keterampilan, bursa kerja, pemagangan ke luar negeri, dan fasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia.

Kepala Dinnakerin Kabupaten Banyumas Wahyu Dewanto di Purwokerto, Banyumas, Jumat, mengatakan pelatihan secara berkelanjutan dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), antara lain kejuruan menjahit, servis telepon seluler, tata rias, dan servis kendaraan bermotor.

Menurut dia, pelatihan tersebut didukung anggaran yang bersumber dari APBD, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan APBN.

"Secara umum, rata-rata sekitar 80 persen peserta pelatihan terserap di dunia kerja," katanya.

Menurut dia, pelatihan tersebut membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan nonteknis atau sikap kerja.

Setelah memiliki kompetensi, peserta pelatihan diarahkan untuk bekerja pada pemberi kerja atau mengembangkan usaha secara mandiri.

Ia mengatakan upaya tersebut penting karena angkatan kerja di Banyumas mencapai kisaran 900 ribu orang, sedangkan sekitar 60 ribu orang masih menganggur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai upaya untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, pihaknya menyediakan informasi lowongan melalui media sosial dan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan (Simak Kerja) Banyumas.

Selain itu, pihaknya rutin menggelar bursa kerja. Dalam sejumlah kegiatan yang digelar pada 2025 dan 2026, sekitar 2.500 pencari kerja dilaporkan telah diterima bekerja.

"Kami terus melakukan berbagai upaya agar persoalan pengangguran di Banyumas dapat segera ditangani," katanya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekitar 90 sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk memfasilitasi lulusan dan alumni memperoleh kesempatan kerja.

Di sisi lain, pihaknya memfasilitasi pemagangan ke Jepang melalui kerja sama dengan International Manpower Development Organization of Japan (IM Japan).

"Program magang sekitar tiga tahun itu berpotensi memberikan penghasilan hingga Rp15 juta-Rp20 juta per bulan," katanya.

Pihaknya juga mendorong penempatan pekerja migran Indonesia melalui sekitar 12 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Ia mengatakan calon pekerja migran diarahkan mengikuti prosedur resmi, mulai pengurusan dokumen hingga pelatihan melalui lembaga pelatihan kerja (LPK).

“Kami juga membina sekitar 70 LPK di Banyumas terkait perizinan dan legalitas kejuruan,” katanya.

Selain itu, pihaknya menjajaki pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pembiayaan peserta pemagangan dan calon pekerja migran, salah satunya dengan PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

"Jika membutuhkan pembiayaan, kami mendorong mereka memanfaatkan KUR dengan bunga terjangkau. Pembayaran angsuran dapat disesuaikan setelah mereka mulai bekerja," kata Wahyu.

DPKUKM: Harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat di Banyumas naik

Jumat, 11 September 2026 12:34 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/644867/dpkukm-harga-beberapa-kebutuhan-pokok-masyarakat-di-banyumas-naik>

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyebut sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di wilayah itu mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan beberapa komoditas.

Kepala DPKUKM Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi di Purwokerto, Banyumas, Jumat, mengatakan kenaikan harga terutama terjadi pada cabai rawit yang telah berlangsung sekitar dua pekan terakhir.

"Kalau yang cabai rawit memang sudah mengalami kenaikan sejak dua minggu yang lalu," katanya.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, kata dia, kenaikan harga cabai berkaitan dengan proses regenerasi tanaman di tingkat petani. Tanaman lama mulai menghabiskan sisa produksi, sedangkan tanaman baru belum memasuki masa panen.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pasokan cabai ke pasar untuk sementara terbatas.

"Petani sedang regenerasi tanaman. Yang lama menghabiskan sisa tanam, kemudian yang baru ini masih menunggu panen," katanya.

Ia mengharapkan pasokan kembali normal setelah tanaman baru memasuki masa panen sehingga tekanan terhadap harga cabai dapat berkurang.

Harga cabai rawit di sejumlah pasar Banyumas bahkan telah mencapai kisaran Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting yang sebelumnya berada pada kisaran Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram juga mulai mengalami kenaikan.

Selain cabai, kata dia, harga daging sapi juga mengalami kenaikan akibat pasokan sapi yang masih terbatas karena belum terdapat penambahan ternak sejak momentum Hari Raya Idul Adha.

"Pasokannya agak terbatas, sehingga harga daging sapi naik dari kisaran Rp170.000 per kilogram menjadi Rp180.000 per kg," katanya.

Sementara itu, untuk harga beras curah yang mulai menunjukkan kecenderungan meningkat di sejumlah pasar, dia mengatakan hal tersebut antara lain dipengaruhi petani yang menahan penjualan hasil produksinya kepada Bulog maupun pasar terbuka.

Menurut dia, petani cenderung menyimpan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sendiri karena memasuki masa paceklik dan masih menunggu datangnya musim hujan.

"Namun untuk ketersediaan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog masih aman dan mencukupi kebutuhan," katanya.

Gatot mengatakan DPKUKM bersama pihak terkait terus memantau perkembangan harga dan pasokan berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Banyumas agar inflasi di wilayah itu tetap terkendali.

Berdasarkan pantauan di Pasar Manis Purwokerto, harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp75.000 per kg atau naik dari sebelumnya yang sebesar Rp72.500 per kg, cabai merah keriting naik dari Rp50.000 per kg menjadi Rp55.000 per kg, dan cabai merah besar naik dari Rp55.000 per kg menjadi Rp60.000 per kg, sedangkan cabai rawit hijau masih bertahan di kisaran Rp65.000 per kg.

Sedangkan harga beras curah rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp500 per kg yang tergantung pada varietas beras, misalnya beras IR-64 biasa yang sebelumnya Rp14.500 per kg naik menjadi Rp15.000 per kg dan IR-64 super naik dari Rp16.500 per kg menjadi Rp17.000 per kg.

MTQ Nasional 2026 Digelar, Perputaran Ekonomi Jateng Diprediksi Rp1,2 Triliun

Jumat, 11 September 2026 11:45 WIB

Devi Setya

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8658103/mtq-nasional-2026-digelar-perputaran-ekonomi-jateng-diprediksi-rp1-2-triliun>

Jakarta - Perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, diperkirakan memberikan dampak besar terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksikan perputaran ekonomi selama rangkaian kegiatan mencapai Rp1,2 triliun.

MTQ Nasional XXXI akan berlangsung pada 11-20 September 2026. Ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari peserta, ofisial, pendamping, hingga tamu dan unsur pendukung lainnya.

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan proyeksi perputaran ekonomi tersebut dihitung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mempertimbangkan berbagai aktivitas yang muncul selama penyelenggaraan MTQ.

"Kita berharap ada Rp1,2 triliun. Kita menghitung dengan BPS kemarin," kata Taj Yasin.

Tak Hanya dari Perlombaan MTQ

Perputaran ekonomi tersebut diperkirakan tidak hanya berasal dari kegiatan utama MTQ. Kehadiran ribuan orang selama hampir 10 hari di Semarang turut menggerakkan berbagai sektor, seperti perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan, hingga pariwisata.

Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung untuk menarik aktivitas masyarakat dan para kafilah selama MTQ berlangsung.

Beberapa di antaranya adalah job fair, penjualan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai agenda budaya di Kota Semarang. Para kafilah juga akan ditawarkan untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Semarang dan daerah sekitarnya.

"Kita akan tawarkan kepada kafilah yang sekaligus mau berwisata di Semarang dan sekitarnya," ujarnya.

Salah satu agenda yang diperpanjang selama pelaksanaan MTQ adalah Festival Kota Lama Semarang. Festival tersebut akan berlangsung hingga rangkaian MTQ Nasional selesai sehingga dapat menjadi alternatif kegiatan bagi para tamu dari berbagai daerah.

Jumlah orang yang telah dikonfirmasi hadir dalam rangkaian MTQ juga mencapai sekitar 7.000 orang. Mereka terdiri atas peserta, ofisial, pendamping, dan unsur lainnya.

"Target kita yang pertama sukses pelaksanaan MTQ ke-31 ini, memberikan pelayanan terbaik buat para kafilah. Yang kedua dari perlombaan, kita targetkan paling tidak masuk tiga besar," kata Taj Yasin.

2.242 Peserta Ikuti MTQ Nasional

Sebanyak 2.242 peserta telah ditetapkan untuk mengikuti MTQ Nasional XXXI. Jumlah tersebut terdiri atas 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan.

Para peserta akan berkompetisi dalam delapan cabang dan 24 golongan lomba dengan total 48 kategori yang dipertandingkan. Panitia juga telah menyiapkan sebanyak 5.257 butir soal untuk kebutuhan perlombaan.

"Mulai tanggal 11 kita sudah mulai kedatangan tamu-tamu dari seluruh provinsi di Indonesia sampai tanggal 20 September. Kita sukseskan MTQ ke-31 di Semarang ini," ujar Abu Rokhmad.

MTQ Nasional XXXI tahun ini juga menghadirkan hal baru berupa eksibisi bagi penyandang disabilitas sensorik tuli. Sebanyak 24 peserta dari berbagai provinsi telah menyatakan kesiapan untuk mengikuti eksibisi tersebut.

Abu Rokhmad mengatakan eksibisi ini menjadi langkah awal untuk membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan MTQ.

Kementerian Agama berencana mengembangkan eksibisi tersebut menjadi salah satu cabang lomba resmi dalam penyelenggaraan MTQ berikutnya.

Inflasi AS Panas, Tekanan The Fed Naikkan Suku Bunga Meningkat

Sabtu, 12 September 2026 18:00 WIB

Jonnelle Marte

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121362/inflasi-as-panas-tekanan-the-fed-naikkan-suku-bunga-meningkat/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh menghadapi tekanan besar untuk menaikkan suku bunga dalam rapat kebijakan pekan depan setelah laporan inflasi yang dinantikan menunjukkan indeks harga konsumen (IHK) Amerika Serikat (AS) terus meningkat bulan lalu.

Inflasi inti naik lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus. Indeks harga konsumen inti, yang tidak memasukkan biaya makanan dan energi, meningkat 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis Jumat (11/9). Laporan tersebut memperkuat pandangan yang telah dianut sejumlah pembuat kebijakan bahwa The Fed harus bertindak untuk menekan tekanan harga setelah lebih dari lima tahun inflasi berada pada tingkat tinggi.

“Bagi The Fed, sekarang saatnya bertindak atau diam saja,” tulis Presiden dan Pendiri Inflation Insights LLC Omair Sharif dalam catatan kepada klien.

Setelah data terbaru tersebut dirilis, investor memperjelas ekspektasi mereka. Probabilitas kenaikan suku bunga dalam pertemuan The Fed pada 15-16 September, berdasarkan kontrak berjangka suku bunga dana federal, melonjak menjadi di atas 85%, dari sekitar 70% pada Kamis. Investor juga memperkirakan kenaikan suku bunga kedua akan terjadi pada Desember.

Sebelum laporan inflasi dirilis, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di kalangan ekonom yang mengamati bank sentral belum setinggi itu. Namun, setelah data tersebut keluar, sejumlah ekonom—termasuk dari TD Bank dan JPMorgan Chase & Co—mengubah proyeksi mereka dan kini memperkirakan akan terjadi kenaikan suku bunga.

“Angka ini semakin mengukuhkan pergeseran arah menuju kenaikan suku bunga,” kata Kepala Ekonom KPMG Diane Swonk. “Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan menaikkan suku bunga, tetapi seberapa besar kenaikan yang dibutuhkan untuk mengendalikan inflasi ini.”

Sebagian besar kenaikan inflasi inti pada Agustus didorong oleh lonjakan rekor pada harga layanan telepon nirkabel, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Meski hal tersebut dapat dipandang hanya memberikan dampak satu kali terhadap inflasi, sejumlah analis menilai The Fed tidak bisa terus mempertahankan suku bunga dengan mengandalkan harapan akan adanya perbaikan di masa mendatang.

Investor juga kemungkinan mempertimbangkan pernyataan Warsh sendiri dalam pidatonya pada 28 Agustus di Jackson Hole, Wyoming. Dalam pidato itu, ia mengatakan inflasi inti belum menunjukkan perbaikan yang berarti dan menambahkan bahwa para pembuat kebijakan masih memiliki “pekerjaan yang harus dilakukan” jika mereka tidak mendapatkan keyakinan baru bahwa inflasi berada di jalur menuju target 2% bank sentral.

“Anda tidak bisa menyampaikan pidato seperti yang Anda lakukan di Jackson Hole dan kemudian tidak mendukung kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya,” kata Sharif.

Dukungan Menguat

Dukungan terhadap kenaikan suku bunga telah menguat di internal bank sentral meskipun para pejabat mempertahankan suku bunga acuan dalam lima pertemuan tahun ini. Tiga pejabat menyatakan perbedaan pendapat pada Juli dan mendukung kenaikan seperempat poin persentase dalam pertemuan tersebut, sementara dua pejabat lain yang tidak memiliki hak suara mengatakan mereka juga akan mendukung kenaikan suku bunga.

Kelompok pembuat kebijakan yang berpandangan sebaliknya mengatakan mereka memperkirakan inflasi inti akan melambat dalam beberapa bulan mendatang. Namun, sebagian dari mereka mengakui perlu melihat lebih banyak bukti untuk mendukung keputusan mempertahankan suku bunga.

Keputusan untuk menaikkan biaya pinjaman pekan depan dapat memperkuat kredibilitas retorika antiinflasi Warsh sekaligus membantu memperbaiki dampak dari konferensi persnya pada 29 Juli, ketika ia dinilai gagal menjelaskan—setidaknya menurut pandangan investor—alasan The Fed mempertahankan suku bunga pada hari itu.

“Kenaikan suku bunga The Fed pekan depan kini tampaknya akan terjadi,” tulis ekonom Evercore ISI yang dipimpin Krishna Guha dalam catatan kepada klien pada Jumat. “Kami menilai Gubernur Warsh akan memandang data tersebut belum cukup baik untuk mengabaikan tekanan tambahan dari harga minyak dan tetap mempertahankan kredibilitas yang terguncang akibat konferensi persnya yang buruk pada Juli, dan ia kemungkinan akan mampu mendapatkan dukungan mayoritas pemilih yang cukup kuat.”

Namun, kenaikan suku bunga juga dapat memicu kemarahan Donald Trump, yang menunjuk Warsh dan terus menyerukan penurunan suku bunga. Pekan lalu, Trump bahkan mengancam akan menghentikan perdagangan dengan sejumlah negara jika The Fed tidak menurunkan suku bunga.

“Saya menduga jika The Fed mengambil langkah besar, presiden akan memberikan tanggapannya,” kata Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dalam wawancara dengan Michael McKee di Bloomberg TV pada Jumat.

Jika Trump berbalik menyerang Warsh, yang pekan lalu masih ia sebut sebagai “pemimpin baru yang hebat” bagi The Fed, Warsh mungkin akan menghadapi lebih dari satu kenaikan suku bunga yang menjadi sasaran kritik.

Dengan konflik di Iran yang terus berlanjut, harga minyak kembali melonjak. Minyak mentah Brent sempat mencapai US\$109 per barel pada Kamis. Selain itu, para ekonom menilai sejumlah faktor utama yang mendorong inflasi lebih tinggi, seperti pembangunan pusat data, kecil kemungkinan akan mereda dalam waktu dekat.

Konsumen juga tampak khawatir. Survei terbaru Universitas Michigan menunjukkan ekspektasi inflasi untuk satu tahun ke depan melonjak menjadi 4,6% pada awal September dari 4% sebulan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak 2023, mayoritas konsumen juga memperkirakan suku bunga akan meningkat dalam 12 bulan mendatang.

Sejumlah pejabat The Fed berpendapat tingkat suku bunga saat ini tidak lagi menekan permintaan sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, meskipun kenaikan upah tampaknya tidak menambah tekanan inflasi, tingkat pengangguran masih rendah dan secara luas dinilai stabil.

Seluruh kondisi tersebut dapat memperkuat alasan bagi The Fed untuk membatalkan pemangkasan suku bunga sebesar 75 basis poin yang dilakukan tahun lalu, ketika kekhawatiran terhadap potensi perlambatan pasar tenaga kerja masih lebih besar.

Dalam survei Bloomberg terhadap para pelanggan yang dilakukan pada 8-10 September, mayoritas responden mengatakan jika The Fed menaikkan suku bunga pekan depan, kemungkinan langkah tersebut hanya berupa penyesuaian satu atau dua kali kenaikan. Namun, sejumlah ekonom pada Jumat mengatakan mereka kini memperkirakan kenaikan yang lebih banyak.

"The Fed perlu menarik kembali tiga kali pemangkasan suku bunga yang mereka terapkan pada akhir 2025 dan memperlambat laju ekonomi yang kemungkinan akan tumbuh jauh di atas tren pada kuartal ini," tulis Joseph Brusuelas, kepala ekonom di RSM US LLP, dalam catatannya kepada para klien.

Defisit Anggaran AS 2026 Tembus US\$1,97 T dengan Tenggat 1 Bulan

Sabtu, 12 September 2026 07:40 WIB

Christopher Anstey dan Yash Roy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121333/defisit-anggaran-as-2026-tembus-us-1-97-t-dengan-tenggat-1-bulan/2>

Bloomberg, Defisit anggaran federal mencapai US\$1,97 triliun selama 11 bulan pertama tahun fiskal—salah satu angka tertinggi yang pernah tercatat—yang menyebabkan beban utang bergerak menuju tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

Selama periode 11 bulan hingga Agustus, defisit turun tipis 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (setelah memperhitungkan perbedaan kalender), menurut rilis Departemen Keuangan pada Jumat (11/9/2026) waktu setempat.

Untuk Agustus saja, selisihnya mencapai US\$166,8 miliar. Bulan terakhir tahun fiskal, yaitu September, sering kali mencatat surplus berkat adanya tenggat waktu pembayaran pajak perusahaan.

Total belanja untuk tahun fiskal berjalan mencapai US\$6,81 triliun (naik 3%), sementara pendapatan tercatat sebesar US\$4,85 triliun (juga naik 3% setelah penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya).

Pembayaran bunga utang yang lebih tinggi—yang sebagian disebabkan oleh kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah AS (Treasury)—telah membebani anggaran.

Biaya bunga bersih selama 11 bulan hingga Agustus mencapai \$1 triliun; angka ini melampaui belanja pertahanan dan semua kategori utama lainnya, kecuali Jaminan Sosial (Social Security) serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (yang mengelola Medicare).

Data departemen menunjukkan bahwa tingkat suku bunga rata-rata obligasi pemerintah yang dapat diperdagangkan (marketable Treasuries) naik menjadi 3,48% pada akhir Agustus.

Angka ini lebih tinggi lebih dari 2 poin persentase dibandingkan lima tahun lalu, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring jatuh temponya surat berharga berbunga rendah dan keharusan Departemen Keuangan melakukan pembiayaan kembali (refinancing) dengan biaya yang lebih tinggi.

Suku Bunga dan Pengembalian Dana

Kekhawatiran yang meningkat mengenai inflasi, serta langkah Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk meredamnya, telah mendorong imbal hasil obligasi ke tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir pada pekan ini.

Imbal hasil obligasi tenor dua tahun sempat mencapai 4,66% pada Jumat, sementara tingkat bunga obligasi tenor 10 tahun menyentuh angka 4,98%.

Belanja untuk Jaminan Sosial dan Medicare juga terus meningkatkan pengeluaran federal.

Program-program yang disebut sebagai program tunjangan wajib (entitlement programs) ini menghadapi tantangan berupa peningkatan jumlah pensiunan yang terus-menerus, sementara Kongres enggan untuk memangkas manfaat maupun menaikkan iuran pekerja.

Dalam beberapa bulan terakhir, pengembalian dana tarif (bea masuk) turut menambah besaran defisit.

Hal ini terjadi menyusul putusan Mahkamah Agung pada bulan Februari yang menyatakan bahwa sebagian besar kenaikan tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump hingga saat itu adalah ilegal.

Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan optimismenya bahwa sebagian besar aliran pendapatan bea masuk sebelumnya akan pulih seiring dengan langkah pemerintah menerapkan pungutan impor baru berdasarkan undang-undang lain.

Setelah mencatat penurunan bersih bea masuk selama tiga bulan berturut-turut, bulan Agustus justru mencatatkan pemasukan positif sebesar US\$12,8 miliar, menurut data yang dihimpun oleh Bloomberg.

Pada Februari, Congressional Budget Office (CBO) memperingatkan bahwa rasio utang AS terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan akan melampaui rekor 106% yang tercatat pada tahun 1946—tepat setelah Perang Dunia II—menjelang 2030.

Salah satu indikator utang publik AS yang beredar telah menembus rekor angka US\$40 triliun pada bulan lalu.

Seruan Trump untuk meningkatkan belanja pertahanan serta usulan baru untuk memberikan cek senilai US\$5.000 kepada setiap warga negara AS dewasa—jika Partai Republik berhasil mempertahankan kendali atas Kongres dalam pemilihan umum bulan November—makin memperkuat kekhawatiran bahwa tidak ada keinginan kuat di Washington untuk melakukan pengetatan anggaran.

Kendati demikian, Bessent telah berjanji untuk memaparkan rencana konsolidasi fiskal dalam beberapa minggu atau bulan mendatang; ia menyebutkan bahwa rencana tersebut sedang disusun bersama dengan Direktur Anggaran Gedung Putih, Russ Vought.

Dolar Goyah Saat Data CPI Perkuat Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 12 September 2026 07:10 WIB

Anya Andrianova

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121335/dolar-goyah-saat-data-cpi-perkuat-sinyal-kenaikan-bunga-the-fed/2>

Bloomberg, Nilai tukar dolar bergerak fluktuatif pada Jumat (11/9/2026) waktu setempat setelah indikator utama harga konsumen Amerika Serikat (AS) mencatat kenaikan yang melampaui perkiraan.

Hal itu mendorong para pelaku pasar untuk meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga pada pekan depan.

Bloomberg Dollar Spot Index berakhir dengan perubahan tipis setelah sempat bergerak naik-turun sepanjang hari.

Indeks tersebut sempat menguat hingga 0,2% dan menyentuh level tertinggi dalam sepekan setelah data inflasi inti bulanan Agustus tercatat naik 0,3%, melampaui perkiraan sebesar 0,2%.

Namun, penguatan tersebut segera memudar karena penurunan harga minyak memberikan tekanan pada mata uang AS tersebut.

Menurut data Commodity Futures Trading Commission yang dirilis Jumat, para pedagang nonkomersial kembali mengurangi posisi long (taruhan beli) terhadap dolar pada periode hingga 8 September.

"Laporan tersebut memberikan sinyal yang mendukung langkah kenaikan suku bunga The Fed, namun tidak sampai memicu kekhawatiran berlebih bahwa inflasi akan tak terkendali," ujar Nathan Thooft, manajer portofolio senior di Manulife Investment Management.

"Penurunan harga minyak juga turut mendukung pergerakan nilai tukar dolar."

Mata uang dolar AS sempat menguat pada sesi sebelumnya setelah data harga produsen AS dan lonjakan harga minyak memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga tahun ini.

Namun, pada Jumat, harga minyak memangkas kenaikan tajam tersebut, sehingga mengurangi dukungan bagi penguatan dolar.

Sejauh bulan ini, indeks dolar telah turun 0,5%. Biaya untuk lindung nilai terhadap potensi kenaikan dolar dibandingkan risiko penurunannya dalam enam bulan ke depan telah menurun, yang mengindikasikan prospek yang kurang positif bagi mata uang tersebut.

Para spekulasi telah mengurangi posisi long (taruhan beli) mereka terhadap dolar selama enam pekan terakhir. Menurut laporan CFTC, dana lindung nilai (hedge fund), manajer aset, dan pedagang lainnya memangkas posisi long dolar mereka hingga di bawah US\$19,4 miliar pada pekan yang berakhir tanggal 8 September.

Angka tersebut turun dari hampir US\$50 miliar pada akhir Juli, saat posisi bullish (optimistis) terhadap dolar berada di level tertinggi sejak 2014.

Sementara itu, yen Jepang menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Jumat, sehingga menekan posisi dolar.

Yen sempat melonjak hingga 0,8% ke level 153,24 dan mencatatkan kenaikan selama dua pekan berturut-turut—rentetan penguatan terpanjang sejak Mei.

Sebelumnya pada pekan ini, mata uang tersebut mendapat dorongan setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menantang para pelaku pasar untuk menguji tekadnya dalam mendukung mata uang Jepang.

Para pembuat kebijakan di Jepang telah memberikan sinyal hawkish, yang turut menopang mata uang domestik tersebut. Bank of Japan dijadwalkan akan menggelar pertemuan pekan depan, menyusul keputusan The Fed.

Ekspor Batu Bara RI ke China Drop 30,78% Imbas El Niño Kalimantan

Sabtu, 12 September 2026 10:00 WIB

Azura Yumna Ramadani Purnama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121321/ekspor-batu-bara-ri-ke-china-drop-30-78-imb- el-nino-kalimantan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta – Ekspor batu bara Indonesia pada Agustus 2026 ke China dilaporkan turun 30,78% secara tahunan menjadi 14,47 juta ton, tetapi naik tipis 1,26% dibandingkan dengan Juli 2026.

Penurunan ekspor batu bara disebut dipengaruhi surutnya sejumlah sungai di Kalimantan.

Hal itu diketahui berdasarkan data pelacakan kapal Kpler, yang dikompilasi Sxcoal. Menurut data tersebut, ekspor batu bara melalui laut sepanjang Januari—Agustus 2026 mencapai 302 juta ton atau turun 4,51% secara tahunan alias year on year (yoy).

Dari jumlah tersebut, pengiriman ke China mencapai 116 juta ton atau turun 2,73%.

Sxcoal melaporkan penurunan ekspor batu bara Indonesia dipengaruhi ketidakpastian kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, serta terhambatnya ekspor gegara sungai yang dilalui tongkang surut di Kalimantan.

“Selain ketidakpastian kebijakan, pasokan pada Agustus juga terkendala oleh rendahnya ketinggian air sungai akibat kekeringan,” tulis Sxcoal dalam laporannya.

Sebuah tongkang yang mengangkut batu bara di Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia./Bloomberg-Dimas Ardian

“Ketinggian air di Sungai Barito turun menjadi 3—4 meter dari biasanya 8—18 meter, memaksa tongkang untuk mengurangi muatan hingga setengahnya. Beberapa bagian sungai menjadi tidak dapat

dilayari, sehingga mendorong beberapa produsen untuk menyatakan *force majeure* [keadaan kahar],” tegasnya.

Adapun, ekspor batu bara Indonesia pada Agustus 2026 dilaporkan turun 23,34% secara tahunan menjadi 36,1 juta ton, dari capaian tahun sebelumnya sejumlah 47,09 juta ton.

Secara bulanan, ekspor batu bara Indonesia pada Agustus 2026 turun 6,54% dari besaran bulan Juli 2026 sebanyak 38,62 juta ton.

Negara Tujuan

Berdasarkan negara tujuannya, Sxcoal mencatat ekspor batu bara Indonesia ke Asia pada Agustus 2026 mencapai 35,83 juta ton atau turun 23,66% secara tahunan dan turun 6,59% secara bulanan alias *month to month* (mtm).

Ekspor ke Asia mengambil porsi sekitar 99,3% dari total ekspor yang dilakukan Indonesia. Sxcoal mencatat China tetap menjadi pengimpor batu bara Indonesia terbesar pada Agustus 2026, dengan volume sebesar 14,47 juta ton.

Sxcoal mencatat ekspor batu bara Indonesia ke India pada Agustus 2026 mencapai 7,1 juta ton atau turun 15,83% secara tahunan, tetapi naik 12,01% secara yoy.

Kemudian, ekspor batu bara Indonesia ke Filipina pada Agustus 2026 mencapai 2,69 juta ton atau turun 18,1% secara yoy dan turun 26,38% secara mtm.

“Filipina sangat bergantung pada impor batu bara dari Indonesia. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di negara tersebut tetap stabil secara tahunan sepanjang 2026 ini, sehingga permintaan impor tetap stabil meskipun dalam skala yang moderat,” ungkap Sxcoal.

Sementara itu, ekspor batu bara ke Malaysia pada Agustus 2026 mencapai 2,2 juta ton atau naik 28,52% secara yoy dan naik 4,91% secara mtm.

Selanjutnya, ekspor batu bara pada Agustus 2026 menuju Vietnam mencapai 2,07 juta ton atau naik 28,6% secara yoy, walaupun turun 21,58% secara mtm.

“Kpler memperkirakan pasar batu bara Indonesia akan tetap kuat hingga akhir tahun ini meskipun permintaan dari tujuan ekspor terbesarnya melemah, dengan kendala pasokan yang terus menopang harga,” tulis Sxcoal.

Untuk diketahui, sejumlah sungai di Kalimantan yang digunakan tongkang batu bara mengangkut hasil produksi tambang dari jetty ke kapal induk mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut terjadi di tiga sungai utama Kalimantan, yaitu; Mahakam, Kapuas, dan Barito.

Asosiasi Pertambangan batu bara Indonesia (APBI) mengonfirmasi surutnya sungai Mahakam telah menghambat pengiriman batu bara, bahkan berpotensi meningkatkan stok sementara di area tambang maupun stockpile pelabuhan.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menyatakan hingga kini asosiasinya masih belum dapat mengestimasi volume ekspor batu bara yang pengirimannya terhambat akibat surutnya sungai Mahakam.

Meskipun begitu, dia menyatakan bahwa penurunan debit air di sungai Mahakam membatasi draft tongkang sehingga muatan tidak dapat dimaksimalkan.

“Kondisi ini tentu dapat memengaruhi kelancaran pemenuhan pasokan batu bara dan berpotensi meningkatkan stok sementara di area tambang maupun stockpile pelabuhan,” kata Gita saat dihubungi, Selasa (8/9/2026).

Di sungai Mahakam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda Mursidi menyatakan telah mengeluarkan instruksi agar seluruh perusahaan dan pemilik pelabuhan membatasi muatan batu bara di tongkang menjadi sekitar 5.500—6.000 ton.

Mursidi menjelaskan, dalam kondisi normal, tongkang pengangkut batu bara dapat mengangkut hingga 7.000 ton batu bara.

Namun, saat ini kondisi tersebut dapat membahayakan pelayaran sebab debit air mengalami penyusutan.

“Kita juga melakukan imbauan. Artinya, instruksi juga sebetulnya kepada semua perusahaan termasuk pemilik pelabuhan untuk melakukan pemuatan di bawah batas normal lah,” kata Mursidi, dikutip dari YouTube Tribun Kaltim, Jumat (4/9/2026).

Sementara itu, di sungai Barito, Argus Media melaporkan terjadi penurunan kedalaman sungai Barito yang dapat membatasi pergerakan batu bara dari lokasi tambang menuju terminal ekspor

Argus Media juga mencatat sejumlah produsen menyatakan keadaan kahar atas pengiriman batu bara.

“Rendahnya permukaan air di Sungai Barito telah memaksa sejumlah produsen menyatakan force majeure atas pengiriman, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap ketersediaan ekspor ketika El Niño yang kuat mengancam memperpanjang kondisi kering,” tulis Argus, Rabu (2/9/2026).

Adapun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan surutnya sungai Barito akibat El Niño diperkirakan menyebabkan pengiriman sekitar 3,9 juta ton batu bara terhambat dalam satu bulan.

Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia menegaskan belum menerima laporan perusahaan yang mengumumkan keadaan kahar atau wanprestasi.

“Info yang saya dapat dari perusahaan anggota, dampak dari mulai suratnya hulu sungai Barito mengganggu shipment yang diperkirakan sekitar 3,9 juta ton dalam sebulan,” kata Hendra ketika dihubungi, Senin (7/9/2026).

Sekadar catatan, Kementerian ESDM melaporkan realisasi produksi batu bara Januari—Juli 2026 mencapai 423,71 juta ton. Dari besaran itu, 279,4 juta ton atau sekitar 63,82% batu bara dilakukan ekspor.

Kemudian, sekitar 113,4 juta ton batu bara atau sekitar 23,86% dipasok untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO). Sementara itu, sisanya sekitar 39,51 juta ton atau 9,32% dijadikan stok nasional.

Kementerian ESDM juga telah memutuskan untuk memangkas target produksi batu bara nasional dalam RKAB 2026 menjadi kisaran 600 juta ton, turun dari realisasi produksi sepanjang 2025 sebesar 817,48 juta ton.

Kadin Usul 3 Cara Tingkatkan Perdagangan Antarnegara BRICS

Sabtu, 12 September 2026 22:42 WIB

Agustina Melani

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/8290547/kadin-usul-3-cara-tingkatkan-perdagangan-antarnegara-brics>

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan tiga langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antarnegara anggota BRICS.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, dikutip dari Antara, Sabtu (12/9/2026).

Tiga langkah itu mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antarnegara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa.

Mengutip Antara, Sabtu (12/9/2026), Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, Jumat, 11 September 2026.

Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara.

Dia menuturkan, BRICS Business Council perlu mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi dunia usaha, kemudian menyampaikan usulan penyelesaian secara spesifik kepada pemerintah masing-masing negara.

Pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu dan kemudahan perjalanan bisnis, menurut Anindya, dapat mempercepat transaksi dan investasi.

Anindya pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS (BRICS Business Travel Card) untuk mendukung mobilitas pelaku usaha.

Langkah kedua adalah menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara, terutama pembayaran digital.

Anindya menilai India, Brasil, dan China telah menunjukkan besarnya potensi pembayaran waktu nyata. Tantangannya adalah membuat sistem pembayaran tersebut dapat terhubung dan digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.

BRICS, menurut dia, juga perlu memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan yang sesuai dengan tetap menjaga keamanan data dan stabilitas sistem keuangan.

"Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial," kata Anindya yang juga Ketua BRICS Business Council Indonesia.

Langkah Ketiga

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat acara Global & Domestic Economic Outlook 2026, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Usulan tersebut sejalan dengan pembahasan BRICS Business Forum mengenai konektivitas sistem pembayaran, peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta pembangunan mekanisme pembayaran lintas batas yang cepat, murah, dan aman.

Langkah ketiga, Anindya mendorong negara-negara BRICS meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang menopang perdagangan jasa.

Dunia usaha, menurut dia, perlu meningkatkan pelatihan pekerja, membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta membantu perusahaan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI).

Anindya mengusulkan agar setiap cabang BRICS Business Council memiliki target terukur mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahun.

Ia juga menilai New Development Bank dapat mengambil peran dalam pembiayaan jaringan digital, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Peran Indonesia

Menurut Anindya, negara anggota baru seperti Indonesia harus ikut menentukan agenda BRICS dan tidak sekadar menjadi pasar bagi produk maupun perusahaan dari negara-negara yang lebih dahulu bergabung.

Setiap kemitraan, kata dia, perlu membangun kemampuan domestik sehingga masyarakat di seluruh negara anggota dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna jasa.

Anindya menggambarkan integrasi BRICS yang nyata sebagai ekosistem ketika pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya, Sao Paulo, Durban hingga Alexandria dapat menemukan pelanggan, menawarkan jasa, serta menerima pembayaran melalui jaringan ekonomi BRICS.

"Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna," katanya.

Dalam forum yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian itu, Anindya menegaskan Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar baru, tetapi juga ikut membentuk arah kerja sama ekonomi BRICS.

Ia mengatakan Indonesia kini memiliki cabang yang aktif dalam BRICS Business Council sehingga dapat ikut mendorong agenda perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa di antara negara-negara anggota.

"Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council," kata Anindya.

Harga Pangan 12 September 2026: Cabai Rawit Merah Tembus Rp 90 Ribu per Kg

Sabtu, 12 September 2026 11:07 WIB

Cahya Alena Fauza

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/8290200/harga-pangan-12-september-2026-cabai-rawit-merah-tembus-rp-90-ribu-per-kg>

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa harga pangan yakni cabai, bawang, beras, serta bahan pangan protein dijual dengan harga bervariasi. Harga cabai rawit merah naik dibandingkan dengan pantauan harga pangan di Pasar Kebayoran Lama, Jumat, 11 September 2026. Harga cabai rawit merah sentuh Rp 90.050 per kilogram (kg) pada Sabtu, (12/9/2026). Kemarin harga cabai tersebut berada di Rp 80.000 per kg.

Pada perbandingan yang sama, cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga dari Rp 55.000 per kg ke Rp 62.950 per kg. Selain itu, cabai merah besar naik dari Rp 50.000 per kg ke Rp 54.200 per kg. Demikian dikutip dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Sabtu pekan ini.

Pada komoditas protein, kemarin, harga daging ayam turun, kemarin dibanderol Rp 50.000 per kg, dan kini dijual seharga Rp 42.500 per kg. Sementara, daging sapi naik dari Rp 150.000 per kg ke Rp 152.150 per kg. Komoditas lain seperti minyak goreng curah, di sisi lain, turun, dari harga kemarin Rp 22.000 per kg, kini Rp 20.500 per kg.

Simak harga pangan lainnya pada Sabtu, 12 September 2027.

Harga Cabai dan Bawang

- Cabai Rawit Merah: Rp 90.050 per kg.
- Cabai Rawit Hijau: Rp 64.700 per kg.
- Cabai Merah Besar & Keriting: Dipatok Rp 54.200 dan Rp 62.950 per kg.
- Bawang Merah & Putih: Bawang merah dijual Rp 37.700 per kg, dan bawang putih berada di angka Rp 39.400 per kg.

Harga Bahan Pangan Protein

- Daging Sapi: Kualitas 1 di harga Rp 152.150 per kg, sedangkan kualitas 2 dijual seharga Rp 142.850 per kg.
- Daging Ayam Ras Segar: Rp 42.500 per kg.
- Telur Ayam Ras Segar: Rp 29.900 per kg.

Harga Beras

- Kualitas Super: Tipe I dijual seharga Rp 17.850 per kg, dan tipe II di harga Rp 17.300 per kg.
- Kualitas Medium: Tipe I dan tipe II dipasarkan seharga Rp 16.550 dan Rp 16.400 per kg.
- Kualitas Bawah: Tipe I dipatok seharga Rp 14.800 per kg, sedangkan tipe II seharga Rp 14.700 per kg.

Harga Minyak dan Gula

Minyak Goreng: Kemasan bermerek 1 dijual di harga Rp 24.300 per kg, kemasan bermerek 2 seharga Rp 23.500 per kg, dan jenis curah di harga Rp 20.500 per kg.

Gula Pasir: Varian premium dibanderol di angka Rp 20.300 per kg, sedangkan gula pasir lokal dipatok seharga Rp 19.100 per kg.

Sudah Disetujui Prabowo, Bantuan Pangan Beras Berlanjut hingga Desember 2026

Sabtu, 12 September 2026 08:41 WIB

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/sudah-disetujui-prabowo-bantuan-pangan-beras-berlanjut-hingga-desember-2026-28ARifoMmbF/1>

Pemerintah memastikan bantuan pangan beras berlanjut hingga Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan dilanjutkannya kebijakan tersebut sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi Bapak Ibu yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya. Oktober, November, Desember. Sudah disetujui Presiden, ini kita tambah,” kata Zulhas melalui keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (12/9).

Zulhas menekankan pemerintah mempercepat penyalurannya terutama kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, agar bantuan segera diterima pada masa kekeringan saat ini.

“Kebijakan ini sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat. Ada laporan harga beras naik, ada yang sulit beli beras, tidak bisa beli beras, dan seterusnya. Kita sebut ini gerak cepat bantu rakyat,” ujar Zulhas.

Selain bantuan pangan, pemerintah menyiapkan penyaluran satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 150 ribu ton jagung SPHP bagi peternak UMKM, serta pelelangan 380 ribu ton beras sebagai bahan baku industri tepung beras dengan harga minimal Rp 11.000 per kg.

Sebelumnya, Perum Bulog telah mendapatkan tugas menyalurkan 997,2 ribu ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan kepada 33.244.408 penerima manfaat periode Juli-September 2026.

Penerima bantuan tersebut merupakan masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masing-masing penerima memperoleh 10 kg beras per bulan sehingga total bantuan untuk tiga bulan mencapai 30 kg.

Pada 5 September 2026, Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan periode Juli-September baru mencapai sekitar 30 persen dari total penugasan 997,2 ribu ton. Pemerintah kemudian meminta penyaluran dirapel 30 kg sekaligus dan dituntaskan pada September. Berdasarkan data Bulog per 10 September 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan periode Juli-September telah mencapai 49,86 persen.

Rupiah Diprediksi Stabil di Rp17.600-Rp18.000 pada 2026, PDB 5,3%

Sabtu, 12 September 2026 13:00 WIB

Hafiyyan

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20260912/9/2003575/rupiah-diprediksi-stabil-di-rp17600-rp18000-pada-2026-pdb-53>

Bisnis.com, JAKARTA — DBS Bank memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.600 hingga Rp18.000 per dolar AS pada 2026, seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,3%.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 0,36% ke level Rp17.611 pada Jumat (11/9/2026). Rupiah cenderung berfluktuasi sepanjang tahun ini, bahkan sempat menembus 18.100 pada Juni 2026.

Senior Economist DBS Group Research Radhika Rao mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid, ditopang oleh konsumsi dan investasi. DBS memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,3% pada 2026, dengan inflasi berada di kisaran 3,3%.

"Arus masuk investasi juga berpotensi mendukung stabilitas rupiah sehingga nilai tukar diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp17.600-Rp18.000 per dolar AS pada 2026," ujar Radhika Rao, Kamis (10/9/2026).

Sementara dari sisi moneter, DBS memperkirakan Bank Indonesia tidak perlu kembali menaikkan suku bunga pada tahun ini. BI telah mengerek BI Rate 100 basis poin pada Mei-Juni 2026 hingga kini mencapai level 5,75%.

"BI telah melakukan aksi preemptive dengan menaikkan suku bunga. Tinggal melihat ke depan kondisi global seperti apa," ujarnya.

Radhika mengatakan kondisi global tetap menjadi salah satu faktor utama yang perlu dicermati karena dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar rupiah, serta kondisi pendanaan Indonesia menuju 2027.

Setidaknya terdapat tiga sentimen global utama yang menjadi perhatian pasar, yakni pergerakan harga minyak yang dipengaruhi perkembangan geopolitik, terutama perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury yield serta arah kebijakan suku bunga Federal Reserve, dan pergerakan imbal hasil obligasi Jepang.

Menurut Radhika, kenaikan imbal hasil obligasi global dapat meningkatkan tekanan terhadap pasar negara berkembang karena investor akan mencari tingkat imbal hasil yang lebih menarik. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi biaya pendanaan dan arus modal ke negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, DBS melihat peluang investasi Indonesia tetap terbuka di tengah perubahan rantai pasok global. Tren China+1 dan Taiwan+1 dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik (EV) dan tujuan investasi utama di Asia Tenggara.

Agenda hilirisasi juga dinilai dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional sekaligus membuka peluang investasi pada sektor energi, infrastruktur, dan manufaktur strategis.

Dengan kombinasi sumber daya, pasar yang berkembang, dan dukungan kebijakan, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam ekosistem teknologi, elektronik, semikonduktor, dan kendaraan listrik di kawasan Asia.

Sederet Agenda Ekonomi Indonesia di KTT BRICS India

Dany Saputra

Sabtu, 12 September 2026 21:50 WIB

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20260912/9/2003632/sederet-agenda-ekonomi-indonesia-di-ktt-brics-india>

Bisnis.com, NEW DELHI — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di bawah keketuaan India diselenggarakan pada akhir pekan ini, Sabtu (12/9/2026) sampai dengan Minggu (13/9/2026). Indonesia sebagai anggota baru di tahun kedua mendorong berbagai program ekonomi di bawah bayang-bayang perang Iran dan Amerika Serikat (AS).

Sebagaimana diketahui, Iran dan Indonesia merupakan negara anggota BRICS. Sejak awal tahun ini, perang antara Iran, AS termasuk Israel meletus dan memicu disrupsi logistik energi terutama di Selat Hormuz.

Tensi antara AS dan Iran khususnya kembali memanaskan setidaknya sepekan terakhir sehingga memicu lonjakan harga minyak dunia. Melansir DataIndonesia.id, Jumat (11/9/2026), harga minyak mentah Brent memanaskan hingga menembus level US\$109 per barel.

Pemimpin negara Selatan-Selatan pun berkumpul di Bharat Mandapam, kawasan convention center yang berlokasi di New Delhi, Delhi, India. Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta di antaranya Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan oleh tuan rumah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

Berdasarkan pantauan Bisnis di area Bharat Mandapam, tempat perhelatan KTT BRICS di Delhi, puncak penyelenggaraan forum internasional ini dimulai sekitar pukul 14.00 waktu setempat (atau sekitar 15.30 WIB). Namun, beberapa pemimpin delegasi negara anggota maupun mitra yang sudah datang sejak Jumat tengah menjalani pertemuan bilateral dengan tuan rumah.

Perdana Menteri (PM) India Shri Narendra Modi telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Islam Iran Masoud Pezeshkian, Jumat (11/9/2026).

BACA JUGA Laporan dari India: Modi Sambut Kedatangan Prabowo, Putin dan Xi Jinping di KTT BRICS
Prabowo Bakal Bicara di KTT BRICS India, Bahas Ekonomi hingga Keamanan
Modi Pamer Kekuatan Ekonomi BRICS, Tumbuh Dua Kali Lebih Cepat dari Dunia

PM Modi berterima kasih kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang sudah hadir pada forum tahunan BRICS meski negaranya tengah menghadapi perang. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai perkembangan di Asia Barat.

"Perdana Menteri [Modi] menekankan posisi konsisten India bahwa seluruh permasalahan harus dipecahkan melalui dialog dan diplomasi. Dia juga menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang bertahan lama di kawasan, menjaga kebebasan navigasi dan perdagangan, serta keselamatan dan kesejahteraan pelaut," dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri India, Sabtu (12/9/2026).

Di lapangan, saling serang antara AS dan Iran kembali memanaskan. Pada akhir Agustus lalu, tidak hanya serangan militer, Gedung Putih di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan Operasi Pengasingan Ekonomi terhadap Iran.

Lewat Kementerian Keuangan AS dan institusi lainnya, salah satu negara G7 ini berencana untuk menghalangi seluruh potensi penerimaan yang dapat mendanai pemerintahan Iran.

Selain Iran, Presiden Rusia turut menggelar pertemuan bilateral dengan PM Modi pada hari yang sama. Keduanya berbincang soal kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, energi, antariksa, mobilitas keterampilan, dan hubungan antarwarga.

Kedua negara juga membahas rencana penguatan lebih jauh atas Kemitraan Strategis Spesial dan Istimewa guna mendorong pertumbuhan lebih signifikan. Kemitraan ini diharapkan dapat menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian geopolitik.

Selain itu, kedua negara pendiri BRICS ini turut membicarakan berbagai isu multilateral khususnya perang yang melibatkan AS dan Iran. Keduanya membahas ihwal dampak langsung dari ketegangan yang sudah berlangsung sejak awal 2026 ini.

"Mereka juga berbagi pandangan mengenai isu-isu utama regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk konflik di Asia Barat dan kawasan Laut Hitam yang berdampak pada perdagangan maritim serta keselamatan dan keamanan pelaut India," bunyi keterangan resmi Kemlu India.

Agenda Ekonomi RI

Di sisi lain, Indonesia yang merupakan anggota baru sejak Januari 2025, menjadikan BRICS sebagai peluang untuk memperluas keterlibatan di tingkat multilateral dan memperkuat kerja sama antara negara-negara Selatan-Selatan.

Sebagai salah satu ekonomi terbesar di antara negara-negara BRICS, Indonesia turut mendorong sejumlah agenda ekonomi. Apalagi, pemerintah pun sedang aktif mengejar berbagai kesempatan untuk melakukan diversifikasi, baik dalam hal perdagangan, investasi dan pembiayaan.

Selain dengan Cina, yang merupakan salah satu mitra utama investasi dan perdagangan, Indonesia tengah mengupayakan pemberlakuan Kesepakatan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Eurasia (I-EAEU FTA).

Salah satu yang menjadi area fokus potensi kerja sama Indonesia dengan negara-negara BRICS yaitu transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement (LCT). Salah satu negara yang sudah bekerja sama LCT dengan Indonesia, yakni Cina, sehingga kedua negara tidak perlu lagi menggunakan denominasi dolar AS dalam bertransaksi.

Hal ini yang turut disampaikan oleh Ketua Konsil Bisnis BRICS (Chair of BRICS Business Council) Indonesia Anindya Bakrie pada BRICS Business Forum, Jumat (11/9/2026).

Pada forum yang dihadiri oleh Presiden Putin, PM Modi hingga Presiden Pezeshkian ini, Anindya menyebut, penghubungan dan penguatan sistem pembayaran adalah satu dari tiga agenda yang dibicarakan oleh forum bisnis BRICS.

Pria yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini mengajukan agar negara-negara BRICS mempertimbangkan soal sistem pembayaran digital lintas negara.

Menurutnya, terdapat peluang besar dalam sistem pembayaran ini lantaran tujuh dari sepuluh total nilai transaksi real time seluruh dunia berasal dari India, Brasil dan Cina saja.

"Ekonomi kita menunjukkan apa yang mungkin terjadi. Tugas kita adalah untuk membuat sistem tersebut bekerja lintas batas secara efektif. Kita harus memperluas pembayaran dengan mata uang lokal dengan keamanan data dan stabilitas keuangan. Kedaulatan keuangan tidak perlu berarti isolasi keuangan," papar Anindya.

Anindya, yang juga CEO PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), turut menyampaikan dua hal lain yang menjadi perbincangan forum bisnis. Salah satunya, kemudahan berusaha lintas batas yang mencakup lisensi lebih jelas serta perjalanan lebih mudah untuk bisnis.

"Saya mengajukan kita membentuk BRICS Business Travel Card," ujarnya.

Kemudian, berinvestasi pada manusia dan infrastruktur yang dapat menyediakan layanan jasa.

"UMKM di Surabaya, Sao Paulo, Durban, Alexandria, harus bisa mendapatkan pelanggan, menyampaikan layanannya, serta mendapatkan bayaran antarnegara BRICS. Ini adalah ujian yang berarti untuk integrasi BRICS," tuturnya, dikutip dari siaran langsung Kementerian Luar Negeri India.

Ekonomi Jateng Tumbuh 5,80 Persen, BCA Bidik Potensi Besar Semarang Lewat Expo 2026

Sabtu, 12 September 2026 16:54 WIB

Penulis: Val, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1266098/ekonomi-jateng-tumbuh-580-persen-bca-bidik-potensi-besar-semarang-lewat-expo-2026>

TRIBUNJATENG.COM - Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan tren positif sepanjang 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, perekonomian provinsi ini pada semester I 2026 tumbuh kumulatif sebesar 5,80 persen.

Capaian tersebut menegaskan peran Jawa Tengah sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Berbagai sektor mulai dari perdagangan, industri manufaktur, jasa, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Di antara berbagai wilayah di Jawa Tengah, Kota Semarang masih memegang peranan penting sebagai pusat perdagangan dan bisnis.

Posisinya yang strategis, didukung infrastruktur yang terus berkembang, menjadikan ibu kota provinsi ini sebagai simpul aktivitas ekonomi yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah II BCA Andreas Andy C. menilai Semarang memiliki potensi ekonomi yang besar karena pertumbuhan sektor perdagangan dan industri yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

"Kami menyadari besarnya potensi ekonomi yang ada di Semarang. Oleh karena itu, melalui BCA Expo, kami berharap dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pelaku usaha di wilayah ini," ucapnya dalam keterangan tertulis Sabtu (12/9/2026).

Ia menjelaskan BCA Expo Semarang 2026 yang berlangsung pada 8–13 September 2026 di 23 Semarang Shopping Center.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengeksplorasi berbagai solusi finansial, mulai dari kebutuhan hunian, kendaraan, investasi, hingga layanan perbankan digital.

"Dalam kegiatan itu kami juga ingin memperkenalkan berbagai produk dan layanan unggulan BCA yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari tabungan, kredit, hingga solusi digital perbankan," ujar Andreas Andy C.

Sebagai bagian dari rangkaian BCA Expo 2026, acara ini mempertemukan masyarakat dengan berbagai mitra strategis, mulai dari pengembang properti, dealer otomotif, hingga perusahaan anak BCA.

Kehadiran berbagai mitra tersebut memungkinkan pengunjung membandingkan beragam pilihan produk dan memperoleh informasi pembiayaan secara langsung dalam satu lokasi.

Direktur BCA Vera Eve Lim menambahkan, penyelenggaraan BCA Expo merupakan salah satu upaya perseroan untuk mendekatkan berbagai solusi finansial kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami senang dapat menyambangi Semarang melalui BCA Expo 2026. Lewat gelaran ini, kami berharap dapat membantu nasabah dan masyarakat Semarang melangkah lebih dekat menuju berbagai rencana mereka dengan suku bunga kompetitif dan promo spesial yang kami tawarkan." tambahnya.

Dalam ajang tersebut, BCA menawarkan berbagai program pembiayaan dengan bunga spesial. Untuk kredit pemilikan rumah (KPR), tersedia bunga mulai 1,23 persen effective per tahun fixed satu tahun khusus rumah baru dari mitra developer KPR BCA, dengan biaya provisi sebesar 0,81 persen.

"Kami akan terus berupaya memberikan solusi yang mudah, aman, dan relevan, serta senantiasa mendampingi nasabah dalam setiap langkahnya," ujar Vera.

Ekosistem properti dalam BCA Expo Semarang 2026 juga menghadirkan 14 developer yang menawarkan berbagai pilihan hunian.

Kehadiran para pengembang tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian rumah sekaligus mencari solusi pembiayaan yang sesuai.

Sementara itu, untuk kebutuhan kendaraan roda empat, BCA menyediakan program Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan bunga mulai 1,80 persen flat per tahun tenor satu tahun untuk mobil baru jenis passenger car, serta potongan biaya administrasi hingga Rp900 ribu.

Bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan roda dua, tersedia Kredit Sepeda Motor (KSM) dengan bunga mulai 5,69 persen flat per tahun dan potongan biaya administrasi sebesar Rp200 ribu.

Pilihan kendaraan yang ditampilkan dalam expo juga cukup beragam, melibatkan 19 merek mobil dari 22 dealer serta sembilan merek sepeda motor.

Selain melihat langsung unit kendaraan, pengunjung dapat berkonsultasi mengenai skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. (*)

Angka kemiskinan Temanggung turun

Sabtu, 12 September 2026 12:51 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/644976/angka-kemiskinan-temanggung-turun>

Temanggung (ANTARA) - Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada 2025 tercatat 7,78 persen atau sekitar 62.050 jiwa, turun dari 8,67 persen atau sekitar 72.960 jiwa pada 2024.

"Penurunan angka kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat Temanggung," kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Esti Dwi Utami di Temanggung, Jumat.

Secara umum, capaian angka kemiskinan Temanggung pada 2025 berada di urutan ke-13 di Provinsi Jawa Tengah.

Di wilayah pengembangan Gelangmanggung yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo, Temanggung berada di posisi kedua dalam capaian penurunan kemiskinan.

Meski menunjukkan tren positif, Esti mengatakan penanganan kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari penurunan angka statistik. Kemiskinan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh hak-haknya.

"Kemiskinan bukan sekadar angka atau statistik semata, namun kemiskinan adalah suatu kondisi masyarakat yang belum terpenuhi hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan yang layak, kesehatan, serta akses terhadap pekerjaan dan kehidupan ekonomi yang baik," katanya.

Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan penanganan menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor. Program penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan secara parsial, sektoral, atau sekadar menjadi agenda rutin tahunan.

"Penanganan kemiskinan tidak bisa kita lakukan secara parsial, ego sektoral, atau sekadar urusan rutin tahunan. Ini adalah panggilan kemanusiaan, sekaligus tanggung jawab moral dan konstitusional kita," katanya.

Esti mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan penurunan angka kemiskinan diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut dia, akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Dengan capaian 7,78 persen pada 2025, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan tren penurunan, tetapi juga memperkuat intervensi yang menasar kelompok masyarakat miskin secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ekspor Perdana 19,56 Ton Teri Jengki Jepara ke Sri Lanka, Apa Itu?

Pelapor : Damarjati. Editor: Ardiansyah H

Sabtu, 12 September 2026 13:04 WIB

<https://www.rmoljawatengah.id/ekspor-perdana-1956-ton-teri-jengki-jepara-ke-sri-lanka-apa-itu>

Teri jengki dari Jepara mulai menembus pasar internasional. Sebanyak 19,56 ton komoditas perikanan tersebut dikirim untuk pertama kalinya ke Sri Lanka pada Jumat (11/9/2026).

Ekspor perdana itu dilakukan CV Karimun Mina Sejahtera (KMS), usaha binaan dalam ekosistem inkubasi bisnis Badan Pengelola Kampus Jepara (BPKJ) Universitas Diponegoro (UNDIP).

Sebanyak 19.560 kilogram atau 19,56 ton teri jengki diberangkatkan dari Jepara menuju Sri Lanka. Pengiriman tersebut ditujukan kepada R.G. Wilson Stores (PVT) LTD selaku importir.

Lantas, apa itu

teri jengki?

Teri jengki merupakan salah satu jenis ikan teri yang dikenal dalam perdagangan hasil perikanan. Komoditas ini umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, baik dalam bentuk segar maupun setelah melalui proses pengolahan dan pengeringan.

Bagi masyarakat pesisir, ikan teri menjadi salah satu hasil laut yang memiliki nilai ekonomi karena dapat diolah dan dipasarkan dalam berbagai bentuk. Jepara sendiri memiliki aktivitas perikanan dan pengolahan hasil laut yang menjadi bagian dari perekonomian masyarakat pesisir.

Ekspor perdana 19,56 ton teri jengki tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komoditas hasil laut dari Jepara memiliki peluang untuk masuk ke pasar luar negeri.

Kepala BPKJ UNDIP Nyoman Widiasta bersama Wakil Kepala BPKJ UNDIP Agus Subagyo turut menyaksikan proses pengiriman tersebut. Hadir pula Direktur CV Karimun Mina Sejahtera Dwi Daruma dan tim yang terlibat dalam ekspor.

Bagi CV Karimun Mina Sejahtera, pengiriman ke Sri Lanka menjadi langkah awal untuk memperluas pasar sekaligus membuka peluang perdagangan internasional bagi produk perikanan yang dihasilkan dari wilayah Jepara.

Sementara bagi BPKJ UNDIP, capaian tersebut menjadi bagian dari pendampingan usaha binaan melalui ekosistem inkubasi bisnis. Pendampingan diarahkan tidak hanya pada pengembangan usaha, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas.

Ekspor tersebut juga memperlihatkan peran kawasan pesisir Jepara dalam menghasilkan komoditas perikanan yang dapat dipasarkan hingga ke luar negeri.

Dengan pengiriman perdana ini, teri jengki Jepara kini memiliki pintu masuk ke pasar Sri Lanka. Ke depan, keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi usaha binaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jaringan ekspor. Article Image

Tren Kenaikan Suku Bunga Bank Sentral G7: The Fed Jadi Sorotan

Minggu, 13 September 2026 18:30 WIB

Craig Stirling

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121401/tren-kenaikan-suku-bunga-bank-sentral-g7-the-fed-jadi-sorotan/2>

Bloomberg, Bank-bank sentral dari sebagian besar negara maju yang tergabung dalam Group of Seven (G7) menghadapi pekan krusial, seiring meningkatnya risiko inflasi yang menekan mereka untuk menaikkan suku bunga.

Tiga keputusan, dimulai dengan Federal Reserve pada hari Rabu, diikuti secara berturut-turut oleh bank sentral Inggris dan Jepang, dapat mengubah peta kebijakan moneter global untuk sisa tahun 2026 dan seterusnya.

Amerika Serikat (AS) akan menjadi pusat perhatian setelah data inflasi inti hari Jumat menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perkiraan. Hal ini memicu spekulasi investor bahwa Gubernur Fed Reserve, Kevin Warsh, dan rekan-rekannya akan menaikkan suku bunga acuan, kemungkinan besar bertentangan dengan keinginan Presiden Donald Trump.

Kenaikan suku bunga oleh Bank of England (BoE) pada hari Kamis tidak diperkirakan akan terjadi. Namun, mengingat tiga pejabat mendukung langkah tersebut dalam pertemuan akhir Juli dan risiko

harga yang terus membayangi, kemungkinan beralih ke kenaikan suku bunga paling cepat November tidak dapat dikesampingkan.

Sementara itu, Bank of Japan (BoJ) diprediksi secara luas akan menaikkan suku bunga utamanya pada akhir pekan ini setelah munculnya serangkaian data pendukung, termasuk lonjakan upah terbesar di negara tersebut dalam hampir tiga dekade.

Dengan harga minyak yang kembali bertahan kuat di atas US\$100 per barel dan konflik Timur Tengah yang tampaknya kembali memanas, harapan para pembuat kebijakan akan meredanya tekanan harga global tampak tipis untuk saat ini.

Setelah para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) memperketat kebijakan pada hari Kamis—langkah kedua semacam itu sejak pecahnya konflik Iran—investor kemungkinan akan mengakhiri pekan dengan gambaran yang semakin jelas mengenai sikap kebijakan hawkish yang selaras di seluruh negara G7.

Institusi lain dalam kelompok ini, Bank of Canada, juga bergerak ke arah yang sama. Risalah keputusan awal bulan ini, saat para pejabat mempertahankan suku bunga, namun menekankan kekhawatiran inflasi, akan diterbitkan pada hari Rabu.

AS dan Kanada

Warsh mengatakan bulan lalu bahwa The Fed akan "memiliki pekerjaan rumah" jika tidak bisa "yakin bahwa inflasi dasar bergerak menuju target kami, secara jelas dan dengan kecepatan yang memadai." Data inflasi hari Jumat tidak memberikan angin segar semacam itu. Para investor dan ekonom kini memandang hampir pasti bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

Dukungan untuk langkah tersebut sebenarnya sudah menguat di lingkungan The Fed, bahkan sebelum angka-angka terbaru ini muncul. Pada bulan Juli, tiga pejabat menyatakan keberatan atas keputusan untuk mempertahankan suku bunga dan justru lebih memilih untuk menaikkannya. Pada hari Rabu, para pembuat kebijakan juga akan merilis proyeksi terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan prospek suku bunga.

Agenda data AS minggu ini mencakup penjualan ritel, yang diperkirakan akan kembali meningkat pada bulan Agustus, serta data terbaru mengenai pembangunan rumah baru, dan produksi industri.

Di Kanada, data inflasi Agustus yang akan dirilis hari Senin akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi saat memasuki kuartal ketiga yang penuh ketidakpastian, yang didominasi oleh eskalasi perang tarif dengan AS.

Asia

Fokus utama minggu ini adalah serangkaian data ekonomi Tiongkok bulan Agustus yang akan dirilis pada hari Selasa; data ini diharapkan memberikan gambaran resmi paling komprehensif mengenai kondisi ekonomi di sana pada bulan lalu.

Prakiraan menunjukkan bahwa para ekonom tidak mengharapkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan bulan Juli, saat ekonomi melambat di hampir semua sektor. Seperti yang terjadi sepanjang tahun ini, produksi dan ekspor produk teknologi terkait AI di Tiongkok terus berkembang pesat, namun sektor ekonomi lainnya justru sedang lesu.

Data inflasi India bulan Agustus, yang dijadwalkan rilis hari Senin, akan dipantau untuk melihat apakah tekanan harga mulai meluas; hal ini dapat memberikan petunjuk mengenai seberapa cepat RBI mungkin akan menaikkan suku bunga. Pada hari yang sama, bank sentral Pakistan akan mengumumkan keputusan suku bunganya, di mana para ekonom memperkirakan suku bunga akan tetap dipertahankan.

Kemungkinan kenaikan suku bunga oleh BoJ pada hari Jumat akan menjadi kenaikan kedua tahun ini. Langkah tersebut akan membawa suku bunga kebijakan ke level 1,25%—tingkat tertinggi sejak 1995—dan mungkin memberikan dukungan lebih lanjut bagi yen, yang telah menguat dalam beberapa minggu terakhir.

Pada pagi hari yang sama, pemerintah akan melaporkan data harga konsumen nasional untuk bulan Agustus, dengan perkiraan inflasi naik 2% dibandingkan tahun sebelumnya.

India, Jepang, dan Selandia Baru semuanya akan melaporkan data perdagangan bulan Agustus pada minggu mendatang; impor dan ekspor Jepang diperkirakan melanjutkan pertumbuhan pesat yang telah terjadi sepanjang tahun saat data tersebut dirilis pada hari Rabu. Selandia Baru pada hari Kamis akan melaporkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua, dengan perkiraan ekonomi tumbuh lebih lambat dibandingkan kuartal pertama.

Data tersebut akan menjadi rilis PDB terakhir sebelum pemilihan umum nasional pada November, dan dapat menjadi pertimbangan bagi para pemilih saat memutuskan apakah akan memilih kembali Perdana Menteri Christopher Luxon. Sri Lanka juga akan melaporkan data PDB pada hari Selasa.

Eropa, Timur Tengah, Afrika

Rilis data dari Inggris akan memberikan petunjuk kepada para pengambil kebijakan mengenai kekuatan tekanan harga sebelum keputusan suku bunga yang akan diambil pada akhir pekan tersebut.

Data ketenagakerjaan yang akan dirilis pada hari Selasa diprediksi menunjukkan kenaikan upah yang relatif stabil, sementara pada hari berikutnya, inflasi utama diperkirakan meningkat menjadi 3,1% pada bulan Agustus—level tertinggi dalam lima bulan terakhir.

Selain keputusan mengenai suku bunga, pertemuan Bank of England juga akan disorot karena adanya pengumuman tahunan mengenai seberapa cepat bank sentral tersebut berencana mengurangi kepemilikan obligasinya. Sementara itu, di zona euro, menyusul kenaikan suku bunga pada hari Kamis, data penting yang akan dirilis meliputi produksi industri dan indeks pemantau upah ECB (European Central Bank), yang keduanya dijadwalkan keluar pada hari Rabu. Data mengenai ekspektasi harga konsumen akan dirilis pada hari Jumat.

Kepala Ekonom ECB, Philip Lane, akan berbicara dalam konferensi penelitian dua hari yang dimulai pada hari Rabu, sementara Presiden Christine Lagarde dan para koleganya akan berkumpul di Dublin untuk pertemuan informal dengan para menteri keuangan Uni Eropa pada akhir pekan.

Dalam sebuah wawancara dengan Ouest-France yang diterbitkan pada Sabtu malam, Lagarde menyatakan bahwa guncangan inflasi "kemungkinan akan berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan sebelumnya."

Konflik yang melibatkan Iran dan "hancurnya kapasitas penyulingan di seluruh dunia, terutama di Rusia," telah "menyebabkan kenaikan biaya energi, dan hal itu mendorong kenaikan harga secara keseluruhan," ujarnya. "Dalam situasi seperti ini, dan mengingat ekonomi kita juga tangguh, kita harus mengambil tindakan."

Data pengangguran Swedia dijadwalkan rilis pada hari Rabu dan Kamis. Pada hari Kamis tersebut, pemerintah Swiss juga akan merilis prakiraan ekonomi terbarunya; data terkini di negara itu menunjukkan adanya peningkatan inflasi yang cukup signifikan.

Di wilayah lain, Israel akan merilis data inflasi pada hari Selasa, dengan perkiraan kenaikan tipis menjadi 1,6% dari sebelumnya 1,55%. Karena angka tersebut masih berada dalam kisaran target bank sentral, hal ini dapat memperkuat argumen untuk kembali memangkas suku bunga, meskipun laju kenaikan harga diperkirakan akan meningkat menjelang akhir tahun.

Amerika Latin

Di Peru, gambaran awal aktivitas ekonomi kuartal ketiga yang akan dirilis pada hari Selasa kemungkinan menunjukkan angka proksi PDB bulan Juli yang sejalan dengan bulan Juni, seiring fenomena cuaca El Niño yang terus memicu gangguan pasokan.

Ekonomi Peru mencatatkan pertumbuhan kuartal kedua yang sedikit lebih baik dari perkiraan, meskipun data bulan Juni menunjukkan kinerja yang lesu. Selain indikator aktivitas ekonomi bulanan, laporan ketenagakerjaan bulan Agustus untuk ibu kota negara juga dijadwalkan rilis; tingkat pengangguran di Lima sempat mencapai rekor terendah sebesar 4,7% pada bulan Juli.

Angka penjualan ritel dan data aktivitas ekonomi bulan Juli di Brasil menjadi penentu bagi keputusan suku bunga bank sentral pada hari Rabu. Para analis dan pelaku pasar memperkirakan para pembuat kebijakan, yang dipimpin oleh Gubernur Gabriel Galipolo, akan kembali memangkas suku bunga sebesar seperempat poin untuk kelima kalinya secara berturut-turut, sehingga membawa suku bunga Selic ke level 13,75%.

Kebijakan moneter yang ketat serta kondisi keuangan rumah tangga yang sudah mencapai batas kemampuan membuat ekonomi terbesar di Amerika Latin ini berada di jalur perlambatan pertumbuhan untuk tahun ketiga, meskipun inflasi yang berada di atas target dan ekspektasi inflasi yang sulit turun kemungkinan akan membatasi ruang gerak pembuat kebijakan.

Di Cili, risalah rapat bank sentral bulan September, yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di angka 4,5% untuk keenam kalinya secara berturut-turut, kemungkinan besar tidak akan menyimpang dari pandangan yang hati-hati dan bergantung pada kondisi tertentu sebagaimana disampaikan dalam pernyataan pasca-keputusan.

Lembaga tersebut telah memangkas perkiraan PDB tahun 2026 menjadi kisaran 0,25% hingga 0,75%, turun dari perkiraan sebelumnya yang berada di rentang 1% hingga 1,75%.

Laporan output kuartal kedua untuk Argentina kemungkinan akan menunjukkan ekonomi terbesar kedua di Amerika Selatan ini sedang mengalami kesulitan, dengan pertumbuhan yang tidak merata dan sebagian besar terkonsentrasi di sektor pertanian, energi, dan pertambangan.

Data proksi PDB hingga bulan Juni mengindikasikan adanya kontraksi kuartalan mendekati 1%, serta penurunan tajam dibandingkan angka pertumbuhan tahunan (yoy) sebesar 2,3% pada kuartal pertama.

Xi Jinping Dorong Greater BRICS Perkuat Kerja Sama Ekonomi Global South

Minggu, 13 September 2026 16:02 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/xi-jinping-dorong-greater-brics-perkuat-kerja-sama-ekonomi-global-south>

KONTAN.CO.ID - Presiden China Xi Jinping mendorong penguatan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota BRICS yang semakin luas atau “Greater BRICS”.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok negara berkembang itu dalam perekonomian dan tata kelola global.

Dalam KTT BRICS di New Delhi, India, Minggu (13/9/2026), Xi mengusulkan sejumlah inisiatif mulai dari kecerdasan buatan (AI) hingga perdagangan untuk memperdalam kerja sama antarnegara anggota.

Xi mengatakan, keberhasilan “Greater BRICS Initiative” bergantung pada terbentuknya fondasi yang kuat untuk kerja sama yang praktis.

“Greater BRICS” perlu meningkatkan kerja sama, menjaga stabilitas rantai industri dan pasokan, serta membangun pasar yang terintegrasi, kata Xi dalam sesi penutupan KTT, seperti dilaporkan kantor berita resmi China, Xinhua.

China juga akan memimpin pembentukan BRICS AI Open Source Zone. Inisiatif ini ditujukan untuk mendorong kerja sama dalam pengembangan large language models (LLM), pelatihan AI, serta ekosistem AI yang terbuka.

Selain itu, Xi mengusulkan kemitraan BRICS Special Economic Zone untuk memperkuat hubungan ekonomi antarnegara anggota.

China juga akan menjadi tuan rumah BRICS Service Trade Forum pada tahun depan guna meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi.

Peran BRICS Makin Luas

BRICS kini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan saat pertama kali dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan sekitar dua dekade lalu.

Kelompok tersebut kini mencakup Iran, Indonesia, Mesir, Ethiopia dan Uni Emirat Arab (UEA). Selain anggota penuh, BRICS juga memiliki 10 negara mitra dari kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah.

China dan Rusia terkadang menyebut kelompok yang lebih besar tersebut sebagai “Greater BRICS”.

Perluasan keanggotaan tersebut membuat BRICS memiliki jangkauan yang semakin besar di negara-negara Global South.

Kelompok ini juga berupaya memperkuat peran negara berkembang dalam sistem ekonomi dan politik internasional.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan manfaat dari berbagai solusi yang dikembangkan melalui BRICS seharusnya tidak hanya dinikmati oleh negara anggota, tetapi juga dapat diadaptasi dan diakses oleh negara-negara Global South.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut BRICS sebagai kekuatan pendorong menuju terbentuknya tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar.

Ia mendorong negara-negara anggota menggabungkan keunggulan kompetitif dari masing-masing perekonomian.

BRICS Soroti Konflik Timur Tengah

KTT BRICS berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk. Konflik melibatkan serangan balasan antara Amerika Serikat dan Iran serta serangan kelompok Houthi yang didukung Iran ke Arab Saudi.

Meski demikian, KTT BRICS pada Sabtu (12/9) berhasil mencapai kesepakatan atas deklarasi bersama yang turut didukung Iran dan UEA.

Dalam deklarasi tersebut, negara-negara BRICS menyatakan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi ketegangan yang terus berlangsung di Timur Tengah dan menyerukan semua pihak menahan diri secara maksimal.

Di sela-sela KTT, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Iran dan UEA sejak konflik dimulai.

Kedua pihak membahas upaya deeskalasi, stabilitas kawasan, serta langkah untuk mendorong perdamaian dan pembangunan regional.

Investasi Jerman Bergeser, China Jadi Pilihan

Minggu, 13 September 2026 15:55 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/investasi-jerman-bergeser-china-jadi-pilihan>

KONTAN.CO.ID – BERLIN. Perusahaan-perusahaan Jerman mengalihkan investasi dari Amerika Serikat (AS) ke China. Pada paruh pertama 2026, investasi Jerman di China meningkat sepertiga, sedangkan investasi di AS anjlok hampir dua pertiga.

Berdasarkan studi Institut Ekonomi Jerman (IW) yang mengacu pada data Bundesbank, perusahaan Jerman menambah investasi di China sebesar €5,6 miliar atau sekitar US\$6,5 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Mengutip laporan Reuters (13/9), Ekonom IW Juergen Matthes mengatakan China tetap menjadi pasar penting bagi perusahaan Jerman. Selain sebagai pasar penjualan, China juga menjadi tempat bagi perusahaan Jerman memperkuat daya saing menghadapi kompetitor lokal.

Menurut Matthes, subsidi pemerintah dan nilai yuan yang dinilai terlalu rendah membuat biaya produksi di China relatif murah. Kondisi ini mendorong perusahaan Jerman memperluas kegiatan produksi di China agar mampu bersaing di pasar global.

Namun, peningkatan investasi tersebut berisiko mempercepat pergeseran aktivitas produksi dan lapangan kerja dari Jerman ke China. Kondisi ini menjadi tantangan bagi industri Jerman dalam mempertahankan basis produksinya di dalam negeri.

Matthes menilai Uni Eropa perlu merespons praktik perdagangan yang dianggap tidak adil tersebut. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menerapkan bea masuk penyeimbang terhadap produk impor dari China.

Sementara itu, investasi perusahaan Jerman di AS turun hampir dua pertiga menjadi sekitar €4,3 miliar pada paruh pertama 2026. Penurunan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump.

Perubahan tersebut menunjukkan perusahaan Jerman mulai menata ulang strategi investasinya di tengah ketidakpastian perdagangan global. China tetap menarik karena pasar dan basis produksinya, sedangkan kebijakan tarif AS meningkatkan risiko ekspansi di negara tersebut.

Indeks Ekspektasi Makroekonomi Triwulan III-2026 Makin Pesimis

Minggu, 13 September 2026 18:20 WIB

Reporter: Selvi Mayasari, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-ekspektasi-makroekonomi-triwulan-iii-2026-makin-pesimis>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi makroekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 semakin memburuk.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) yang turun ke level 28, dari 37 pada triwulan sebelumnya.

Berdasarkan laporan Survei Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (SBPO) Triwulan III-2026, IKM berada di zona pesimistis.

Penurunan tersebut dipengaruhi prediksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta peningkatan inflasi.

Pelaku usaha memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan III-2026 akan lebih moderat dibandingkan realisasi triwulan II-2026.

Kondisi ini sejalan dengan berakhirnya sejumlah faktor musiman yang sebelumnya menopang aktivitas ekonomi.

Pada triwulan I-2026, momentum Ramadan dan Idulfitri mendorong konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, serta belanja pemerintah.

Sementara itu, pada triwulan II-2026, aktivitas ekonomi kembali didukung oleh periode libur sekolah yang meningkatkan konsumsi dan pergerakan masyarakat.

Setelah faktor musiman tersebut berakhir, aktivitas ekonomi pada triwulan III-2026 diperkirakan kembali ke pola normal sehingga pertumbuhan cenderung melambat.

Indikasi perlambatan konsumsi masyarakat juga tercermin dari Survei Konsumen Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 117,8 pada Juni 2026 menjadi 116,8 pada Juli 2026.

Penurunan tersebut mengindikasikan masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh inflasi yang masih tinggi dan menekan daya beli, khususnya kelompok masyarakat menengah yang belum sepenuhnya pulih.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga global berpotensi menahan kinerja ekspor, investasi, serta aktivitas usaha.

Meski demikian, perekonomian Indonesia diperkirakan masih tumbuh positif pada triwulan III-2026. Salah satu indikasinya adalah Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang tercatat sebesar 50,2 pada Juli 2026.

Capaian tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih berada di zona ekspansi, meski dengan laju yang lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya.

BI Rate Diperkirakan Naik

Dari sisi suku bunga, BI-Rate diperkirakan cenderung meningkat seiring upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih berlanjut akibat suku bunga global yang tetap tinggi dan terbatasnya ruang pelonggaran suku bunga The Federal Reserve.

Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia menjaga daya tarik aset domestik sekaligus memitigasi risiko arus modal keluar.

Di sisi domestik, inflasi yang telah mendekati batas atas sasaran, kenaikan harga energi, serta peningkatan biaya produksi turut meningkatkan risiko imported inflation dan tekanan harga lanjutan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih cukup solid, Bank Indonesia dinilai memiliki ruang untuk memprioritaskan stabilitas.

Kenaikan BI-Rate pada triwulan III-2026 diperkirakan bersifat pre-emptive untuk menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi.

Sebagai informasi, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20–21 Juli 2026 memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 5,75%. Sebelumnya, BI-Rate telah meningkat 100 basis poin dari level 4,75%.

Inflasi dan Rupiah Jadi Perhatian

Inflasi September 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi Juni 2026 yang sebesar 3,34% secara tahunan. Kenaikan inflasi diperkirakan lebih banyak berasal dari sisi harga, sementara permintaan masyarakat masih moderat.

Kenaikan harga diproyeksikan terjadi secara menyeluruh, terutama akibat kenaikan harga energi global serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur. Kondisi tersebut berpotensi diteruskan ke biaya transportasi, produksi, dan logistik.

Depresiasi nilai tukar rupiah juga berpotensi meningkatkan harga barang impor. Selain itu, fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III hingga triwulan IV-2026 dapat mendorong kenaikan harga pangan secara signifikan.

Sebagai pembanding, inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,88%, menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama didorong oleh kelompok volatile food yang mengalami deflasi.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada September 2026 diperkirakan melemah dibandingkan posisi Rp17.856 per dolar AS pada 30 Juni 2026.

Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian global, penguatan dolar AS, kebijakan moneter Amerika Serikat yang cenderung ketat, serta tingginya imbal hasil US Treasury.

Kondisi ini meningkatkan daya tarik aset berdenominasi dolar dan mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang.

Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Hal tersebut dapat meningkatkan kebutuhan impor migas Indonesia, menekan neraca perdagangan dan transaksi berjalan, serta memperbesar kebutuhan valuta asing domestik.

Dari sisi domestik, tekanan rupiah juga berasal dari meningkatnya kebutuhan valas untuk pembayaran impor, utang luar negeri, dan repatriasi dividen, serta kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan prospek pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, pelemahan rupiah diperkirakan relatif terbatas. Kebijakan stabilisasi Bank Indonesia melalui intervensi di pasar valuta asing, tingkat suku bunga domestik yang tetap menarik, serta dukungan cadangan devisa yang memadai diharapkan dapat meredam volatilitas nilai tukar.

Konsumsi Masih Jadi Andalan Ekonomi, Namun Daya Dorongnya Mulai Berkurang

Minggu, 13 September 2026 18:19 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/konsumsi-masih-jadi-andalan-ekonomi-namun-daya-dorongnya-mulai-berkurang>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia memasuki kuartal IV 2026. Namun, kualitas penopang konsumsi mulai mendapat perhatian seiring meningkatnya porsi pendapatan yang dibelanjakan dan menurunnya porsi pendapatan yang ditabung.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini bukan konsumsi yang tiba-tiba melemah, melainkan kualitas penopangnya yang mulai berkurang.

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan optimisme masyarakat membaik. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2026 naik menjadi 118,5, sementara Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini mencapai 109,4.

Namun, pada saat yang sama, porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi meningkat dari 72,7% menjadi 74,2%. Sebaliknya, porsi pendapatan yang ditabung turun dari 16,8% menjadi 15,8%.

"Jadi konsumsi sedang kuat, tetapi sebagian penguatannya berasal dari rumah tangga yang menyisihkan bagian pendapatan lebih kecil untuk tabungan," ujar Josua kepada Kontan, Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, penurunan porsi tabungan tersebut belum berarti masyarakat secara agregat telah mencairkan stok tabungan lama. Namun, kondisi itu menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk membentuk tabungan baru mulai melemah.

Indikator Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menunjukkan hal serupa. Indeks kemauan menabung (IMK) pada Agustus 2026 menguat 1,6 poin secara bulanan menjadi 79,4, tetapi indeks kemampuan menabung (IKPM) justru turun 0,2 poin menjadi 71,8.

Josua menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan bukan terletak pada keinginan masyarakat untuk menabung, melainkan semakin sempitnya ruang pendapatan yang dapat disisihkan.

"Ini berarti persoalannya bukan masyarakat tidak ingin menabung, tetapi ruang pendapatannya untuk menabung semakin sempit," katanya.

Di sisi lain, membaiknya optimisme konsumen belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan belanja riil. Penjualan eceran pada Agustus diperkirakan hanya tumbuh 0,5% secara tahunan dan masih turun 0,1% secara bulanan.

Josua menilai, konsumsi rumah tangga juga dinilai tidak dapat menopang pertumbuhan ekonomi sendiri secara berkelanjutan.

Konsumsi rumah tangga memiliki porsi sekitar 53,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar pada kuartal II 2026, yakni sekitar 2,67 poin persentase.

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki bobot sekitar 29,36% terhadap PDB. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga dan PMTB secara bersama-sama mencapai sekitar 82,68% dari struktur PDB berdasarkan sisi pengeluaran.

Menurut Josua, besarnya porsi tersebut membuat investasi tidak dapat dipandang sekadar sebagai mesin tambahan pertumbuhan. Investasi berperan dalam membentuk kapasitas produksi, produktivitas, lapangan kerja dan pendapatan yang pada akhirnya menopang konsumsi.

"Konsumsi menentukan permintaan hari ini, sedangkan investasi menentukan kapasitas produksi, produktivitas, pekerjaan dan pendapatan yang akan membiayai konsumsi besok," jelasnya.

Josua menilai, jika konsumsi terus meningkat sementara PMTB melemah, ekonomi masih dapat terlihat kuat dalam beberapa triwulan. Namun, kondisi tersebut berisiko mengurangi fondasi pertumbuhan pada periode berikutnya.

Dari sisi investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) sebenarnya belum mengalami kontraksi. Investasi asing langsung pada triwulan II 2026 mencapai sekitar US\$15,6 miliar, tumbuh 23,6% secara tahunan dan sekitar 3,1% secara kuartalan. Secara semester I 2026, PMA tumbuh 13,8%.

Titik lemah justru terlihat pada investasi domestik. Investasi domestik turun 7,8% secara tahunan pada triwulan II 2026 dan sekitar 1,4% selama semester I.

"Jadi kekhawatiran saya lebih tepat diarahkan pada momentum pembentukan modal secara keseluruhan dan lemahnya investasi domestik, bukan menyimpulkan bahwa PMA sudah melemah tajam," ujar Josua.

Setelah PMTB tumbuh 6,87% pada kuartal II 2026, Josua memperkirakan pertumbuhannya melambat menjadi sekitar 5,53% pada kuartal III dan 5,61% pada kuartal IV.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun dari 5,29% pada kuartal II menjadi 5,14% pada kuartal III dan 5,03% pada kuartal IV. Dengan proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan sekitar 5,26%, di bawah sasaran APBN sebesar 5,4%.

Josua menilai risiko target pertumbuhan ekonomi 2026 meleset sudah muncul bahkan tanpa tambahan pelemahan investasi.

Dalam simulasinya, apabila pertumbuhan PMTB pada kuartal IV hanya sekitar 3,5%, dibandingkan proyeksi 5,61%, pertumbuhan PDB kuartal IV secara mekanis dapat kehilangan sekitar 0,6 poin persentase dengan asumsi komponen lainnya tidak berubah.

Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi setahun diperkirakan sekitar 0,15 poin persentase. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan 5,26% dapat turun mendekati 5,1%.

Jika pertumbuhan PMTB hanya berada di kisaran 2,5%-3% dan konsumsi rumah tangga turut melemah akibat semakin tipisnya tabungan, pertumbuhan ekonomi setahun berpotensi bergerak ke sekitar 5%.

"Dengan skenario tersebut, target 5,4% berpotensi meleset sekitar 0,3-0,4 poin persentase," kata Josua.

Tantangan lainnya berasal dari biaya pembiayaan. Meskipun BI Rate telah berada di level 5,75%, rata-rata tertimbang suku bunga kredit justru naik dari 8,79% pada Juni menjadi 8,86% pada Juli 2026.

Josua mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan persoalan tidak semata-mata terletak pada jumlah likuiditas di sistem keuangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan likuiditas berubah menjadi kredit dengan biaya lebih murah dan selanjutnya mendorong investasi riil.

"Jadi masalahnya kini bukan semata-mata jumlah uang di sistem, tetapi seberapa cepat likuiditas tersebut berubah menjadi kredit dengan harga lebih murah dan kemudian berubah lagi menjadi investasi riil," ujarnya.

Josua memperkirakan impor riil pada 2026 tumbuh sekitar 6,42%, jauh lebih cepat dibandingkan ekspor yang diperkirakan hanya tumbuh sekitar 2,16%.

Menurutnya, pola tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi berisiko meningkatkan kebutuhan devisa dan membuat kapasitas produksi domestik tidak bertambah secepat permintaan.

Karena itu, pemerintah dinilai tidak perlu kembali mengandalkan stimulus konsumsi besar-besaran pada kuartal IV. Dukungan terhadap daya beli tetap diperlukan, terutama bagi kelompok bawah dan menengah, tetapi perlu diarahkan agar rumah tangga tidak terus mengorbankan tabungan.

Di saat yang sama, dorongan kebijakan perlu dialihkan pada investasi yang dapat direalisasikan dengan cepat. Proyek yang perizinan, lahan dan pendanaannya telah siap perlu dipercepat, sementara investasi yang telah memperoleh komitmen perlu didorong masuk ke tahap konstruksi.

Belanja modal pemerintah juga perlu dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Sementara itu, hambatan listrik, logistik dan perizinan di kawasan industri perlu dibenahi.

Dari sisi moneter, Josua menilai insentif likuiditas BI perlu semakin dikaitkan dengan tambahan kredit investasi dan penurunan suku bunga kredit yang benar-benar diterima debitur, khususnya pada sektor manufaktur, ekspor, pangan, perumahan dan UMKM produktif.

"Konsumsi masih cukup kuat untuk mencegah perlambatan tajam pada 2026, tetapi tidak cukup sehat apabila harus terus disokong dengan penurunan porsi tabungan," pungkas Josua.

Tabungan Masyarakat Menipis, Investasi Perlu Digenjot Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Minggu, 13 September 2026 18:14 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/tabungan-masyarakat-menipis-investasi-perlu-digenjot-jaga-pertumbuhan-ekonomi>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Namun, penguatan konsumsi mulai dibayangi oleh penurunan porsi tabungan masyarakat.

Kondisi ini membuat investasi dituntut lebih kuat untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, konsumsi yang menguat dan investasi yang belum optimal sebenarnya bukan dua kondisi yang bertentangan.

Menurutnya, Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2026 menunjukkan keyakinan masyarakat kembali membaik. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2026 tercatat 118,5, sementara Indeks Kondisi Ekonomi(IKE) Saat Ini mencapai 109,4.

"Porsi pendapatan yang dibelanjakan juga naik menjadi 74,2%. Artinya, permintaan domestik masih cukup kuat," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (13/9/2026).

Meski demikian, ada catatan dari penguatan konsumsi tersebut. Porsi pendapatan yang ditabung turun dari 16,8% pada Agustus 2026, menjadi 15,8%. Sementara itu, porsi pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan relatif stabil di sekitar 10%.

Yusuf menilai, kondisi tersebut menunjukkan konsumsi masih didorong optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Namun, ruang keuangan rumah tangga mulai sedikit menyempit.

Jika pendapatan dan lapangan kerja tetap kuat, konsumsi masih dapat bertahan. Sebaliknya, jika tabungan terus tergerus tanpa diikuti peningkatan pendapatan, konsumsi akan sulit menjadi penopang pertumbuhan dalam jangka panjang.

Di tengah kondisi tersebut, investasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026.

Menurut Yusuf, realisasi investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II 2026 masih cukup baik, yakni tumbuh sebesar 6,87%% dengan porsi kontribusi atau distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 29,36%.

Namun menurutnya, persoalan investasi saat ini lebih terletak pada kecepatan dan kualitas transmisinya terhadap aktivitas ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, tantangan investasi bukan semata-mata mengejar nilai realisasi, tetapi memastikan investasi tersebut benar-benar masuk ke sektor produktif dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Ia mencatat, salah satu kendala yang masih membayangi investasi adalah biaya pembiayaan. Sebagaimana diketahui, BI-Rate saat ini berada di level 5,75%, sementara rata-rata suku bunga kredit perbankan pada Juni 2026 masih mencapai 8,81%.

Yusuf mengatakan, penurunan suku bunga acuan tidak otomatis membuat bunga kredit menjadi murah. Perbankan tetap memperhitungkan biaya dana, risiko kredit, serta kondisi likuiditas.

"Jadi, tantangannya sekarang bukan hanya bagaimana menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga memastikan pelanggaran kondisi moneter benar-benar diteruskan ke sektor produktif," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf juga menilai konsumsi yang ditopang tabungan yang lebih tipis masih dapat menjaga pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu. Namun, konsumsi tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan dalam jangka panjang.

Konsumsi rumah tangga memiliki bobot lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga perubahan konsumsi akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, apabila tabungan terus menurun sementara investasi tidak meningkat, konsumsi pada akhirnya akan kehilangan tenaga.

Menurut dia, risiko yang perlu diwaspadai bukan kontraksi ekonomi secara mendadak. Risiko yang lebih besar adalah pertumbuhan berhenti di kisaran 5% dan sulit naik ke level yang lebih tinggi.

Karena itu, peluang target pertumbuhan ekonomi 2026 terlewat akan sangat bergantung pada kinerja investasi pada paruh kedua tahun ini.

Jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV mampu bertahan di kisaran 5,2%-5,4%, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4% sebagaimana yang tercantum dalam APBN 2026 masih cukup realistis.

Namun, untuk mencapai pertumbuhan 5,6% atau lebih, konsumsi rumah tangga saja tidak cukup. Investasi swasta perlu bergerak lebih cepat, terutama investasi yang meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja.

"Untuk mencapai 5,6% atau lebih, konsumsi saja tidak cukup. Investasi swasta harus lebih cepat, terutama investasi yang meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja," pungkas Yusuf.

Penerimaan Pajak Seret, Kenaikan Harga Minyak Bisa Perparah Defisit APBN

Minggu, 13 September 2026 17:45 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-seret-kenaikan-harga-minyak-bisa-perparah-defisit-apbn>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Agustus baru mencapai 59,8% dari target.

Capaian tersebut berada di bawah rata-rata historis yang biasanya mencapai 64%-66% pada periode yang sama.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mengatakan, rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut perlu menjadi perhatian karena membuka potensi terjadinya shortfall penerimaan negara.

"Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rata-rata realisasi penerimaan pajak hingga Agustus mencapai 64%-66%. Realisasi saat ini baru 59,8% jadi berada di bawah realisasi historis," ujar Telisa kepada Kontan.co.id Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai pola historis. Salah satunya adalah target penerimaan yang kemungkinan ditetapkan terlalu agresif, terutama karena terdapat asumsi dampak implementasi Coretax serta asumsi makroekonomi yang relatif optimistis.

Selain itu, perlambatan harga komoditas global dan kondisi geopolitik turut menekan perekonomian nasional. Kondisi tersebut dapat menurunkan kapasitas ekonomi dalam menghasilkan penerimaan pajak.

Tekanan juga datang dari sisi konsumsi dan dunia usaha. Perlambatan daya beli masyarakat serta aktivitas dunia usaha dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak.

Harga Minyak Jadi Risiko Tambahan

Telisa menilai persoalan penerimaan pajak tersebut dapat semakin kompleks apabila terjadi kenaikan harga minyak.

Menurutnya, kombinasi antara potensi shortfall penerimaan dengan kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan tambahan terhadap defisit APBN. Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi energi pemerintah.

"Beberapa pengamat APBN dan fiskal menyoroti kemungkinan potensi shortfall dan melebarnya defisit APBN akibat shortfall ditambah naiknya harga minyak yang bisa menekan subsidi energi," katanya.

Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal pemerintah dapat semakin tertekan. Meski demikian, pemerintah disebut akan terus menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di tengah potensi tekanan terhadap APBN, Telisa menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kemungkinan keuntungan Danantara yang dapat masuk ke APBN.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah telah menyiapkan alternatif untuk mengantisipasi potensi kesenjangan penerimaan dan belanja negara.

"Makanya ada pernyataan dari Menkeu bahwa Danantara keuntungannya bisa masuk APBN sepertinya sudah berjaga-jaga untuk menutup gap ini," pungkasnya.

Penerimaan Pajak Baru 59,8% hingga Agustus 2026, Risiko Shortfall Mengintai

Minggu, 13 September 2026 15:48 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-baru-598-hingga-agustus-2026-risiko-shortfall-mengintai>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2026 yang baru mencapai 59,8% dari target dinilai masih berada di bawah capaian ideal.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menyebut, secara proporsional penerimaan pajak seharusnya sudah mencapai sekitar 66% pada akhir bulan kedelapan.

"Realisasi sebesar 59,8% hingga bulan ke-8 ini memang menunjukkan adanya perlambatan struktural, mengingat benchmark proporsional idealnya sudah menyentuh kisaran 66% pada akhir Agustus," ujar Ariawan kepada Kontan.co.id, Minggu (13/9).

Berdasarkan perhitungan Kontan, penerimaan pajak hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp 1.409,1 triliun. Angka tersebut dihitung dari realisasi penerimaan pajak Januari-Agustus 2025 sebesar Rp 1.135,4 triliun yang kemudian tumbuh secara tahunan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 secara kumulatif tumbuh 24,1% secara tahunan atau year on year (yoy).

Meski mencatat pertumbuhan secara tahunan, Ariawan menilai laju penerimaan tersebut belum cukup untuk menghapus kekhawatiran terhadap pencapaian target hingga akhir tahun.

Menurutnya, berdasarkan lintasan penerimaan saat ini, terdapat potensi shortfall sebesar Rp 46,9 triliun. Bahkan, dalam skenario moderat-pesimis, kekurangan penerimaan tersebut berpotensi melebar hingga Rp 140 triliun pada akhir 2026.

Ariawan juga menilai persoalan penerimaan pajak tidak semata-mata berkaitan dengan pertumbuhan nominal. Menurutnya, target penerimaan 2026 disusun dengan asumsi yang cukup agresif.

Ia menyebut pemerintah mengandalkan asumsi tax buoyancy, implementasi Coretax, serta ekstensifikasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk mendorong penerimaan.

"Penentuan target APBN 2026 sebenarnya tidak dapat dikatakan sepenuhnya tidak realistis. Hanya saja, pemerintah terlalu percaya diri," katanya.

Di tengah pelemahan harga komoditas dan moderasi konsumsi, Ariawan menilai target yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan tekanan terhadap dunia usaha.

"Mematok target yang teralienasi dari kapasitas fundamental makroekonomi akan merusak asas kepastian dan kenyamanan," katanya.

Selain itu, tekanan untuk mengejar kekurangan penerimaan dalam empat bulan terakhir berpotensi mendorong otoritas melakukan upaya ekstra.

"Untuk menutup gap 40% lebih hanya dalam tempo empat bulan tersisa, otoritas akan terpaksa melakukan extra effort yang eksekutif," kata Ariawan.

Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah. Ariawan mengatakan postur APBN 2026 dirancang cukup ketat dengan batas persetujuan defisit di rentang 2,48%-2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jika shortfall penerimaan mencapai Rp 140 triliun, defisit APBN 2026 berpotensi melebar ke kisaran 2,7%-2,85% terhadap PDB.

Ariawan menilai pemerintah berada dalam posisi dilematis untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah batas legal 3%.

Pemerintah perlu memilih antara melakukan spending review dengan memangkas belanja kementerian yang tidak menjadi prioritas secara signifikan pada kuartal terakhir, atau menambah pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Namun, opsi penerbitan SBN tambahan juga memiliki konsekuensi karena dapat meningkatkan leverage utang pemerintah dan berpotensi menambah beban bunga negara seiring kenaikan yield SBN.

Bank Indonesia Gelar Puncak PUSAKA 2026 Untuk Dorong Pariwisata dan Ekonomi Jateng

Minggu, 13 September 2026 17:19 WIB

Oleh : Tj Sutrisno

<https://semarang.viva.co.id/jawa-tengah/7846-bank-indonesia-gelar-puncak-pusaka-2026-untuk-dorong-pariwisata-dan-ekonomi-jateng>

Viva Semarang – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menggelar acara Puncak PUSAKA JATENG (Forum Perumusan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Jawa Tengah) 2026 di Semarang pada Jumat (11/9/2026).

Program ini mengangkat tema “Transformasi Pariwisata Jawa Tengah sebagai Sumber Pertumbuhan Baru yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Gelaran kelima ini menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis riset guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Acara puncak ini menutup seluruh rangkaian agenda PUSAKA JATENG 2026 yang diisi dengan kegiatan Road to Forum sejak Maret 2026, Call for Paper, serta Workshop Karya Tulis Ilmiah. Forum ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho. Pusaka Jateng juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen, serta Menteri Pariwisata periode 2020–2024, Sandiaga Salahuddin Uno.

Dalam pidato pembukanya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, menggarisbawahi pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Ia memaparkan dua area penguatan sektor ekonomi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja tinggi.

Area pertama menyasar sektor penopang utama seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sementara area kedua berfokus pada sektor dengan pertumbuhan relatif tinggi dan berkapasitas menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri akomodasi serta penyediaan makan dan minum yang berkorelasi erat dengan sektor pariwisata.

"Upaya memperkuat sumber pertumbuhan baru sehingga mampu mendorong sektor terkait berkontribusi lebih besar dapat dilakukan dalam kerangka teori ekonomi dengan pendekatan fungsi Cobb Douglas. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan output dipengaruhi oleh tiga variabel utama yaitu kapital atau investasi, tenaga kerja, dan teknologi atau inovasi," tegas M. Noor Nugroho.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen, memberikan apresiasi atas kontribusi Forum PUSAKA JATENG 2026 dalam melahirkan rekomendasi ilmiah bagi pengambilan kebijakan daerah. Ia menegaskan bahwa pariwisata memegang peran vital untuk menggerakkan perekonomian masyarakat secara langsung melalui pemberdayaan UMKM dan optimalisasi potensi wisata religi yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.

"Dengan harapan mereka berkunjung ke Jawa Tengah, melihat potensi Jawa Tengah, dan menginvestasikan kekayaannya untuk tumbuh di Jawa Tengah," ujar Taj Yasin mengenai pentingnya dampak nyata pariwisata terhadap perekonomian dan investasi lokal.

Dari sudut pandang industri pariwisata, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan perubahan paradigma dalam mengukur keberhasilan sektor ini. Menurutnya, indikator kualitas pariwisata tidak lagi bertumpu hanya pada kuantitas angka kunjungan semata, melainkan pada durasi tinggal (length of stay) serta tingkat kunjungan berulang (repeat visit) para wisatawan di Jawa Tengah.

Sesi diskusi panel yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Jateng-DIY, Farodillah Muqoddam, turut menghadirkan pakar dan praktisi terkemuka. Wakil Gubernur Bali periode 2018–2023, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, membagikan resep keberhasilan Bali dalam membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan.

Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, memaparkan strategi pengembangan pariwisata ramah muslim berbasis desa. Sementara itu, Wakil Ketua ISEI Cabang Semarang, Prof. Firmansyah, mengulas formulasi optimalisasi sektor pariwisata demi mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, kompetisi Call for Papers PUSAKA JATENG 2026 berhasil menyaring enam karya tulis ilmiah terbaik yang mencakup isu pariwisata, ekonomi kreatif perdesaan, ekonomi hijau, hingga digitalisasi pemerintah daerah. Rekomendasi implementatif dari karya ilmiah ini diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk bunga rampai untuk ditindaklanjuti dalam forum diskusi teknis penentuan kebijakan mendatang. (TJ)

Injeksi Rp1,2 Triliun: MTQ Nasional XXXI Jawa Tengah Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pelaksanaan

Minggu, 13 September 2026 21:49 WIB

Lely Suryani, Qubaca

<https://www.qubaca.id/ekonomi/1107517967/injeksi-rp12-triliun-mtq-nasional-xxxi-jawa-tengah-jadi-katalis-pertumbuhan-ekonomi-daerah-pelaksanaan>

QUBACA.ID - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI tahun 2026 di Jawa Tengah ditaksir mampu menginjeksikan arus modal hingga Rp1,2 triliun ke perekonomian lokal.

Berlangsung pada 11–20 September 2026, gelaran ini menyedot pergerakan massal ribuan delegasi, pejabat, dan pengunjung dari seluruh penjuru Nusantara.

Selain mengemban misi pembinaan keagamaan, perhelatan berfluktuasi tinggi ini memicu dampak pengganda (multiplier effect) pada sektor akomodasi, logistik, transportasi, kuliner, hingga rantai pasok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dampak ekonomi hajatan ini agar dapat dinikmati masyarakat luas.

Strategi konkret diwujudkan lewat Pameran MTQ Nasional XXXI di Gajah Mada Plaza, kawasan Simpang Lima, Semarang, yang resmi dibuka pada Sabtu (12/9/2026).

Ajang tersebut menampilkan komoditas unggulan dan kerajinan lokal dari berbagai penjuru tanah air.

Melalui integrasi pasar ini, ruang promosi tidak lagi terbatas pada pelaku usaha domestik Jawa Tengah, tetapi juga memfasilitasi ekspansi produk unggulan luar daerah.

Pelibatan entitas UMKM lintas provinsi ini dinilai krusial dalam membangun ekosistem bisnis inklusif.

Pertemuan langsung antara produsen dan konsumen potensial dari skala nasional diyakini mampu mentransformasikan interaksi jangka pendek menjadi kemitraan dagang strategis pascamedan kompetisi berakhir.

Para anggota kafilah dari Sumatra hingga Papua didorong menjadikan pameran ini sebagai sarana integrasi komersial, membawa pulang produk lokal sekaligus membuka jalur distribusi baru antarwilayah.

Estemasi nilai transaksi Rp1,2 triliun dihitung dari lonjakan belanja barang dan jasa selama sepuluh hari pelaksanaan.

Mobilisasi 2.242 peserta dari 37 provinsi yang bertanding dalam 8 cabang dan 48 kategori musabaqah secara otomatis mengerek tingkat okupansi hotel, volume transportasi, serta perputaran omzet di sektor ritel dan UMKM kuliner.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis bahwa efek domino penyelenggaraan ini akan melampaui durasi acara. Jaringan bisnis yang terkoneksi selama gelaran diharapkan mengkrystal menjadi kolaborasi antardaerah yang berkelanjutan.

Hasilnya, MTQ Nasional XXXI tidak sekadar sukses secara spiritual, tetapi juga meninggalkan warisan struktur ekonomi lokal yang lebih tangguh dan terkoneksi secara nasional.(LS)

Batang Masuk Tiga Besar Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Ternyata Ini Sektor Penggeraknya

Minggu, 13 September 2026 18:06 WIB

Penulis: Lutfi Ramadhan

<https://cilacap.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-23910446607/batang-masuk-tiga-besar-pertumbuhan-ekonomi-nasional-ternyata-ini-sektor-penggeraknya?page=all>

CilacapUpdate.com — Perekonomian Kabupaten Batang menunjukkan laju yang mencolok pada paruh pertama 2026. Pertumbuhan ekonomi Batang pada Triwulan II 2026 mencapai 8,38 persen, jauh melampaui target pemerintah daerah sekaligus berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Angka tersebut melampaui target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang dipatok pada kisaran 6,35-6,50 persen. Sebagai pembandingan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode yang sama tercatat sebesar 5,65 persen.

Capaian Batang bahkan menempatkan daerah tersebut dalam tiga besar pertumbuhan ekonomi daerah secara nasional. Batang berada di bawah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Batang Bagus Pambudi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakorpok) Triwulan II 2026 di Aula Bupati Batang, Kamis (10/9/2026).

Empat Sektor Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Batang

Bagus mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi Batang tidak terlepas dari kinerja sejumlah sektor utama.

Setidaknya ada empat sektor yang menjadi motor penggerak perekonomian daerah hingga pertengahan 2026, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi.

Keempat sektor tersebut menjadi penopang aktivitas ekonomi sekaligus menunjukkan semakin beragamnya sumber pertumbuhan di Kabupaten Batang.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan menjadi salah satu faktor penting mengingat aktivitas industri memiliki efek berantai terhadap perdagangan, jasa, tenaga kerja, hingga sektor pendukung lainnya.

Di sisi lain, sektor pertanian tetap memiliki peran strategis, terutama dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menopang ketahanan pangan daerah.

Kinerja Program Pemkab Batang Capai 87,19 Persen

Tidak hanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Batang hingga Triwulan II 2026 juga menunjukkan capaian positif.

Bagus menyebut rata-rata capaian kinerja program dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang mencapai 87,19 persen. Secara keseluruhan, capaian tersebut masuk kategori tinggi.

Dari seluruh indikator yang dievaluasi, sebanyak 185 indikator atau sekitar 74 persen telah mencapai kategori sangat tinggi.

Sementara dari 44 perangkat daerah yang menjadi objek evaluasi, sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk kategori kinerja sangat tinggi dan 16 OPD berada pada kategori tinggi.

"Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang hingga Triwulan II Tahun 2026 masuk dalam kriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian kinerja program mencapai 87,19 persen," ujar Bagus.

Meski mayoritas indikator menunjukkan hasil positif, Pemkab Batang masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah.

Bapperida mencatat terdapat 38 indikator kinerja program yang masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Indikator tersebut tersebar pada 21 OPD dan kecamatan.

38 Indikator Jadi Perhatian hingga Akhir 2026

Bagus meminta seluruh OPD teknis tidak terlena dengan capaian positif yang telah diraih. Evaluasi harus segera dilakukan agar indikator yang masih rendah dapat dikejar sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan. Di antaranya persoalan perizinan sarana kesehatan, proses peremajaan sertifikasi tenaga konstruksi, faktor cuaca yang memengaruhi produksi hortikultura, hingga keterbatasan sarana pendukung di tingkat kecamatan.

"Terdapat 38 indikator kinerja program yang masih perlu perhatian dan upaya keras bersama agar target kinerja tahun 2026 dapat tercapai secara optimal di akhir tahun," kata Bagus.

Menurut dia, percepatan kinerja tersebut penting agar capaian pembangunan tidak hanya terlihat dari indikator makro berupa pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terasa pada pelaksanaan program dan pelayanan masyarakat.

Batang Alokasikan Rp13,52 Miliar untuk Ketahanan Pangan

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemkab Batang juga mempertahankan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,52 miliar untuk memperkuat sektor ketahanan pangan.

Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan cadangan pangan, hingga penanganan kerawanan pangan.

Kebijakan tersebut menjadi penting karena sektor pertanian merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Batang. Penguatan infrastruktur pertanian diharapkan dapat menjaga produktivitas sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

Batang Raih Pengakuan di Tingkat Nasional

Kinerja pembangunan Kabupaten Batang juga mendapat sejumlah apresiasi di tingkat provinsi dan nasional.

Kabupaten Batang berhasil masuk sebagai finalis Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah 2026.

Tidak hanya itu, Batang juga mencatat prestasi dalam Evaluasi Program Stunting Nasional (ProSN). Kabupaten Batang menempati peringkat ke-14 nasional dari 546 pemerintah daerah yang mengikuti evaluasi tersebut.

Batang memperoleh nilai 90,83, sekaligus menjadi salah satu dari hanya dua kabupaten di Jawa Tengah yang berhasil masuk jajaran papan atas nasional.

Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8,38 persen, kinerja program pembangunan yang mencapai 87,19 persen, serta berbagai capaian nasional tersebut menjadi modal penting bagi Batang untuk menjaga momentum pembangunan hingga akhir 2026.

Namun, pemerintah daerah masih harus memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan penyelesaian 38 indikator yang belum optimal agar hasil pembangunan semakin merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kudus gandeng KJPP menilai aset berpotensi PAD untuk ditawarkan kepada swasta

Minggu, 13 September 2026 13:44 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

https://jateng.antaranews.com/berita/645073/kudus-gandeng-kjpp-menilai-aset-berpotensi-pad-untuk-ditawarkan-kepada-swasta?utm_source=chatgpt.com

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian sejumlah aset daerah yang berpotensi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang pengelolaannya nanti ditawarkan kepada swasta.

"Setelah sebelumnya ada dua aset daerah yang diminati swasta, yakni Objek Wisata Taman Krida Wisata dan objek wisata Taman Ria, nantinya akan ada beberapa objek aset yang akan ditawarkan kepada pihak swasta," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Minggu.

Di antaranya, kata dia, ada Museum Kretek, Kolam Renang dan kawasan Balai Jagong, dan Hotel Graha Mulia Colo.

Sebelumnya, kata Sekda Kudus, pemerintah kabupaten terlebih dahulu melakukan penilaian atas aset tersebut dengan menggandeng KJPP, seperti halnya saat melakukan penilaian terhadap aset objek wisata Taman Krida Wisata dan Taman Ria Colo.

Untuk penganggarannya, diusulkan melalui APBD Perubahan 2026. Sedangkan yang melaksanakan kegiatan tersebut dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Ia berharap dengan kebijakan tersebut, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena pihak swasta berani menawar tinggi dan melebihi pemasukan ketika masih dikelola secara mandiri oleh Pemkab Kudus.

Misal, realisasi PAD Taman Krida Wisata tahun 2025 saja tercatat hanya Rp117,69 juta, meliputi tiket masuk Rp90,64 juta, dan water pool Rp27,05 juta. Sedangkan pihak swasta sesuai kesepakatan dengan Pemkab Kudus berani menyewa dengan tarif sebesar Rp677 juta setiap tahunnya.

Kawasan wisata yang memiliki luas sekitar 17.000 meter persegi atau 1,7 hektare yang sebelumnya tersedia sejumlah fasilitas akan diperbaiki dan tambah wahana permainan, cafe, dan taman lampion.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah membenarkan bahwa sejumlah aset, seperti Museum Kretek, Terminal Kargo, Terminal Klaling, dan beberapa aset lainnya memang akan dilakukan penaksiran nilai asetnya.

Hasil penaksiran dari KJPP tersebut, kata dia, akan dijadikan dasar ketika pengelolaannya ditawarkan kepada pihak swasta.

"Penaksiran oleh KJPP tersebut untuk setiap objek aset tersebut, berlaku selama dua tahun. Setelahnya akan dilakukan penaksiran ulang," ujar dia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus Abdul Halil membenarkan ada aset yang sebelumnya dikelola oleh Disbudpar, kini disewa pihak swasta. Di antaranya ada Taman Krida Wisata serta Taman Ria Colo.

"Dari sisi pemasukan dari nilai sewa memang lebih besar, di bandingkan dengan pemasukan dari retribusi setiap tahunnya," ujar dia.

Kevin Warsh & Trump Berpotensi Berkonflik Menyikapi Suku Bunga

Senin, 14 September 2026 10:45 WIB

Andrew Ackerman

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121437/kevin-warsh-trump-berpotensi-berkonflik-menyikapi-suku-bunga/2>

Bloomberg, Ketika Kevin Warsh dilantik di Gedung Putih pada bulan Mei, Presiden Donald Trump memuji Gubernur Federal Reserve yang dipilihnya sendiri itu dan mendorongnya untuk bersikap “sepenuhnya independen.”

“Lakukan saja apa yang menurutmu benar,” katanya.

Kebebasan bertindak yang diberikan presiden itu akan diuji pekan ini seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap The Fed untuk menaikkan suku bunga guna meredam inflasi yang tinggi.

Laporan harga konsumen pada hari Jumat menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai inflasi inti tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada bulan Agustus, sehingga mendorong ekspektasi investor akan kenaikan suku bunga pada pertemuan The Fed tanggal 15-16 September melampaui 85% di pasar futures.

Hal itu menempatkan Warsh pada jalur gesekan dengan Trump yang berulang kali mendesak bank sentral untuk memangkas suku bunga.

Trump baru-baru ini mengancam akan meningkatkan eskalasi perang dagangnya jika kebijakan moneter tidak dilonggarkan, dan pada Minggu ia kembali menegaskan argumennya bahwa biaya pinjaman AS seharusnya menjadi yang terendah di dunia.

Ketika ditanya apakah dia memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga pada pertemuan mendatang, Trump menjawab: “Saya tidak tahu.”

Desakan untuk kebijakan yang lebih longgar semakin diperkuat oleh ketegangan politik di dalam Gedung Putih. Jelang pemilihan tengah masa jabatan, jajak pendapat mempertontonkan meningkatnya ketidakpuasan pemilih atas kenaikan biaya hidup. Suku bunga yang lebih rendah — meskipun butuh waktu berbulan-bulan untuk tercermin dalam tagihan hipotek atau kartu kredit di dunia nyata — dapat memberikan alasan bagi Trump untuk memberi sinyal bahwa bantuan ekonomi sedang dalam perjalanan, dan mengalihkan kesalahan dari pemerintahannya.

Dinamika tersebut membuat Warsh terjebak dalam pengaruh institusional hanya beberapa minggu sebelum para pemilih menuju tempat pemungutan suara.

“Mereka benar-benar berada dalam situasi yang sulit di mana mereka harus menghadapi kemarahan presiden atau merusak kredibilitas mereka di pasar, dengan konsekuensi terhadap inflasi yang kemungkinan akan lebih parah di masa mendatang,” kata Maurice Obstfeld, peneliti senior di Peterson Institute for International Economics dan mantan kepala ekonom di IMF.

“Saya rasa Warsh tidak ingin dikenang sebagai Gubernur Fed yang menyerah pada tekanan pemerintah ketika mandat Fed sedang dipertaruhkan.”

Sejak laporan inflasi terbaru dirilis, satu pejabat Gedung Putih telah memberikan sinyal yang ambigu mengenai bagaimana presiden mungkin bereaksi terhadap kenaikan suku bunga.

Pada hari Jumat, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengatakan kepada Bloomberg TV bahwa Trump masih menginginkan suku bunga turun dan, jika Fed menaikkan suku bunga, “Presiden akan memiliki pendapat mengenai hal itu.”

Pada hari Minggu, Hassett sedikit melunakkan pernyataannya.

“Jika terjadi kenaikan suku bunga, maka presiden — saya yakin dia tidak akan terlalu senang dengan hal itu, tetapi dia akan membela kemandirian Kevin Warsh di atas segalanya,” katanya dalam acara Fox News Sunday.

Serangan ke Powell

Jika melihat dari pendahulu Warsh, ia mungkin akan menghadapi masalah. Gubernur Fed pertama di era Trump, Jerome Powell, dilantik pada awal Februari 2018, dan pada Juli tahun yang sama presiden sudah secara terbuka mengkritiknya karena menaikkan suku bunga. Serangan-serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pun berlanjut selama bertahun-tahun.

Namun, Powell tetap mempertahankan sikap yang jaga jarak dan formal terhadap Gedung Putih. Sebaliknya, Warsh berbicara secara informal dengan Trump beberapa kali sejak menjabat. Beberapa pengamat The Fed percaya bahwa, meskipun bank sentral melanjutkan putaran kenaikan suku bunga baru, Warsh dapat menenangkan Trump dengan mengandalkan hubungan pribadinya dengan presiden.

“Ia bisa memuji presiden melalui telepon, mendengarkannya, dan memberi ruang baginya untuk menyampaikan pendapat,” kata Michael Redmond, ekonom AS di firma konsultan Energy Aspects. “Mungkin tekanan terhadap Warsh tidak terlalu berat.”

Namun, Warsh sedang menapaki jalan berliku dengan Gedung Putih yang telah memberikan tekanan hebat kepada bank sentral, dan bukan hanya melalui serangan verbal.

Trump telah mencoba — dalam upaya yang sejauh ini telah diblokir oleh Mahkamah Agung — untuk memecat Gubernur Fed Lisa Cook. Dan Departemen Kehakiman AS melakukan penyelidikan pidana terhadap Powell atas tuduhan penipuan terkait rekonstruksi markas besar Fed. Penyelidikan tersebut dibatalkan setelah anggota parlemen dari kedua partai mengajukan keberatan dan seorang hakim federal menggambarkan penyelidikan tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

“Warsh tidak bisa menang secara politik saat ini. Jika dia menaikkan suku bunga, dia akan mendapat cuitan, dan jika dia mempertahankan suku bunga, dia akan mendapat reaksi negatif” dari pasar, jelas kata Heather Long, kepala ekonom di Navy Federal Credit Union.

Perusahaan-perusahaan besar di Wall Street, termasuk TD Bank dan JPMorgan Chase & Co., dengan cepat merevisi proyeksi mereka setelah laporan inflasi Jumat lalu, mengantisipasi kenaikan suku bunga pekan ini.

“Sinyal pasar yang tanpa filter sangat jelas: Investor menginginkan dan mengharapkan FOMC menaikkan suku bunga. Jika The Fed tidak menaikkan suku bunga, Warsh akan kehilangan kredibilitas di mata para pelaku pasar,” kata Anna Wong dan Andrew Sacher, ekonom Bloomberg Economics.

Patrick Harker, mantan Gubernur Fed Philadelphia yang kini mengajar di Wharton School, Universitas Pennsylvania, mengatakan bahwa kenaikan suku bunga justru dapat, secara kontra intuitif, mendukung tujuan ekonomi yang lebih luas, yaitu kekhawatiran terhadap inflasi. Ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi Treasury jangka panjang, sehingga membuat pinjaman hipotek dan pinjaman korporasi menjadi lebih mahal.

“Dengan menaikkan suku bunga, hal tersebut menandakan bahwa The Fed sedang menjalankan tugasnya. Hal itu mungkin membantu apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah, bukan merugikannya,” urai Harker.

Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 30 tahun naik secara signifikan pada 29 Juli ketika The Fed mempertahankan suku bunga dan Warsh gagal menjelaskan langkah tersebut secara memuaskan kepada para investor.

Presiden Donald Trump Tuntut Fed Turunkan Suku Bunga

Senin, 14 September 2026 05:20 WIB

Jennifer A. Dlouhy dan Skylar Woodhouse

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121406/presiden-donald-trump-tuntut-fed-turunkan-suku-bunga/2>

Bloomberg, Presiden Donald Trump kembali menyakinkan bahwa Amerika Serikat seharusnya memiliki suku bunga terendah di dunia, meskipun Gubernur bank sentral atau The Federal Reserve yang ia pilih sendiri, Kevin Warsh, kembali menghadapi tekanan untuk menaikkan biaya pinjaman.

“Kita seharusnya membayar — AS begitu kuat — kita seharusnya membayar suku bunga terendah di dunia, terlepas dari rumus-rumus yang mereka gunakan,” kata Trump kepada wartawan pada hari Minggu di Irlandia waktu setempat, tempat ia menghadiri turnamen Irish Open.

Saat ditanya apakah ia memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga pada rapat minggu depan, Trump menjawab: “Saya tak tahu.”

Komentar Trump tersebut muncul usai data yang dirilis Jumat menunjukkan indeks harga konsumen AS naik lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus. The Fed kemungkinan akan memandang angka-angka tersebut sebagai dorongan untuk menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

Data inflasi tersebut membuat para pelaku pasar meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed, dengan probabilitas 86% untuk kenaikan pada September dan dua kali kenaikan yang diperkirakan akan terjadi hingga akhir tahun.

Ekonomi AS menghadapi kenaikan harga energi seiring perang AS melawan Iran yang kini telah memasuki bulan ketujuh, dan kebijakan tarif Trump juga semakin memperumit situasi terkait target inflasi The Fed.

Trump berulang kali menyerang eks Gubernur Fed Jerome Powell karena ketidakmauannya menurunkan biaya pinjaman secara lebih agresif. Walau Warsh belum menghadapi tekanan serupa setelah mengambil alih jabatan tertinggi di bank sentral tersebut, dalam beberapa pekan terakhir Trump telah menunjukkan keputusan yang terus berlanjut terhadap sikap kebijakan Fed.

Sekalipun Trump telah meluapkan kekecewaannya terhadap The Fed, dia menyiratkan bahwa tangan Warsh mungkin terikat oleh apa yang disebut presiden sebagai dewan gubernur yang “sangat politis”.

Awal September lalu, Trump mengemukakan kemungkinan memutus hubungan perdagangan dengan beberapa negara yang memiliki defisit perdagangan dengan AS jika bank sentral tidak menurunkan suku bunga, namun tidak jelas bagaimana ancaman tersebut akan membantu menurunkan suku bunga.

“Saya lebih paham soal rumus-rumus daripada siapa pun, dan dengan kredit terbaik di dunia, kita justru membuat negara lain kaya. Kita bisa menghentikan itu dalam dua menit,” kata Trump pada hari Minggu.

Lantas, ketika ditanya oleh rekan media apakah ia benar-benar akan menindaklanjuti ancaman tersebut, Trump menjawab: “Ya, saya akan melakukannya terhadap beberapa negara.”

“Hal itu akan dilakukan secara bertahap,” katanya.

Para pemilih telah memberikan penilaian buruk kepada Trump baik terkait perang maupun penanganannya terhadap perekonomian. Kekhawatiran atas kenaikan biaya hidup yang mencakup energi, perumahan, layanan kesehatan, dan bahan makanan menjadi isu utama bagi para pemilih menjelang pemilihan sela bulan November yang mengancam kendali Partai Republik atas Kongres.

Kredit Baru China Bangkit pada Agustus 2026, tetapi Jauh di Bawah Ekspektasi

Senin, 14 September 2026 21:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/kredit-baru-china-bangkit-pada-agustus-2026-tetapi-jauh-di-bawah-ekspektasi>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Penyaluran kredit perbankan China kembali tumbuh positif pada Agustus 2026 setelah mengalami kontraksi tajam pada Juli. Namun, pemulihan tersebut masih jauh di bawah ekspektasi pasar, mencerminkan lemahnya permintaan pembiayaan dari rumah tangga dan dunia usaha.

Berdasarkan perhitungan Reuters menggunakan data Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBOC) yang dirilis Senin (14/9/2026), bank-bank China menyalurkan kredit baru sebesar 60 miliar yuan atau sekitar US\$8,95 miliar pada Agustus.

Angka tersebut berbalik dari kontraksi sebesar 340 miliar yuan pada Juli. Kendati demikian, realisasi kredit baru masih jauh di bawah proyeksi analis.

Dalam jajak pendapat Reuters, para analis memperkirakan kredit yuan baru pada Agustus dapat rebound hingga 400 miliar yuan. Nilai tersebut pun masih lebih rendah dibandingkan 590 miliar yuan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Lemahnya penyaluran kredit menunjukkan permintaan pembiayaan rumah tangga China masih tertekan. Kredit rumah tangga tercatat mengalami kontraksi selama enam bulan berturut-turut.

Capital Economics menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat semakin kecil.

"Penurunan permintaan hipotek yang berkepanjangan sejak awal krisis properti menjadi salah satu penyebabnya, tetapi tekanan utama berasal dari lemahnya minat rumah tangga untuk membiayai konsumsi melalui utang," kata Capital Economics dalam catatannya.

Permintaan Kredit China Masih Lemah

Secara kumulatif, kredit baru yang disalurkan perbankan China sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 10,44 triliun yuan. Angka tersebut turun cukup signifikan dibandingkan 13,46 triliun yuan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perlambatan tersebut menunjukkan permintaan kredit masih lesu meskipun pemerintah China terus berupaya mendorong aktivitas ekonomi.

Kredit yuan yang masih beredar pada Agustus hanya tumbuh 4,9% secara tahunan, melambat dari pertumbuhan 5,1% pada Juli. Laju pertumbuhan tersebut menjadi yang paling lemah dalam catatan.

Kredit rumah tangga, termasuk kredit hipotek, menyusut sebesar 202,9 miliar yuan pada Agustus, meskipun kontraksinya lebih kecil dibandingkan 460,3 miliar yuan pada Juli.

Di sisi lain, kredit korporasi meningkat sebesar 260 miliar yuan pada Agustus setelah sebelumnya mengalami penurunan 130 miliar yuan pada Juli.

Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan kredit korporasi belum cukup kuat untuk mengimbangi lemahnya permintaan pembiayaan dari rumah tangga.

Ekonomi China Kehilangan Momentum

Lemahnya permintaan kredit menjadi salah satu hambatan yang terus membebani perekonomian China, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Pemerintah China sebelumnya telah berupaya memperluas saluran pembiayaan di luar kredit perbankan konvensional, termasuk melalui pasar saham dan obligasi.

Namun, momentum ekonomi China mulai kehilangan tenaga pada awal paruh kedua tahun ini. Pertumbuhan produksi industri dan penjualan ritel melambat di tengah gangguan cuaca ekstrem serta lemahnya permintaan domestik.

Situasi tersebut kembali meningkatkan tekanan terhadap pemerintah China untuk memperkuat stimulus guna menopang konsumsi dan investasi.

Data kredit yang mengecewakan ini muncul setelah pertumbuhan ekonomi China pada kuartal II 2026 melambat ke level terendah dalam tiga setengah tahun.

Kondisi tersebut memperlihatkan masih besarnya ketergantungan China terhadap ekspor untuk mengimbangi lemahnya konsumsi dan investasi domestik. Pada saat yang sama, perekonomian China menghadapi tantangan dari tarif Amerika Serikat serta konflik di Timur Tengah.

China Belum Diperkirakan Pangkas Suku Bunga dalam Waktu Dekat

Untuk mendorong konsumsi dan investasi, pemerintah China baru-baru ini memperluas subsidi bunga pinjaman bagi perusahaan swasta kecil dan konsumen.

Beijing juga mengumumkan suntikan dana sebesar US\$54 miliar kepada delapan lembaga keuangan milik negara. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat modal inti lembaga keuangan sekaligus menjaga kemampuan mereka dalam menyalurkan kredit.

Pada bulan sebelumnya, pembuat kebijakan China juga meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menstabilkan sektor properti.

Kebijakan tersebut mencakup penguatan dukungan pembiayaan bagi pengembang properti serta memperpanjang batas maksimum tenor hipotek dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi beban pembayaran bagi pembeli rumah.

Meski demikian, analis masih berhati-hati dalam menilai kecepatan pemulihan permintaan di sektor perumahan China.

Capital Economics masih memperkirakan pemangkasan suku bunga sekitar 30 basis poin hingga akhir 2027. Namun, kenaikan harga minyak dan potensi percepatan belanja fiskal membuat pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat dinilai semakin kecil kemungkinannya.

Pertumbuhan Uang Beredar China Melambat

Data PBOC juga menunjukkan pertumbuhan jumlah uang beredar luas atau M2 pada Agustus mencapai 7,5% secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah dalam 17 bulan dan berada di bawah proyeksi analis sebesar 7,6% dalam jajak pendapat Reuters. Pada Juli, pertumbuhan M2 masih mencapai 7,7%.

Sementara itu, pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 meningkat menjadi 4,1% secara tahunan pada Agustus, dibandingkan 4% pada Juli.

Total pembiayaan sosial yang masih beredar atau outstanding total social financing, indikator luas yang mencakup kredit dan likuiditas dalam perekonomian, tumbuh 7,2% secara tahunan pada Agustus.

Pertumbuhan tersebut melambat dari 7,4% pada Juli.

Peningkatan penerbitan obligasi pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan total pembiayaan sosial China ke depan. Namun, lemahnya permintaan kredit dari rumah tangga dan dunia usaha tetap menjadi tantangan bagi upaya Beijing untuk memperkuat pemulihan ekonomi domestik.

Bank Global Ramai-ramai Prediksi The Fed Naikkan Suku Bunga Pekan Ini

Senin, 14 September 2026 17:15 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-global-ramai-ramai-prediksi-the-fed-naikkan-suku-bunga-pekan-ini>

KONTAN.CO.ID - Sejumlah bank investasi global mulai ramai memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada pekan ini.

Ekspektasi tersebut menguat setelah data inflasi Amerika Serikat (AS) lebih tinggi dari perkiraan dan memunculkan kekhawatiran tekanan harga belum akan mereda tanpa pengetatan kebijakan moneter tambahan.

Melansir Reuters Senin (14/9/2026), Goldman Sachs, J.P. Morgan, HSBC dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) dalam pertemuan 15-16 September.

Sejumlah bank juga memperkirakan suku bunga AS akan bertahan lebih tinggi dalam waktu lebih lama demi mengembalikan inflasi ke target The Fed sebesar 2%.

Perubahan ekspektasi tersebut terjadi setelah data menunjukkan harga konsumen dan produsen AS meningkat lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus.

Di saat yang sama, harga minyak kembali menembus US\$ 100 per barel akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tekanan inflasi akan bertahan lebih lama.

Pergeseran pandangan bank-bank global tersebut menjadi perubahan tajam dibandingkan awal tahun.

Saat itu, banyak ekonom memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga setelah tidak mengubah kebijakan moneter sepanjang 2026, menyusul pemangkasan 25 bps pada Desember 2025.

"Kurangnya kemajuan dalam inflasi telah mengubah keseimbangan," kata ekonom HSBC Ryan Wang dalam sebuah catatan, sembari mendukung kenaikan suku bunga The Fed pada September.

J.P. Morgan juga memberikan sinyal hawkish setelah rilis data inflasi terbaru.

"Pekan ini ditandai dengan kenaikan imbal hasil obligasi dan harga energi, serta data inflasi yang cukup kuat untuk membuat kenaikan suku bunga pada pertemuan FOMC pekan depan menjadi lebih mungkin," tulis ekonom J.P. Morgan yang dipimpin Michael Feroli.

Peluang Kenaikan Suku Bunga Meningkat

Prospek pengetatan kebijakan The Fed akan menjadi perhatian utama pasar pekan ini. Para pembuat kebijakan akan mengakhiri pertemuan pada Rabu (16/9), sementara investor juga mencermati sinyal kebijakan dari Bank of Japan (BOJ).

J.P. Morgan menilai data inflasi terbaru menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan tren disinflasi di AS.

Bank tersebut kini memperkirakan The Fed kembali menaikkan suku bunga tahun ini dan meningkatkan estimasi suku bunga kebijakan jangka panjang menjadi 3,25%.

Pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 bps pada September mencapai sekitar 90%.

Angka tersebut naik dari sekitar 70% sebelum data inflasi terbaru dirilis, berdasarkan CME FedWatch Tool.

Pasar juga memperkirakan adanya kenaikan suku bunga tambahan pada Desember.

Di sisi lain, Goldman Sachs dalam catatan pada Minggu (13/9) masih memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebanyak dua kali pada 2027. Namun, waktunya diperkirakan lebih lambat dari proyeksi sebelumnya.

Goldman Sachs menilai, kenaikan suku bunga yang diperkirakan terjadi pekan ini lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi pasar dibandingkan fundamental inflasi.

Peso Filipina dan Won Korea Jadi Mata Uang Asia Paling Tertekan Hari Ini

Senin, 14 September 2026 09:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/peso-filipina-dan-won-korea-jadi-mata-uang-asia-paling-tertekan-hari-ini>

KONTAN.CO.ID - Peso Filipina dan won Korea Selatan menjadi mata uang Asia yang mencatat pelemahan terbesar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (14/9/2026). Berdasarkan data Reuters pada pukul 02.06 GMT, peso Filipina melemah 0,33% menjadi 62,791 per dolar AS. Sementara won Korea Selatan turun 0,26% ke level 1.345 per dolar AS.

Sejumlah mata uang Asia lainnya juga melemah terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,16% menjadi 153,790 per dolar AS, dolar Taiwan melemah 0,16% menjadi 31,690 dan baht Thailand turun 0,18% menjadi 33,110.

Dolar Singapura melemah 0,07% menjadi 1,268 per dolar AS. Ringgit Malaysia turun 0,05% menjadi 4,070.

Rupiah Indonesia juga berada di zona merah dengan pelemahan 0,09% menjadi Rp17.600 per dolar AS. Sementara yuan China relatif stabil di level 6,708 per dolar AS.

Peso paling tertekan sepanjang 2026

Secara kumulatif sepanjang 2026, peso Filipina menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terbesar dalam daftar tersebut.

Peso tercatat melemah 6,36% dibandingkan posisi akhir 2025 di level 58,800 per dolar AS.

Rupiah India menyusul dengan pelemahan 5,94%, sedangkan rupiah Indonesia turun 5,28% sepanjang tahun berjalan.

Baht Thailand juga melemah 5,01% sejak akhir 2025.

Sebaliknya, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik secara kumulatif. Won menguat 7,10% dari level 1.440,510 per dolar AS pada akhir 2025.

Yuan China juga menguat 4,18%, sementara yen Jepang naik 1,86% dan dolar Singapura menguat 1,38%.

Dolar Taiwan justru melemah 0,80% secara kumulatif, sedangkan ringgit Malaysia turun 0,34%.

Dolar Stabil, Yen Bertahan Dekati Level Tertinggi 7 Bulan Jelang The Fed dan BOJ

Senin, 14 September 2026 08:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-stabil-yen-bertahan-dekati-level-tertinggi-7-bulan-jelang-the-fed-dan-boj>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak stabil pada perdagangan Senin (14/9/2026), sementara yen bertahan di dekat level tertinggi dalam tujuh bulan.

Investor mencermati potensi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) dan Bank of Japan (BOJ) pada pekan yang krusial bagi kebijakan moneter global.

Tekanan inflasi global kembali menjadi perhatian setelah perang AS-Israel dengan Iran yang telah berlangsung selama enam bulan mendorong harga minyak mentah bertahan di atas US\$ 100 per barel.

Kondisi tersebut turut mengubah ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga dan memicu aksi jual di pasar obligasi tenor panjang.

Bank Sentral Eropa (ECB) telah menaikkan suku bunga pada pekan lalu dan memberikan sinyal kemungkinan kenaikan lanjutan. Selanjutnya, perhatian pasar tertuju pada keputusan The Fed pada Rabu dan BOJ pada Jumat.

Sementara itu, Bank of England (BoE) diperkirakan mempertahankan suku bunga pada Kamis, meski keputusan tersebut berpotensi berlangsung ketat.

Pelaku pasar semakin memperbesar taruhan terhadap kenaikan suku bunga The Fed setelah data inflasi konsumen AS pada Jumat menunjukkan harga konsumen kembali meningkat pada Agustus.

Berdasarkan CME FedWatch, peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pekan ini mencapai 86%, dengan pasar juga memperkirakan kenaikan lanjutan sebelum akhir tahun.

"The Fed bisa saja memutuskan untuk menunggu, tetapi hal itu menjadi rumit karena pertemuan Oktober berlangsung tepat sebelum pemilu sela AS. Menunggu hingga Desember untuk bertindak akan terlalu lama," kata Shane Oliver, Kepala Ekonom sekaligus Kepala Strategi Investasi AMP.

Di pasar valuta asing, euro berada di US\$ 1,159, sementara poundsterling berada di US\$ 1,3524.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama berada di 99,15, relatif stabil setelah melemah tipis selama dua pekan berturut-turut.

Imbal hasil US Treasury juga bertahan di dekat level tertinggi dalam beberapa tahun. Imbal hasil obligasi AS tenor dua tahun yang sensitif terhadap ekspektasi suku bunga The Fed turun tipis menjadi 4,6148%, setelah melonjak 26 basis poin pada pekan lalu.

Meski imbal hasil obligasi AS meningkat dan ekspektasi suku bunga bergeser, kondisi tersebut sejauh ini belum mampu mendorong penguatan signifikan dolar. Pasalnya, bank sentral negara-negara maju lainnya juga diperkirakan menaikkan suku bunga.

Analisis ING menilai, kenaikan suku bunga The Fed dapat memberikan dukungan terhadap dolar karena akan memperkuat kredibilitas kebijakan moneter bank sentral AS.

"Kami menilai dolar akan menyambut kenaikan suku bunga karena hal itu akan mendukung kredibilitas kebijakan moneter The Fed," tulis analisis ING.

Namun, ING memperkirakan penguatan dolar kemungkinan terbatas karena langkah tersebut lebih merupakan penyesuaian kebijakan The Fed, bukan awal dari siklus kenaikan suku bunga baru.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak kembali menjadi faktor penting bagi pasar valuta asing.

Harga minyak Brent naik hampir 3% menjadi US\$ 107,51 per barel pada perdagangan awal Asia setelah serangan baru Houthi terhadap Arab Saudi dan serangan Iran terhadap kapal-kapal di Teluk meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak global.

Yen Menguat, BOJ Jadi Penentu

Yen Jepang berada di level 153,49 per dolar AS, tidak jauh dari level tertinggi tujuh bulan sebesar 152,89 yang dicapai pekan lalu.

Penguatan yen terjadi seiring perubahan sentimen pelaku pasar terhadap mata uang Jepang. Spekulasi bahkan mulai mencatat posisi net long yen untuk pertama kalinya sejak Februari.

Analisis MUFG mengatakan, kenaikan suku bunga BOJ sebesar 25 basis poin sudah hampir sepenuhnya diperhitungkan oleh pasar.

"Untuk membuat yen kembali menguat, BOJ harus memberikan sinyal bahwa mereka berencana mempertahankan laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat," tulis analisis MUFG.

Yen telah menguat sekitar 4% sepanjang September. Penguatan tersebut didorong ekspektasi bahwa BOJ akan mempercepat kenaikan suku bunga serta indikasi potensi repatriasi aset oleh investor domestik Jepang.

Analisis TD Securities memperingatkan bahwa jika BOJ tidak membuka kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Oktober atau Desember, dolar berpotensi kembali menguat terhadap yen menuju level 157-160.

"Jika tidak menaikkan suku bunga, itu akan menjadi kesalahan besar. Jika tidak menyampaikan komunikasi yang kuat, itu juga akan menjadi kesalahan sendiri," kata James Athey, manajer portofolio pendapatan tetap di Marlborough.

Selain ekspektasi suku bunga, prospek repatriasi aset dan perubahan alokasi aset Government Pension Investment Fund (GPIF) Jepang juga disebut menjadi faktor penting yang menopang penguatan yen.

Rupiah Ditutup di Level Rp17.648/US\$

Senin, 14 September 2026 16:21 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121480/rupee-ditutup-di-level-rp17-648-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Senin (14/9/2026) dengan pelemahan 0,27% ke Rp17.648/US\$, seiring kenaikan harga minyak yang persisten.

Harga minyak Brent masih bertahan tinggi di US\$107,9/barel dan menekan mata uang Asia. Yen Jepang melemah paling tajam, disusul baht Thailand, dolar Singapura, rupiah, peso Filipina, dolar Taiwan, won Korea Selatan, dan ringgit Malaysia.

Kenaikan harga minyak disebabkan oleh gangguan pasokan di kawasan Timur Tengah, menyusul adanya serangan terbaru terhadap pipa minyak Arab Saudi.

Hal ini menambah kekhawatiran terhadap pasokan minyak. Selain itu, persediaan minyak negara-negara OECD sebenarnya telah turun lebih dari 400 juta barel sejak April. Sementara, cadangan minyak strategis AS juga ikut menyusut 128 juta barel sejak Maret.

Ditambah, persediaan produk minyak tercatat turun, dari 2,05 miliar barel menjadi 1,8 miliar barel dalam enam bulan terakhir.

Dengan kondisi ini, serangan terhadap pipa di Arab Saudi semakin dramatis dan memicu kekhawatiran bahwa pasokan minyak dunia semakin menipis. Tak heran jika harga minyak kembali melambung.

Dari sisi fiskal, harga minyak yang terus bertahan tinggi dapat berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi jika pemerintah kembali menahan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik agar tidak melonjak, terutama jenis Pertalite.

Dengan harga rata-rata minyak berada di US\$90/barel, sementara asumsi anggaran dalam APBN adalah US\$70/barel, pemerintah perlu memangkas anggaran untuk program lainnya agar dapat membiayai tagihan subsidi.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, defisit minyak dan gas (migas) Indonesia tercatat US\$18,75 miliar. Dengan surplus non-migas yang sebesar US\$22,45 miliar, defisit itu hanya menyisakan surplus sebesar US\$3,7 miliar bagi neraca perdagangan. Sehingga bisa dikatakan 83,5% surplus non-migas itu terserap untuk menutup defisit migas.

Sementara itu, dari dalam negeri kabar mengejutkan turut mewarnai perdagangan hari ini dengan adanya perombakan kabinet. Menteri Keuangan kembali diganti dari Purbawa Yudhi Sadewa menjadi Suahasil Nazara.

Pergantian ini tentu jadi perhatian pelaku pasar, terutama karena posisi ini sangat strategis dalam menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

Perubahan di tengah tekanan eksternal yang cukup besar, mulai dari keterbatasan pasokan minyak, ketidakpastian suku bunga global, hingga tekanan terhadap nilai tukar, berpotensi membuat pasar kembali mencermati arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Pelantikan berlangsung kala pasar valuta sudah tutup, sehingga respons pasar belum terlihat. Namun, rupiah offshore mendapat tenaga memangkask sebagian pelemahannya dari Rp17.725/US\$ ke kisaran Rp17.710/US\$.

Begitu juga dengan pasar saham, pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memangkask sebagian pelemahannya. Melansir data Bloomberg, IHSG berbalik menguat 0,08% ke zona hijau.

Di tengah pergantian Menteri Keuangan secara mendadak ini, ada kabar positif positif pasar surat utang. Kepemilikan asing atas surat utang pemerintah Indonesia mulai meingkat, dari Rp892,44 triliun pada Juli menjadi Rp907,79 triliun pada akhir Agustus.

Arus masuk sekitar US\$861 juta itu memang belum besar, tapi setidaknya menunjukkan bahwa minat investor terhadap aset rupiah mulai kembali.

Ke depan, arah rupiah akan sangat ditentukan oleh dua kekuatan yang berlawanan. Harga minyak dan ketidakpastian global jadi sumber tekanan, sementara potensi kembalinya arus modal asing serta kredibilitas kebijakan fiskal dapat jadi penopang.

Rupiah Kembali Tertekan, Mata Uang Asia Berguguran

Senin, 14 September 2026 13:57 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121462/rupee-kembali-tertekan-mata-uang-asia-berguguran/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah melanjutkan pelemahan pada sesi perdagangan siang, sejalan dengan tekanan harga minyak yang menyerpa sebagian besar mata uang Asia.

Melansir data Bloomberg, Senin (14/9/2026) siang 13.30 WIB, rupiah terdepresiasi 0,25% ke Rp17.644/US\$. Di kawasan, baht Thailand melemah paling dalam, disusul yen Jepang, dolar Taiwan, rupiah, dan peso Filipina. Sementara, dolar Singapura dan ringgit Malaysia melemah lebih terbatas.

Sebaliknya, yuan cukup punya tenaga untuk bersikap defensif, meski penguatannya sangat terbatas.

Kenaikan harga minyak ke atas US\$100/barel kembali memicu kekhawatiran akan inflasi global dan membuat pertahanan mata uang Asia jebol. Sebagai importir energi, harga minyak yang mahal meningkatkan kebutuhan dolar untuk membiayai impor dan berpotensi menekan ruang fiskal negara-negara di kawasan ini.

Pada pembuat kebijakan di kawasan akan menghadapi tekanan untuk mampu memberi bantalan bagi rumah tangga dan dunia usaha yang pendapatannya telah tergerus oleh inflasi ini.

Sementara itu, dari pasar obligasi pergerakannya relatif beragam. Pergerakan yield obligasi di sebagian negara masih stabil. Obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS), US Treasury, tenor 10 tahun tercatat naik 1,5 bps ke 4,97%. Begitu juga dengan Perancis naik 1,3 bps jadi 4,45%, disusul Jerman naik 0,5 bps ke 3,5%.

Akan tetapi, obligasi Asia Pasifik untuk tenor yang sama, merespons lebih beragam. Hanya yield obligasi Taiwan (+0,1 bps), Singapura (+2,2 bps), yang tercatat naik. Disusul obligasi berdenominasi dolar AS milik Filipina (+1 bps) ke 5,83% dan Indonesia (+2,2 bps) ke 5,9%.

Sedangkan yield obligasi Jepang tenor 10 tahun turun 0,3 bps ke 2,96%, China (-0,1 bps) ke 1,68%, disusul Australia (-1,9 bps) ke 5,34%, dan Selandia Baru (-2,4 bps) jadi 4,99%. Sementara, pergerakan yield obligasi pemerintah Malaysia relatif stabil di 4,1%, Korea Selatan 4,52% dan India 7,02%. Sementara itu, dari dalam negeri sebagian besar tenor mencatat kenaikan yield, khususnya tenor menengah dan panjang.

Meski sebagian besar tenor naik, sejatinya aliran modal masuk ke pasar obligasi kembali naik.

Data Bloomberg mencatat kepemilikan investor nonresiden kembali naik menjadi Rp907,79 triliun hingga akhir Agustus lalu, dari posisi Rp892,44 triliun pada Juli.

Kenaikan itu setara dengan arus dana masuk sekitar US\$861 juta. Sehingga, porsi kepemilikan asing meningkat jadi 13% dari sebelumnya 12,9%.

Namun, pemulihan ini relatif kecil jika dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19. Kala itu, kepemilikan asing berada di atas 30%. Sehingga, pemulihan ini belum cukup untuk disebut sebagai arus balik modal asing secara besar-besaran.

Walaupun masih terbatas, pemulihan ini setidaknya menunjukkan permintaan aset rupiah kembali meningkat. Jika tren ini berlanjut, tentu dapat menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah, terlebih di era harga minyak tinggi seperti akhir kuartal III-2026 ini.

Pasar Obligasi Dibayangi Kekhawatiran Defisit Fiskal dan Inflasi

Senin, 14 September 2026 11:12 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121443/pasar-obligasi-dibayangi-kekhawatiran-defisit-fiskal-dan-inflasi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Obligasi pemerintah Indonesia mengalami tekanan pada perdagangan Senin (14/9/2026).

Melansir data Bloomberg, pergerakan yield cenderung bearish pada sebagian besar tenor, terutama tenor menengah hingga panjang.

Yield tenor 3 tahun naik 4,7 basis poin (bps) ke 6,9%, sementara tenor 4 tahun melonjak 8,3 bps ke 6,99%, menjadi tenor yang naik paling tajam. Tekanan juga terlihat pada tenor 12 tahun yang naik 5,1 bps ke 7,16%, dan 15 tahun naik 0,5 bps ke 7,2%.

Sementara, tenor 5-11 tahun bergerak beragam, namun tetap mencatat kenaikan yield.

Pada tenor panjang, pergerakan juga cenderung naik. Yield 20 tahun naik 2,8 bps ke 7,21%, dan tenor 30 tahun naik 1,4 bps ke 7,22%, meski tenor 18 dan 40 tahun turun masing-masing 0,4 bps.

Sebaliknya, tenor pendek justru bergerak berlawanan. Yield tenor 1 tahun turun 5,5 bps ke 6,8%, sedangkan tenor 2 tahun turun 1,4 bps ke 6,85%.

Pasar Obligasi Global

Tekanan ini tak cuma terjadi di Indonesia. Obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS), US Treasury, tenor 10 tahun tercatat naik 1,5 bps ke 4,97%. Begitu juga dengan Perancis naik 1,3 bps jadi 4,45%, disusul Jerman naik 0,5 bps ke 3,5%.

Akan tetapi, obligasi Asia Pasifik untuk tenor yang sama, merespons lebih beragam. Hanya yield obligasi Taiwan (+0,1 bps), Singapura (+2,2 bps), yang tercatat naik. Disusul obligasi berdenominasi dolar AS milik Filipina (+1 bps) ke 5,83% dan Indonesia (+2,2 bps) ke 5,9%.

Sedangkan yield obligasi Jepang tenor 10 tahun turun 0,3 bps ke 2,96%, China (-0,1 bps) ke 1,68%, disusul Australia (-1,9 bps) ke 5,34%, dan Selandia Baru (-2,4 bps) jadi 4,99%. Sementara, pergerakan yield obligasi pemerintah Malaysia relatif stabil di 4,1%, Korea Selatan 4,52% dan India 7,02%.

Sentimen

Pergerakan yield di pasar obligasi global hari ini dipicu oleh ekspektasi naiknya suku bunga acuan The Fed.

Berdasarkan CME FedWatch, ada peluang sekitar 86,2% bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps. Padahal, sebelum data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) dirilis Jumat lalu, peluangnya baru sekitar 70%.

Tingkat inflasi berada di 3,4% pada Agustus, sesuai ekspektasi analis dan ekonom. Angka ini juga stagnan dari posisi inflasi Juli. Tapi, inflasi umum meningkat pada Agustus jadi 0,4%, dari posisi Juli hanya 0,07% akibat kenaikan harga minyak. Begitu juga dengan inflasi inti naik dari posisi Juli.

Namun, jika melihat yield tenor pendek pada obligasi pemerintah RI yang justru bullish, sepertinya tekanan terhadap pasar surat utang tidak sepenuhnya dipicu oleh ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.

Menurut Lionel Priyadi, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, ada kemungkinan The Fed menghindari kenaikan suku bunga September dengan kebijakan quantitative tightening yang lebih ketat.

Pergerakan harga minyak mentah Brent yang kembali melambung justru yang memperparah sentimen. Kenaikan harga minyak ini membuat semua kekhawatiran bermuara pada angka inflasi yang diperkirakan akan kembali panas.

Pada pembuat kebijakan di Asia akan menghadapi tekanan untuk mampu memberi bantalan bagi rumah tangga dan dunia usaha yang pendapatannya telah tergerus oleh inflasi yang sepertinya sulit turun.

Tapi, defisit anggaran yang juga sudah melebar, dan suku bunga tinggi, membuat ruang gerak otoritas moneter kawasan menjadi lebih sempit, termasuk Bank Indonesia (BI).

“Lonjakan harga minyak kembali membawa persoalan terms of trade, inflasi, dan kekhawatiran fiskal jangka menengah ke dalam perhatian,” kata Wee Khoo Chong, senior market strategist untuk Asia Pasifik di BNY di Hong Kong, seperti dikutip Bloomberg News.

Bagi Indonesia, persoalan harga minyak selama ini juga sebenarnya telah membebani fiskal. Dengan harga rata-rata minyak berada di US\$90/barel, sementara asumsi anggaran dalam APBN adalah US\$70/barel, pemerintah perlu memangkas anggaran untuk program lainnya agar dapat membiayai tagihan subsidi.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, defisit minyak dan gas (migas) Indonesia tercatat US\$18,75 miliar. Dengan surplus non-migas yang sebesar US\$22,45 miliar, defisit itu hanya menyisakan surplus sebesar US\$3,7 miliar bagi neraca perdagangan.

Sehingga bisa dikatakan 83,5% surplus non-migas itu terserap untuk menutup defisit migas.

Namun, pemerintah masih belum berencana memangkas biaya subsidi dengan mentransmisikan kenaikan harga minyak dunia ke BBM jenis Pertalite. Padahal, kebijakan itu terus menggerus performa perdagangan luar negeri Indonesia.

RI: Negara Berkembang Harus Jadi Penentu Ekonomi Global

Senin, 14 September 2026 11:10 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121442/ri-negara-berkembang-harus-jadi-penentu-ekonomi-global/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia mendorong negara-negara berkembang untuk ikut mengambil peran lebih besar dalam penentuan arah kebijakan dan tata kelola di sistem ekonomi global, alih-alih hanya menjadi pihak yang menerima ketentuan yang dirumuskan negara-negara maju.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keterlibatan aktif negara berkembang dinilai sangat krusial di tengah upaya reformasi lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), dan International Financial Institutions (IFIs).

"Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita," Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip Senin (14/9/2026).

"Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan," sambungnya menegaskan.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dorongan yang diutarakan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/09/2026) lalu.

Indonesia, kata Airlangga, berpandangan bahwa perubahan lanskap ekonomi dan geopolitik global perlu diikuti dengan perubahan dalam sistem pengambilan keputusan.

Negara-negara berkembang, yang selama ini kerap menjadi objek berbagai kebijakan dan ketentuan internasional dinilai perlu terlibat langsung dalam proses perumusan.

Dorongan tersebut juga muncul di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok.

"Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal."

Proyek Kopdes Rp175 T: Baru 30% dari Target, 0 yang Layak Operasi

Senin, 14 September 2026 10:00 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121432/proyek-kopdes-rp175-t-baru-30-dari-target-0-yang-layak-operasi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara telah membangun 24.184 unit Kopdes Merah Putih dengan progres 100%. Anggaran terserap mencapai Rp106 triliun dari dana pinjaman Himbara Rp175 triliun, dari total pagu Rp240 triliun.

Jumlah fisik Kopdes tersebut diketahui masih di kisaran 30% dari target Presiden Prabowo sebanyak 80.000 unit di seluruh Indonesia.

Dari total Kopdes yang sudah terbangun, juga diketahui belum ada satu pun Kopdes yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi (verval) baik dari pemerintah daerah (Pemda) maupun Kementerian Koperasi. Verval merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur kelayakan Kopdes untuk beroperasi.

Dilansir dari dashboard Simkopdes Kementerian Koperasi, dipantau Bloomberg Technoz, Senin (14/9/2026) pagi, dari 24.184 Kopdes yang telah selesai dibangun, belum ada satupun Kopdes yang telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi.

"Layak dan siap operasional, 0 Kopdes" tulis laporan realtime Simkopdes.

Sistem pemantauan verifikasi dan validasi Kopdes Merah Putih.

Selain itu, dalam laporan tersebut juga terungkap sebanyak 319 Tim Verval kabupaten/kota yang belum mengunggah SK dan 195 yang sudah ber-SK. Kemudian, sebanyak 24.142 koperasi yang belum diverifikasi serta 42 koperasi sedang dalam proses verval, tetapi belum mengeluarkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

Proses verifikasi dan validasi (verval) Kopdes dilakukan secara sinergis antara Kementerian Koperasi, Pemerintah Daerah, serta melibatkan lembaga pengawas/auditor negara seperti BPKP dan BPK untuk pengadaan barang dan pembiayaannya.

Kementerian Koperasi telah menerbitkan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai acuan Tim Verifikasi dan Validasi di daerah dalam pelaksanaan.

Dalam aturan tersebut, pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan guna mendukung dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima), sebagai instrumen wajib percepatan proses pembayaran kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Kita lagi laksanakan proses verifikasi dan validasinya. Nanti ada surat terimanya. Jadi nanti atas dasar itu [pencairannya]. Semua kita buat atas dasar itu," kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono beberapa waktu lalu.

Bayar Utang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah memastikan akan segera membayar utang Koperasi Desa Merah Putih atau Program Kopdes sebesar Rp40 triliun yang diperkirakan jatuh tempo akhir

September 2026. Pihaknya masih menunggu prosedur yang jelas untuk memastikan nilai pembiayaan dan penggunaannya tepat.

Skema pendanaan pembayaran utang Kopdes telah dituangkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.

Dalam pasal 2 ayat (2), setiap unit KDMP dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan dengan plafon maksimal Rp3 miliar. Kredit diberikan dengan suku bunga tetap sebesar 6% per tahun dan jangka waktu pinjaman hingga 72 bulan.

Regulasi itu juga memberikan kelonggaran berupa masa tenggang (grace period) pembiayaan selama 6-12 bulan, lebih panjang dibandingkan ketentuan sebelumnya yang membatasi masa tenggang maksimal delapan bulan. Hal itu dilakukan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pembiayaan.

Selain itu, Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa pembayaran angsuran termasuk bunga dilakukan melalui Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) setiap bulan atau dibayar sekaligus per tahun berjalan menggunakan porsi dana desa.

Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah Tembus Rp90.050/Kg

Senin, 14 September 2026 08:42 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121420/harga-pangan-hari-ini-cabai-rawit-merah-tembus-rp90-050-kg/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Harga rerata sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional bergerak variatif pada perdagangan hari ini, Senin (14/9/2026). Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang tembus Rp90.050 per kilogram (kg).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga cabai rawit merah naik 7,2% atau Rp6.050 dari harga sebelumnya. Kemudian, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan sebesar 9% atau Rp5.200 menjadi Rp62.950 per kg.

Harga cabai rawit hijau juga naik 3,94% atau Rp2.450 menjadi Rp64.700 per kg. Sedangkan untuk cabai merah besar, harganya naik 2,65% atau Rp1.400 menjadi Rp54.200 per kg.

Di sisi lain, pergerakan harga juga terjadi pada kelompok bawang. Harga bawang merah ukuran sedang tercatat turun 1,05% atau Rp400 menjadi Rp37.700 per kg. Sementara itu, harga bawang putih ukuran sedang naik 0,25% atau Rp100 menjadi Rp39.400 per kg.

Harga beras kualitas bawah I turun 0,34% atau Rp50 menjadi Rp14.800 per kg. Sementara beras kualitas bawah II naik 0,34% atau Rp50 menjadi Rp14.700 per kg.

Beras kualitas medium I tercatat harga tetap di level Rp16.550 per kg. Sementara beras kualitas medium II mengalami kenaikan 0,31% atau Rp50 menjadi Rp16.400 per kg.

Selanjutnya, harga beras kualitas super I terpantau tetap sebesar Rp17.850 per kg. Beras kualitas super II juga tercatat harga tetap di level Rp17.300 per kg.

Harga gula pasir kualitas premium tercatat tetap sebesar Rp20.300 per kg. Sementara gula pasir lokal juga terpantau tidak mengalami perubahan dengan harga Rp19.100 per kg.

Untuk komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 0,24% atau Rp50 menjadi Rp20.500 per kg.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek I mengalami penurunan 0,21% atau Rp50 menjadi Rp24.300 per kg. Kemudian, minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,21% atau Rp50 menjadi Rp23.500 per kg.

Selanjutnya, harga telur ayam ras segar tercatat naik 0,84% atau Rp250 menjadi Rp29.900 per kg. Sebaliknya, harga daging ayam ras segar turun 0,47% atau Rp200 menjadi Rp42.500 per kg.

Harga pangan jenis daging sapi kualitas I naik 0,16% atau Rp250 menjadi Rp152.150 per kg. Sementara daging sapi kualitas II juga mengalami kenaikan tipis 0,07% atau Rp100 menjadi Rp142.850 per kg.

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Wamendagri Minta Pemda Tak Andalkan Belanja Pemerintah

Senin, 14 September 2026 18:51 WIB

Reporter: Hervin Jumar, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/kejar-pertumbuhan-ekonomi-8-wamendagri-minta-pemda-tak-andalkan-belanja-pemerintah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak menjadikan belanja pemerintah sebagai satu-satunya motor penggerak ekonomi daerah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan target pertumbuhan ekonomi nasional hanya dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi daerah ikut bergerak.

Kepala daerah perlu memahami indikator pembangunan dan menerjemahkannya dalam kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi nasional itu enggak mungkin tercapai targetnya tanpa kontribusi dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan tidak mungkin ekonomi daerah itu berkembang ketika kepala daerahnya enggak paham bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima dalam keterangan resminya, Senin (14/9/2026).

Bima menekankan, Pemda perlu membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir, bukan sekadar mengandalkan government spending.

Ekosistem tersebut mencakup penguatan produksi lokal, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja hingga penyiapan tenaga kerja lokal yang berdaya saing.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam indikator makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Untuk itu, Bima meminta kepala daerah memahami berbagai indikator pembangunan, termasuk PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membimbing Pemda agar indikator tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Selain mengejar pertumbuhan, Bima mengingatkan Pemkot Batam agar mengimbangi laju ekonomi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain penyediaan air bersih, transportasi publik, penanganan kemacetan dan pengelolaan sampah secara terpadu.

Bima juga menyoroti tingginya arus migrasi penduduk ke Batam. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengantisipasi perkembangan kota serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif dan tidak diskriminatif.

Di tengah pembangunan fisik dan modernisasi Batam, Bima turut mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya lokal.

Kemajuan infrastruktur, kata Bima, perlu berjalan beriringan dengan pelestarian nilai budaya dan sejarah agar perkembangan kota tidak menghilangkan karakter daerah.

BPS Soroti Kenaikan Harga Daging Ayam, Telur, Beras hingga Minyak Goreng

Senin, 14 September 2026 18:49 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bps-soroti-kenaikan-harga-daging-ayam-telur-beras-hingga-minyak-goreng>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti kenaikan harga pangan khususnya daging ayam telur hingga beras hingga minyak goreng pada minggu kedua September 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Ateng Hartono mencatat harga rata-rata daging ayam ras secara nasional mencapai Rp 41.935 per kg di atas HAP yang berada di level Rp 40.000 per kg.

"Daging ayam ras perlu mendapat perhatian, karena kenaikannya 3,04 persen dan juga sudah di atas HAP untuk daging ayam ras," kata Ateng dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (14/9/2026).

BPS mencatat kenaikan tersebut terjadi di 227 kabupaten/kota atau sekitar 63,06% dari seluruh kabupaten/kota.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas telur ayam ras. Namun begitu, BPS mencatat harga telur ayam ras masih berada di bawah HAP yakni Rp 29.489 per kg.

Meski masih berada di bawah HAP, BPS tetap menyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,79%.

"Walaupun secara HAP, masih di bawah HAP konsumen, tetapi perlu untuk diperhatikan karena bulan yang lalu juga mengalami peningkatan dan dari sisi jumlah kabupaten kotanya cukup banyak," kata Ateng.

Khusus beras, BPS mencatat kenaikan IPH beras medium mencapai 0,67% dan harga beras premium tercatat 0,60%.

Selain itu, BPS juga mencatat kenaikan harga minyak goreng secara umum yang mencapai Rp 20.241 per per liter, naik dari sebelumnya Rp 20.215 per liter.

"Untuk minyak goreng juga naik 0,13%. Ada 81 kabupaten-kota yang mengalami peningkatan. Walaupun demikian, untuk MinyakKita mengalami penurunan kecil 0,03%," ungkap Ateng.

BI Waspadai Tekanan Inflasi dari Kenaikan Harga Pangan dan Minyak

Senin, 14 September 2026 15:05 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-waspadai-tekanan-inflasi-dari-kenaikan-harga-pangan-dan-minyak>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mewaspadai tekanan inflasi ke depan yang berasal dari kenaikan harga pangan dan minyak. Kedua komponen tersebut dinilai menjadi tantangan utama yang dapat memengaruhi inflasi, di tengah inflasi inti yang masih relatif stabil.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, inflasi inti masih berada dalam kondisi terkendali. Hal ini sejalan dengan aktivitas ekonomi Indonesia yang dinilai masih bergerak di bawah level potensialnya.

Menurut Destry, kondisi tersebut membuat tekanan inflasi yang bersumber dari aktivitas ekonomi atau inflasi inti masih relatif dapat dikendalikan meski pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.

Namun, perhatian BI saat ini lebih tertuju pada inflasi pangan bergejolak atau volatile food inflation. Destry menyebut harga pangan dan minyak menjadi dua tantangan utama inflasi global yang juga perlu diwaspadai Indonesia.

“Tapi memang concern itu adalah volatile food inflation,” ujar Destry saat melakukan rapat kerja dengan DPD RI, Senin (14/9/2026).

Ia mengatakan, dalam sejumlah pertemuan internasional, termasuk BRICS dan Basel, harga minyak dan pangan turut menjadi perhatian karena berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi global.

“Disampaikan, tantangan utama global itu adalah dua, harga minyak dan pangan. Nah ini yang menjadi tantangan kita semua,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi tekanan dari pangan, BI bersama pemerintah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi. Salah satunya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GTIPS).

Destry mengatakan, program tersebut dijalankan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga di daerah.

Sejumlah langkah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan, mulai dari kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, pelaksanaan pasar murah, hingga penguatan cadangan pangan.

“Dan koordinasi yang terus kita perkuat. Dan ini alhamdulillah gerakannya masih jalan terus, sehingga volatile food inflation masih bisa kami kendalikan di bawah 5%,” kata Destry.

Meski demikian, Destry mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang mencatat inflasi di atas sasaran. Ia menyebut daerah-daerah tersebut sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi.

“Kalau kita lihat yang di peta sebelah kiri, ini adalah daerah-daerah merah, itu adalah daerah-daerah yang inflasi mereka itu di atas inflasi 3,5% yang menjadi target kami,” pungkasnya.

Belanja Pemerintah Pusat yang Dinikmati Daerah Dipatok Rp 1.445 Triliun pada 2027

Senin, 14 September 2026 13:09 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pemerintah-pusat-yang-dinikmati-daerah-dipatok-rp-1445-triliun-pada-2027>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang dinikmati daerah sebesar Rp 1.445 triliun pada 2027, meningkat Rp 85 triliun dari tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan belanja pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan masyarakat di daerah menunjukkan ruang fiskal untuk pembangunan daerah pada 2027 justru semakin meningkat.

"Tahun ini dinaikkan lagi sebesar Rp 85 triliun. Jadi secara total net-nya sebetulnya uang yang dibelanjakan di daerah tidak pernah berkurang," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (14/9/2026).

Sementara itu, alokasi TKD pada 2027 ditetapkan sebesar Rp 735 triliun. Angka tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 63,4 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 415 triliun, DAK Fisik Rp 5 triliun, DAK Nonfisik Rp 150,9 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 16,8 triliun, Dana Keistimewaan Yogyakarta atau DIY Rp 1,1 triliun, Dana Insentif Fiskal Rp 2,3 triliun, serta Dana Desa Rp 77 triliun.

Purbaya menjelaskan, TKD merupakan instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah sekaligus memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

TKD ke depan harus semakin terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional melalui koordinasi antarlembaga, penyelarasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional, serta penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah. "TKD harus ikut mendorong daya saing daerah," ujarnya.

Gubernur Jateng: Transaksi pameran UMKM MTQ XXXI mencapai Rp500 juta per hari

Senin, 14 September 2026 16:58 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/645191/gubernur-jateng-transaksi-pameran-umkm-mtq-xxxi-mencapai-rp500-juta-per-hari>

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut transaksi perdagangan di Pameran Serambi Nusantara yang digelar dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI di Kota Semarang mencapai kisaran Rp500 juta per hari.

"Per hari sekitar Rp500 juta pendapatan yang dihasilkan oleh mereka. Bagus sekali ini," kata Luthfi di Semarang, Jateng, Senin.

Terdapat 24 pemerintah provinsi, 70 pemerintah kabupaten/ kota, serta belasan kementerian yang membuka gerai dalam pameran tersebut.

Menurut dia, tingginya transaksi dalam gelaran tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan MTQ tidak hanya memberikan dampak dari sisi keagamaan dan sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Melalui MTQ, UMKM ikut tumbuh dan berkembang. Mereka yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota dapat bertemu sehingga kita bersama-sama merasakan perputaran ekonomi di wilayah Jawa Tengah," katanya.

MTQ, lanjut dia, juga menjadi momentum untuk memperluas pasar UMKM sekaligus membangun jejaring usaha antardaerah yang tetap berlanjut setelah perhelatan selesai.

Tingginya antusiasme pengunjung di Pameran Serambi Nusantara tersebut dirasakan peserta asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Sekretaris Dekranasda Mimika, Lintje Siwabessy Paiman, mengaku kewalahan melayani masyarakat yang data ke gerai pemerintah daerahnya.

"Hari pertama kami kewalahan. Mungkin masyarakat ingin melihat apa yang dibawa oleh teman-teman dari Papua," katanya.

Bawang Brebes diekspor ke Thailand

Senin, 14 September 2026 08:57 WIB

Pewarta: Aria Ananda, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/645120/bawang-brebes-diekspor-ke-thailand>

Jakarta (ANTARA) - Bawang merah hasil produksi petani di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diekspor ke Thailand, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan ekspor bawang merah tersebut memperluas pasar bagi petani setelah kebutuhan komoditas tersebut di dalam negeri terpenuhi.

“Kita bersyukur kebutuhan bawang merah dalam negeri sudah terpenuhi. Sekarang kita dorong agar produksi terus meningkat sehingga petani mendapatkan pasar yang lebih luas dan harga yang lebih baik, termasuk pasar ekspor,” kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dikatakan Menko saat meninjau dan melepas pengiriman bawang merah ke Thailand dari fasilitas penyimpanan atmosfer terkendali (controlled atmosphere storage/CAS) di Brebes, Jawa Tengah.

Kemenko Pangan mencatat Kabupaten Brebes menjadi salah satu sentra utama bawang merah dengan kontribusi sekitar 20 persen terhadap produksi nasional dan sekitar 60 persen terhadap produksi Jawa Tengah.

Luas tanam bawang merah di daerah tersebut berkisar 30 ribu hingga 35 ribu hektare per tahun dengan produksi sekitar 300 ribu hingga 350 ribu ton.

Selain Thailand, bawang merah asal Brebes telah dipasarkan ke Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Zulhas mengatakan perluasan pasar ekspor perlu tetap mempertimbangkan kecukupan pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri sehingga peningkatan produksi turut memberikan manfaat bagi petani.

Produksi bawang merah nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 1,32 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 1,25 juta ton.

Tenaga Kerja Asing di Jateng Tembus 22 Ribu Orang

Senin, 14 September 2026 20:29 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1266308/tenaga-kerja-asing-di-jateng-tembus-22-ribu-orang>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah (Jateng) mencatat sebanyak 22.375 Tenaga Kerja Asing (TKA) telah bekerja di kawasan Jateng.

Mereka tersebar di 35 kabupaten/kota yang mayoritas merupakan TKA asal Cina.

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz menyebut, TKA yang paling banyak bekerja di Jateng berasal dari Republik Rakyat Cina (RRC) sebanyak 12.269 orang, Korea Selatan 2.142 orang, Jepang 1.961 orang.

Kemudian, India sebanyak 991 orang, Amerika 379 orang, Malaysia 504 orang, Filipina 513 orang, dan Taiwan 625 orang, sisanya dari negara lainnya.

"Mereka bekerja sebagai manajer, profesional, advisor, direksi, dan komisaris," katanya, Senin (14/9/2026).

Menurutnya Aziz, jumlah TKA tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024, TKA di Jateng mencapai 19.292 orang.

Peningkatan tersebut karena industri yang ada di Jawa Tengah ditopang oleh investasi asing atau penanaman modal asing (PMA).

Komposisi investasi Jateng pada semester pertama 2026 mencapai Rp48,56 triliun yang mana PMA-nya mencapai Rp25,92 triliun atau 53,40 persen.

"Asas manfaatnya tenaga kerja asing atau orang asing itu bagi yang punya duit menginvestasikan, bikin perusahaan yang artinya nanti ada penyerapan tenaga kerja," katanya.

Aziz juga berharap, adanya tenaga asing tersebut bisa ada transfer pengetahuan antara pekerja asing dan lokal.

Pekerja asing tersebut yang didampingi oleh pekerja lokal bisa menyerap ilmu yang nantinya pekerja lokal bisa memenuhi kualifikasi jabatan tersebut.

Manfaat berikutnya yang diharapkan adalah perolehan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) yang mencapai USD 100 per bulan per jabatan per TKA.

Meski, ada pengecualian TKA yang tidak ditarik PNPB atau retribusi yang bekerja di sektor pendidikan, pastor dan lain sebagainya.

"Ya dua manfaat itu, transfer knowledge dan retribusi," katanya.

Pemprov Jateng tidak hanya menerima puluhan ribu TKA, sebanyak 50 ribu lebih warga Jateng juga cari peruntungan dengan bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Aziz mengatakan, per Agustus 2026, sebanyak 50.646 orang telah pergi bekerja ke luar negeri. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri sebanyak 62 ribu orang.

"Kalau tahun 2025 itu sebanyak 62.276 orang, tahun ini sampai Agustus baru 50 ribu orang," tandasnya. (Iwn).

Harga Energi Melesat, Neraca Dagang Uni Eropa Berbalik Defisit €13,8 Miliar

Selasa, 15 September 2026 16:57 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/harga-energi-melesat-neraca-dagang-uni-eropa-berbalik-defisit-138-miliar>

KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Neraca dagang Uni Eropa (UE) berbalik menjadi defisit pada periode Januari-Juli 2026. Uni Eropa mencatat defisit perdagangan sebesar €13,8 miliar, berbanding terbalik dengan surplus €84,0 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Mengutip publikasi Eurostat, lembaga statistik Uni Eropa, Selasa (15/9/2026), defisit neraca dagang terjadi lantaran kinerja ekspor UE ke luar blok justru melemah. Sementara impor meningkat cukup signifikan.

Eurostat juga mencatat ekspor ke negara-negara di luar UE selama Januari-Juli 2026 mencapai €1.565,1 miliar, turun 0,6% dibandingkan periode yang sama 2025. Sebaliknya, impor ke kawasan tersebut naik 5,9% menjadi €1.578,9 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, posisi perdagangan UE dengan negara-negara di luar blok berubah drastis. Pada Januari-Juli 2025, UE masih mencatat surplus €84,0 miliar.

Dalam tujuh bulan pertama 2026, surplus tersebut berubah menjadi defisit €13,8 miliar. Artinya, perubahan posisi neraca perdagangan mencapai €97,8 miliar dalam setahun.

Perubahan tersebut terutama terlihat dari kesenjangan pertumbuhan ekspor dan impor. Ekspor ke kawasan di luar UE turun 0,6%, sedangkan impor meningkat 5,9%.

Pada saat yang sama, perdagangan antarnegara anggota UE justru tumbuh. Perdagangan intra-UE mencapai €2.581,6 miliar pada Januari-Juli 2026, naik 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, tekanan terhadap neraca perdagangan mulai mereda pada Juli. Pada bulan tersebut, UE mencatat surplus perdagangan barang dengan negara-negara di luar blok sebesar €8,0 miliar. Angka itu meningkat dari surplus €2,4 miliar pada Juni, tetapi masih lebih rendah dibandingkan surplus €9,8 miliar pada Juli 2025.

Pada Juli 2026, ekspor ke luar kawasan UE mencapai €247,1 miliar, tumbuh 7,8% dibandingkan Juli 2025. Sementara itu, impor dari luar UE mencapai €239,1 miliar, tumbuh lebih cepat sebesar 9,0%. Dengan demikian, meskipun ekspor meningkat secara tahunan, laju kenaikan impor tetap lebih tinggi.

Jika dilihat berdasarkan kelompok produk, energi menjadi salah satu sumber tekanan terbesar terhadap neraca perdagangan UE. Pada Juli 2026, ekspor energi mencapai €13,3 miliar atau tumbuh 30,3% secara tahunan.

Namun, impor energi mencapai €41,3 miliar, naik 13,9%, sehingga kelompok ini mencatat defisit €28,0 miliar. Defisit tersebut lebih besar dibandingkan €26,1 miliar pada Juli 2025.

Dari sisi mitra dagang, Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar bagi UE pada Juli 2026. Ekspor UE ke AS mencapai €49,1 miliar atau tumbuh 10,7%, sementara impor dari AS turun 1,9% menjadi €31,2 miliar. Kondisi tersebut menghasilkan surplus perdagangan UE dengan AS sebesar €17,9 miliar, naik dari €12,6 miliar pada Juli 2025.

Sebaliknya, China menjadi sumber defisit perdagangan terbesar. Ekspor UE ke China turun 1,6% menjadi €17,4 miliar, sedangkan impor dari China meningkat 8,0% menjadi €53,9 miliar. Alhasil, defisit perdagangan UE dengan China melebar menjadi €36,5 miliar pada Juli 2026 dari €32,3 miliar setahun sebelumnya.

Perkembangan berbeda juga terlihat dalam perdagangan UE dengan sejumlah negara Asia. Ekspor ke Taiwan meningkat 42,1% menjadi €3,7 miliar, sementara impor dari Taiwan naik 43,8% menjadi €5,5 miliar. Dengan Jepang, ekspor UE tumbuh 7,7% dan impor naik 13,1%. Sementara itu, ekspor ke India meningkat 17,3% dan impor naik 10,0%.

Untuk zona euro, kondisinya relatif lebih kuat. Pada Juli 2026, kawasan negara-negara pengguna euro mencatat surplus perdagangan barang sebesar €14,2 miliar dengan negara-negara di luar kawasan, naik dari €10,7 miliar pada Juli 2025. Ekspor zona euro mencapai €276,0 miliar atau naik 9,0%, sedangkan impor mencapai €261,8 miliar atau naik 7,9%.

Meski demikian, surplus di negara zona euro sepanjang Januari-Juli 2026 menyusut tajam menjadi €17,0 miliar dari €92,8 miliar pada periode yang sama 2025. Dalam periode tersebut, ekspor zona euro naik 1,2% menjadi €1.763,6 miliar, sementara impor tumbuh jauh lebih cepat, yakni 5,8%, menjadi €1.746,6 miliar.

Eurostat menyatakan angka dalam rilis ini masih bersifat sementara dan didasarkan pada informasi yang diterima dari negara-negara anggota hingga 11 September 2026.

Korsel Disebut Siap Umumkan Investasi US\$350 Miliar di AS

Selasa, 15 September 2026 16:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/korsel-disebut-siap-umumkan-investasi-us350-miliar-di-as>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan disebut akan mengumumkan rincian rencana investasinya di Amerika Serikat (AS) senilai US\$350 miliar pada Jumat (18/9/2026). Informasi tersebut disampaikan seorang anggota parlemen Korea Selatan saat mengajukan pertanyaan kepada calon menteri keuangan negara tersebut.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat (DP) yang berkuasa, Yoon Hu-duk, menyampaikan pernyataan itu dalam sesi uji kelayakan terhadap Lee Hyoung-il, calon menteri keuangan Korea Selatan. Dalam sidang yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, Yoon juga menanyakan sejumlah proyek yang tengah dibahas sebagai bagian dari komitmen investasi Seoul di AS.

"Trump dijadwalkan mengumumkan investasi Korea Selatan di AS pada 18 September," kata Yoon.

Lee mengatakan persoalan tersebut masih dalam tahap konsultasi. Ia menambahkan bahwa dirinya akan memberikan komentar setelah pembahasan antara kedua negara selesai.

Lima proyek investasi Korea Selatan di AS

Dalam sidang tersebut, Yoon juga menyebut sejumlah proyek yang sebelumnya telah diberitakan media sebagai bagian dari rencana investasi Korea Selatan di AS.

Proyek tersebut antara lain pembangunan proyek gas di Texas, pembangunan delapan reaktor nuklir, serta proyek gas alam cair (LNG) di Alaska.

Yoon mengatakan proyek keempat tampaknya berkaitan dengan permintaan AS untuk melakukan pemrosesan ulang sekitar 4.000 ton material nuklir. Sementara proyek kelima berkaitan dengan teknologi penangkapan karbon.

Namun, Lee mengatakan pemerintah tidak dapat mengungkapkan rincian pembicaraan bilateral yang masih berlangsung.

Yoon tidak menjelaskan sumber informasi mengenai proyek-proyek tersebut. Pemerintah Korea Selatan juga belum mengonfirmasi rincian negosiasi tersebut.

Meski demikian, seorang sumber yang mengetahui langsung persoalan tersebut mengatakan Kementerian Perindustrian Korea Selatan telah memberikan pengarahan kepada anggota parlemen dari Partai Demokrat pada pekan lalu. Media lokal juga telah memberitakan cakupan sejumlah proyek yang sedang dibahas.

Menteri Perindustrian Korea Selatan Kim Jung-kwan pada Minggu (13/9) mengatakan kedua negara telah mendekati kesepakatan dalam banyak isu. Namun, dia mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.

Menanggapi pernyataan Yoon, kantor anggota parlemen tersebut mengatakan pemerintah belum mengonfirmasi rincian yang disampaikan sehingga pihaknya tidak dapat memverifikasinya.

Kementerian Perindustrian Korea Selatan menolak memberikan komentar. Kedutaan Besar AS di Seoul dan Gedung Putih juga belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Kesepakatan investasi US\$350 miliar

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mencapai kesepakatan perdagangan pada Oktober tahun lalu. Dalam kesepakatan tersebut, Korea Selatan berkomitmen menanamkan investasi sebesar US\$350 miliar di sektor manufaktur AS.

Sebagai imbalannya, Washington sepakat membatasi tarif impor produk Korea Selatan menjadi 15%. Dari total komitmen tersebut, sekitar US\$150 miliar dialokasikan untuk sektor industri galangan kapal.

Namun, implementasi kesepakatan perdagangan tersebut mengalami sejumlah penundaan. Kondisi itu bahkan mendorong Trump mengancam akan mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap Korea Selatan pada awal tahun ini.

Dalam sidang yang sama, calon Menteri Keuangan Lee Hyoung-il juga ditanya apakah nilai berbagai proyek yang sedang dibahas berpotensi melampaui batas investasi Korea Selatan sebesar US\$200 miliar.

Lee menegaskan pemerintah akan menjaga nilai investasi tetap berada dalam batas tersebut dan melakukan negosiasi berdasarkan ketentuan itu.

Sementara itu, anggota parlemen dari partai oposisi, Bae June-young, mengatakan komite-komite parlemen diperkirakan akan mendapatkan pengarahan pada Kamis (17/9) mengenai rencana investasi Korea Selatan di AS.

Malaysia Naikkan Harga Referensi Minyak Sawit Mentah Oktober, Bea Ekspor Tetap 10%

Selasa, 15 September 2026 15:57 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/malaysia-naikkan-harga-referensi-minyak-sawit-mentah-oktober-bea-ekspor-tetap-10>

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia menaikkan harga referensi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk Oktober 2026.

Namun, kenaikan tersebut belum mengubah tarif bea ekspor CPO yang tetap berada di level 10%.

Mengutip Reuters, Selasa (15/9/2026), berdasarkan surat edaran yang dipublikasikan di situs Malaysian Palm Oil Board (MPOB), Malaysia menetapkan harga referensi CPO Oktober sebesar 4.452,66 ringgit per metrik ton atau sekitar US\$1.091,34 per ton.

Harga referensi tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang berada di level 4.392,32 ringgit per ton.

Malaysia merupakan negara eksportir sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Meski harga referensi CPO meningkat, tarif bea ekspor yang berlaku pada Oktober tetap sebesar 10%.

Struktur pajak ekspor CPO Malaysia dimulai dari tarif 3% ketika harga CPO berada di kisaran 2.250-2.400 ringgit per ton. Tarif tersebut kemudian meningkat secara bertahap seiring kenaikan harga CPO.

Adapun tarif pajak ekspor maksimum sebesar 10% berlaku ketika harga CPO berada di atas 4.050 ringgit per ton.

Dengan harga referensi Oktober yang mencapai 4.452,66 ringgit per ton, tarif bea ekspor CPO Malaysia tetap berada pada level maksimum 10%.

Kurs yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah US\$1 setara dengan 4,0800 ringgit.

Surplus Dagang Italia Tembus €8,24 Miliar pada Juli, Jauh Melebihi Ekspektasi

Selasa, 15 September 2026 15:39 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/surplus-dagang-italia-tembus-824-miliar-pada-juli-jauh-melebihi-ekspektasi>

KONTAN.CO.ID - ROMA. Neraca perdagangan Italia mencatat surplus €8,24 miliar pada Juli 2026. Realisasi surplus neraca dagang tersebut lebih tinggi dibandingkan konsensus proyeksi ekonom, yang memprediksi surplus perdagangan Italia di Juli 2026 hanya akan mencapai €4,77 miliar.

Istat, biro statistik nasional Italia, mengumumkan, Selasa (15/9/2026), kinerja tersebut ditopang terutama oleh perdagangan dengan negara-negara di luar Uni Eropa, yang menghasilkan surplus €6,99 miliar, sementara perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa menyumbang surplus €1,25 miliar.

ekspor Italia pada Juli meningkat €4,73 miliar dibandingkan Juni. Jika transaksi energi dikeluarkan dari perhitungan, surplus perdagangan bahkan mencapai €13,76 miliar.

Perbaikan neraca perdagangan tersebut terjadi ketika ekspor dan impor bergerak berlawanan secara bulanan. Berdasarkan data yang telah disesuaikan secara musiman, ekspor meningkat 0,3% pada Juli dibandingkan Juni, sedangkan impor turun 1,2%. Dalam tiga bulan hingga Juli, ekspor masih tumbuh 1,3% dan impor meningkat lebih tinggi, yakni 2,8%.

Perbedaan kinerja antara perdagangan dengan Uni Eropa dan negara di luar blok tersebut menjadi salah satu faktor utama. Ekspor Italia ke Uni Eropa turun 5,6% secara bulanan pada Juli, sedangkan ekspor ke negara-negara non-Uni Eropa melonjak 6,9%. Dari sisi impor, arus barang dari Uni Eropa meningkat 0,8%, sementara impor dari negara non-Uni Eropa turun 3,6%.

Secara tahunan, kinerja perdagangan Italia masih mencatat pertumbuhan positif. Pada Juli, ekspor meningkat 4,7% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor tumbuh 4,6%. Ekspor ke negara-negara Uni Eropa naik 2,7%, sementara ekspor ke luar Uni Eropa tumbuh lebih cepat sebesar 6,6%.

Dari sisi impor, arus barang dari Uni Eropa meningkat 4,9% secara tahunan, sedangkan impor dari negara-negara non-Uni Eropa tumbuh 4,2%. Dengan demikian, baik ekspor maupun impor sama-sama mencatat pertumbuhan tahunan pada Juli, meski pertumbuhan ekspor sedikit lebih tinggi.

Jika dilihat berdasarkan kelompok barang, barang antara menjadi salah satu pendorong utama ekspor. Ekspor barang antara meningkat 10,0% secara tahunan pada Juli, sementara ekspor barang modal naik 1,0% dan barang konsumsi tumbuh 2,5%. Ekspor energi meningkat paling tinggi, yakni 19,0%, meski kelompok energi hanya memiliki porsi 2,5% dari total ekspor.

Pada sisi impor, barang antara meningkat 7,7% secara tahunan dan barang modal naik 6,6%. Impor energi mencatat kenaikan paling tinggi, yakni 29,7%. Namun, energi juga menjadi satu-satunya kelompok utama yang menghasilkan defisit perdagangan besar, sebesar €5,52 miliar pada Juli.

Di luar energi, neraca perdagangan Italia menunjukkan surplus yang jauh lebih besar. Pada Juli, surplus perdagangan di luar energi mencapai €13,76 miliar. Secara kumulatif Januari-Juli 2026, surplus di luar energi mencapai €65,13 miliar, sedangkan total surplus perdagangan tercatat €32,88 miliar.

Perdagangan dengan sejumlah mitra non-Uni Eropa memberikan kontribusi besar terhadap surplus tersebut. Pada Juli, Italia mencatat surplus €3,63 miliar dengan Amerika Serikat, €2,38 miliar dengan Swiss, dan €2,05 miliar dengan Inggris. Perdagangan dengan Jepang juga menghasilkan surplus €505 juta.

Sebaliknya, perdagangan dengan China masih menghasilkan defisit terbesar. Pada Juli, defisit perdagangan Italia dengan China mencapai €4,20 miliar. Sepanjang Januari-Juli 2026, defisit dengan China mencapai €27,84 miliar. Italia juga mencatat defisit €3,76 miliar dengan negara-negara Asia lainnya pada Juli.

Sementara transaksi ekspor impor Italia dengan kawasan ASEAN masih mencetak defisit sebesar €133 juta di Juli 2026. Sementara di periode Januari-Juli 2026, total defisit neraca dagang Italia dengan ASEAN mencapai €2,10 miliar.

Ekspor Italia ke ASEAN tercatat merosot 26,9% secara tahunan di Juli 2026. Sementara impor hanya naik 0,5% secara tahunan.

Kinerja perdagangan Italia dengan negara-negara non-Uni Eropa secara keseluruhan cukup kuat. Ekspor ke kawasan tersebut meningkat 6,6% secara tahunan pada Juli, sementara impor naik 4,2%. Secara kumulatif Januari-Juli, ekspor ke luar Uni Eropa meningkat 4,8% dan impor tumbuh 5,3%.

Perkembangan perdagangan tersebut juga diikuti kenaikan nilai unit barang yang diperdagangkan. Secara tahunan pada Juli, indeks nilai unit ekspor meningkat 6,5%, sementara volume ekspor justru turun 1,7%. Untuk impor, nilai unit meningkat 7,5%, sedangkan volume impor turun 2,7%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai perdagangan Italia pada Juli berlangsung bersamaan dengan kenaikan nilai unit barang, sementara volume perdagangan justru mengalami penurunan secara tahunan. Dengan kata lain, kenaikan nilai ekspor dan impor tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan volume barang yang diperdagangkan.

Pasar Tenaga Kerja Inggris Tertekan, Lowongan Kerja di Level Terendah Sejak 2014

Selasa, 15 September 2026 14:03 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/pasar-tenaga-kerja-inggris-tertekan-lowongan-kerja-di-level-terendah-sejak-2014>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pasar tenaga kerja Inggris kembali menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Jumlah pekerja yang masuk dalam sistem penggajian turun pada Agustus, sementara jumlah pencari tunjangan terkait pengangguran meningkat.

Pada saat yang sama, jumlah lowongan kerja turun ke level terendah di luar periode pandemi sejak 2014. Kondisi ini terlihat dalam data ketenagakerjaan Office for National Statistics (ONS) Inggris periode Agustus 2026, yang dipublikasikan Selasa (15/9/2026).

Data ONS menunjukkan jumlah pekerja yang menerima pembayaran melalui sistem payroll Inggris turun 26.000 atau 0,1% secara bulanan pada Agustus 2026 menjadi 30,2 juta orang. Secara tahunan, jumlah pekerja payroll turun 145.000 atau 0,5%.

Angka Agustus tersebut masih merupakan estimasi awal, sehingga berpotensi direvisi setelah ONS menerima lebih banyak data. Namun, tren pelemahan sudah terlihat dalam data sebelumnya. Jumlah pekerja payroll turun 101.000 atau 0,3% antara Juli 2025 dan Juli 2026, serta turun 19.000 atau 0,1% antara Juni dan Juli 2026.

Tekanan tersebut juga tercermin dari indikator pengangguran berbasis klaim. Claimant Count Inggris, yakni data yang menunjukkan jumlah orang yang membuat klaim pengangguran, meningkat secara bulanan maupun tahunan pada Agustus menjadi sekitar 1,692 juta orang. ONS menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat mengalami revisi setelah publikasi awal.

Kenaikan claimant count terjadi setelah indikator tersebut sempat turun dalam dua bulan sebelumnya. Dalam publikasi sebelumnya, ONS mencatat Claimant Count mencapai 1,665 juta pada Juli 2026. Dengan demikian, kenaikan menuju 1,692 juta pada Agustus menunjukkan adanya peningkatan sekitar 27.000 orang secara bulanan. Jumlah ini di atas konsensus proyeksi analis, yang memprediksi klaim cuma naik sekitar 8.300.

Pelemahan pasar kerja semakin terlihat dari sisi permintaan tenaga kerja. Jumlah lowongan kerja di Inggris pada periode Juni-Agustus 2026 diperkirakan turun 8.000 atau 1,1% dibandingkan Maret-Mei 2026, menjadi 702.000.

Level tersebut merupakan yang terendah di luar periode pandemi sejak Agustus-Oktober 2014, ketika jumlah lowongan tercatat sebesar 701.000. ONS juga menyebut estimasi lowongan relatif datar sejak awal tahun dan hanya turun 16.000 dibandingkan periode Januari-Maret 2026.

Masih lemahnya perekrutan terutama terlihat pada perusahaan berukuran lebih kecil. Umpan balik dari survei lowongan ONS menunjukkan sebagian perusahaan kecil mungkin menahan perekrutan karena meningkatnya biaya tenaga kerja.

Di sisi lain, tingkat pengangguran Inggris relatif stabil dalam jangka pendek. Tingkat pengangguran untuk penduduk berusia 16 tahun ke atas diperkirakan sebesar 4,9% pada periode Mei-Juli 2026. Angka tersebut tidak banyak berubah dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi masih 0,2 poin persentase lebih tinggi dibandingkan setahun sebelumnya.

Tingkat pekerjaan penduduk usia 16-64 tahun juga relatif stabil secara kuartalan, yakni 75,1% pada Mei-Juli 2026. Namun, angka tersebut turun 0,1 poin persentase dibandingkan setahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat ketidakaktifan ekonomi berada di 20,9%, turun 0,1 poin persentase baik secara tahunan maupun kuartalan.

Perkembangan upah memberikan sinyal tambahan mengenai perlambatan pasar tenaga kerja. Pertumbuhan upah reguler tahunan, tidak termasuk bonus, mencapai 3,5% pada Mei-Juli 2026. Namun, pertumbuhan total upah termasuk bonus melambat menjadi 3,9%, dari 4,2% pada periode tiga bulan sebelumnya. Pertumbuhan sebesar 3,9% tersebut merupakan yang terendah sejak September-November 2020, ketika pertumbuhannya mencapai 3,7%.

Perbedaan pertumbuhan upah antara sektor publik dan swasta juga masih lebar. Pertumbuhan rata-rata upah reguler tahunan mencapai 6,3% di sektor publik, sementara sektor swasta hanya 2,9%. ONS menyebut pertumbuhan upah sektor publik masih dipengaruhi variasi waktu pemberian kenaikan gaji pada tahun ini.

Data ONS juga menunjukkan jumlah pekerjaan secara keseluruhan mencapai 36,7 juta pada Juni 2026. Angka tersebut turun 48.000 atau 0,1% dibandingkan Maret 2026. Penurunan terutama berasal dari pekerjaan wiraswasta yang berkurang 43.000 atau 1,0%, sementara pekerjaan karyawan turun 10.000.

Namun, secara tahunan jumlah workforce jobs masih meningkat 60.000 atau 0,2%. Komponen pekerjaan karyawan naik 46.000 atau 0,1%, sedangkan pekerjaan wiraswasta turun 10.000 atau 0,2%.

Jepang Siapkan Pemangkasan Pajak Konsumsi, Kekhawatiran Fiskal Tetap Membayangi

Selasa, 15 September 2026 10:06 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-siapkan-pemangkasan-pajak-konsumsi-kekhawatiran-fiskal-tetap-membayangi>

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Jepang dijadwalkan memfinalisasi rancangan pemangkasan pajak konsumsi dan pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga pada Selasa (15/9/2026).

Namun, rancangan tersebut tidak mencantumkan secara jelas sumber pendanaan, sehingga berpotensi mempertahankan kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal Jepang yang sudah terbebani.

Kabinet Jepang diperkirakan menyetujui rancangan tersebut pada Selasa.

Keputusan itu muncul ketika kekhawatiran mengenai kondisi fiskal dan inflasi global mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) bertenor 10 tahun menembus level penting 3%.

Pemangkasan pajak tersebut akan menambah rencana belanja besar yang diusung Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Kebijakan tersebut sebelumnya telah memicu aksi jual obligasi pemerintah Jepang dan mendapat kritik dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent.

Takaichi berkomitmen, membatasi penerbitan obligasi pemerintah baru sekitar 40 triliun yen atau US\$258,7 miliar untuk anggaran tahun fiskal 2027.

Namun, target tersebut mulai mendapat sorotan karena kebutuhan belanja diperkirakan meningkat, sementara permintaan anggaran dari kementerian dan lembaga pemerintah telah membengkak hingga mendekati level era pandemi.

"Pasar akan tetap gelisah hingga persetujuan kabinet terhadap rancangan anggaran yang diperkirakan dilakukan pada akhir tahun," kata Keisuke Tsuruta, senior bond strategist di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Saat ini, Jepang menerapkan pajak konsumsi sebesar 10% untuk barang dan jasa, sementara produk makanan dikenai tarif lebih rendah sebesar 8%.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah berencana memangkas pajak konsumsi makanan dari 8% menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027.

Kebijakan tersebut akan dilengkapi pembayaran tunai yang setara dengan sisa 1%, sehingga secara efektif menghapus beban pajak atas pembelian makanan.

Pemerintah Jepang tidak akan menggunakan obligasi untuk menutup defisit sebagai sumber pendanaan pemangkasan pajak tersebut.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mencari dana dari pendapatan non-pajak serta melakukan peninjauan terhadap subsidi dan keringanan pajak yang sudah ada.

Pemangkasan pajak konsumsi menjadi salah satu kebijakan utama Takaichi untuk meringankan tekanan kenaikan biaya hidup terhadap rumah tangga.

Namun, kebijakan tersebut diperkirakan menciptakan kekurangan penerimaan sekitar 5 triliun yen.

Rancangan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan undang-undang untuk memangkas tarif pajak konsumsi.

RUU tersebut diperkirakan akan diajukan ke parlemen Jepang yang dijadwalkan bersidang mulai bulan depan.

Dengan imbal hasil JGB 10 tahun telah menembus 3%, pasar kini akan mencermati apakah pemerintah Jepang mampu menjalankan stimulus fiskal sekaligus menjaga kredibilitas keuangan negara.

Won Korea dan Dolar Taiwan Melemah di Tengah Pergerakan Terbatas Mata Uang Asia

Selasa, 15 September 2026 09:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-dan-dolar-taiwan-melemah-di-tengah-pergerakan-terbatas-mata-uang-asia>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (15/9/2026).

Won Korea Selatan dan dolar Taiwan menjadi dua mata uang yang mencatat pelemahan cukup besar, sementara pergerakan sejumlah mata uang lainnya cenderung terbatas.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.09 GMT, won Korea Selatan melemah 0,43% ke level 1.352,78 per dolar AS dari posisi sebelumnya 1.347,03. Dolar Taiwan juga turun 0,37% menjadi 31,807 per dolar AS dari 31,688.

Yen Jepang melemah 0,27% ke 154,77 per dolar AS. Dolar Singapura turun 0,12% menjadi 1,272, sementara baht Thailand melemah 0,12% ke 33,24.

Di kawasan Asia Tenggara, rupiah juga berada di zona merah. Rupiah melemah 0,14% menjadi Rp17.665 per dolar AS dari Rp17.640 pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, ringgit Malaysia turun tipis 0,05% menjadi 4,076 per dolar AS dan yuan China melemah 0,04% ke level 6,711. Rupee India relatif stabil di 95,55 per dolar AS.

Hanya peso Filipina yang bergerak menguat di antara mata uang yang tercatat dalam tabel Reuters. Peso naik tipis 0,06% menjadi 62,795 per dolar AS.

Jika dihitung sejak awal 2026, kinerja mata uang Asia menunjukkan perbedaan yang cukup lebar. Won Korea Selatan menjadi salah satu yang menguat paling besar dengan kenaikan 6,49% terhadap dolar AS.

Yuan China juga menguat 4,13%, sedangkan yen Jepang dan dolar Singapura masing-masing naik 1,21% dan 1,09%.

Sebaliknya, sejumlah mata uang Asia masih mencatat pelemahan sepanjang tahun. Peso Filipina turun 6,36%, rupee India melemah 5,94%, rupiah terdepresiasi 5,63%, sedangkan baht Thailand turun 5,39%.

Dolar Taiwan juga masih melemah 1,16% dibandingkan posisi akhir 2025. Sementara itu, ringgit Malaysia turun tipis 0,49%.

Pergerakan mata uang Asia berlangsung di tengah perhatian investor terhadap arah kebijakan bank sentral utama dunia, terutama Federal Reserve.

Investor juga mencermati perkembangan geopolitik dan harga minyak yang berpotensi memengaruhi inflasi serta ekspektasi suku bunga global.

Rupiah Menutup Perdagangan di Level Rp17.691/US\$

Selasa, 15 September 2026 16:02 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121598/rupee-menutup-perdagangan-di-level-rp17-691-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Selasa (15/9/2026) dengan melemah 0,24% ke Rp17.691/US\$. Pelemahan rupiah dipicu oleh dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat seiring meningkatnya ekspektasi The Fed akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama.

Tekanan terhadap rupiah tak cuma datang dari faktor domestik. Pergerakan mata uang Asia juga tertekan pada sore ini. Won Korea Selatan bahkan melemah paling dalam 1,1%.

Pelemahan pada mata uang kawasan yang hampir serempak itu mencerminkan adanya perubahan sentimen global, terutama setelah pasar kembali memperhitungkan risiko bahwa ruang pelonggaran moneter The Fed sepertinya makin terbatas.

Bahkan, obligasi pemerintah AS, US Treasury, tenor 10 tahun kembali terkerek 3,9 basis poin (bps) ke 5,02%. Ini merupakan level tertinggi sejak Oktober 2023.

Ekspektasi itu timbul lantaran harga minyak terus berada di level tinggi, US\$106/barel. Kenaikan harga minyak memicu kekhawatiran akan inflasi. Tanpa kenaikan harga minyak pun, inflasi AS cukup bandel, dan berada di 3,5%, jauh dari target The Fed 2%.

Berdasarkan CME FedWatch, peluang kenaikan suku bunga Fed Fund Rate naik lagi 94,5%. Agaknya pelaku pasar semakin dominan berpendapat bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Padahal, sebelum data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) dirilis Jumat lalu, peluangnya baru sekitar 70%.

Tekanan ini juga kian sensitif bagi rupiah yang sebenarnya sudah berada di level lemah. Sebagai catatan, rupiah sudah melemah 5,66% sepanjang tahun ini.

Utang Luar Negeri RI Naik 4,9% (yoy) per Juli 2026

Selasa, 15 September 2026 18:12 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121591/utang-luar-negeri-ri-naik-4-9-yoy-per-juli-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Juli 2026 tercatat sebesar US\$454,8 miliar, meningkat dibanding posisi Juni 2026 yang senilai US\$454,5 miliar.

Kendati demikian, secara tahunan, utang luar negeri Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 % (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang luar negeri publik di tengah penurunan utang luar negeri swasta.

Berdasarkan data BI, posisi utang luar negeri pemerintah pada Juli 2026 tercatat US\$218,4 miliar atau bertambah 3,2% (yoy).

"Perkembangan utang luar negeri pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang luar negeri.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22% dari total utang luar negeri pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7%), jasa pendidikan (16,2%), konstruksi (11,5%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%).

Posisi utang luar negeri pemerintah diklaim relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US\$194,5 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 1,2% (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh utang luar negeri kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,4% (yoy) dan 0,3% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi utang luar negeri swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,6% dari total utang luar negeri swasta. Utang swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang.

Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,7% pada Juli 2026 dan didominasi oleh utang jangka panjang.

DPR: Tren Suku Bunga Tinggi, Menkeu Baru Harus Jaga Stabilisasi

Selasa, 15 September 2026 16:00 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121593/dpr-tren-suku-bunga-tinggi-menkeu-baru-harus-jaga-stabilisasi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi XI DPR menaruh harapan besar kepada Menteri Keuangan baru, Suhasil Nazara yang resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Proses serah terima jabatan (sertijab) juga telah dilakukan hari ini, Selasa (15/9/2026).

Ketua Komisi IX Muhammad Misbakhun mengatakan, sebagai teknokrat yang telah lama berada di pucuk pimpinan Kemenkeu, Suhasil semestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan, termasuk menjaga stabilisasi.

"Beliau tahu apa yang harus dikerjakan, tinggal bagaimana menyeimbangkan semua circumstance yang ada, membalance kembali. Dia harus menjaga stabilisasi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Misbakhun juga berhadapan sosok Menkeu baru tersebut dapat mampu mengantisipasi situasi suku bunga tinggi yang diperkirakan akan bertahan lama (higher for longer) terhadap kebijakan fiskal negara ke depan.

Situasi tersebut, kata dia, dapat berdampak dan berpengaruh kepada yield surat utang negara, yang saat ini juga telah menyentuh sekitar 7%.

"Ini yang harus diantisipasi," tutur dia. "Tentunya ini kan butuh stabilisasi. Sehingga pasar harus diyakinkan dengan cara kebijakan-kebijakan yang seperti itu."

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil mengungkapkan arahan Prabowo kepada dirinya. Dia diminta untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan keuangan negara, menjaga APBN juga menstabilkan ekonomi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

"Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing, dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Suahasil dalam pernyataannya kepada wartawan.

Dia juga memastikan akan tetap melanjutkan berbagai kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Purbaya, termasuk diantaranya pembersihan di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

"Yang soal rokok ilegal, saya yakin Pak Djaka, gempur terus. Sepakat ya Pak Djaka? Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat dan akan kita lanjutkan terus," tutur dia.

Harga Pangan Hari Ini: Beras Naik, Cabai Kian Pedas

Selasa, 15 September 2026 11:50 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121561/harga-pangan-hari-ini-beras-naik-cabai-kian-pedas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan pada Selasa (15/9/2026) pukul 11.00 WIB.

Dalam kelompok komoditas beras, harga beras kualitas bawah I dan II mengalami kenaikan. Beras kualitas bawah I naik sebesar 4,03% menjadi Rp15.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah II naik 1,3% menjadi Rp14.900 per kilogram.

Sebaliknya, harga beras kualitas super dan medium mencatatkan penurunan. Beras kualitas super I dan II turun masing-masing sebesar 2,8% dan 2,89% menjadi Rp17.350 dan Rp16.800 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas medium I dan II sama-sama mengalami penurunan sebesar 0,3% menjadi Rp16.550 dan Rp16.350 per kilogram.

Kenaikan harga terjadi secara kompak pada komoditas cabai. Harga cabai merah keriting melonjak 9,51% menjadi Rp66.800 per kilogram dan cabai rawit hijau naik 14,29% menjadi Rp73.200 per kilogram. Adapun harga cabai rawit merah naik 3,57% menjadi Rp94.400 per kilogram.

Satu-satunya penurunan terjadi pada cabai merah besar yang turun 2,37% menjadi Rp53.600 per kilogram.

Pada komoditas gula, harga gula pasir lokal naik 1,31% menjadi Rp19.350 per kilogram. Sementara itu, harga gula pasir kualitas premium turun tipis 0,21% menjadi Rp19.900 per kilogram.

Selanjutnya, harga telur ayam ras segar mengalami kenaikan sebesar 0,34% menjadi Rp29.700 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis. Minyak goreng kemasan bermerek I dijual seharga Rp24.400 per liter, minyak goreng curah mencapai Rp20.500 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II berada di angka Rp23.850 per liter.

Penurunan harga tercatat pada komoditas bawang. Harga bawang putih ukuran sedang turun 1,41% menjadi Rp38.800 per kilogram, sedangkan harga bawang merah ukuran sedang turun 3,95% menjadi Rp38.450 per kilogram.

Sementara itu, harga komoditas daging terpantau stabil tanpa kenaikan. Harga daging ayam ras segar berada pada posisi Rp41.450 per kilogram, daging sapi kualitas I sebesar Rp150.900 per kilogram, dan daging sapi kualitas II sebesar Rp142.050 per kilogram.

Utang Luar Negeri RI Tembus US\$ 454,8 Miliar pada Juli 2026

Selasa, 15 September 2026 15:01 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-ri-tembus-us-us-4548-miliar-pada-juli-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 sebesar US\$ 454,8 miliar. Posisi ini relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai US\$ 454,5 miliar.=

Meski secara bulanan hanya naik tipis, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 4,9% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan ULN publik, sementara ULN swasta masih mengalami kontraksi.

"Posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 tercatat sebesar 454,8 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada Juni 2026 sebesar 454,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 % (yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

BI merinci, posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat sebesar US\$ 218,4 miliar. Angka ini tumbuh 3,2% secara tahunan.

Menurut Denny, peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Ini yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga," lanjut Denny.

Pemerintah juga disebut tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif. Pengelolaannya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah disebut digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pangsa 22,0% dari total ULN pemerintah.

Sementara sektor lainnya seperti, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.

Posisi ULN pemerintah tersebut dinilai relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.

ULN swasta masih menurun

Di sisi lain, BI mencatat ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US\$ 194,5 miliar. Posisi ini mengalami kontraksi 1,2% (yoy).

Penurunan tersebut terutama berasal dari kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang berkontraksi 1,4% (yoy), serta lembaga keuangan (financial corporations) yang turun 0,3% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,6% dari total ULN swasta.

Sama seperti ULN pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang.

Lebih lanjut BI menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,7% pada Juli 2026.

Struktur tersebut juga didukung oleh dominasi utang jangka panjang, sehingga risiko pembiayaan jangka pendek tetap terjaga.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Denny.

BI dan pemerintah akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Denny.

ULN Jangka Pendek Pemerintah Naik 36%, Ekonom Ingatkan Risiko Refinancing

Selasa, 15 September 2026 20:04 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/uln-jangka-pendek-pemerintah-naik-36-ekonom-ingatkan-risiko-refinancing>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren kenaikan utang luar negeri (ULN) jangka pendek pemerintah mulai menjadi sinyal yang perlu diwaspadai. Sejumlah ekonom menilai, kenaikan ULN jangka pendek bisa menimbulkan sejumlah risiko.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, lonjakan utang jangka pendek pemerintah maupun swasta dapat mendorong kerentanan likuiditas.

"Artinya risiko rollover meningkat. Ini perlu diwaspadai mengingat kondisi global yg masih rentan," ujar David kepada Kontan, Selasa (15/9/2026)

Sementara, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan ULN dengan tenor kurang dari satu tahun dapat meningkatkan risiko refinancing, terutama di tengah suku bunga global yang masih tinggi dan harga minyak yang kembali menembus US\$ 100 per barel.

Untuk diketahui, Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan ULN pemerintah jangka pendek atau dengan tenor hingga satu tahun mengalami kenaikan cukup signifikan dalam setahun terakhir.

ULN pemerintah jangka pendek tercatat sebesar US\$ 18,54 miliar pada Juli 2026, naik 36,52% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Juli 2025 yang sebesar US\$ 13,58 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025, ULN pemerintah jangka pendek juga meningkat 25,10% dari US\$ 14,82 miliar.

Sementara itu, ULN pemerintah jangka panjang pada Juli 2026 tercatat sebesar US\$ 199,85 miliar, meningkat tipis 0,90% yoy dari US\$ 198,07 miliar pada Juli 2025.

Secara year to date (YtD), ULN pemerintah jangka panjang naik 0,20% dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar US\$ 199,45 miliar.

Dengan demikian, total ULN pemerintah pada Juli 2026 mencapai sekitar US\$ 218,4 miliar, tumbuh 3,2% yoy. Angka tersebut meningkat dari sekitar US\$ 211,66 miliar pada Juli 2025 dan naik dari sekitar US\$ 214,27 miliar pada Desember 2025.

Berbeda dengan pemerintah, ULN swasta justru mengalami penurunan secara total. Posisi ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US\$ 194,48 miliar, turun 1,16% yoy dari US\$ 196,76 miliar pada Juli 2025. Secara YtD, posisi tersebut turun 0,46% dibandingkan Desember 2025 yang sebesar US\$ 195,37 miliar.

Namun, berdasarkan tenor, ULN swasta jangka pendek justru mengalami kenaikan. Posisi ULN swasta jangka pendek pada Juli 2026 mencapai US\$ 52,10 miliar, naik 4,81% yoy dari US\$ 49,71 miliar pada Juli 2025. Secara YtD, angkanya meningkat 9,57% dari posisi Desember 2025 sebesar US\$ 47,55 miliar.

Sebaliknya, ULN swasta jangka panjang turun menjadi US\$142,38 miliar pada Juli 2026. Secara total, posisi tersebut turun 3,17% yoy dari US\$147,04 miliar pada Juli 2025. Secara YtD, ULN swasta jangka panjang juga turun 3,68% dari US\$147,82 miliar pada Desember 2025.

Secara keseluruhan, BI menyebut posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai US\$ 454,8 miliar, relatif stabil dibandingkan Juni 2026 sebesar US\$ 454,5 miliar dan tumbuh 4,9% yoy.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta.

Ekonom Soroti Utang Jangka Pendek

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, secara umum struktur ULN Indonesia masih cukup sehat karena porsi utang jangka panjang tetap dominan.

"Yang menurut saya perlu lebih diperhatikan justru pergerakan di tenor pendek. ULN jangka pendek pemerintah memang tumbuh 36,5%, tetapi basisnya relatif kecil sehingga belum mengubah gambaran bahwa sebagian besar utang pemerintah masih berjangka panjang," kata Yusuf.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan agar kenaikan ULN jangka pendek tidak dibiarkan menjadi tren yang berkelanjutan. Pasalnya, utang dengan tenor pendek memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan kembali atau refinancing.

"Kalau tren ini terus berlanjut, risikonya perlu diwaspadai karena utang jangka pendek lebih sensitif terhadap kondisi pasar dan kebutuhan refinancing," ujarnya.

Menurut Yusuf, kondisi di sektor swasta juga perlu dicermati. Meskipun total ULN swasta mengalami penurunan, ULN jangka pendek justru meningkat 4,8%.

"Ini yang perlu dicermati karena bisa menunjukkan perusahaan mulai lebih banyak menggunakan pembiayaan yang harus diperbarui dalam waktu kurang dari satu tahun," jelasnya.

Risiko ke Rupiah hingga Neraca Perusahaan

Yusuf menilai, kenaikan utang jangka pendek menjadi semakin penting untuk diperhatikan ketika kondisi suku bunga global masih tinggi dan harga minyak kembali berada di atas US\$ 100 per barel.

Dalam kondisi tersebut, biaya refinancing maupun kebutuhan valuta asing (valas) perusahaan berpotensi meningkat. Tekanan tersebut, kata Yusuf, dapat terlebih dahulu tercermin melalui nilai tukar dan cadangan devisa apabila kewajiban valas yang jatuh tempo dalam waktu dekat semakin besar.

"Tekanannya juga bisa masuk ke neraca perusahaan, terutama di industri pengolahan, listrik dan gas, pertambangan, serta jasa keuangan," ujar Yusuf.

Sementara efek bagi pemerintah, kenaikan ULN jangka pendek menurut Yusuf tidak otomatis meningkatkan tekanan terhadap defisit APBN. Namun, risiko tetap muncul melalui meningkatnya biaya penerbitan dan refinancing Surat Berharga Negara (SBN).

"Di sisi pemerintah, risikonya bukan langsung pada defisit APBN, tetapi pada biaya penerbitan dan refinancing SBN, terutama jika investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi," pungkasnya.

Rupiah Masih Tertekan, Faktor Global Jadi Penggerak Utama

Selasa, 15 September 2026 19:13 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur, Editor: Tri Sulistiowati

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupee-masih-tertekan-faktor-global-jadi-penggerak-utama>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah disebut masih lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal ketimbang pergantian Menteri Keuangan (Menkeu).

Pasar saat ini masih mencermati arah kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh Menkeu Suahasil Nazara, terutama terkait upaya memperkuat soliditas dan keberlanjutan fiskal.

Sehari setelah pergantian Menkeu, pada Selasa (15/9/2026), rupiah spot ditutup di level Rp 17.694 per dolar Amerika Serikat (AS). Ini membuat rupiah melemah 0,14% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya yang berada di level Rp 17.669 per dolar AS.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, pergantian Menkeu sejauh ini tidak terlalu memengaruhi pergerakan rupiah maupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Pergerakan IHSG dan rupiah tidak terlalu terpengaruh oleh pergantian Menkeu. Khusus rupiah, ia lebih didorong oleh faktor global," ujar Wijayanto kepada Kontan, Selasa (15/9/2026).

Menurut dia, pasar masih menunggu kebijakan yang akan ditempuh Suahasil, khususnya dalam memperkuat soliditas dan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, dampak pergantian figur di Kementerian Keuangan terhadap rupiah belum terlihat signifikan.

Wijayanto juga menilai pelemahan rupiah dalam perdagangan terakhir masih tergolong normal dan belum mencerminkan kekhawatiran berlebihan dari pasar terhadap perubahan kebijakan fiskal.

Di sisi lain, Suahasil sejatinya mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha. Namun, pendekatan yang diambil berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Pak Sua sesungguhnya direspons positif oleh dunia usaha. Tetapi, berbeda dengan Pak Purbaya yang menjanjikan banyak hal begitu dilantik, ia memilih untuk menahan diri dari memberikan harapan berlebih kepada pasar dan dunia usaha," jelasnya.

Dalam kondisi rupiah saat ini, Wijayanto menilai faktor kebijakan moneter global lebih berpengaruh. Pasar terutama mencermati arah kebijakan The Federal Reserve (The Fed) dan Bank of Japan (BOJ).

Lebih lanjut, Wijayanto melihat rupiah masih berpotensi menghadapi tekanan apabila pemerintah tidak menunjukkan keseriusan untuk mengubah arah kebijakan fiskal dan sektoral. Menurut dia, penguatan rupiah tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan manajemen fiskal.

Ia memandang pemerintah perlu lebih fokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi dibandingkan sekadar mengejar nominal pertumbuhan. Selain itu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga perlu diperbaiki dengan memangkas anggaran sejumlah program strategis dan meningkatkan alokasi untuk transfer ke daerah.

Pemerintah juga perlu lebih mendorong peran sektor swasta dalam perekonomian. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas sekaligus memperkuat fundamental rupiah.

"Nilai tukar rupiah saat ini sangat artifisial, akibat doping dari BI yang mendekati level maksimal," pungkaskan Wijayanto.

Pemkab Kudus himpun PAD sebesar Rp522,75 miliar hingga Agustus 2026

Selasa, 15 September 2026 06:00 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/645215/pemkab-kudus-himpun-pad-sebesar-rp52275-miliar-hingga-agustus-2026>

Kudus (ANTARA) - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp522,75 miliar atau 73,22 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp713,94 miliar.

"PAD sebesar itu, berasal dari pos pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Senin.

Menurut dia, realisasi PAD sebesar Rp522,75 miliar tersebut menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan sisa waktu yang ada pihaknya optimistis bisa melampaui target yang direncanakan sebesar Rp713,94 miliar.

Dari sejumlah pos penerimaan tersebut, kata dia, pos yang melampaui target, yakni lain-lain PAD yang sah hingga akhir Agustus 2026 dengan realisasinya sebesar Rp29,29 miliar atau 183,37 persen dari target Rp15,97 miliar.

Untuk sektor lainnya, seperti pajak daerah terealisasi sebesar Rp246,75 miliar atau 73,52 persen dari target Rp335,61 miliar.

Retribusi daerah juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp239,14 miliar atau 67,92 persen dari target Rp352,1 miliar.

Sedangkan pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat realisasinya sebesar Rp7,6 miliar atau 73,70 persen dari target sebesar Rp10,3 miliar.

Ia berharap dukungan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.

"Kami berharap seluruh masyarakat memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Karena dengan dukungan tersebut, target PAD Kabupaten Kudus tahun 2026 dapat terlampaui karena dananya nanti untuk pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal," ujar dia.

Untuk realisasi pajak daerah, kata dia, penyumbang pendapatan terbesar dari pos Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) dengan realisasi sebesar Rp71,92 miliar. Dengan persentase 69,16 persen dari target sebesar Rp103,98 miliar.

Sementara itu, dari sektor retribusi, sumbangan terbesar dari retribusi jasa umum dengan realisasi per akhir Agustus 2026 sebesar Rp229,53 miliar dari target sebesar Rp333,18 miliar.

Dorong Kemandirian Ekonomi, Bupati Blora Arief Resmikan ZMODIS Kelompok Penjahit Dapat Rp 55 Juta

Selasa, 15 September 2026 16:54 WIB

Penulis: M Iqbal Shukri, Editor: Raka F Pujiangga

<https://jateng.tribunnews.com/blora-sesarengan/1266403/dorong-kemandirian-ekonomi-bupati-blora-arief-resmikan-zmodis-kelompok-penjahit-dapat-rp-55-juta>

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.

Salah satunya melalui pembangunan ZMODIS (Zona Modis), di Jalan Dr. Sutomo Lorong 3, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora.

ZMODIS yang berada di belakang SMA Negeri 1 Blora tersebut diresmikan Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Selasa (15/9/2026).

Peresmian ini sekaligus menjadi momentum penyerahan bantuan pemberdayaan UMKM kepada Kelompok Penjahit Mustika.

Bantuan yang diserahkan berupa lima mesin jahit, tiga mesin obras, serta pembangunan tempat usaha dengan total nilai mencapai Rp 55.325.000.

Dalam peresmian tersebut, Bupati Blora Arief Rohman didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kiswoyo, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Endro Budi Darmawan, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Antonius Sriandwi Nugrahanto, Ketua BAZNAS Blora H. Sutaat, beserta jajaran, Muspika Kecamatan Blora, Lurah Tempelan, Ketua Yayasan Sion, Kelompok Penjahit Mustika, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kabupaten Blora yang terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Blora yang terus hadir di tengah masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program yang produktif seperti ini,” ujar Arief.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat usaha kecil agar mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Bantuan ini merupakan bentuk ikhtiar bersama dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat usaha kecil, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga,” lanjutnya.

Bupati Arief juga berpesan kepada anggota Kelompok Penjahit Mustika agar memanfaatkan sekaligus merawat fasilitas yang telah diberikan. Tidak kalah penting, para penjahit diminta mulai mengoptimalkan pemasaran melalui platform digital.

“Kepada anggota Kelompok Penjahit Mustika, manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Rawat peralatannya dan tingkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sekarang zamannya digital. Manfaatkan WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya untuk promosi,” katanya.

Pihaknya meyakini kualitas produk yang baik, pelayanan yang maksimal, serta promosi yang tepat akan membuka peluang semakin luas bagi usaha penjahit tersebut.

“Kalau jahitannya bagus, promosinya bagus, pelayanannya bagus, insyaallah pelanggan semakin banyak yang datang,” imbuhnya.

Bupati Arief berharap ZMODIS dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan program pemberdayaan UMKM yang digagas BAZNAS Kabupaten Blora.

Ke depan, program serupa diharapkan mampu mendorong semakin banyak pelaku usaha mikro untuk tumbuh, mandiri, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Program pemberdayaan tersebut mendapat sambutan positif dari para penjahit yang tergabung dalam Kelompok Penjahit Mustika.

Salah satu perwakilan kelompok, Tono, mengatakan usaha jahit di tempat tersebut telah memiliki pelanggan tetap.

“Untuk setiap bulan sekitar 50 pelanggan, setiap penjahit di sini sudah memiliki pelanggan tetapnya masing-masing. Total ada 12 penjahit. Saya berharap ke depannya ditambahkan lagi bantuan mesin jahitnya lima lagi, Pak Bupati,” ujar Tono.

Suasana peresmian juga berlangsung hangat ketika Bupati Arief berdialog dengan salah satu penjahit senior, Mbah Sumarni.

Dengan pengalaman menjahit selama puluhan tahun, Mbah Sumarni menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diterima.

“Sampun dangu, Pak Bupati, sejak bujang sampun jahit, sak niki sampun mutu. Maturnuwun sanget, Pak Bupati sampun dibantu,” ujar Mbah Sumarni.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Arief mengatakan pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas para penjahit melalui pelatihan.

“Nantinya penjahit yang ada di sini diberikan pelatihan atau dikursuskan supaya model jahitan dan semakin meningkat kualitas jahitannya, dan pelanggan semakin puas dengan kualitasnya,” kata Arief.

Manfaat keberadaan ZMODIS bahkan langsung terlihat sesaat setelah peresmian. Belum lama rombongan meninggalkan lokasi, sejumlah pelanggan sudah berdatangan untuk menggunakan jasa para penjahit.

Salah satunya seorang pelajar SMA yang menjadi pelanggan pertama setelah peresmian. Ia datang untuk memperbaiki celana sekolahnya yang robek. Tanpa harus menunggu lama, pakaian tersebut langsung dikerjakan oleh penjahit.

Kehadiran pelanggan tersebut seolah menjadi gambaran nyata bahwa ZMODIS tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga telah menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk kebutuhan permak dan perbaikan pakaian.

Kelompok Penjahit Mustika selama ini dikenal melayani jasa permak dan perbaikan pakaian dengan mengutamakan kualitas serta kecepatan pengerjaan.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Blora, H. Sutaat mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen BAZNAS dalam mendorong masyarakat agar semakin mandiri secara ekonomi.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya menjadi sarana untuk menunjang kegiatan usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya BAZNAS dalam membantu masyarakat agar semakin mandiri secara ekonomi,” ujar Sutaat.

Ia berharap mesin jahit, mesin obras, dan fasilitas yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas kelompok.

“Semoga mesin jahit dan mesin obras yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Penjahit Mustika,” paparnya. (Iqs)

MTQ Nasional 2026 Diproyeksikan Gerakkan Ekonomi Jateng hingga Rp1,2 Triliun

Selasa, 15 September 2026 10:21 WIB

Puji Sri Rahayu, Reni Susanti

<https://cahaya.kompas.com/aktual/26115102132990/mtq-nasional-2026-diproyeksikan-gerakkan-ekonomi-jateng-hingga-rp12-triliun>

SEMARANG, KOMPAS.com — Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI 2026 diproyeksikan menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun di Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Abu Rokhmad mengatakan, dampak ekonomi tersebut berasal dari aktivitas ribuan peserta, pendamping, ofisial, dan tamu selama MTQ berlangsung.

“Wakil Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa perputaran ekonomi selama MTQ ini diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Abu dalam rilisnya, Selasa (15/9/2026).

Menurut dia, penyelenggaraan MTQ memberikan manfaat lebih luas bagi daerah tuan rumah. Pergerakan peserta dan pengunjung mendorong aktivitas pada sektor akomodasi, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebutuhan penginapan, makanan, kendaraan, oleh-oleh, dan berbagai keperluan pendukung turut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi selama perhelatan tersebut.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diberhentikan

“MTQ ini mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah. Ada peserta, pendamping, ofisial, tamu, dan masyarakat yang bergerak selama kegiatan berlangsung,” kata Abu.

Diikuti 2.242 peserta

MTQ Nasional XXXI berlangsung pada 11–20 September 2026 di Jawa Tengah, dengan pusat kegiatan di Kota Semarang.

Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti delapan cabang, 24 golongan, dan 48 kategori musabaqah. Perlombaan berlangsung di 12 lokasi.

Selain perlombaan Al-Qur'an, penyelenggara menghadirkan sejumlah kegiatan pendukung yang dapat dikunjungi masyarakat.

Kegiatan tersebut meliputi Kemenag Expo, bazar UMKM dan produk halal, pameran mushaf dan khazanah manuskrip Al-Qur'an, muzakarah ilmiah Al-Qur'an, serta panggung seni dan budaya Islami.

Menurut Abu, kegiatan pendukung itu memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dan daerah untuk memperkenalkan produknya kepada pengunjung dari berbagai wilayah.

Aktivitas selama MTQ juga diharapkan membantu pelaku usaha memperluas jaringan dan membuka peluang pasar baru.

Peluang mengenalkan wisata Jawa Tengah

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, proyeksi perputaran ekonomi sebesar Rp1,2 triliun dihitung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Penghitungan tersebut mempertimbangkan berbagai aktivitas ekonomi yang muncul selama rangkaian MTQ berlangsung.

“Kalau ada yang sekaligus mau berwisata di Semarang dan sekitarnya, akan kami tawarkan,” ujar Taj Yasin dalam rapat pengecekan kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah MTQ Nasional XXXI di Semarang, Rabu (9/9/2026).

Menurut Taj Yasin, kedatangan peserta dan tamu dari berbagai daerah menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi Jawa Tengah.

Selain mengikuti rangkaian MTQ, mereka dapat mengunjungi destinasi wisata serta menikmati kuliner dan produk lokal di Semarang maupun daerah sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kehadiran kafilah dari 37 provinsi memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, MTQ Nasional XXXI tidak hanya menjadi perhelatan keagamaan, tetapi juga ruang pertemuan antara masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai sektor ekonomi.

MTQ Nasional XXXI dibuka di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Sabtu (12/9/2026) malam.

Pembukaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Wakil Menteri Agama Romo R Muhammad Syafi'i.

Hadir pula sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen selaku tuan rumah.

AS-China Bahas Pangkas Tarif Jelang KTT Trump-Xi Jinping

Rabu, 16 September 2026 11:10 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/121669/as-china-bahas-pangkas-tarif-jelang-ktt-trump-xi-jinping/2>

Bloomberg, Prospek perpanjangan gencatan dagang antara AS dan China semakin menguat setelah kedua negara membahas pemangkasan tarif terhadap sejumlah barang, termasuk produk energi dan pertanian AS, menjelang pertemuan tingkat tinggi para pemimpin kedua negara pekan depan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pada Selasa (15/9) bahwa dia akan bertemu dengan mitranya dari China, He Lifeng, pada akhir pekan ini, menjelang pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September di Washington.

Sebelumnya, Bloomberg News melaporkan bahwa AS dan China tengah membahas penurunan tarif terhadap sejumlah barang. Pertemuan pekan depan juga kemungkinan menghasilkan kesepakatan untuk memangkas bea masuk atas bahan baku dari China yang digunakan produsen, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Langkah tersebut diperkirakan akan dilakukan berdasarkan rencana sebelumnya untuk memangkas tarif secara timbal balik terhadap perdagangan senilai sekitar US\$30 miliar. Tarif berdasarkan prinsip most-favored-nation (MFN) akan diterapkan pada sejumlah produk asal China, kata sumber-sumber tersebut. Mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas percakapan yang bersifat tertutup.

Perpanjangan gencatan dagang selama satu tahun akan menghilangkan salah satu potensi hambatan bagi perekonomian dunia yang tengah menghadapi perang di Iran dan Ukraina, harga minyak yang tinggi, serta kembali meningkatnya kekhawatiran inflasi yang mendorong kenaikan biaya pinjaman global. Meski demikian, ekspektasi terhadap pertemuan tingkat tinggi tersebut masih terbatas akibat hubungan China dengan Iran dan Rusia, serta persaingan dalam teknologi terdepan seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Bessent, saat berbicara di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS, mengatakan dia menantikan pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri China tersebut mengenai sanksi terkait perang di Iran, seiring AS meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Republik Islam tersebut.

Sejalan dengan Trump, Menteri Keuangan AS itu secara konsisten menekankan pentingnya mempertahankan keunggulan AS atas China dalam bidang AI, yang saat ini menjadi salah satu area di mana perusahaan-perusahaan China mulai mengejar pesaing mereka di Silicon Valley.

“Penting untuk melihat apakah pihak yang baik atau pihak yang buruk yang memiliki teknologi ini,” kata Bessent. “Sebagai orang yang mengelola hubungan dengan China terkait AI, hal itu sangat penting.”

Persaingan di bidang AI telah muncul sebagai salah satu sumber utama ketegangan antara kedua negara.

Pekan lalu, tiga badan keamanan nasional AS menuduh perusahaan AI China, termasuk DeepSeek dan Moonshot AI—pembuat model Kimi K3 yang menjadi terobosan—secara sistematis mengambil pengetahuan eksklusif dari perusahaan-perusahaan AS. Perusahaan-perusahaan China tersebut tidak memberikan komentar terkait tuduhan AS, sementara pemerintah China dengan tegas membantah klaim tersebut.

Otoritas di Beijing juga mengkritik seruan dari pengembang AI terkemuka AS, Anthropic PBC dan OpenAI, untuk memperlambat pengembangan model-model canggih sebagai bentuk “menebar ketakutan”. Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran China bahwa perusahaan-perusahaan AS dapat menekan pemerintahan Trump untuk semakin membatasi akses China terhadap chip canggih dan perangkat keras lainnya.

Pembicaraan tingkat tinggi tersebut menjadi sinyal terbaru bahwa pertemuan antara para pemimpin dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu masih sesuai rencana. Trump mengatakan Xi akan mengunjungi Gedung Putih pada 24 September, yang juga akan mencakup jamuan makan malam kenegaraan. China belum mengonfirmasi tanggal perjalanan Xi, sesuatu yang biasanya baru dilakukan beberapa hari sebelum keberangkatan.

Bessent tidak menyebutkan tanggal maupun lokasi pertemuannya dengan He. Financial Times melaporkan keduanya akan bertemu di New York pada Minggu. Kedua pejabat tersebut biasanya bertemu sebelum setiap pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin AS dan China untuk mempersiapkan pembicaraan.

Delegasi CEO

Menyoroti peran penting sektor pertanian yang kemungkinan akan menjadi bagian dari pembahasan, perwakilan perusahaan perdagangan pangan milik negara China, Cofco, kemungkinan akan bergabung dengan Xi saat dia melakukan perjalanan ke AS, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Belasan lebih perusahaan juga sedang dipertimbangkan untuk masuk dalam delegasi CEO, meskipun keputusan final belum dibuat, kata sumber-sumber tersebut.

Dalam kunjungan kenegaraannya pada Mei, Trump membawa belasan CEO ke China, termasuk CEO Nvidia Corp. Jensen Huang dan CEO Tesla Inc Elon Musk. Para eksekutif tersebut bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang, sementara Xi mengatakan kepada mereka bahwa perusahaan-perusahaan AS “terlibat secara mendalam dalam reformasi dan keterbukaan China, sebuah proses yang telah memberikan manfaat bagi kedua pihak.”

Tekan Inflasi, The Fed Diproyeksi Naikkan Suku Bunga Acuan

Rabu, 16 September 2026 08:10 WIB

Maria Eloisa Capurro

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121644/tekan-inflasi-the-fed-diproyeksi-naikkan-suku-bunga-acuan/2>

Bloomberg, Federal Reserve (The Fed) diperkirakan menaikkan suku bunga pada Rabu (16/9) untuk pertama kalinya sejak 2023, setelah para pembuat kebijakan semakin kehilangan keyakinan bahwa inflasi akan cukup melandai tanpa dorongan setidaknya dari bank sentral.

Langkah tersebut kemungkinan akan memperburuk hubungan Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh dengan Presiden Donald Trump.

Para pejabat mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,5%-3,75% sejak Desember, ketika mayoritas pembuat kebijakan menilai kemajuan dalam menurunkan inflasi terhambat oleh faktor-faktor sementara.

Keraguan terhadap pandangan tersebut terus meningkat di internal The Fed sepanjang tahun ini. Laporan inflasi yang kembali tinggi baru-baru ini tampaknya memperkuat dukungan untuk setidaknya

satu kali kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Investor pada Selasa melihat peluang lebih dari 90% untuk kenaikan sebesar 25 basis poin pekan ini dan memperkirakan kenaikan lainnya pada akhir tahun.

“Pada titik tertentu, mereka harus menaikkan suku bunga,” kata Sebnem Kalemli-Ozcan, profesor ekonomi di Brown University. “Dan sebenarnya, semakin lama hal ini ditunda, semakin persisten inflasi akan bertahan dan semakin besar pula masalah yang akan ditimbulkannya.”

The Fed akan merilis pernyataan setelah rapat pada pukul 14.00 waktu Washington pada Rabu, bersamaan dengan proyeksi ekonomi dan suku bunga terbaru. Warsh dijadwalkan menggelar konferensi pers 30 menit kemudian.

Kekhawatiran Gedung Putih

Kenaikan suku bunga dapat memicu kritik baru dari Gedung Putih. Bahkan pada Minggu, Trump kembali menyampaikan argumennya bahwa AS seharusnya memiliki biaya pinjaman terendah di dunia.

Trump secara signifikan mengurangi serangannya terhadap The Fed sejak menunjuk Warsh untuk menggantikan Jerome Powell sebagai gubernur. Trump bahkan menyebut Warsh mendapat tekanan dari pejabat The Fed lainnya untuk menaikkan suku bunga, yang dia tuduh “sangat politis.”

Namun, Warsh dalam pidatonya pada akhir Agustus menegaskan bahwa tekanan harga yang mendasari belum mengalami perbaikan berarti. Dia mengatakan The Fed masih memiliki “pekerjaan yang harus dilakukan” jika tidak mendapatkan kepastian baru bahwa inflasi berada di jalur menuju target bank sentral sebesar 2%.

Dua pekan kemudian, data menunjukkan inflasi inti—yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi—naik lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus. Meskipun sebagian besar kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan tarif layanan telepon nirkabel yang mencapai rekor, banyak analis mengatakan The Fed tidak dapat mengabaikan laporan tersebut setelah gagal mencapai target 2% selama lebih dari lima tahun.

Konferensi Pers

Pernyataan Warsh akan menjadi sorotan ketika dia menjawab pertanyaan para wartawan. Dalam kemunculannya setelah rapat pada 29 Juli, dia gagal memberikan penjelasan yang jelas mengenai keputusan The Fed mempertahankan suku bunga dan hanya memberikan sedikit gambaran mengenai pandangannya terhadap perekonomian. Hal itu memicu lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang serta gelombang kritik dari para pedagang dan ekonom.

Namun, pidato gubernur The Fed di Jackson Hole, Wyoming, bulan lalu tampaknya berhasil meredakan kekhawatiran investor. Kenaikan suku bunga pada Rabu dapat semakin memperbaiki dampak yang masih tersisa.

Para wartawan kemungkinan kembali mendesak gubernur The Fed untuk menjelaskan keputusan komite dan mencari petunjuk apakah satu kali kenaikan suku bunga dapat menjadi awal dari siklus kenaikan. Meskipun kecil kemungkinan dia memberikan sinyal yang jelas mengenai arah suku bunga selanjutnya, Warsh dapat kembali membuat investor frustrasi jika menolak menyampaikan pandangannya mengenai kondisi perekonomian saat ini.

Perbedaan Pendapat

Kekhawatiran di internal The Fed terus meningkat sepanjang tahun bahwa serangkaian faktor yang tampaknya bersifat sementara, termasuk tarif dan perang di Iran, berisiko membuat inflasi tinggi tertanam dalam ekspektasi masyarakat.

Tiga pejabat berbeda pendapat dalam rapat The Fed pada Juli dan mendukung suku bunga yang lebih tinggi. Kenaikan pada rapat kali ini juga dapat didukung beberapa kolega mereka yang sebelum laporan inflasi Agustus menyatakan membutuhkan perbaikan data harga untuk terus mempertahankan kebijakan saat ini.

Namun, keputusan bulat belum tentu tercapai. Gubernur The Fed Christopher Waller memberikan sinyal yang beragam mengenai pandangannya terhadap inflasi, sementara Gubernur The Fed New York John Williams mengatakan awal bulan ini masih terdapat bukti bahwa proses disinflasi terus berlangsung. Sejumlah ekonom juga memperkirakan Wakil Gubernur Pengawasan Michelle Bowman, yang dinilai memiliki kedekatan dengan Gedung Putih, dapat berbeda pendapat dan mendukung keputusan untuk mempertahankan suku bunga.

Para pembuat kebijakan pekan ini juga akan menyerahkan proyeksi ekonomi dan suku bunga terbaru. Para ekonom dalam survei Bloomberg baru-baru ini memperkirakan proyeksi mereka terhadap tingkat pengangguran dan inflasi sebagian besar tidak berubah. Proyeksi suku bunga akan menunjukkan berapa banyak pejabat yang memperkirakan kenaikan suku bunga tambahan tahun ini.

Namun, proyeksi tersebut kemungkinan tidak akan mencakup pandangan Warsh, yang tidak berpartisipasi ketika para pejabat terakhir kali menyerahkan proyeksi pada Juni.

Kuras Kas Rp670 T, Perang Iran Ancam Dorong Inflasi AS

Rabu, 16 September 2026 07:00 WIB

Gregory Korte dan Erik Wasson

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/121636/kuras-kas-rp670-t-perang-iran-ancam-dorong-inflasi-as/2>

Bloomberg, Keputusan Donald Trump untuk berperang dengan Iran telah membebani pembayar pajak AS sebesar US\$38 miliar (sekitar Rp670 triliun) dalam biaya langsung selama lima bulan pertama konflik. Perang ini juga akan mendorong inflasi naik sekitar 0,5 poin persentase pada awal tahun depan, menurut studi baru Kongres AS.

Biaya tersebut mencakup penggantian amunisi yang telah digunakan dan peralatan yang hilang dalam pertempuran, peningkatan jam penerbangan, serta kenaikan biaya bahan bakar, kata Congressional Budget Office (CBO) dalam surat kepada anggota DPR AS dari Pennsylvania Brendan Boyle, yang merupakan anggota Demokrat paling senior di Komite Anggaran DPR, pada Selasa (15/9).

Estimasi CBO tersebut sejalan dengan kesaksian Menteri Pertahanan Pete Hegseth kepada Kongres pada Juli, yang menyebut biaya perang telah mencapai US\$37,5 miliar saat itu. Setiap tambahan satu bulan konflik akan menelan biaya setidaknya US\$2 miliar hingga US\$3 miliar. "Biaya bulanan bahkan bisa melonjak lebih tinggi jika eskalasi kekerasan terus terjadi," tulis laporan tersebut.

Laporan itu juga memberikan estimasi pemerintah pertama mengenai dampak perang terhadap inflasi AS. Akibat terganggunya pengiriman minyak dan gas melalui Selat Hormuz, CBO kini memproyeksikan salah satu indikator inflasi utama yang dipantau Federal Reserve (The Fed) akan 0,5 poin persentase lebih tinggi pada awal 2027 dibandingkan proyeksi yang dibuat pada Februari.

Sementara itu, inflasi inti PCE—yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi—akan 0,3 poin persentase lebih tinggi dari perkiraan awal. Inflasi inti tersebut muncul lebih lambat, tetapi juga akan bertahan lebih lama, kata CBO.

Selain itu, perang telah menguras persediaan amunisi yang membutuhkan waktu lima tahun atau lebih untuk dipulihkan, sehingga mengurangi kapasitas militer AS dalam menghadapi konflik besar lainnya, menurut laporan tersebut. Temuan itu sejalan dengan studi dari inspektur jenderal Pentagon yang mengatakan pada Senin bahwa basis industri pertahanan AS tidak mampu mengejar kekurangan amunisi.

"Kekurangan amunisi ini dapat menjadi masalah yang sangat krusial jika timbul konflik dengan lawan yang memiliki persenjataan rudal balistik dan rudal jelajah dalam jumlah besar," tulis CBO, secara khusus menyoroti potensi konflik antara China dan Taiwan.

Namun, Trump menepis risiko tersebut dan menegaskan bahwa AS memiliki pasokan amunisi dalam "jumlah yang secara praktis tidak terbatas."

Laporan tersebut dirilis ketika DPR AS dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas sebuah langkah yang akan menarik pasukan AS dari permusuhan tanpa deklarasi perang secara resmi. Ini merupakan upaya ke-18 di Kongres tahun ini untuk membatasi kewenangan presiden dalam urusan perang.

Melewati Pemilu Paruh Waktu

"Donald Trump dan Partai Republik telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengatakan kepada warga Amerika bahwa kita tidak mampu membantu keluarga di dalam negeri, tetapi tampaknya mereka bisa menemukan puluhan miliar dolar, dan berpotensi jauh lebih banyak, untuk perang sembrono yang membuat warga Amerika harus menanggung akibatnya," kata Boyle, anggota DPR dari Pennsylvania tersebut.

Trump, yang pada awal Maret mengatakan perang tersebut "hampir" berakhir, kini mengatakan konflik itu dapat berlanjut hingga melewati pemilu paruh waktu pada 3 November. Sejumlah penasihat seniornya juga telah mempertimbangkan kemungkinan konflik tersebut berlangsung hingga akhir masa kepresidenannya, Wall Street Journal melaporkan pekan lalu dengan mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya.

"Ada jalan keluar yang jelas di sini," kata mantan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada Bloomberg TV pada Selasa. "Menurut saya presiden sebenarnya ingin mengambil jalan keluar itu sejak beberapa bulan lalu karena ia menghadapi tekanan besar dari pasar, keterbatasan pasokan amunisi, dan tentu saja pemilu sela. Namun mengambil jalan keluar—yang berarti kesepakatan diplomatik dengan Iran yang secara definisi memberikan kelonggaran bagi Iran—akan terlihat seperti sebuah kekalahan."

"Tidak ada jalan keluar militer yang menguntungkan," tambahnya.

Gedung Putih maupun Pentagon tidak menanggapi permintaan komentar mengenai laporan tersebut.

Anggota DPR dari Partai Republik mengajukan rencana anggaran pada Juli yang akan mengalokasikan US\$73 miliar untuk militer dan badan intelijen guna membiayai biaya langsung perang dengan Iran. Rencana anggaran tersebut terhenti di Senat, setelah Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan pada Selasa bahwa persoalan itu "kemungkinan besar baru akan dibahas setelah pemilu."

Rancangan anggaran tersebut merupakan tambahan dari proposal terpisah untuk meningkatkan anggaran rutin Pentagon sebesar US\$350 miliar melalui belanja wajib, yang sebagian dibiayai dengan menargetkan penipuan dalam layanan kesehatan. Kedua rencana tersebut dapat digabungkan setelah pemilu November.

Pasar Obligasi Berhati-hati Menanti Arah Suku Bunga The Fed

Rabu, 16 September 2026 15:15 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121739/pasar-obligasi-berhati-hati-menanti-arah-suku-bunga-the-fed/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pasar obligasi Indonesia mengalami aksi beli di sebagian tenor pendek dan menengah, pada Rabu (16/9/2026), kala pasar keuangan global berekspektasi adanya kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat (AS).

Melansir data Bloomberg, yield tenor 1 tahun bergerak di 6,7%, setelah terpankask tipis 0,2 basis poin (bps). Sementara tenor 5 tahun terpankask paling dalam 5,8 bps ke 7%, disusul tenor 4 tahun turun 3 bps jadi 6,99%, dan tenor 3 tahun turun 2,1 bps ke 6,9%.

Di tenor yang lebih panjang seperti 8-10 tahun, yield tercatat di rentang 7,12-7,13%. Sedangkan pendek tenor 2 tahun, yield justru naik 4,7 bps ke 6,85%. Hal ini mengindikasikan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan.

Pelaku pasar mencermati pertemuan bank sentral AS Federal Reserve yang hasilnya akan diumumkan Kamis (17/8/2026) dini hari waktu Indonesia. Pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 25 bps mencapai 92,4%.

Tekanan ini sempat mendorong kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun ke level 5,04%, tertinggi sejak September 2007. Namun, berdasarkan pemantauan siang ini, yield itu sudah sedikit terpankask 1,4 bps menjadi 4,98%.

Tak cuma yield obligasi pemerintah AS yang terpankask. Di pasar Asia, yield obligasi pemerintah Singapura tenor 10 tahun turun 3,5 bps ke 2,47%, sedangkan yield obligasi pemerintah Jepang terpankask 4,9 bps ke 2,97%. Bahkan, yield obligasi Australia lebih dalam lagi, terpankask 6,3 bps jadi 5,35%.

Sementara, yield obligasi Indonesia berdenominasi dolar AS juga ikut terpankask 3,5 bps ke 5,93%, disusul yield obligasi mata uang dolar AS milik Filipina juga turun 2,2 bps ke 5,88%.

Pergerakan yield di pasar obligasi dunia belum sepenuhnya berada dalam mode risk-off, meskipun investor sedang menghadapi ketidakpastian dari arah kebijakan moneter AS.

Pelaku pasar sebelumnya memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga sepanjang sisa 2026. Pada Jumat lalu, sebelum data inflasi dirilis, probabilitas The Fed mengerek suku bunga berkisar 70%. Namun, angkanya kini melonjak menjadi 92%.

Tekanan inflasi menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga AS diperkirakan naik. Jika kenaikan itu benar-benar terjadi, maka perhatian pelaku pasar agaknya akan beralih pada pertanyaan, apakah ini kenaikan satu kali atau merupakan awal dari siklus pengetatan baru?

Apabila Gubernur The Fed Kevin Warsh memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bunga bulan ini bukan yang terakhir, maka tekanan terhadap obligasi global dan mata uang negara berkembang berpotensi semakin besar. Siang ini, terpankasknya yield US Treasury memberi sedikit ruang bagi mata uang Asia untuk bergerak variatif.

Namun, pergerakan yang beragam ini masih dibayangi sikap kehati-hatian investor akan tingginya yield US Treasury menjelang pengumuman dari The Fed. Melansir data Bloomberg, dolar Taiwan berbalik melemah setelah siang tadi sempat menguat untuk kali pertama dalam lima hari terakhir. Begitu juga dengan won Korea Selatan yang tertekan, lantaran pelaku pasar menanti keputusan The Fed.

Sebaliknya, peso Filipina menguat bersama baht Thailand, yuan China, yuan offshore, yen Jepang, dan rupee India.

Indeks dolar AS terhadap mata uang utama terpengkas 0,06% ke 99,54. Namun, kenaikan harga minyak mentah Brent yang bertahan tinggi di US\$107,49/barel, menahan laju penguatan sebagian mata uang Asia sore ini.

Harga Impor AS Melonjak 0,7% pada Agustus, Inflasi Makin Tertekan

Rabu, 16 September 2026 20:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/harga-impor-as-melonjak-07-pada-agustus-inflasi-makin-tertekan>

KONTAN.CO.ID - Harga impor Amerika Serikat (AS) melonjak pada Agustus 2026, didorong kenaikan harga barang modal dan barang konsumsi.

Data tersebut mengindikasikan tekanan inflasi AS berpotensi kembali meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Melansir Reuters, Departemen Tenaga Kerja AS pada Rabu (16/9/2026) melaporkan harga impor naik 0,7% pada Agustus, setelah turun 0,3% dalam dua bulan sebelumnya.

Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan ekonom yang disurvei Reuters sebesar 0,4%. Harga impor yang menjadi indikator tersebut tidak memasukkan tarif.

Secara tahunan, harga impor AS melonjak 7% hingga Agustus, menjadi kenaikan terbesar sejak Agustus 2022. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan kenaikan 6,1% pada Juli.

Pemerintah AS sebelumnya melaporkan percepatan inflasi konsumen dan harga produsen pada Agustus.

Harga barang modal ikut melonjak

Harga barang modal impor meningkat 0,9% pada Agustus, setelah naik 1% pada Juli. Salah satu pendorongnya adalah harga mesin nonlistrik yang kembali naik 1,2%.

Lonjakan harga barang modal impor turut dikaitkan dengan tingginya permintaan akibat investasi dan belanja infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang tengah meningkat.

Sementara itu, harga barang konsumsi impor di luar kendaraan bermotor kembali naik 0,5% setelah mengalami penurunan dalam dua bulan berturut-turut.

Harga kendaraan bermotor, suku cadang dan mesin impor tidak mengalami perubahan pada Agustus.

Tekanan inflasi inti meningkat

Di sisi lain, harga bahan bakar impor turun tipis 0,1% pada Agustus dan mencatat penurunan selama tiga bulan berturut-turut.

Harga makanan impor hanya naik 0,1%.

Jika komponen makanan dan bahan bakar dikeluarkan, harga impor AS justru melonjak 0,8% pada Agustus, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,3% pada Juli.

Inflasi inti harga impor tersebut meningkat 5,6% secara tahunan hingga Agustus.

Kombinasi tekanan harga impor, kenaikan harga konsumen dan produsen serta penguatan data ketenagakerjaan menjadi perhatian Federal Reserve (The Fed).

Lonjakan inflasi akibat kenaikan harga minyak yang berkaitan dengan perang AS-Israel dengan Iran, ditambah pertumbuhan tenaga kerja nonpertanian yang lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus, diperkirakan turut memengaruhi keputusan The Fed mengenai suku bunga pada Rabu waktu setempat.

Inflasi Inggris Melonjak Jadi 3,1% di Agustus, BOE Diproyeksi Pertahankan Suku Bunga

Rabu, 16 September 2026 13:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-inggris-melonjak-jadi-31-di-agustus-boe-diproyeksi-pertahankan-suku-bunga>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inflasi Inggris meningkat ke level tertinggi dalam lima bulan ke level 3,1% pada Agustus 2026. Asal tahu saja, inflasi tahunan Inggris pada Juli 2026 masih berada di posisi 2,9%.

Angka resmi inflasi Inggris ini dirilis sehari sebelum Bank of England (BOE) akan mengumumkan kebijakan suku bunga. Di mana, BOE diperkirakan mempertahankan suku bunga tetap stabil meskipun terjadi peningkatan tekanan harga.

Peningkatan inflasi tersebut sejalan dengan perkiraan median para ekonom yang disurvei oleh Reuters yang memperkirakan inflasi harga konsumen akan meningkat karena kenaikan harga energi yang kembali terjadi akibat dimulainya kembali konflik di Teluk.

Sebelumnya pada Juli 2026, BoE memperkirakan inflasi tahunan Inggris akan mencapai 2,8% pada Agustus 2026.

Sterling sedikit melemah setelah angka inflasi dipublikasikan pada hari ini (16/9/2026).

Meskipun tingkat inflasi utama lebih tinggi dari yang diperkirakan bank sentral, para pembuat kebijakan kemungkinan akan lebih memperhatikan ukuran pertumbuhan harga yang mendasar yang dampaknya lebih kecil akibat lonjakan biaya energi.

Kantor Statistik Nasional (ONS) mengatakan, ukuran inflasi inti Inggris - yang tidak termasuk barang-barang yang mudah berubah seperti makanan dan bahan bakar - tetap di angka 2,6% untuk bulan keempat berturut-turut pada bulan Agustus.

Inflasi di sektor jasa Inggris - sesuatu yang dipantau ketat oleh Bank of England karena mencerminkan pertumbuhan upah dan tekanan inflasi jangka panjang - juga tidak berubah di angka 3,4%.

Data ONS yang diterbitkan pada hari Selasa menunjukkan pertumbuhan upah tetap mendekati titik terlemahnya sejak tahun 2020.

Investor melihat peluang satu banding tiga Bank of England menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin pada hari Kamis. Namun, dua kenaikan sepenuhnya diperhitungkan sebelum akhir tahun 2026, yang mencerminkan kekhawatiran tentang risiko lonjakan biaya energi yang mendorong kenaikan harga secara lebih luas.

Sementara itu, pada awal pekan ini, Goldman Sachs memperkirakan tingkat inflasi utama Inggris akan mencapai puncaknya di level 3,9% pada awal tahun 2027 mendatang, tingkat yang kemungkinan akan membuat Bank of England (BoE) lebih khawatir tentang masalah inflasi jangka panjang.

Ekonomi Inggris tumbuh paling pesat di antara negara-negara Kelompok Tujuh (G7) pada paruh pertama tahun 2026, yang berpotensi menambah tekanan inflasi.

Mata Uang Asia Mayoritas Menguat, Won Korea Turun Paling Dalam di Tengah Hari Ini

Rabu, 16 September 2026 12:52 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-asia-majoritas-menguat-won-korea-turun-paling-dalam-di-tengah-hari-ini>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergerakan mata uang di Asia cenderung menguat hingga tengah hari ini (16/9/2026).

Hingga pukul 12.30 WIB, dolar Taiwan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melesat 0,35%.

Selanjutnya ada ringgit Malaysia yang menanjak 0,27% dan peso Filipina terangkat 0,13%.

Disusul, baht Thailand melonjak 0,05%. Berikutnya, rupee India dan yuan China yang sama-sama naik 0,05%. Lalu ada dolar Hong Kong yang menguat tipis 0,01% di tengah hari ini.

Baca Juga: Beijing Buka Akses Pasar Luar Negeri, Investor China Menyerbu Saham AS Sementara itu, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah ambles 0,13%.

Kemudian ada yen Jepang terkoreksi 0,1% dan dolar Singapura turun 0,02%. Diikuti rupiah yang terlihat melemah tipis 0,01% terhadap the greenback.

Pada sesi ini, won Korea Selatan sempat melemah hingga 0,8% menjadi 1.372,80 per dolar AS, sehingga membatasi kenaikan indeks mata uang pasar berkembang MSCI yang mencatat sedikit penguatan.

Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan mata uang tersebut terhadap sekerajang enam mata uang utama lainnya, diperdagangkan mendekati level tertinggi dalam dua minggu di angka 99,736.

Pergerakan ini terjadi menjelang keputusan Federal Reserve (The Fed) yang dijadwalkan pada hari yang sama, di mana para pelaku pasar memperkirakan adanya kenaikan suku bunga AS—yang kemungkinan menjadi awal dari serangkaian kenaikan suku bunga di masa mendatang.

Pasar memperhitungkan probabilitas lebih dari 90% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin, sembari tetap memperkirakan total dua kali kenaikan hingga akhir tahun, tulis Lloyd Chan, analis mata uang senior di MUFG, dalam sebuah catatan.

Bank of Japan Diprediksi Akan Naikkan Suku Bunga di Tengah Risiko Inflasi

Rabu, 16 September 2026 09:43 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-of-japan-diprediksi-akan-naikkan-suku-bunga-di-tengah-risiko-inflasi>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Bank of Japan (BOJ) diperkirakan akan menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 31 tahun dan mengisyaratkan kesiapan untuk terus menaikkan biaya pinjaman, mengikuti langkah bank sentral utama lainnya dalam memerangi tekanan inflasi yang terus berlanjut akibat lonjakan harga minyak.

Mengutip Reuters, Rabu (16/9/2026), langkah ini akan menjadi kenaikan pertama dalam tiga bulan dan membawa suku bunga lebih dekat ke tingkat yang dianggap netral bagi perekonomian oleh BOJ, menandai langkah lebih lanjut untuk meninggalkan kebijakan suku bunga sangat rendah yang telah berlangsung selama beberapa dekade—kebijakan yang mengukuhkan status yen sebagai mata uang pendanaan global yang murah.

Kenaikan suku bunga oleh BOJ ini akan menyusul langkah serupa oleh bank sentral Eropa dan langkah pengetatan yang diperkirakan akan dilakukan oleh Federal Reserve AS akhir pekan ini, yang menyoroti fokus mereka pada risiko inflasi.

Setelah hampir sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga, pasar kini menantikan isyarat apa pun yang mungkin diberikan oleh Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengenai waktu dan laju kenaikan lebih lanjut.

"Pasar terbagi antara mereka yang memandang komunikasi hawkish BOJ dapat membantu menurunkan imbal hasil obligasi dengan meredakan kekhawatiran bahwa bank sentral terlambat merespons inflasi, dan pihak lain yang melihatnya justru akan menaikkan imbal hasil karena mendorong ekspektasi terhadap tingkat suku bunga puncak (terminal rate)," kata Katsutoshi Inadome, ahli strategi senior di Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

"Meningat besarnya ketidakpastian mengenai bagaimana pasar akan bereaksi, pendekatan terbaik bagi BOJ adalah tetap bersikap samar sebisa mungkin."

Dalam pertemuan dua hari yang berakhir pada hari Jumat, BOJ diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 1,25% dari 1%.

Menurut para analis, anggota dewan Toichiro Asada—yang sebelumnya menentang kenaikan suku bunga pada bulan Juni—kemungkinan akan kembali mengambil sikap serupa.

Mengingat perlunya mengukur dampak kenaikan suku bunga sebelumnya terhadap kondisi keuangan, banyak pihak di BOJ kemungkinan lebih memilih kenaikan sebesar 25 basis poin dibandingkan langkah yang lebih besar, demikian ungkap sejumlah sumber kepada Reuters.

Tantangan Komunikasi

BOJ telah mengakhiri kebijakan stimulus yang berlangsung selama satu dekade pada tahun 2024 dan menaikkan suku bunga beberapa kali, termasuk pada bulan Juni.

Bank sentral tersebut mempertahankan suku bunga tetap pada bulan Juli namun memperingatkan adanya risiko inflasi yang melampaui target akibat lonjakan biaya bahan bakar, kenaikan biaya impor karena pelemahan yen, serta tingginya permintaan terkait kecerdasan buatan (AI).

Ueda juga menyatakan awal bulan ini bahwa dengan tingkat inflasi inti yang "cukup dekat" dengan target 2%, BOJ harus memberikan perhatian khusus pada risiko inflasi.

Para analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga menjadi 1,25% bulan ini, menjadi 1,5% pada akhir Maret tahun depan, dan kemudian menjadi 1,75% pada kuartal kedua tahun 2027. Sebagian besar memperkirakan tingkat suku bunga puncak (terminal rate) berada di angka setidaknya 1,75%.

Ueda menghadapi tantangan komunikasi yang besar saat menggelar konferensi pers setelah pertemuan kebijakan hari Jumat. Meskipun BOJ berharap untuk menghindari komitmen awal mengenai kenaikan suku bunga berikutnya, sikap yang terlalu dovish dan hanya bergantung pada data (data-dependent) berisiko memicu kembali aksi jual yen yang dapat mendorong kenaikan harga impor.

Di sisi lain, sikap yang terdengar terlalu hawkish dapat mengguncang pasar obligasi, yang saat ini sedang mengalami aksi jual hingga mendorong imbal hasil (yield) ke level tertinggi dalam tiga dekade akibat kekhawatiran terhadap kondisi keuangan Jepang.

Kenaikan suku bunga menjadi 1,25% juga akan menempatkan suku bunga kebijakan BOJ dalam kisaran estimasi suku bunga netral nominal Jepang—yaitu tingkat suku bunga yang tidak mendinginkan maupun memanasakan pertumbuhan ekonomi—yang berkisar antara 1,1% hingga 2,5%.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa jauh BOJ pada akhirnya dapat menaikkan suku bunga.

Ueda menyatakan bahwa BOJ tidak memiliki patokan awal mengenai seberapa jauh suku bunga dapat dinaikkan. Namun, menurut sumber-sumber yang memahami pandangan bank sentral tersebut, banyak pihak di dalamnya melihat adanya ruang untuk beberapa kali kenaikan lagi sebelum mencapai tingkat suku bunga netral; sebagai contoh, anggota dewan yang cenderung hawkish, Naoki Tamura, memperkirakan tingkat suku bunga netral berada di kisaran 2%.

"Menunda kenaikan suku bunga yang diperlukan akan menimbulkan dampak sampingan, meskipun laju kenaikannya akan bergantung pada kondisi ekonomi, harga, dan keuangan pada saat itu," ujar salah satu sumber.

Kebijakan fiskal ekspansif yang diusung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi juga turut mempersulit pengambilan keputusan BOJ.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, memperingatkan mengenai tantangan yang dihadapi bank sentral akibat besarnya dukungan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang digelontorkan oleh pemerintah.

"Di tengah tingginya utang dan kekhawatiran akan dominasi fiskal yang bersama-sama meningkatkan risiko kenaikan ekspektasi inflasi, bank sentral perlu merespons guncangan di masa depan secara tegas demi menjaga independensi, mempertahankan kredibilitas, serta memenuhi mandat stabilitas harga," ujarnya dalam sebuah pidato pekan lalu.

Impor Jepang Agustus Melonjak, Harga Minyak Dorong Biaya Energi

Rabu, 16 September 2026 08:47 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/impor-jepang-agustus-melonjak-harga-minyak-dorong-biaya-energi>

KONTAN.CO.ID - Impor Jepang melonjak untuk bulan ketiga berturut-turut pada Agustus 2026, terdorong kenaikan harga minyak mentah yang meningkatkan biaya energi.

Di sisi lain, ekspor Jepang tetap solid dan mencatat pertumbuhan selama 12 bulan beruntun berkat permintaan produk terkait semikonduktor.

Mengutip data Kementerian Keuangan Jepang pada Rabu (16/9/2026), nilai impor Jepang pada Agustus meningkat 28% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan median proyeksi ekonom sebesar 26,3%.

Kenaikan harga minyak mentah membuat nilai impor energi meningkat meski yen menguat tajam setelah Jepang dan Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi bersama untuk membeli yen.

Data perdagangan tersebut menunjukkan bagaimana kenaikan harga energi memperbesar tagihan impor Jepang sekaligus menambah tekanan inflasi.

Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan (BOJ) akan menaikkan suku bunga pada akhir pertemuan kebijakan dua hari yang berakhir Jumat (18/9).

Sementara itu, nilai ekspor Jepang meningkat 19,3% YoY pada Agustus. Pertumbuhan tersebut melampaui proyeksi ekonom sebesar 18,2%, meski melambat dari kenaikan 23,2% pada Juli.

Kinerja ekspor ditopang kuatnya pengiriman produk terkait semikonduktor serta kenaikan harga logam non-ferrous.

Ekspor Jepang ke AS meningkat 24,9% YoY pada Agustus. Sementara itu, ekspor ke China tumbuh 20,6%.

Defisit perdagangan Jepang melebar

Lonjakan biaya impor energi membuat neraca perdagangan Jepang kembali mencatat defisit. Defisit perdagangan mencapai 1,106 triliun yen atau sekitar US\$7,12 miliar pada Agustus.

Angka tersebut lebih besar dibandingkan proyeksi ekonom yang memperkirakan defisit sebesar 1,053 triliun yen.

Harga minyak kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah serangan terhadap kapal dan infrastruktur energi di Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan.

Kondisi tersebut berpotensi membuat biaya impor Jepang tetap tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Kenaikan biaya impor yang diikuti ekspor solid dan pertumbuhan upah dapat memperkuat alasan bagi BOJ untuk kembali menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Pasar secara luas memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Jumat.

BOJ juga berpotensi memberikan sinyal mengenai percepatan kenaikan suku bunga berikutnya apabila tekanan harga meningkatkan risiko inflasi melampaui proyeksi bank sentral.

Perekonomian Jepang sendiri masih menunjukkan ketahanan meski menghadapi gangguan rantai pasok. Data revisi yang dirilis pekan lalu menunjukkan ekonomi Jepang tumbuh lebih kuat dari perkiraan awal pada kuartal II-2026, ditopang belanja perusahaan yang ternyata lebih solid dari laporan sebelumnya.

Prabowo Sebut 328 BUMN Ditutup, Negara Hemat Anggaran Rp 50 Triliun

Rabu, 16 September 2026 18:01 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-sebut-328-bumn-ditutup-negara-hemat-anggaran-rp-50-triliun>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik curang demi menjaga kekayaan negara, salah satunya lewat efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak menjabat pada 20 Oktober 2024, Prabowo sudah menutup 328 BUMN dan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun.

“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).

Ia mengatakan target hingga akhir tahun ini bisa menutup 750 BUMN, sehingga masih ada sekitar 400 BUMN lagi yang harus ditutup. Dengan penutupan ratusan BUMN itu, ia berharap anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp 100 triliun.

“Uang itu banyak di Indonesia, (tapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ucapnya.

Selain menutup BUMN yang dianggap tak menguntungkan, pemerintah juga berkomitmen menegakkan aturan. Menurut Prabowo, PT Pupuk Indonesia menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan mencatat keuntungan bersih hingga 252%

“PT Pupuk, Dirutnya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20%, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen,” ujar Prabowo.

Pemerintah pun berupaya memberantas tambang ilegal di berbagai wilayah, seperti di Bangka Belitung. Kini, PT Timah Tbk mencatat kenaikan untung hingga sembilan kali lipat dibanding tahun 2025.

“PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900%,” katanya.

Prabowo mengatakan capaian ini bisa terwujud karena pemerintah dan seluruh jajaran direksi BUMN yang ada saat ini tak mau main-main dengan rakyat dan mencari keuntungan sendiri.

“Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegasnya.

Beban Pensiun ASN Daerah Nyaris Rp1.000 Triliun, Fiskal Daerah Berpotensi Tertekan

Rabu, 16 September 2026 17:27 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/beban-pensiun-asn-daerah-nyaris-rp1000-triliun-fiskal-daerah-berpotensi-tertekan>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti beban fiskal daerah yang berasal dari pembayaran kewajiban pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang disebut hampir mencapai Rp 1000 triliun.

Hal ini disampaikan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Suwarni dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 pada Rabu (16/9/2026).

Ia merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Dalam catatan tersebut, jumlah kewajiban pensiun terhadap pegawai pemerintah daerah sudah mencapai Rp 973 triliun.

Ahmad menyebut, risiko liabilitas pensiun ASN daerah hingga kini belum memiliki pencatatan dan skema penyelesaian yang dinilai memadai. Kondisi tersebut berpotensi menjadi beban berat bagi keuangan daerah di kemudian hari.

"Kami mencatat adanya risiko yang belum tertangani secara memadai. Sementara liabilitas pensiun aparatur sipil negara daerah belum jelas pencatatan dan skema penyelesaiannya, dan ini berpotensi menjadi beban yang berat di kemudian hari bagi daerah, dengan potensi beban saat ini sudah mencapai Rp 1.000 triliun," kata Ahmad dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Parlemen, Rabu (16/9/2026).

Karena itu, DPD memandang pemerintah perlu menyiapkan skema yang jelas agar kewajiban pensiun tidak menjadi tekanan fiskal baru bagi pemerintah daerah.

Risiko tersebut menjadi semakin penting di tengah tekanan anggaran daerah. DPD sebelumnya menyoroti porsi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus menurun, sementara kebutuhan belanja daerah untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penanganan bencana tetap besar.

DPD dan Pemerintah Sepakat Anggaran TKD 2027 Naik Jadi Rp 780,22 Triliun

Rabu, 16 September 2026 16:29 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/dpd-dan-pemerintah-sepakat-anggaran-tkd-2027-naik-jadi-rp-78022-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite IV DPD RI dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sepakat mempertimbangkan kenaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 menjadi Rp 780,22 triliun. Angka tersebut naik Rp 45,22 triliun dibandingkan alokasi awal pemerintah sebesar Rp 735 triliun.

Nantinya pertimbangan kenaikan anggaran TKD tersebut akan dilanjutkan dalam pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Kenaikan alokasi TKD tersebut menjadi salah satu pertimbangan DPD RI dalam memberikan pandangan terhadap pembahasan RAPBN 2027. Sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi TKD 2027 sebesar Rp 735 triliun, meningkat dibandingkan outlook TKD 2026 sebesar Rp 696,9 triliun.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan, tambahan alokasi Rp 45,22 triliun tersebut tidak akan menambah utang maupun defisit APBN. Menurut dia, tambahan anggaran itu berasal dari pos belanja cadangan pemerintah pusat yang dalam RAPBN 2027 dialokasikan sekitar Rp 616,77 triliun.

“Dengan ini kami rangkum beberapa pokok pertimbangan. Pertama, menaikkan Transfer ke Daerah dari Rp 735 triliun menjadi Rp 780,22 triliun, yaitu batas atas rentang yang ditetapkan pemerintah sendiri,” kata Ahmad dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Parlemen, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan, tambahan tersebut dapat dialokasikan dari belanja cadangan pusat yang sebagian besar bersifat dana antisipatif. Menurut Ahmad, ruang anggaran tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama menghadapi berbagai risiko bencana.

“Tambahan Rp 45,22 triliun ini tidak menambah utang dan tidak menambah defisit, karena diambil dari pos belanja cadangan pusat sebesar Rp 616,77 triliun yang oleh pemerintah sendiri disebut sebagian besar bersifat dana antisipatif,” ujarnya.

DPD Soroti Kebutuhan Daerah

Ahmad menilai penguatan TKD diperlukan karena pemerintah daerah menghadapi kebutuhan belanja yang semakin beragam. Selain mendukung pelayanan publik dan pembangunan, daerah juga membutuhkan kapasitas fiskal untuk menghadapi bencana yang terjadi di berbagai wilayah.

DPD RI juga meminta agar tambahan TKD tidak hanya diberikan dalam bentuk peningkatan nominal, tetapi diarahkan kepada daerah yang memiliki kebutuhan dan karakteristik khusus.

“Perlu juga menambahkan dana afirmatif dalam tambahan TKD bagi daerah kepulauan, perbatasan, pegunungan, 3T, daerah otonom baru, serta daerah terdampak bencana Sumatra dan kebakaran hutan Kalimantan, Sumatra, dan lain sebagainya,” kata Ahmad.

Sebelumnya, Komite IV DPD RI memang telah menyerap masukan dari pemerintah daerah dan akademisi dalam penyusunan pertimbangan RAPBN 2027. DPD menilai kenaikan nominal TKD perlu diikuti desain alokasi yang lebih tepat sasaran agar dapat memberikan ruang fiskal yang memadai bagi daerah.

Selain TKD, Komite IV DPD RI turut menyoroti alokasi dana khusus dan keistimewaan daerah. Untuk 2027, dana otonomi khusus dialokasikan sebesar Rp 16,85 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Rp 9,34 triliun untuk enam provinsi di Tanah Papua, Rp 4,15 triliun untuk Provinsi Aceh, serta Rp 3,36 triliun untuk dana tambahan infrastruktur Papua.

Ahmad mengatakan, besaran dana otonomi khusus yang dikaitkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) nasional perlu menjadi perhatian. Pasalnya, perubahan DAU nasional secara otomatis dapat memengaruhi besaran dana khusus tersebut.

“Penurunan DAU otomatis menaikkan dana khusus, seiring menguatkan Papua dan Aceh tanpa perlu mengubah satu rumus,” ujarnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan memperhatikan pertimbangan yang disampaikan DPD RI dalam proses pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI.

Suahasil menyebut pertimbangan DPD menjadi penting karena lembaga tersebut merepresentasikan kepentingan daerah dari seluruh Indonesia.

“Kami menyaksikan Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan dari DPD yang akan disampaikan dalam pembahasan RAPBN 2027,” kata Suahasil.

Menurut Suahasil, penyampaian pertimbangan tersebut berlangsung pada waktu yang tepat karena pemerintah tengah menjalankan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI.

“Pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan akan menjadi masukan yang sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam RAPBN 2027 yang disampaikan pemerintah pada 14 Agustus 2026, total belanja negara dirancang mencapai Rp 4.097,2 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, alokasi awal TKD ditetapkan Rp735 triliun.

Dengan adanya kesepakatan kenaikan menjadi Rp 780,22 triliun, tambahan Rp 45,22 triliun tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan dan penetapan akhir RAPBN 2027 bersama DPR RI.

ADB Kucurkan Pinjaman Rp 11,5 Triliun untuk Perkuat Fiskal Daerah

Rabu, 16 September 2026 15:20 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/adb-kucurkan-pinjaman-rp-115-triliun-untuk-perkuat-fiskal-daerah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai US\$ 650 juta atau sekitar Rp 11,5 triliun untuk mendukung Indonesia memperkuat pengelolaan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari Accelerating Decentralization for Improved Local Governance Program (ADIL), yang bertujuan memodernisasi pengelolaan fiskal antarpemerintah, mempercepat tata kelola digital, serta meningkatkan kualitas layanan publik di tengah sistem pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi.

ADB menyebut subprogram pertama ADIL akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola dana publik sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Program tersebut akan mendukung pengembangan platform digital nasional untuk integrasi data dan pelaporan fiskal.

Selain itu, ADB juga mendukung penerapan penilaian pajak properti yang lebih adil untuk membantu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

ADB Country Director for Indonesia Bobur Alimov mengatakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa memiliki peran strategis dalam mendukung ambisi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 secara strategis didukung oleh pembangunan ekonomi provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik penting diberikan," kata Bobur dalam keterangan resmi, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, penguatan arsitektur fiskal dan digital Indonesia dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Arsitektur fiskal dan digital yang diperkuat memungkinkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," katanya.

ADB mencatat sekitar 35%-40% dari total belanja publik Indonesia dikelola di tingkat subnasional. Belanja tersebut mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Besarnya porsi belanja yang dikelola pemerintah daerah membuat penguatan sistem pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah menjadi strategis.

ADB menilai sistem pengelolaan keuangan publik yang masih terfragmentasi serta ketimpangan kapasitas fiskal dan administratif antardaerah dapat melemahkan administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, dan penyediaan layanan publik.

Selain penguatan fiskal, program ADIL juga mencakup aspek perlindungan hak-hak sipil. Kerangka program memasukkan perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak perempuan.

Integrasi risiko bencana ke dalam perencanaan dan pengelolaan fiskal juga menjadi bagian dari program tersebut.

Program ADIL dibangun berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Program ini juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Visi Indonesia Emas 2045.

Melalui dukungan tersebut, ADB berharap reformasi fiskal daerah dapat membantu Indonesia mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan.

DPD: Belanja Infrastruktur Terendah dalam Dua Dekade, PAD Melejit

Rabu, 16 September 2026 20:40 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121776/dpd-belanja-infrastruktur-terendah-dalam-dua-dekade-pad-melejit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menyebut bahwa anggaran daerah yang terus turun memberikan efek bagi belanja infrastruktur di daerah yang turut tergerus dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemotongan belanja modal membuat belanja infrastruktur saat ini merupakan yang terendah sejak dua dekade terakhir," kata Ahmad dalam Sidang Paripurna 2 DPD RI yang berlangsung pada Rabu (16/9/2026).

Hal ini menurutnya membuat target Pendapatan Asli Daerah melonjak dari dari Rp264 triliun pada 2020 menjadi Rp429 triliun pada 2026.

Imbasnya, daerah terpaksa menaikkan berbagai pungutan di sejumlah wilayah. Hal ini menurutnya menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial di daerah.

DPD dalam pokok-pokok pertimbangannya juga meminta pemerintah untuk menaikkan transfer ke daerah dari Rp735 triliun menjadi Rp780,22 triliun.

Menurut Ahmad, angka tersebut merupakan batas atas rentang yang ditetapkan pemerintah sendiri. Sementara tambahan Rp45,22 triliun juga dinilai tidak akan menambah utang dan tidak menambah defisit, karena diambil dari pos belanja cadangan pusat sebesar Rp616,77 triliun.

Sebagai informasi saja, pemerintah mengalokasikan TKD pada 2027 yang hanya sebesar Rp735 triliun. Meski naik dari outlook 2026 yang Rp638 triliun, namun turun drastis dari 2025 yang masih di Rp919 triliun.

Selain itu, DPD juga meminta dana alokasi khusus fisik dipulihkan dari Rp5 triliun menjadi sekurang-kurangnya Rp20 triliun untuk membangun jalan kabupaten, irigasi, air bersih, sekolah, dan puskesmas.

Berikut pokok-pokok pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN 2027:

1. Menaikkan transfer ke daerah dari Rp735 triliun menjadi Rp780,22 triliun, yaitu batas atas rentang yang ditetapkan pemerintah sendiri. Tambahan Rp45,22 triliun ini tidak menambah utang dan tidak menambah defisit, karena diambil dari pos belanja cadangan pusat sebesar Rp616,77 triliun
2. Meminta DPR RI dan pemerintah untuk menghapus atau merumuskan ulang penjelasan pasal 18 agar kenaikan penerimaan sumber daya alam tetap menjadi hak daerah penghasil.
3. Dana alokasi khusus fisik dipulihkan dari Rp5 triliun menjadi sekurang-kurangnya Rp20 triliun untuk membangun jalan kabupaten, irigasi, air bersih, sekolah, dan puskesmas.
4. Fungsi dana desa agar dikembalikan sebagai dana kewenangan desa dengan menaikkan dana desa reguler dari Rp25 triliun menjadi sekurang-kurangnya Rp30 triliun.
5. Menyiapkan diri menghadapi tekanan anggaran tahun 2028, belanja kementerian diproyeksikan melonjak 26,6 persen. Kami memohon jaminan penyesuaian tahun depan jangan lagi dibebankan pada transfer ke daerah.
6. DPD RI perlu diberi ruang, terutama dalam pasal 12 RUU APBN, sehingga dana alokasi khusus ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan atau aspirasi anggota DPR serta Dewan Perwakilan Daerah.
7. Perkuat penerimaan negara tanpa mengorbankan daerah, perluas jumlah pembayaran pajak, bukan menekan yang sudah patuh, namun memperbaiki aturan tempat pembayaran pajak agar sesuai lokasi usaha yang sebenarnya. Selain itu DPD meminta untuk membuka data dasar penerimaan yang dibagi ke daerah termasuk pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak listrik, agar bisa dicocokkan bersama pemerintah daerah.
8. DPD meminta penjelasan menyeluruh atas turunnya setoran dividen Badan Usaha Milik Negara ke APBN, serta pelaporan terbuka atas pengelolaan aset negara melalui Danantara kepada DPR dan DPD.
9. Kesembilan, transparansi pertanggung jawaban pembiayaan di luar APBN, termasuk soal kebutuhan dana program prioritas nasional mencapai Rp2.178 triliun.
10. Menambahkan dana afirmatif dalam tambahan TKD bagi daerah kepulauan perbatasan, pergunungan, 3T daerah otonom baru, serta daerah terdampak bencana Sumatra dan kebakaran hutan Kalimantan, Sumatra, dan lain sebagainya.

Kerek Pertumbuhan, Kemenkeu Beber Rencana Perluas Basis Pajak

Rabu, 16 September 2026 20:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121786/kerek-pertumbuhan-kemenkeu-beber-rencana-perluas-basis-pajak/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan reformasi perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga disiplin fiskal. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas basis pajak.

“Memperluas basis pajak dan memperkuat kepatuhan secara adil,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Junda Agung dalam International Tax Conference 2026 di Jakarta, Kamis (16/9/2026).

Perluasan basis pajak dilakukan melalui pemanfaatan data administrasi dan data pihak ketiga secara lebih optimal. Upaya tersebut dikombinasikan dengan pengawasan berbasis risiko untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan dan memfokuskan penegakan pada area yang paling membutuhkan perhatian.

Junda menyebut bahwa tujuan dari reformasi perpajakan ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus tetap menjaga disiplin fiskal.

Sementara itu, dua prioritas lainnya adalah memodernisasi administrasi dan mempermudah kepatuhan wajib pajak, serta membangun sistem perpajakan yang adil, pasti, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi global.

Junda mengatakan, evaluasi terhadap insentif perpajakan juga diperlukan untuk memastikan insentif fiskal tersebut memberikan manfaat dalam pertumbuhan investasi, lapangan kerja, dan produktivitas.

Namun, kata Junda, reformasi pajak tidak serta-merta dapat ditempuh hanya dengan bermodalkan ambisi semata saja. Reformasi pajak perlu didukung dengan komitmen dalam pelaksanaan perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy making).

“Teknologi harus membuat administrasi dan layanan menjadi lebih baik,” kata Junda. “Pada akhirnya, kepercayaan tidak hanya bergantung pada bagaimana kita mengumpulkan pajak, tetapi juga pada seberapa transparan dan efektif penerimaan tersebut digunakan.”

DPD: Anggaran Pusat Tembus Batas Atas, Daerah Mepet Batas Bawah

Rabu, 16 September 2026 17:40 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121756/dpd-anggaran-pusat-tembus-batas-atas-daerah-mepet-batas-bawah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi mengeluhkan alokasi anggaran daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang dipatok di batas bawah, sementara anggaran pusat ditetapkan melebihi batas atas asumsi makro 2027.

Dalam pemaparannya Ahmad menyebut bahwa Pemerintah dalam RAPBN 2027 telah menetapkan rentang belanja sebesar 11,07-12,01% dari Produk Domestik Bruto(PDB) sementara transfer ke daerah berada dalam rentang 2,55-2,79%

“Yang terjadi kemudian belanja pusat ditetapkan 12,02% tepat di atas di batas atas, transfer ke daerah 2,63% mepet di atas di batas bawah,” kata Ahmad dalam Sidang Paripurna 2 DPD RI yang berlangsung pada Rabu (16/9/2026).

Hal ini menurut Ahmad telah berulang kali terjadi yang menyebabkan porsi transfer ke daerah terus menyusut dari 28,24% pada 2023 menjadi 17,94% pada 2027.

Ahmad juga menyoroti tingginya porsi bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah pada tahun 2027, yakni sebesar Rp650,31 triliun. Angka tersebut hampir menyamai anggaran transfer ke daerah yang berjumlah Rp735 triliun dan harus dibagi ke lebih dari 500 kabupaten dan kota serta lebih dari 75 ribu desa.

“Pemotongan belanja modal membuat belanja infrastruktur saat ini merupakan yang terendah sejak dua dekade terakhir. Akibatnya sudah terasa target pendapatan asli daerah melonjak dari Rp264 triliun pada 2020 menjadi Rp429 triliun pada 2026,” kata Ahmad.

“Daerah terdorong bahkan terpaksa menaikkan berbagai pungutan di beberapa wilayah. Itu sudah menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial.”

Dalam RAPBN 2027, pemerintah sebelumnya memang menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp 735 triliun atau naik 5,5% dari outlook 2026 yang dipatok sebesar Rp639 triliun.

Dari total itu, DBH mengambil porsi senilai Rp63,36 triliun, atau naik sedikit dibandingkan outlook tahun ini yang dipatok sebesar Rp61,49 triliun. Namun dibandingkan 2025, angkanya turun sekitar 60%.

RAPBN 2027: DPD Keluhkan Pusat Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

Rabu, 16 September 2026 15:50 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121749/rapbn-2027-dpd-keluhkan-pusat-kurang-bayar-dana-bagi-hasil/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti sejumlah hal yang menjadi keprihatinan daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Salah satunya soal kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) daerah.

Ketua Komite IV Ahmad Nawardi mengatakan, hal itu berpotensi membuat tambahan risiko fiskal bagi daerah. Pagu DBH di RAPBN 2027 dipatok hanya Rp63 triliun, atau turun 62,5% dibanding realisasi 2025 lalu.

Rapat tersebut juga menjadi pertama kali agenda Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara yang dilantik pada Senin (13/9/2026) lalu. Dia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Ada hal menjadi keprihatin khusus daerah, pertama mengenai risiko fiskal. Kami mencatat adanya risiko yang tertangani secara memadai, kurang bayar DBH yang terus menumpuk," ujar Ahmad dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Rabu (16/9/2026).

Ahmad mengatakan, hal ini membuat daerah hanya menerima dana jauh lebih sedikit dan bukan karena dana sumbangan ke pusat berkurang, melainkan ada perbedaan cara pembagian yang mulai berubah.

Dia lantas menyoroti pemerintah pusat telah mematok target PNBPN di RAPBN 2027 sekitar Rp283 triliun yang berasal dari sumber daya alam (SDA) di daerah yang meliputi minyak, tambang, hingga perairan yang dampaknya dirasakan oleh warga setempat.

"Banyak perusahaan beroperasi di daerah, tetapi membayar pajaknya di kota besar, tempat kantor pusatnya di sana. Daerah menanggung jalan yang susah dan lingkungan terdampak, tapi pajaknya tercatat ditempat lain," tutur dia.

Alhasil, DPD pun meminta sejumlah pertimbangan, yakni meminta transfer ke daerah (TKD) dari semula Rp735 triliun menjadi Rp780,2 triliun, atau bertambah sekitar Rp45,22 triliun yang diambil dari pos belanja cadangan pusat.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah sebelumnya memang menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp 735 triliun atau naik 5,5% dari outlook 2026 yang dipatok sebesar Rp639 triliun.

Dari total itu, DBH mengambil porsi senilai Rp63,36 triliun, atau naik sedikit dibandingkan outlook tahun ini yang dipatok sebesar Rp61,49 triliun. Namun dibandingkan 2025, angkanya turun sekitar 60%.

Utang Luar Negeri Indonesia Makin Rentan Tertular Sentimen Global

Rabu, 16 September 2026 06:37 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121625/utang-luar-negeri-indonesia-makin-rentan-tertular-sentimen-global/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Posisi utang luar negeri Indonesia kembali meningkat pada Juli. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), posisi utang luar negeri mencapai US\$454,76 miliar, naik 4,9% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari data itu, utang luar negeri pemerintah tercatat US\$218,39 miliar, meningkat 0,49% yoy dari US\$217,33 miliar setahun sebelumnya. Sementara itu, utang luar negeri swasta masih turun 1,46% menjadi US\$194,48 miliar.

Sebaliknya, kewajiban luar negeri Bank Indonesia (BI) terlihat melonjak 34,5% yoy menjadi US\$41,89 miliar, dari US\$31,15 miliar. Struktur kewajiban BI pada Juli terdiri atas surat berharga US\$15,90 miliar, mata uang dan simpanan US\$17,24 miliar, serta alokasi Special Drawing Rights (SDR) US\$8,76 miliar.

Jika melihat komposisinya, maka dari total utang luar negeri pemerintah sebesar US\$218,39 miliar, sekitar 67,1% atau setara US\$146,59 miliar berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) alias obligasi pemerintah. Sedangkan, komposisi pinjaman bilateral maupun multilateral 'hanya' US\$71,8 miliar.

Dari angka itu terlihat juga bahwa pemerintah semakin mengandalkan pembiayaan berbasis pasar daripada pinjaman. Memang utang jenis ini memberi fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan pembiayaan, juga memungkinkan pemerintah menjangkau basis investor yang lebih luas. Namun konsekuensinya, utang luar negeri pemerintah kini semakin sensitif terhadap kondisi pasar keuangan global.

Selain itu, dolar Amerika Serikat (AS) masih menjadi mata uang utama dalam struktur utang luar negeri Indonesia. Utang dalam bentuk dolar AS mencapai US\$270,65 miliar, atau sekitar 59,5% dari total luar negeri.

Nilai dolar AS dalam struktur utang turun dari tahun lalu yang mencapai 61,3%. Sementara nilai utang dalam mata uang rupiah meningkat jadi US\$92,61 miliar, atau sekitar 20,4% dari total utang luar negeri.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Tbk Josua Pardede menyebut, penurunan pangsa dolar AS merupakan perkembangan positif dari sisi diversifikasi mata uang. Namun belum cukup besar untuk menghilangkan kerentanan ketika dolar menguat tajam atau likuiditas dolar global menegat.

"Jadi dengan pangsa dolar sekitar 59,5%, lebih dari separuh kewajiban eksternal, Indonesia masih sensitif terhadap pergerakan dolar," kata Josua kepada Bloomberg Technoz.

Namun, perubahan struktur ini tak lantas membuat utang luar negeri terbebas dari risiko. Meski, secara kurs risikonya bisa jadi lebih rendah, utang dalam bentuk rupiah ini juga mencakup SBN.

Artinya, sensitivitas terhadap arus keluar-masuk modal asing serta volatilitas pasar obligasi jadi lebih tinggi. Terlebih di era rezim hawkish bank sentral global akibat tekanan inflasi.

Kenaikan yield global berpotensi mengerek yield SBN, sehingga biaya penerbitan utang baru pemerintah jadi lebih mahal. Di sisi lain, jika investor asing mengurangi kepemilikan SBN, tekanan berpotensi meningkatkan volatilitas di pasar obligasi, sekaligus menekan rupiah.

"Jika rupiah melemah tajam, suku bunga global naik, atau persepsi risiko Indonesia memburuk, maka mereka bisa mengurangi kepemilikan SBN," sebut Josua.

Ia menambahkan, dampak risiko ini bukan berupa lonjakan nilai pokok utang pemerintah, tetapi berupa penjualan SBN, kenaikan yield, kenaikan biaya penerbitan baru, serta tekanan tambahan terhadap rupiah.

Akan tetapi, penggunaan SBN bukan hanya memberikan fleksibilitas pembiayaan yang jauh lebih besar. Melainkan juga membangun pasar obligasi pemerintah yang likuid, serta memungkinkan pemerintah memilih tenor serta waktu penerbitan.

Komposisi Tenor

Sedangkan dari sisi tenor, utang jangka pendek menyusut dan utang jangka panjang bertambah. Dibanding Juli tahun lalu, utang jangka panjang meningkat 2,65% menjadi US\$383,14 miliar. Sedangkan utang jangka pendek turun 1,33% menjadi US\$71,62 miliar.

Akan tetapi, struktur tenor tersebut belum sepenuhnya menghilangkan risiko refinancing. Berdasarkan sisa jatuh tempo utang luar negeri yang harus dibayar dalam satu tahun justru mencapai US\$96,38 miliar, atau sekitar 21,2% dari total utang luar negeri. Nilai ini naik dari US\$93,59 miliar pada Juli 2025.

Besarnya nilai itu menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan kembali tetap besar dan berpotensi menggerus ruang fiskal. Sehingga, pemerintah perlu melakukan antisipasi tekanan likuiditas dalam jangka pendek.

Karena itu, Josua berpendapat pemerintah sebaiknya memilih instrumen berdasarkan biaya dan risiko: memanfaatkan pinjaman multilateral dan bilateral yang murah dan panjang untuk proyek yang sesuai.

Sementara, pemerintah dapat menerbitkan SBN internasional ketika kondisi pasar menguntungkan, kemudian memperbesar SBN rupiah dan basis investor domestik.

Selain itu, pemerintah perlu menyebarkan jatuh tempo agar tidak menumpuk pada tahun tertentu, juga melakukan pembelian kembali atau pertukaran seri apabila profil jatuh tempo mulai terkonsentrasi.

"Strategi pembiayaan pemerintah sendiri sebenarnya sudah diarahkan pada diversifikasi sumber dana, fleksibilitas dan risiko yang terkendali, dengan dominasi pembiayaan dalam mata uang lokal," kata Josua.

Sekda Jateng Ajak Pepabri Ikut Entaskan Kemiskinan

Rabu, 16 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/sekda-jateng-ajak-pepabri-ikut-entaskan-kemiskinan/>

SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengajak para anggota Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di wilayahnya, untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Syukuran HUT ke-67 Pepabri tingkat DPD Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, kontribusi para purnawirawan tidak hanya diperlukan untuk menjaga persatuan, keamanan, dan kondusivitas daerah. Pengalaman mereka selama bertugas, juga dapat dimanfaatkan untuk ikut mengedukasi dan menggerakkan masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial.

Sekda mengatakan, pengalaman para purnawirawan selama berkecimpung di bidang pertahanan dan keamanan, membuat mereka memiliki rasa terhadap bangsa dan berbagai hal yang telah dibangun.

Karena itu, Sumarno berharap semangat pengabdian tersebut juga diteruskan dalam bentuk kontribusi yang lebih dekat, dengan persoalan sehari-hari masyarakat. Pepabri dapat ikut menyosialisasikan kepedulian terhadap lingkungan, hingga membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan.

"Banyak hal yang bisa dilakukan mulai kepedulian terhadap sampah, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya," tutur Sumarno.

Ketua DPD Pepabri Jateng, Muh Nur Rahmad mengatakan, organisasinya merupakan wadah para purnawirawan TNI dan Polri, untuk menjaga nilai-nilai perjuangan sekaligus meneruskan semangat kebangsaan.

Dia menegaskan, semangat perjuangan harus terus dirawat dengan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Pepabri, menurut Rahmad, tidak boleh bersikap apatis terhadap kondisi bangsa.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Daerah DPD Pepabri Jateng, Bibit Waluyo, mengajak para purnawirawan, untuk terus mengambil bagian dalam kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Jawa Tengah.

"Ayo kita bareng-bareng lakukan, untuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan," kata Bibit yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Dia berharap, organisasinya semakin kuat dalam menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa, serta meneruskan semangat perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. (Humas Jateng)*ul

Jawa Tengah Jadi Tujuan Investasi Global, Investor Dubai Incar Proyek Mini Refinery Senilai Rp5 Triliun

Rabu, 16 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jawa-tengah-jadi-tujuan-investasi-global-investor-dubai-incar-proyek-mini-refinery-senilai-rp5-triliun/>

JAKARTA — Investor asal Dubai, Uni Emirat Arab(UEA), tertarik untuk kembali menanamkan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Kali ini potensi yang diincar adalah pengembangan mini refinery untuk mengolah minyak di wilayah Kabupaten Jepara, dengan nilai investasi mencapai kurang lebih Rp5 triliun.

Ketertarikan tersebut muncul setelah adanya pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan calon investor dari Dubai, di sela kegiatan di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Investasi tersebut akan direalisasikan akhir 2026, setelah dilakukan penandatanganan kerja sama.

“Mereka tertarik investasi mini refinery di wilayah Jepara,” kata Luthfi, se usai pertemuan.

Dari paparan calon investor tersebut, Luthfi menjelaskan, mini refinery yang nanti dibangun dapat melakukan pengolahan minyak mentah, dan sebagainya.

Dia berharap, realisasi investasi tersebut diharapkan dapat terwujud, sehingga dapat memperkuat pemenuhan energi di wilayah Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara asal investor di Jawa Tengah. Tercatat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai investasi dari investor asal Uni Emirat Arab di Jawa Tengah mencapai Rp13 triliun.

“Itulah Jawa Tengah. Di saat dunia global yang tidak menentu, Jawa Tengah masih menjadi tujuan investasi, termasuk di Dubai yang hari ini datang,” ucap Luthfi.

Perwakilan investor asal Dubai, Talal Ourfali, mengatakan rencana investasi tersebut dilakukan setelah melihat potensi Indonesia, khususnya Jawa Tengah, yang cukup bagus. Termasuk, potensi pengembangan mini refinery untuk pengolahan minyak mentah.

“Di Indonesia masih kurang untuk mini refinery, padahal kami melihat ada potensi bagus. Kita mau bangun mini refinery, dengan kapasitas mulai 10 ribu barrel per hari, targetnya nanti sampai 30 ribu barrel per hari. Insyaallah tempatnya di Jepara, dan akan mulai segera sebelum akhir tahun. Nilai investasinya sekitar 200 juta dolar AS atau Rp5 triliun,” bebernya.

Selain bertemu investor asal Dubai, Gubernur Ahmad Luthfi juga bertemu dengan Konsul Kehormatan RI di Gdańsk, Polandia, Mirosław Wawrowski. Pertemuan tersebut membahas penguatan diplomasi budaya dan pariwisata, antara Jawa Tengah Indonesia dengan Polandia.

Salah satu poin pembahasan adalah rencana pengembangan Little Indonesia di Dolina Charlotty. Saat ini di tempat itu sudah dibangun kompleks budaya Bali. Selanjutnya, akan dibangun kompleks budaya Jawa.

“Itu menjadi bagian promosi budaya dan pariwisata Indonesia di Polandia. Kompleks Bali sudah selesai dibuat, dan rencana akan membangun kompleks Jawa. Untuk detailnya nanti saya akan berkunjung lagi ke Jawa Tengah,” ujar Wawrowski, saat bertemu Ahmad Luthfi. (Humas Jateng)*ul

Perubahan APBD Batang 2026 Disepakati, Belanja Daerah Tembus Rp1,95 Triliun

Rabu, 16 September 2026 16:13 WIB

Penulis: Tito Isna Utama, Editor: Deni Setiawan

<https://jateng.tribunnews.com/mbangun-batang/1266516/perubahan-apbd-batang-2026-disepakati-belanja-daerah-tembus-rp195-triliun>

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Perubahan APBD Kabupaten Batang 2026 disepakati DPRD bersama Pemkab Batang, Rabu (16/9/2026).

Dalam anggaran tersebut, belanja daerah mencapai Rp1,95 triliun, dengan sejumlah proyek fisik seperti infrastruktur jalan dan irigasi menjadi pekerjaan yang harus dikebut hingga akhir tahun.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan pun mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras karena waktu pelaksanaan kegiatan perubahan anggaran relatif terbatas.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang yang membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan bersama itu menjadi salah satu tahapan sebelum Raperda Perubahan APBD 2026 disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Batang yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 sesuai jadwal.

"Yang menjadi garis bawah adalah bahwa ini kami ucapkan terima kasih atas pembahasan yang kemudian tepat waktu dan sesuai jadwal," kata M Faiz Kurniawan, Rabu (16/9/2026).

Menurut Faiz, ketepatan waktu dalam pembahasan perubahan anggaran penting agar program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.

Terlebih, sejumlah kegiatan fisik dalam Perubahan APBD 2026 memiliki waktu pelaksanaan yang relatif terbatas hingga akhir tahun anggaran.

"Sehingga kami bisa mengupayakan pelaksanaan untuk perubahan anggaran ini juga sesuai waktu dan lebih cepat, khususnya di perubahan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan fisik terutama untuk infrastruktur jalan dan irigasi," ungkapnya.

Belanja Daerah Rp1,95 Triliun

Dalam struktur Raperda Perubahan APBD sebelum pembahasan, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.756.011.534.440.

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.950.344.655.492. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp194.333.121.052,60.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp196.333.121.052,60, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar.

Setelah melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, terdapat perubahan pada struktur pendapatan dan belanja.

Kenaikan Bunga Acuan The Fed Bikin Mata Uang Asia Tertekan

Kamis, 17 September 2026 09:30 WIB

Matthew Burgess, Winnie Hsu dan Ruth Carson

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121819/kenaikan-bunga-acuan-the-fed-bikin-mata-uang-asia-tertekan/2>

Bloomberg, Kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang bernada hawkish diperkirakan akan menekan mata uang Asia, terutama yen menjelang rapat kebijakan moneter Bank of Japan (BOJ) pada Jumat (18/9), menurut sejumlah strategis pasar.

Yen berpotensi melemah menuju rata-rata pergerakan 200 hari di sekitar 158 per dolar AS, sementara imbal hasil obligasi akan dipengaruhi oleh pergerakan obligasi AS. Saham, terutama yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga, juga berada di bawah tekanan.

“Ketegangan kemungkinan masih akan bertahan di pasar Asia mengingat sikap hawkish baru dari The Fed,” kata Tim Waterer, kepala analis pasar di KCM Trade.

Berikut pandangan sejumlah strategis pasar mengenai kenaikan suku bunga The Fed:

ACCM Prime (Glenn Yin)

“Jepang jelas menghadapi tekanan yang sangat besar untuk menaikkan suku bunga sekaligus menyampaikan pesan hawkish guna meminimalkan dampaknya, terutama karena proyeksi ekonomi The Fed (SEP) menunjukkan masih akan ada satu kenaikan suku bunga lagi sebelum akhir tahun.”

Mengingat Jepang telah beberapa kali melakukan intervensi untuk menopang yen, jika BOJ tidak menyampaikan pesan hawkish besok bersamaan dengan kenaikan suku bunga, pasangan dolar-yen akan kembali naik. Level 160 dalam waktu dekat merupakan risiko yang tidak bisa diabaikan.

Siklus pengetatan kebijakan The Fed yang kembali berlangsung mengurangi daya tarik dolar Australia yang selama ini didukung oleh tingkat suku bunga tunai RBA yang relatif tinggi.

“Saya pikir hal ini, ditambah dengan harga energi yang tinggi dan prospek inflasi yang diperkirakan meningkat, akan memberikan alasan konkret bagi RBA untuk menaikkan suku bunga pada akhir bulan.”

AT Global Markets (Nick Twidale)

“Kita akan melihat dolar AS menguat terhadap yen seiring berjalannya hari, meskipun para pedagang akan berhati-hati dalam mengambil posisi beli mengingat pergerakan yang baru-baru ini terjadi.”

“Perkembangan utama terkait perbedaan suku bunga saat ini adalah seberapa hawkish BOJ pada Jumat.”

Memperkirakan pasangan yen dan dolar AS (USD/JPY) akan menguji rata-rata pergerakan 200 hari di sekitar 158,40.

Dengan kenaikan suku bunga BOJ yang kini dianggap pasti, “semuanya akan bergantung pada rincian dalam pernyataan dan konferensi pers. Saya memperkirakan mereka akan bersikap hawkish dan hal itu akan mendorong pembelian yen pada Jumat.”

KCM Trade (Tim Waterer)

“Dengan setidaknya satu kenaikan lagi diperkirakan terjadi dalam siklus ini, imbal hasil dan dolar AS bergerak lebih tinggi, sementara aset yang sensitif terhadap pertumbuhan seperti saham berada dalam posisi yang kurang kuat karena prospek kondisi moneter yang semakin ketat masih terbuka.”

“Ketegangan kemungkinan masih akan bertahan di pasar Asia mengingat sikap hawkish baru dari The Fed dan potensi bank-bank sentral lain mengikuti langkah tersebut.”

Vantage Global Prime (Hebe Chen)

Untuk pasar obligasi, langkah The Fed kemungkinan akan memberikan dampak berkepanjangan, bukan sekadar gejolak singkat. Gejolak dapat berlalu, tetapi biaya uang yang lebih tinggi akan tetap bertahan, dan hal inilah yang dapat terus menekan valuasi jauh setelah reaksi pasar hari ini.

Asia berada tepat dalam bayang-bayang tersebut. Imbal hasil Treasury yang lebih tinggi dan dolar AS yang menguat dapat menarik kembali aliran modal ke AS, menekan mata uang regional dan pasar obligasi domestik, serta mempersempit ruang bagi bank-bank sentral Asia untuk melakukan pelonggaran. Sementara itu, pasar saham dengan durasi lebih panjang seperti Korea Selatan dan Taiwan tetap sangat sensitif karena tingginya eksposur terhadap sektor teknologi. Dalam jangka lebih panjang, hal ini tidak serta-merta berarti aksi jual akan berlangsung secara linear, tetapi mengubah perhitungannya: bantalan valuasi menjadi lebih tipis, biaya modal semakin berat, dan laba akan semakin dituntut menopang pasar.

Apostle Funds Management (Joe Unwin)

Nada hawkish The Fed diperkirakan akan memberikan tekanan ke atas terhadap imbal hasil obligasi pemerintah Australia.

“Meski kedua pasar tidak selalu bergerak sejalan, keputusan The Fed menunjukkan bahwa siklus pemangkasan suku bunga global telah berakhir dan siklus kenaikan suku bunga mungkin telah dimulai. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kenaikan suku bunga RBA lebih lanjut, yang akan memberikan tekanan ke atas terhadap imbal hasil obligasi Australia.”

Kenaikan suku bunga The Fed akan menjadi hambatan bagi seluruh pasar saham dan Australia tidak terkecuali. Bagian pasar yang sensitif terhadap suku bunga kemungkinan akan paling terdampak, seperti REIT atau perusahaan bertumbuh dengan valuasi tinggi.

Rayliant Global Advisors (Phillip Wool)

Semakin agresif The Fed memperketat kebijakan, semakin besar tekanan terhadap BOJ untuk mempercepat laju kenaikan suku bunga.

Secara sekilas, sinyal hawkish Warsh sejak pertemuan Jackson Hole dan proyeksi terbaru FOMC yang menunjukkan tingkat suku bunga kebijakan jangka panjang lebih tinggi tampak menjadi sentimen negatif.

“Dolar AS mungkin terus menguat terhadap yen saat ini, tetapi para pembuat kebijakan jelas memperhatikan risiko ketidakseimbangan yang berkelanjutan. Karena itu, perkiraan BOJ akan menyampaikan pesan hawkish dan memperlambat momentum dolar AS.”

Fibonacci Asset Management Global (Jung In Yun)

Memperkirakan Bank of Korea (BOK) dan BOJ akan menaikkan suku bunga, serta menilai arah kebijakan relatif kedua bank sentral akan lebih menentukan pergerakan mata uang.

“Pandangan saya adalah tetap berinvestasi secara selektif, dengan mengutamakan perusahaan teknologi Korea yang memiliki kelipatan valuasi rendah serta pertumbuhan laba yang kuat dan berkelanjutan.”

Aozora Bank Ltd. (Akira Moroga)

BOJ diperkirakan mengikuti langkah The Fed dan menaikkan suku bunga besok, tetapi mungkin tidak mengambil sikap sehawkish The Fed. Hal tersebut dapat menjadi katalis langsung bagi pelemahan yen.

Komitmen kuat AS untuk membatasi pelemahan yen menjadi faktor penahan, sehingga penurunan lebih lanjut menuju level 160 yen kemungkinan dapat dihindari.

“Kami mempertahankan pandangan bahwa yen akan berada di sekitar 155 yen pada akhir tahun.”

Pepperstone Group (Dilin Wu)

“Untuk saham, dot plot yang hawkish meningkatkan risiko suku bunga riil sebagai tingkat diskonto, dan itulah titik tekanan bagi saham-saham AI dan teknologi dengan kelipatan valuasi tinggi yang telah mendorong kenaikan pasar tahun ini. Jika The Fed benar-benar menaikkan suku bunga lagi sebelum Desember, hal itu akan menjadi hambatan yang signifikan dalam jangka menengah dan layak diperhatikan.”

Untuk obligasi, hal utama yang perlu diperhatikan dalam beberapa pekan ke depan adalah apakah imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun benar-benar turun dari kisaran 5% tersebut atau kembali bergerak mendekatnya. Hasil tersebut akan menunjukkan kepada pasar apakah kenaikan suku bunga ini merupakan langkah kredibel untuk memerangi inflasi atau The Fed sedang mengejar pasar obligasi yang sebenarnya tidak dapat mereka kendalikan.

Fukuoka Financial Group (Tohru Sasaki)

Standar yang harus dipenuhi BOJ untuk menghindari kekecewaan terhadap ekspektasi hawkish pasar kini semakin tinggi. Jika Gubernur BOJ Ueda menyampaikan pernyataan yang cukup hawkish untuk memenuhi ekspektasi pasar, nilai tukar dolar-yen dapat turun tepat ke sekitar 155 yen.

Sebaliknya, jika BOJ gagal memenuhi ekspektasi pasar, dolar AS kemungkinan menguat ke kisaran pertengahan 158 yen, yang merupakan level rata-rata pergerakan 200 hari.

Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps, Menuai Kecaman dari Trump

Kamis, 17 September 2026 05:47 WIB

Andrew Ackerman

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121794/fed-naikkan-suku-bunga-25-bps-menuai-kecaman-dari-trump/2>

Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) ke 3,75-4,00% dan merencanakan kenaikan tambahan di akhir tahun ini. Langkah-langkah ini diambil untuk mengendalikan inflasi, yang akan menguji hubungan Ketua Kevin Warsh dengan Presiden Donald Trump.

“Kami mengurangi kebijakan akomodatif agar kondisi keuangan dan kredit lebih konsisten dengan tujuan utama kami,” kata Warsh dalam konferensi pers setelah keputusan tersebut.

“Tindakan hari ini mulai menunjukkan bahwa kami serius tentang hal ini, dan kami akan mewujudkan tujuan stabilitas harga.”

FOMC dengan suara bulat memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan dana federal ke kisaran 3,75% hingga 4% pada Rabu. Ini adalah kenaikan suku bunga pertama bank sentral AS sejak Juli 2023.

Trump mengatakan di media sosial setelah langkah tersebut bahwa suku bunga AS seharusnya berada di angka 1% atau lebih rendah, tetapi tidak secara langsung mengkritik Warsh.

“Kita ‘menanggung’ hampir setiap negara di dunia, dan itu tidak bisa terus berlanjut,” kata Trump. “TURUNKAN SUKU BUNGA UNTUK AMERIKA SERIKAT, DAN SECEPATNYA!”

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Warsh menegaskan kembali kekhawatirannya tentang inflasi, dengan mengatakan terlalu banyak kategori produk dan layanan menunjukkan kenaikan harga tahunan di atas 3% dalam jangka waktu 6 dan 12 bulan.

“Angka inflasi musim panas ini tidak menunjukkan kepada saya bahwa tren mendasar telah membaik secara signifikan,” katanya.

Komentarnya tentang penghapusan “sedikit kebijakan akomodatif” juga menarik perhatian para pengamat Fed.

“Itu terlalu agresif. Jika ketua berpikir kebijakan sudah akomodatif, maka masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” kata Michael Gapen, kepala ekonom AS untuk Morgan Stanley.

Imbal hasil obligasi Treasury dua tahun — yang paling sensitif terhadap kebijakan Fed — menghapus penurunan sebelumnya dan diperdagangkan pada 4,73%, lebih dari 12 basis poin lebih tinggi daripada sebelum pengumuman tersebut. Imbal hasil obligasi 10 tahun naik selama konferensi pers Warsh, juga membalikkan penurunan sebelumnya, dan akhirnya bergerak di atas 5%.

“Jelas, The Fed lebih khawatir tentang inflasi saat ini,” kata Oscar Muñoz, kepala ahli strategi makro di TD Securities. “Itulah mengapa mereka menaikkan suku bunga hari ini, dan tampaknya ada lebih banyak kenaikan suku bunga yang akan datang.”

Proyeksi Suku Bunga

Dalam serangkaian proyeksi suku bunga baru yang dirilis Rabu, prospek median pejabat Fed untuk suku bunga pada akhir tahun 2026 naik menjadi 4,1% dari 3,8%, menandakan dukungan yang meningkat untuk serangkaian kenaikan suku bunga.

Enam belas pejabat memproyeksikan setidaknya satu kenaikan tambahan tahun ini, naik dari enam pada bulan Juni yang melihat setidaknya dua kenaikan total pada tahun 2026. Proyeksi median untuk tahun 2027 menunjukkan tidak ada kenaikan suku bunga tambahan tahun depan. Namun, delapan pembuat kebijakan mendukung kenaikan seperempat poin lagi pada akhir tahun 2027 dibandingkan dengan suku bunga saat ini.

Seperti pada bulan Juni, ketika Warsh menolak untuk menyampaikan perkiraannya sendiri, hanya 18 dari 19 pejabat yang memberikan proyeksi suku bunga untuk tahun 2026 dan 2027.

Kenaikan suku bunga ini terjadi setelah Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan pekan lalu bahwa inflasi inti naik lebih cepat dari perkiraan pada bulan Agustus. Hal itu menambah kekhawatiran bahwa tekanan inflasi mungkin meluas melampaui efek sementara dari tarif dan dampak perang Iran terhadap harga energi.

Dengan keputusan mereka untuk menaikkan suku bunga, para pembuat kebijakan juga menentang Trump, yang baru-baru ini mengancam akan meningkatkan perang dagangnya jika The Fed tidak menurunkan suku bunga.

Ketika Warsh ditanya oleh seorang reporter pada hari Rabu tentang pesannya kepada Trump, ia menjawab: “Saya tidak punya apa pun untuk Anda tentang diskusi dengan presiden.”

Namun, Warsh menekankan betapa baiknya kinerja ekonomi AS dan mengulangi bahwa para pejabat tidak melihat kondisi keuangan secara luas sebagai penghambat pertumbuhan.

“Ekonomi Amerika tampaknya semakin kuat,” katanya. “Meningat ketahanan dan potensi kinerja yang lebih besar, sikap optimisme adalah persis apa yang saya dengar di dalam FOMC selama dua hari terakhir ini.”

Peringatan Warsh

Warsh memperingatkan bulan lalu bahwa inflasi tidak melambat secara signifikan, membuka pintu bagi pengetatan kebijakan. Laporan inflasi pada Jumat mendorong investor untuk melihat kenaikan suku bunga sebagai sesuatu yang hampir pasti.

Dalam pernyataan pasca-pertemuan komite pada hari Rabu, para pejabat sekali lagi menggambarkan inflasi sebagai tinggi, namun juga menggambarkan perekonomian dalam istilah positif.

“Pertumbuhan produktivitas kuat, dan investasi modal kuat,” kata para pejabat. “Peningkatan lapangan kerja telah sejalan dengan angkatan kerja, dan tingkat pengangguran tidak banyak berubah.”

Para pejabat mengulangi janji untuk mewujudkan stabilitas harga. Tetapi bahkan dengan kenaikan suku bunga, mereka menunda satu tahun ekspektasi mereka kapan inflasi akan kembali ke 2%. Perkiraan median sekarang melihatnya mencapai level tersebut pada tahun 2029.

Dukungan untuk suku bunga yang lebih tinggi telah perlahan-lahan meningkat di dalam Fed sepanjang tahun ini. Pada pertemuan bulan Juli mereka, para pejabat mempertahankan suku bunga tidak berubah, tetapi tiga presiden bank Federal Reserve regional — Lorie Logan dari Dallas, Beth Hammack dari Cleveland, dan Neel Kashkari dari Minneapolis — berbeda pendapat dan mendukung kenaikan suku bunga.

Poin-Poin Penting dari Keputusan The Fed Naikkan Suku Bunga

Kamis, 17 September 2026 06:10 WIB

Kate Davidson

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121797/poin-poin-penting-dari-keputusan-the-fed-naikkan-suku-bunga>

Bloomberg, Berikut sejumlah poin penting dari keputusan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (16/9):

- Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dengan suara bulat memutuskan menaikkan suku bunga acuan ke kisaran target 3,75%–4,00%.
- Proyeksi suku bunga yang dikenal sebagai dot plot menunjukkan 16 dari 18 pejabat The Fed memperkirakan suku bunga akan dinaikkan setidaknya satu kali lagi hingga akhir 2026. Empat pejabat memperkirakan dua kenaikan tambahan. Proyeksi median suku bunga naik menjadi 4,1% dari 3,75% pada Juni. Pejabat dengan proyeksi median memperkirakan suku bunga tetap berada di level 4,1% pada 2027, meskipun delapan pejabat memperkirakan suku bunga mencapai 4,4%.
- The Fed mengatakan kebijakan yang diambil pada Rabu “akan mendukung kembalinya inflasi secara lebih cepat ke target komite sebesar 2%.”
- Pejabat The Fed dengan proyeksi median memperkirakan inflasi inti berada di level 3,4% pada akhir 2026, sedikit meningkat dari proyeksi 3,3% pada Juni. Mereka juga memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,3%, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,2%.
- The Fed mengatakan, “Meskipun ketidakpastian masih tinggi, sebagian disebabkan oleh perkembangan geopolitik, belanja domestik tetap tangguh,” serta kembali menegaskan bahwa “pertumbuhan produktivitas kuat dan investasi modal tetap kokoh.”

- The Fed kembali menyatakan bahwa pertumbuhan lapangan kerja “sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, sementara tingkat pengangguran hanya mengalami sedikit perubahan.”

Suku Bunga The FED Naik, Kemenkeu Diversifikasi Pembiayaan Global

Kamis, 17 September 2026 21:00 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121937/suku-bunga-the-fed-naik-kemenkeu-diversifikasi-pembiayaan-global/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tetap mewaspadai dampak kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Federal Fund Rate (FFR), yang juga berpotensi mendorong penyesuaian harga (repricing) pada penerbitan surat utang pemerintah di pasar global.

Meski begitu, Wakil Menteri Keuangan Junda Agung mengatakan, pemerintah menilai bahwa penyesuaian tersebut masih berada dalam batas yang wajar.

"Ya ini saya kira itu tentu saja ada repricing ya, tapi saya kira kita masih dalam level yang wajar lah," kata Junda kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Junda mengatakan, pemerintah juga masih tetap membuka opsi diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan utang global untuk mengantisipasi dinamika pasar keuangan internasional.

Junda menyebut penerbitan Panda Bond, yakni surat utang berdenominasi yuan masih tetap menjadi salah satu instrumen yang dipertahankan pemerintah. "Oh iya itu tetap, tetap Panda Bond tetap," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Sentral Amerika Serikat alias The Federal Reserve resmi menaikkan Fed Funds Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75–4,00%. Kenaikan ini sekaligus menjadi yang pertama kali sejak 2023 lalu.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan tetap menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond sebagai salah satu sumber pendanaan hingga akhir tahun ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, strategi tersebut menjadi bagian pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN sepanjang tahun ini, sekaligus pengelolaan portofolio utang. Apalagi, masih ada sisa kuota sekitar US\$2 miliar yang belum terealisasi.

"Dari sisi bauran mata uang, masih ada ruang untuk penerbitan SBN valas hingga akhir tahun," ujar Suminto saat dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (16/9/2026).

Namun, Suminto belum dapat memastikan jadwal penerbitan global bond akan kembali dilakukan di sepanjang sisa tahun ini. Namun, dia memastikan jadwal, komposisi, hingga mata uang didesain dengan kehati-hatian.

Dalam menentukan hal itu, kata dia, otoritas fiskal perlu melakukan pendekatan yang fleksibel dan oportunistik untuk merespons perkembangan kebutuhan pembiayaan, termasuk pasar global yang masih dinamis.

The Fed Kerek Suku Bunga Acuan, Trump: Harusnya di Level 1% atau Lebih Rendah

Kamis, 17 September 2026 11:15 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/the-fed-kerek-suku-bunga-acuan-trump-harusnya-di-level-1-atau-lebih-rendah>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menekan Federal Reserve (The Fed) agar memangkas suku bunga, tak lama setelah bank sentral AS menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi yang masih tinggi.

Trump menyampaikan tuntutan tersebut melalui media sosial Truth Social pada Rabu (16/9/2026). Ia menilai suku bunga AS seharusnya berada di level 1% atau lebih rendah, dengan alasan AS memiliki kualitas kredit terbaik di dunia.

"Turunkan suku bunga untuk Amerika Serikat, dan lakukan dengan cepat!" tulis Trump.

Pernyataan itu menjadi kritik Trump yang paling tajam terhadap Ketua The Fed Kevin Warsh, pejabat yang sebelumnya ia tunjuk untuk menggantikan Jerome Powell. Meski demikian, Trump masih menyatakan memiliki kepercayaan terhadap Warsh.

Trump juga mengaku telah berbicara dengan Warsh dan menyebut Ketua The Fed tersebut sebaiknya mengikuti keputusan mayoritas anggota dewan karena menurut Trump, dewan bank sentral terlalu politis dan mengambil kebijakan yang keliru.

Tekanan Trump muncul setelah para pembuat kebijakan The Fed secara bulat memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4%.

Kenaikan ini dilakukan karena inflasi AS dinilai masih terlalu tinggi dan telah bertahan terlalu lama.

Warsh menegaskan keputusan tersebut diambil secara serius dan bertanggung jawab. "Inflasi terlalu tinggi dan sudah berlangsung terlalu lama," kata Warsh.

Proyeksi terbaru The Fed juga menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan. Sebanyak 16 dari 18 pejabat The Fed memperkirakan setidaknya masih ada satu kali kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin hingga akhir tahun ini.

Sementara dua pejabat lainnya memperkirakan suku bunga bertahan di level saat ini.

Warsh sendiri tidak memberikan proyeksi suku bunga ke depan dan kembali menegaskan keberatannya terhadap pemberian panduan kebijakan moneter secara eksplisit.

Sejak menjabat sebagai Ketua The Fed pada Juni 2026, Warsh sebelumnya mengarahkan bank sentral untuk mempertahankan suku bunga. Namun, tekanan inflasi yang masih terlihat dalam data musim panas membuatnya menilai The Fed perlu mulai bertindak.

"Tren yang mendasari inflasi belum membaik," ujar Warsh.

Di sisi lain, Trump juga mengaitkan defisit perdagangan AS dengan biaya pinjaman yang ditetapkan The Fed. Ia menyebut defisit perdagangan sebagai bentuk kerugian yang harus dihentikan.

Namun, kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan persoalan yang berbeda: defisit perdagangan berkaitan dengan arus perdagangan barang dan jasa, sedangkan suku bunga merupakan instrumen kebijakan moneter untuk memengaruhi inflasi dan aktivitas ekonomi.

Tekanan dari Gedung Putih terhadap The Fed telah berlangsung sepanjang pekan. Sejumlah pejabat Gedung Putih sebelumnya secara terbuka mendorong bank sentral mempertahankan suku bunga.

Meski demikian, Warsh sejauh ini tetap menegaskan independensi The Fed dalam menentukan kebijakan moneter.

Ketika ditanya apakah akan bertemu Trump untuk menjelaskan keputusan kenaikan suku bunga, Warsh tidak memberikan keterangan mengenai pembicaraan dengan presiden.

Ekonomi Selandia Baru Tumbuh 0,2% di Kuartal II, Lampau Ekspektasi

Kamis, 17 September 2026 08:53 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-selandia-baru-tumbuh-02-di-kuartal-ii-lampaui-ekspektasi>

KONTAN.CO.ID - Ekonomi Selandia Baru tumbuh 0,2% pada kuartal II 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Meski melambat dari pertumbuhan 0,8% pada kuartal I, capaian tersebut masih lebih baik dari ekspektasi pasar dan menunjukkan ekonomi Negeri Kiwi relatif mampu bertahan di tengah tekanan konflik Timur Tengah.

Mengutip Reuters, data Statistics New Zealand pada Kamis (17/9) menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal II melampaui proyeksi ekonom sebesar 0,1%.

Capaian tersebut juga lebih tinggi dari perkiraan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) yang sebelumnya memprediksi ekonomi tidak tumbuh.

Secara tahunan, PDB Selandia Baru tumbuh 2,6% pada kuartal II. Angka ini juga jauh di atas ekspektasi pasar sebesar 2,2%.

Michael Gordon, ekonom senior Westpac mengatakan, data tersebut menunjukkan ekonomi Selandia Baru relatif mampu bertahan menghadapi dampak konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran, meski tetap mengalami tekanan.

Menurut dia, data tersebut dapat meredakan kekhawatiran sebagian anggota komite bank sentral mengenai risiko pelemahan pertumbuhan.

Namun, indikator inflasi masih akan menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan RBNZ berikutnya.

Konstruksi Jadi Penopang

Statistics New Zealand menyebutkan hasil pertumbuhan ekonomi kuartal II masih beragam. Hanya sembilan dari 16 sektor industri yang mencatat pertumbuhan.

Sektor konstruksi menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan PDB, dengan kenaikan 2,7% pada kuartal II.

Sebaliknya, sektor transportasi, pos dan pergudangan menjadi penekan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dolar Selandia Baru merespons positif data tersebut. Mata uang tersebut berada di sekitar US\$0,5724, naik dari US\$0,5718 sebelum data ekonomi dirilis.

Namun, dolar Selandia Baru masih berada di bawah tekanan setelah Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga.

Setelah mengalami periode pelemahan yang panjang, ekonomi Selandia Baru mulai menunjukkan tanda-tanda ketahanan.

Bank sentral sebelumnya memperkirakan pemulihan ekonomi akan semakin kuat dan meluas.

Pada awal September, RBNZ menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 2,75%. Kenaikan tersebut menjadi yang kedua secara beruntun, karena inflasi masih berada di atas kisaran target bank sentral.

Ekonom Kiwibank menilai, pertumbuhan kuartal II merupakan hasil yang cukup positif, terutama jika mempertimbangkan tekanan akibat kenaikan harga energi dan konflik di Timur Tengah.

Namun, mereka mengingatkan bahwa keberlanjutan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun masih menjadi pertanyaan.

Arah ekonomi Selandia Baru akan sangat bergantung pada apakah momentum yang terbentuk hingga Juni dapat berlanjut.

Kinerja ekonomi juga menjadi salah satu isu utama menjelang pemilu Selandia Baru pada 7 November.

Pemerintah koalisi sebelumnya terpilih dengan janji untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi, sementara oposisi Partai Buruh mengusung kebijakan untuk mengurangi tekanan biaya hidup bagi kelompok rumah tangga berpendapatan menengah.

Bank of England (BoE) Pertahankan Suku Bunga, Inflasi Tinggi Membayangi

Kamis, 17 September 2026 18:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-of-england-boe-pertahankan-suku-bunga-inflasi-tinggi-membayangi>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Bank of England (BoE) kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,75% pada pertemuan hari ini (17/9/2026). Komite Kebijakan Moneter memberikan suara 6-3 untuk mempertahankan suku bunga di 3,75%, dengan tiga anggota memilih kenaikan menjadi 4%.

Selain itu, BoE juga memperkirakan inflasi Inggris akan mencapai 4% pada awal tahun depan. Gubernur BOE Andrew Bailey memperingatkan secara eksplisit bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah mungkin memerlukan kebijakan yang lebih ketat.

Namun, risalah rapat minggu ini menunjukkan perubahan nada yang jelas.

“Sejauh ini kenaikan biaya energi global hanya berdampak terbatas pada penetapan harga dan upah di Inggris. Namun semakin lama volatilitas ini berlangsung, semakin besar dampaknya terhadap inflasi, dan semakin besar kemungkinan kita perlu menaikkan Suku Bunga Bank untuk memastikan inflasi kembali ke target 2%,” kata Bailey.

BoE mengatakan, risiko inflasi semakin condong ke atas sejak menerbitkan perkiraan ekonomi terakhirnya pada bulan Juli, dan menambahkan bahwa pergerakan harga energi sejak saat itu memiliki kemiripan dengan skenario "merugikan" yang berisiko memperkuat inflasi.

Meskipun BoE mencatat bahwa tanda-tanda tekanan yang terus-menerus belum muncul dari pasar tenaga kerja dan penilaian dunia usaha, BoE mengatakan bahwa risikonya semakin besar.

Bank sentral juga menulis ulang rencananya untuk mengurangi stok obligasi pemerintah Inggris yang terakumulasi dalam upaya merangsang perekonomian di masa lalu, yang berarti bank sentral akan menghentikan penjualan emas ke pasar untuk sementara waktu.

Namun sebagian besar rumah tangga dan dunia usaha akan fokus pada perubahan prospek suku bunga.

Peringatan kenaikan suku bunga datang pada saat yang sulit bagi Perdana Menteri Andy Burnham dan Menteri Keuangan Inggris John Healey, yang mencoba memberikan nada positif mengenai prospek ekonomi Inggris menjelang anggaran pada tanggal 28 Oktober.

Meskipun BoE menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulanan untuk kuartal III-2026 menjadi 0,4% dari perkiraan sebelumnya sebesar 0,1%, BoE mengatakan, inflasi sebesar 3,1% pada bulan Agustus, kini dapat mencapai sedikit di atas 4% pada awal tahun 2027. Sebelumnya, BoE memperkirakan puncaknya sebesar 3,2% pada akhir tahun 2026.

Inflasi telah melampaui target 2% selama tiga bulan dalam lima tahun terakhir dan BoE memperkuat pernyataannya seputar prospek tekanan harga.

“Mengingat lambatnya dampak putaran kedua yang muncul, tidak pantas menunggu terlalu lama untuk melihat bukti dampak tersebut sebelum merespons dengan kebijakan,” kata BoE. Kepala Ekonom Huw Pill dan anggota eksternal MPC Megan Greene dan Catherine Mann kembali memilih untuk menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin.

Namun kali ini Gubernur Bailey dan para deputinya Sarah Breeden, Clare Lombardelli dan Dave Ramsden semuanya mengangkat prospek kenaikan Suku Bunga Bank di masa depan dalam risalah kebijakan.

BoE merombak pendekatannya untuk melepas stok emasnya, yang hingga saat ini telah ditetapkan berdasarkan tahun ke tahun yang diumumkan setiap bulan September.

MPC justru mengatakan pihaknya ingin mengurangi stok emas yang disimpan untuk tujuan kebijakan moneter menjadi nol pada tahun 2034, sambil mempertahankan beberapa obligasi jangka panjang yang telah dibelinya untuk mendukung penerbitan uang kertas.

Berbeda dengan masa lalu dimana BoE akan secara aktif menjual kembali obligasi pemerintah Inggris ke pasar dalam berbagai jangka waktu jatuh tempo, BoE mengatakan akan menahan obligasi yang jatuh tempo sebelum tahun 2035 hingga jatuh tempo.

Mereka juga akan mempertimbangkan untuk menjual kembali emas yang jatuh tempo antara tahun 2035 dan 2049 kepada pemerintah, meskipun mereka akan mengumumkan rencananya sebelum April tahun depan.

Sementara itu, BoE mengatakan akan menghentikan seluruh penjualan aktifnya.

Bank Sentral Taiwan Tahan Suku Bunga, Proyeksi Ekonomi 2026 Naik Jadi 11,48%

Kamis, 17 September 2026 16:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-taiwan-tahan-suku-bunga-proyeksi-ekonomi-2026-naik-jadi-1148>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral Taiwan mempertahankan suku bunga acuannya pada Kamis (17/9/2026), di tengah kinerja ekonomi yang kuat dan inflasi yang relatif terkendali.

Di saat yang sama, bank sentral menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Taiwan untuk 2026.

Melansir Reuters, Bank sentral mempertahankan suku bunga diskonto di level 2%, sesuai ekspektasi pasar.

Dalam jajak pendapat Reuters, 28 dari 31 ekonom memperkirakan bank sentral tidak mengubah kebijakan moneternya.

Selain mempertahankan suku bunga, bank sentral Taiwan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 11,48%, dari perkiraan sebelumnya 9,45% pada Juni.

Untuk 2027, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat menjadi 5,82%.

Ekonomi Taiwan tumbuh 8,68% pada 2025, menjadi pertumbuhan tercepat dalam 15 tahun.

Kinerja tersebut ditopang tingginya permintaan semikonduktor yang digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan (AI), termasuk dari perusahaan seperti Nvidia.

Inflasi Diproyeksi Tetap Terkendali

Bank sentral Taiwan juga sedikit menaikkan proyeksi inflasi tahun ini.

Indeks harga konsumen (CPI) diperkirakan tumbuh 2,03% pada 2026, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,91%.

Namun, inflasi diperkirakan melandai menjadi 1,83% pada 2027.

Keputusan bank sentral Taiwan tersebut diambil sehari setelah Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga AS sebesar 25 basis poin.

The Fed juga memberikan sinyal masih terbuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan dalam beberapa bulan mendatang.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, terutama ditopang industri teknologi dan semikonduktor, serta inflasi yang relatif terkendali, bank sentral Taiwan memilih mempertahankan suku bunga acuannya.

Ekspor Singapura Melonjak 46,2% pada Agustus, Booming AI Jadi Pendorong Utama

Kamis, 17 September 2026 08:36 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-singapura-melonjak-462-pada-agustus-booming-ai-jadi-pendorong-utama>

KONTAN.CO.ID - Ekspor domestik nonminyak Singapura melonjak 46,2% secara tahunan pada Agustus 2026.

Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi dalam rangkaian data sejak November 2005, didorong kuatnya pengiriman produk elektronik di tengah booming kecerdasan buatan (AI).

Mengutip Reuters, pertumbuhan ekspor Singapura pada Agustus juga jauh melampaui median perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters sebesar 35,3%.

Kinerja tersebut sekaligus menjadi bulan kelima berturut-turut ketika ekspor domestik nonminyak Singapura tumbuh lebih dari 20% secara tahunan.

Sektor elektronik menjadi motor utama pertumbuhan. Ekspor elektronik Singapura melonjak 131,8% pada Agustus dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, ekspor produk non-elektronik tumbuh 12%.

Permintaan AI Dorong Ekspor Elektronik

Lonjakan pengiriman elektronik menunjukkan kuatnya permintaan produk yang berkaitan dengan rantai pasok teknologi dan kecerdasan buatan.

Pertumbuhan ekspor juga terjadi di sebagian besar pasar utama Singapura. Pengiriman barang meningkat di sembilan dari 10 pasar utama negara tersebut.

Ekspor ke Amerika Serikat (AS) melonjak 91% secara tahunan. Sementara itu, ekspor ke China tumbuh 70,3% dan pengiriman ke Korea Selatan meningkat 87,1%.

Kinerja tersebut menunjukkan permintaan dari sejumlah pusat ekonomi dan teknologi utama Asia serta AS masih menjadi penopang perdagangan Singapura.

Melihat kinerja tersebut, Enterprise Singapore pada Agustus menaikkan proyeksi pertumbuhan ekspor domestik nonminyak sepanjang 2026 menjadi 14%-16%.

Sebelumnya, lembaga tersebut memperkirakan ekspor domestik nonminyak hanya tumbuh 3%-5% pada tahun ini.

Kenaikan proyeksi tersebut mencerminkan momentum perdagangan yang jauh lebih kuat dari perkiraan sebelumnya, terutama berkat kinerja sektor elektronik yang memperoleh dorongan dari investasi dan permintaan terkait AI.

Ekonom Minta Revisi UU Keuangan Negara Perbesar Alokasi ke Daerah

Kamis, 17 September 2026 18:40 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121924/ekonom-minta-revisi-uu-keuangan-negara-perbesar-alokasi-ke-daerah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Dipo Satria Ramli menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini dinilai sudah sangat sempit. Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk memperbesar anggaran ke daerah dalam Revisi UU Keuangan Negara.

“Memang kita pelan-pelan, menurut saya, spending banyak ke daerah. Belanja itu daerah, pemerintah pusat itu kontrol,” kata Dipo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi XI DPR RI terkait dengan UU Keuangan Negara, Kamis (17/9/2026).

Menurut Dipo saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu independen secara finansial. Dalam analisisnya, hanya kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang bisa menutup lebih dari setengah APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, lebih dari separuh daerah yang dianalisis hanya mampu menutup sekitar 10% APBD dari PAD.

“Dan ini mungkin memang karena ada keterbatasan pajak yang bisa ditarik di pusat dan pajak apa saja yang bisa ditarik di daerah. Dan ini sangat sensitif,” kata Dipo.

Imbasnya, pemerintah daerah hanya bisa menarik pajak-pajak yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan bermotor, maupun pajak restoran.

Dipo juga membandingkan porsi daerah dan pusat tersebut di negara-negara lain. Dari hasil analisisnya sejumlah negara besar memiliki porsi belanja ke daerah yang lebih besar.

China misalnya yang menggenjot belanja daerah menjadi sekitar 85% dari APBN, jauh lebih tinggi ketimbang porsi dua dekade lalu yang sebesar 74% yang dilakukan secara bertahap.

“Ketika diberikan otonomi fiskal lebih, [daerah] itu juga dikasih PR-nya banyak. Jadi bukan serta-merta anggaran dilempar ke daerah, lalu daerah bebas aja cara ngatur anggarannya. Enggak. KPI-nya sangat banyak, sangat tinggi, dan sangat detail. Dan saya rasa tren ini cukup ada di banyak sekali negara,” kata Dipo.

Tak cuma China, Ia juga menyontohkan India, Amerika Serikat dan juga Jepang yang memiliki porsi anggaran ke daerah sebesar 48,5%, 48,2% dan 60,5%.

Sebagai informasi, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sebesar Rp 780,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp735 triliun.

Anggaran TKD tersebut meski sedikit naik dari outlook 2026 sebesar Rp638 triliun, namun turun drastis dari 2025 yang masih di Rp919 triliun.

Dengan demikian, porsi transfer ke daerah terus menyusut dari 28,24% pada 2023 menjadi 17,94% pada 2027. Sementara itu, porsi belanja pusat naik dari 71,76% menjadi 82,06%.

Kemenkeu Soal Usulan Perubahan Batas Defisit: Tetap di Bawah 3%

Kamis, 17 September 2026 18:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121930/kemenkeu-soal-usulan-perubahan-batas-defisit-tetap-di-bawah-3/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menjaga batas atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), meski muncul wacana perubahan atas batas tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Junda Agung mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas fiskal negara.

"Kemenkeu tetap konsisten di bawah 3%. Iya [meski ada wacana itu]. Karena ini menjaga kredibilitas dari fiskal kita," ujar Junda kepada wartawan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya, wacana merevisi batas atas defisit mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat yang membahas mengenai Revisi Rancangan Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) antara Komisi XI DPR dengan pakar.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong pembahasan ulang tentang batas defisit anggaran tersebut.

Misbakhun menilai bahwa pembatasan defisit fiskal sebesar 3% terhadap PDB menghambat ruang ekspansi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Orang mengatakan defisit 3%, saya tanya di pasal berapa, gak ada yang bisa menyebutkan. Defisit itu bukan norma. Defisit itu gak ada di norma," ujarnya dalam rapat bersama pakar di Gedung Parlemen, Kamis (17/9/2026).

Dia lantas memerinci, khususnya pasal 12 dalam UU Keuangan Negara tersebut hanya menekankan sejumlah asas pokok; antara lain APBN harus didasarkan kepada perencanaan, APBN harus berdasarkan UU, rencana pembiayaan utang saat defisit, serta saat menghadapi situasi surplus.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan ekspansi fiskal guna terhindar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap dan memaksimalkan bonus demografi saat ini.

"Bagaimana cara mencapai ekspansi pertumbuhan itu kalau kita nge-lock di sana? Kita itu selalu membicarakan defisit 3% itu Pak, it's an impact, kata dia.

"Itu akibat dari sebuah persamaan apa? Penerimaan kita kurang memadai, kemudian dikurangi dengan belanjanya, lahirlah defisit itu. Kita membicarakan akibat, tidak membicarakan sebab. Ayo kita rumuskan."

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) mengusulkan batas defisit anggaran negara 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diberlakukan secara fleksibel, tidak harus dalam perhitungan tahunan.

Chaikal Nuryakin, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia mengatakan, batas defisit dapat belaku fleksibel di periode-periode tertentu, misalnya dalam kurun 10 tahun, atau skema lain alih-alih per tahun.

"Menurut kita, memang ada fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara mengenai defisit 3%. Untuk, misalnya, tahun-tahun tertentu," ujar Chaikal dalam rapat RUU Keuangan Negara bersama Komisi XI DPR, Kamis (17/9/2026).

Chaikal menilai usulan tersebut dilakukan untuk membuat pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat membuat fleksibilitas apabila ada keadaan-keadaan tertentu dalam beberapa tahun.

"3% ini sebaiknya bukan per tahun, tapi lebih baik kepada mid term tertentu. Jadi dalam 10 tahun harus 3%. Tapi ada fleksibilitas tiap tahun yang memang harus dipenuhi. Jadi memberikan fleksibilitas kepada pengambil kebijakan juga," tutur dia.

Namun, dia menggarisbawahi hal itu harus tetap berdasarkan pengaturan yang jelas.

Menakar Arah Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2026

Kamis, 17 September 2026 14:49 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/121879/menakar-arrah-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menjelang akhir kuartal III-2026, pertumbuhan ekonomi domestik masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebab, belum juga genap kuartal ini menutup masanya, tekanan eksternal kembali mendera.

Harga minyak bertahan tinggi, sikap hawkish bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve yang berpotensi menggiring arus modal keluar dari Indonesia, dolar AS yang menguat, serta kebijakan domestik yang sepertinya belum mendukung penguatan daya beli menjadi tantangan utama.

Memang sejumlah data ekonomi untuk periode Agustus mulai memberi sinyal perbaikan. Namun masih sayup-sayup.

Misalnya aktivitas manufaktur masih bertahan di zona ekspansif dengan Purchasing Managers' Index (PMI) yang sebesar 51,5. Naik dibandingkan Juli yaitu 50,2 dan Juni yang berada di zona kontraksi dengan indeks 46,9.

Lalu, data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga sedikit merangkak naik menjadi 118,5 untuk Agustus dari 116,8 bulan sebelumnya. Meski naik secara agregat, tetapi kelompok kelas menengah dengan pengeluaran Rp3,1-4 juta per bulan mengalami kemerosotan IKK paling tajam.

IKK kelompok ini turun 4,9 poin dari 117,1 menjadi 112,2. Pelemahan ini juga dipicu oleh meredupnya optimisme kelompok ini. Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) turun 6,4 poin, sejurus dengan persepsi terhadap penghasilan saat ini yang turun 4,9 poin, dan persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja turun 5,7 poin.

Ditambah lagi, laju inflasi mengalami akselerasi dan tercatat sebesar 3,19% yoy pada Agustus. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut inflasi terdorong oleh kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi inflasi 3,86%. Ini merupakan kontribusi terbesar di antara seluruh kelompok pengeluaran.

Naiknya harga kebutuhan dasar itu berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Sebab, kelompok makanan dan minuman punya bobot besar dalam konsumsi rumah tangga.

Kenaikan inflasi, walaupun masih berada di rentang target Bank Indonesia (BI) itu diperkirakan bertahan tinggi lebih lama. Sebab, pada Agustus kenaikan harga juga terjadi di tingkat produsen akibat kenaikan harga energi.

Bulan ini, harga minyak dunia bertahan tinggi. Harga Brent tercatat US\$105/barel, dan West Texas Intermediate (WTI) di US\$102/barel. Pendorong utama kenaikan ini adalah gangguan pasokan lantaran terhambatnya pengiriman akibat jalur pipa di Arab Saudi rusak.

Selain kenaikan biaya energi, tren inflasi Indonesia juga diperkirakan terus merangkak karena rantai pasok juga terdampak oleh fenomena El Nino, terutama untuk komoditas pangan (volatile food).

Kondisi ini diperkuat oleh tertahannya angka penjualan ritel. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli memang tumbuh 1,1% secara tahunan. Namun, kinerja pemulihan itu belum dibarengi dengan capaian bulanan, yang justru masih terkontraksi 0,1%. Angka ini turun dari kinerja Juni yang tumbuh 0,7%.

Pungutan

Kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya prima ini juga berpotensi semakin lesu dengan adanya pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang akan diterapkan kepada pedagang online di marketplace. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengetok palu bahwa pungutan PPh kepada pedagang online akan berlaku mulai 1 Oktober, alias dua pekan lagi.

Ini memang bukan pajak pungutan baru, sebab untuk UMKM yang sudah berada dalam skema PPh Final 0,5%. Pungutan di marketplace ini lebih berupa mekanisme pelunasan pajak yang sudah jadi kewajiban.

Untuk diketahui, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut ditetapkan sebesar 0,5%, dari omzet atau nilai transaksi yang tercantum dalam invoice. Pungutan ini dihitung dari nilai bruto sebelum dikurangi berbagai potongan diskon, serta nilai pungutannya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Memang pungutan itu tidak langsung berdampak pada tergerusnya daya beli, lantaran dikenakan ke penjual/merchant di marketplace. Namun jika penjual yang dikenakan pajak ingin mempertahankan margin keuntungan setelah dikenakan pajak, maka ada kemungkinan meneruskan pungutan itu dalam bentuk kenaikan harga jual. Terlebih bagi pedagang online yang marginnya sudah sangat tipis akibat perang harga.

Efeknya mungkin kecil untuk satu transaksi. Namun jika diterapkan pada jutaan transaksi di marketplace, maka efek agregatnya dapat lebih besar, terutama untuk barang dengan permintaan yang sensitif terhadap harga.

Sehingga bisa dikatakan bukan pajaknya ini yang mengurangi daya beli konsumen, tetapi risiko penjual menaikkan harga jual barang sebagai respons pungutan yang akan membuat pembeli harus mengeluarkan uang lebih banyak.

Lapangan Kerja

Di sisi lain, terbatasnya lapangan kerja formal masih menjadi batu sandungan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) edisi Februari 2026 menyebut tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun menjadi 4,68%, melanjutkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Tapi, tingkat pengangguran tenaga kerja berusia muda antara 15-24 tahun masih cenderung tinggi di 16,36% dengan lulusan universitas 6,13% dan SMK 7,74%.

Kondisi ini pula yang mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memang belum ada data mutakhir, namun data Kementerian UMKM menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di sektor ini terus tumbuh. Pada 2024, tercatat ada 56,14 juta unit usaha, naik 11,73% dari posisi 2020 yaitu 50,24 juta unit.

Kementerian UMKM juga mencatat, penyerapan tenaga kerja di sektor ini terus merangkak naik menjadi 121,8 juta tenaga kerja pada 2024, dari 113,3 juta pada 2020. Bertambah 8,5 juta orang dalam empat tahun.

Dalam konteks Indonesia dengan kondisi pasar kerja formal terbatas, UMKM kerap menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang tidak terserap ke sektor formal. Dengan kata lain, pertumbuhan UMKM bukan didorong oleh terbukanya kesempatan berusaha, melainkan keharusan berusaha.

Sebagian kalangan menyebut laju pertumbuhan sektor ini sebagai 'survival entrepreneurship', alias menjadi sekoci bagi masyarakat kala keuangan rumah tangga terhempas badai tekanan ekonomi. Perahu darurat untuk menyelamatkan diri kala kapal besar sudah tenggelam.

Ketika lapangan kerja formal tidak tersedia, masyarakat tidak boleh menganggur. Asap dapur harus tetap mengepul, anak harus tetap sekolah. Ada yang kemudian membuka warung, berdagang secara daring, menjalankan usaha makanan rumahan, menjadi pedagang kecil, membuka jasa, atau membantu usaha keluarga.

Di tengah kondisi ini, stimulus menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor riil dan UMKM yang selama ini menopang pertumbuhan domestik.

Sebagai catatan, pemerintah telah menggelontorkan stimulus untuk semester II-2026. Dengan total nilai sekitar Rp26,34 triliun, yang terdiri dari stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.

Namun, kesuksesan stimulus dalam program magang dan vokasi, dengan alokasi anggaran Rp4,14 triliun dan menyasar 150 ribu peserta lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi bagi program magang, bergantung pada implementasinya.

Sedangkan anggaran untuk pelatihan vokasi sebesar Rp2,12 triliun yang akan disalurkan untuk membiayai program peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenagakerjaan.

Program yang menyasar 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini bergantung pada daya serap industri dan permintaan konsumsi dalam negeri yang sejauh ini ekspansinya masih tertahan akibat tekanan inflasi dan kenaikan biaya energi.

Ekonom: BI Rate Berpotensi Naik Imbas The Fed & Dinamika Dunia

Kamis, 17 September 2026 13:12 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121852/ekonom-bi-rate-berpotensi-naik-imbas-the-fed-dinamika-dunia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai kombinasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju, diikuti peningkatan dinamika moneter dunia, menyebabkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) berpotensi meningkat.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat, dinamika ekonomi dunia mendorong fenomena fly to quality atau pelarian modal ke aset berkualitas. Hal itu pada akhirnya akan membuat potensi kenaikan suku bunga menjadi semakin dibutuhkan untuk menghindari rupiah tertekan terlalu dalam.

"Langkah BI yang selama ini dijalankan berupa operasi pasar yang masif, menaikkan suku bunga SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan memfasilitasi transaksi swap rupiah terhadap dolar AS tidak akan memadai," ujar Wijayanto kepada Bloomberg Technoz, Kamis (17/9/2026).

Saat ini, BI Rate berada di level 5,75%, telah meningkat 100 basispoin (bps) sepanjang tahun ini.

Pada dasarnya, menurut dia, kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve dan bank sentral Jepang Bank of Japan yang menaikkan suku bunga acuan berdampak sangat signifikan terhadap situasi ekonomi dunia. Seluruh bank sentral negara-negara di dunia akan merespons dengan kebijakan yang sama, yakni mengantisipasi pembalikan arus modal keluar.

"Situasi ini juga menunjukkan dinamika moneter dunia yang sedang meningkat. Ini menjadi awal higher for longer," tutur Wijayanto.

Sebelumnya, Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 3,75-4,00% dan merencanakan kenaikan tambahan di akhir tahun ini. Langkah-langkah ini diambil untuk mengendalikan inflasi, yang akan menguji hubungan Ketua Kevin Warsh dengan Presiden Donald Trump.

"Kami mengurangi kebijakan akomodatif agar kondisi keuangan dan kredit lebih konsisten dengan tujuan utama kami," kata Warsh dalam konferensi pers setelah keputusan tersebut.

"Tindakan hari ini mulai menunjukkan bahwa kami serius tentang hal ini, dan kami akan mewujudkan tujuan stabilitas harga."

FOMC dengan suara bulat memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan dana federal ke kisaran 3,75% hingga 4% pada Rabu. Ini adalah kenaikan suku bunga pertama bank sentral AS sejak Juli 2023.

Trump mengatakan di media sosial setelah langkah tersebut bahwa suku bunga AS seharusnya berada di angka 1% atau lebih rendah, tetapi tidak secara langsung mengkritik Warsh.

"Kita 'menanggung' hampir setiap negara di dunia, dan itu tidak bisa terus berlanjut," kata Trump. **"TURUNKAN SUKU BUNGA UNTUK AMERIKA SERIKAT, DAN SECEPATNYA!"**

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Warsh menegaskan kembali kekhawatirannya tentang inflasi, dengan mengatakan terlalu banyak kategori produk dan layanan menunjukkan kenaikan harga tahunan di atas 3% dalam jangka waktu 6 dan 12 bulan.

"Angka inflasi musim panas ini tidak menunjukkan kepada saya bahwa tren mendasar telah membaik secara signifikan," katanya.

Komentarnya tentang penghapusan "sedikit kebijakan akomodatif" juga menarik perhatian para pengamat Fed.

"Itu terlalu agresif. Jika ketua berpikir kebijakan sudah akomodatif, maka masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan," kata Michael Gapen, kepala ekonom AS untuk Morgan Stanley.

Arah Rupiah Kala Suku Bunga The Fed Naik

Kamis, 17 September 2026 08:05 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121798/arah-rupiah-kala-suku-bunga-the-fed-naik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah diproyeksikan defensif pada perdagangan Kamis (17/9/2026), di tengah apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) usai The Fed mengambil langkah hawkish dan menaikkan suku bunga acuan.

Pergerakan rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) relatif stabil pada 06.11 WIB, dengan penguatan terbatas 0,04% ke Rp17.769/US\$. Lalu, rupiah bergerak menguat 0,12% ke Rp17.754/US\$.

Sementara, mata uang Asia di pasar yang sudah buka, beragam. Pelemahan terbatas terjadi pada won Korea Selatan, disusul dolar Singapura. Sebaliknya, yuan China dan dolar Hong Kong berhasil defensif.

Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama menguat hingga 100,25, menyusul kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang sudah diperkirakan pelaku pasar sebelumnya. Federal Open Market Committee (FOMC) secara bulan memutuskan menaikkan suku bunga 25 basis poin (bps) ke kisaran 3,75%-4%.

“Keputusan yang kami ambil hari ini adalah keputusan yang matang, serius, dan bertanggung jawab, yang telah kami persiapkan dan pikirkan selama seratus sepuluh atau dua puluh hari saya berada di sini,” kata Ketua The Fed Kevin Warsh.

Warsh kembali menegaskan pesan untuk memerangi inflasi yang ia sampaikan dalam simposium Jackson Hole bulan lalu. Ia juga mengatakan bahwa terlalu banyak kategori barang dan jasa yang mencatat kenaikan harga tahunan di atas 3%, dalam periode 6 dan 12 bulan.

Investor kini mempertimbangkan seberapa cepat The Fed akan kembali mengetatkan kebijakan ketika angka inflasi diperkirakan akan semakin meluas. Pelaku pasar uang memperkirakan sekitar 50% peluang kenaikan FFR pada Oktober.

Namun, harga minyak Brent kembali terpankas 2,69% ke US\$105,83/barel, menyusul tanda-tanda gangguan pasokan di Timur Tengah mulai mereda, dengan adanya pemulihan jalur pipa minyak utama.

Arab Saudi disebut sedang berupaya untuk mengembalikan sekitar setengah kapasitas pipa East-West yang rusak dalam beberapa hari, dan memulihkan operasi penuh dalam waktu enam pekan.

Harga minyak masih tercatat tinggi 75% sepanjang tahun ini. Lonjakan harga minyak mentah dan bahan bakar ini telah merembet dan meningkatkan inflasi global, termasuk di Indonesia.

Meski terpankasnya harga minyak hari ini dapat memberi sedikit ruang penguatan bagi mata uang di Asia, kuatnya dolar AS kemungkinan akan mendorong sentimen risk-off di pasar Asia, termasuk Indonesia.

Dari dalam negeri, pergantian menteri keuangan belum banyak memengaruhi pasar keuangan. Tekanan pada aset domestik masih berasal dari sisi eksternal. Namun begitu, pelaku pasar akan mencermati pengelolaan anggaran di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara.

Ekonom Bloomberg Economics, Tamara Henderson menilai Suahasil memiliki peluang lebih besar untuk mencapai target defisit sebesar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto, sembari memastikan program prioritas tetap mendapat pendanaan yang memadai di tahun ini.

Di tengah berbagai sentimen dan tekanan yang ada, hari ini rupiah spot diperkirakan defensif dan bergerak di rentang Rp17.650-Rp17.750/US\$.

Analisis Teknikal

Secara teknikal nilai tukar rupiah dibayang-bayangi potensi pelemahan, mencermati berbagai sentimen hingga wait and see pasar, dengan pelemahan terdekat menuju level Rp17.700/US\$ yang merupakan support pertama dengan target pelemahan kedua akan tertahan di Rp17.750/US\$.

Apabila kembali break kedua support tersebut, berpotensi melemah lanjutan dengan menuju level Rp17.800/US\$ sebagai support terkuatnya.

Jika rupiah terjadi penguatan hari ini, resistance menarik dicermati pada level di range Rp17.650/US\$ dan selanjutnya Rp17.600/US\$.

Adapun rupiah sejatinya masih ada potensi penguatan optimistis lanjutan seiring sentimen pasar dalam negeri yang mulai membaik ke resistance potensialnya ke level Rp17.500/US\$ biarpun saat ini masih terbatas peluangnya.

Harga Pangan Hari Ini: Cabai dan Bawang Memimpin Penurunan

Kamis, 17 September 2026 12:50 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121840/harga-pangan-hari-ini-cabai-dan-bawang-memimpin-penurunan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat penurunan harga sejumlah komoditas pangan pada Kamis (17/9/2026) pukul 10.00 WIB.

Seluruh varian cabai mengalami penurunan harga. Harga cabai merah keriting turun sebesar 2,65% menjadi Rp60.650 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau turun 9,42% menjadi Rp58.150 per kilogram dan harga cabai rawit merah turun 6,27% menjadi Rp84.400 per kilogram. Kemudian pada cabai merah besar yang turun sebesar 16,49% menjadi Rp46.100 per kilogram.

Kelompok komoditas bawang juga kompak mengalami penurunan. Harga bawang putih ukuran sedang turun 3,94% menjadi Rp37.800 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah ukuran sedang turun sebesar 7% menjadi Rp35.150 per kilogram.

Mayoritas harga pada kelompok komoditas beras juga mengalami penurunan. Harga beras kualitas super I dan super II masing-masing turun sebesar 2,5% dan 2,89% menjadi Rp17.400 per kilogram dan Rp16.800 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I turut turun sebesar 2,11% menjadi Rp16.250 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium II mengalami penurunan sebesar 2,4% menjadi Rp15.950 per kilogram.

Harga beras bawah II turun sebesar 0,21% menjadi Rp14.600 per kilogram. Adapun yang mengalami kenaikan tipis hanya beras kualitas bawah I dengan harga Rp15.050 per kilogram.

Harga gula pasir premium turun 0,9% menjadi Rp20.150 per kilogram. Kemudian, harga gula pasir kualitas lokal turun sebesar 1,08% menjadi Rp18.900 per kilogram. Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan sebesar 3,16% menjadi Rp28.900 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar penurunan sebesar 2,94% menjadi Rp41.250 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, kenaikan harga terjadi pada minyak goreng kemasan bermerek 2 sebesar 0,55% menjadi Rp23.700 per liter. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek 1 mengalami penurunan dengan harga Rp23.550 per liter dan minyak goreng curah seharga Rp20.300 per liter.

Hanya harga komoditas daging sapi terpantau mengalami kenaikan secara bersamaan. Harga daging sapi kualitas I naik sebesar 0,82% menjadi Rp153.300 per kilogram, sedangkan harga daging sapi kualitas II naik sebesar 1,45% menjadi Rp145.500 per kilogram.

Bank Indonesia (BI) Diproyeksi Tahan BI Rate 5,75% di September, Ini Indikatornya

Kamis, 17 September 2026 20:07 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-bi-diproyeksi-tahan-bi-rate-575-di-september-ini-indikatornya>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, Bank Indonesia (BI) tidak perlu mengikuti langkah Federal Reserve (The Fed) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps).

Menurutnya, BI masih perlu mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2026.

"Menurut saya, Bank Indonesia (BI) tidak perlu mengikuti kenaikan suku bunga The Fed. Sebab, BI sebelumnya sudah melakukan front loading atau kenaikan suku bunga lebih awal pada Mei-Juni. Saat itu, BI Rate telah naik sekitar 100 basis poin," ujar Juniman kepada Kontan, Kamis (17/9/2026).

Seperti diketahui, The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 4% dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC). Juniman menilai, selama nilai tukar rupiah tidak melemah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS dan inflasi tidak berada di atas 3,5%, BI seharusnya mempertahankan BI Rate di level 5,75%.

"Jadi, walaupun The Fed semalam menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, tidak ada alasan bagi BI untuk mengikuti langkah yang sama," ujarnya.

Menurut Juniman, keputusan BI ke depan akan tetap bergantung pada perkembangan indikator ekonomi domestik, terutama inflasi dan nilai tukar rupiah.

Apabila rupiah masih berada di bawah Rp18.000 per dolar AS dan inflasi tetap di bawah 3,5% hingga akhir tahun, ia menilai BI tidak perlu kembali menaikkan suku bunga.

Juniman juga menilai ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate pada Desember 2026 belum tentu terealisasi. Dengan demikian, BI tidak perlu mengambil langkah antisipatif dengan menaikkan suku bunga hanya karena adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed.

Konsekuensi Jika BI Rate Naik

Juniman mengatakan, kenaikan BI Rate berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik melalui sejumlah jalur.

Pertama, kenaikan suku bunga akan membuat cost of fund atau biaya dana semakin mahal. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan.

Kedua, kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan beban anggaran pemerintah. Sebab, kenaikan suku bunga dapat mendorong kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN). Ketika yield SBN meningkat, biaya penerbitan utang pemerintah juga berpotensi ikut naik.

"Kalau BI mengikuti kenaikan suku bunga The Fed, Bank of Japan, Bank of England, atau bank sentral lainnya, dampaknya adalah cost of fund atau biaya suku bunga akan semakin mahal. Pada akhirnya, kondisi ini dapat membuat perekonomian semakin melambat," jelas Juniman.

Selain itu, kenaikan suku bunga juga dapat membuat kredit menjadi lebih mahal. Suku bunga pinjaman yang meningkat berpotensi menekan penyaluran kredit, yang kemudian dapat berdampak terhadap konsumsi dan investasi.

"Jadi, menurut saya, risiko kenaikan BI Rate lebih besar daripada manfaat yang diperoleh," kata Juniman.

Ia menambahkan, dalam dua atau tiga RDG terakhir, Gubernur BI telah menyampaikan bahwa kebijakan suku bunga antara lain diarahkan untuk menopang stabilitas nilai tukar.

Dengan demikian, apabila nilai tukar rupiah sudah stabil dan berada di bawah Rp18.000 per dolar AS, Juniman menilai kenaikan BI Rate tidak lagi menjadi langkah yang diperlukan.

BI Proyeksikan Rupiah Rp17.300-Rp17.800 hingga Akhir 2026

Kamis, 17 September 2026 18:06 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-proyeksikan-rupiah-rp17300-rp17800-hingga-akhir-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai tukar rupiah masih akan bergerak dalam rentang Rp17.300 hingga Rp17.800 per dolar Amerika Serikat (AS) hingga akhir 2026. Proyeksi tersebut disampaikan di tengah tekanan terhadap pasar keuangan global yang kembali meningkat.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, proyeksi nilai tukar tersebut menjadi bagian dari gambaran perekonomian Indonesia ke depan. Selain rupiah, BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada dalam kisaran 5,2%-6%.

"Ekonomi growth kita 5,2%-6% dengan rupiah di Rp17.300-Rp17.800 per dollar AS," kata Destry saat menghadiri Raker di Komisi VI DPD RI, Senin (14/9/2026).

Menurut Destry, pergerakan rupiah sebelumnya telah berada di sekitar level Rp17.500 per dolar AS dan sempat mendekati Rp17.400 per dolar AS.

Namun, tekanan terhadap rupiah kembali meningkat seiring memburuknya kondisi global. Destry mengatakan eskalasi perang Iran-Amerika yang semakin meningkat turut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir.

"Gejolak di global memburuk karena perang Iran-Amerika terus makin meningkat, kita agak tertekan dua hari terakhir ini," ujar Destry.

Meski menghadapi tekanan eksternal, Destry mengatakan rupiah masih mampu bertahan di kisaran Rp17.600-an per dolar AS.

"Alhamdulillah masih berada di level Rp17.600-an," katanya.

Sementara itu, dari sisi inflasi, BI masih mempertahankan proyeksi inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1%.

Batas Defisit 3% APBN Diusulkan Lebih Fleksibel dalam RUU Keuangan Negara

Kamis, 17 September 2026 17:04 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/batas-defisit-3-apbn-diusulkan-lebih-fleksibel-dalam-ruu-keuangan-negara>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembahasan RUU Keuangan Negara membuka opsi baru dalam menjaga disiplin fiskal Indonesia.

Batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai tidak harus diperlakukan sebagai batas kaku setiap tahun.

Opsi tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Keuangan Negara, Kamis (17/9/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membuka ruang agar aturan defisit memberikan fleksibilitas lebih besar.

Misbakhun menilai batas 3% perlu dikaji kembali karena kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi tidak selalu sama setiap tahun.

Menurut dia, ruang fiskal dibutuhkan pemerintah untuk melakukan intervensi dan mendorong ekspansi ekonomi, terutama ketika Indonesia berupaya keluar dari jebakan pendapatan menengah.

“Bagaimana cara mencapai ekspansi pertumbuhan itu kalau kita nge-lock di sana?” kata Misbakhun.

Ia juga menyoroti dasar hukum batas defisit 3%. Menurut Misbakhun, angka tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bukan sebagai norma yang secara eksplisit tertulis dalam pasal.

Misbakhun menilai pembahasan fiskal juga perlu bergeser dari sekadar memperdebatkan angka defisit ke persoalan yang menyebabkan defisit, yakni hubungan antara penerimaan negara dan belanja.

Sementara itu, kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Chaikal Nuryakin menawarkan pendekatan yang lebih terukur.

Ia bilang, batas defisit 3% dapat ditempatkan sebagai target dalam kerangka jangka menengah, bukan kewajiban yang harus dicapai secara persis setiap tahun.

Dengan skema tersebut, pemerintah masih dapat mencatat defisit lebih tinggi pada tahun tertentu ketika ekonomi membutuhkan stimulus, kemudian melakukan penyesuaian pada tahun-tahun berikutnya agar disiplin fiskal tetap terjaga.

“Dalam 10 tahun harus 3%, tapi ada fleksibilitas di tiap tahunnya,” ujar Chaikal.

Menurut Chaikal, fleksibilitas seperti itu tetap membutuhkan pengelolaan agar posisi fiskal dalam jangka menengah berada pada batas yang ditetapkan.

Pengalaman pandemi Covid-19 juga menunjukkan pentingnya ruang bagi pemerintah untuk melampaui batas defisit ketika menghadapi kondisi ekonomi luar biasa.

Dengan demikian, pembahasan RUU Keuangan Negara tidak hanya menyangkut apakah batas defisit 3% dipertahankan atau diubah, tetapi juga bagaimana disiplin fiskal tersebut diterapkan.

Skema jangka menengah menjadi salah satu opsi agar pemerintah memiliki ruang merespons siklus ekonomi tanpa menghilangkan target pengendalian defisit.

ADB Setujui Program US\$650 Juta untuk Perkuat Fiskal Daerah di Indonesia

Kamis, 17 September 2026 04:30 WIB

Reporter: Yudho Winarto, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/adb-setujui-program-us650-juta-untuk-perkuat-fiskal-daerah-di-indonesia>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) menyetujui program senilai setara US\$650 juta untuk membantu Indonesia memperkuat pengelolaan fiskal antarpemerintah, mempercepat digitalisasi tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Program tersebut merupakan bagian pertama dari Accelerating Decentralization for Improved Local Governance Program (ADIL).

Program ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berkelanjutan.

ADB menyebut program tersebut akan mendukung pengembangan platform digital nasional untuk mengintegrasikan data dan pelaporan fiskal.

Selain itu, program juga mencakup upaya memperbaiki penilaian pajak properti guna meningkatkan penerimaan pemerintah daerah.

Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk mendukung target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik penting diberikan," kata Bobur dalam keterangan resmi, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, penguatan arsitektur fiskal dan digital dapat membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Belanja daerah capai 40% pengeluaran publik

ADB menilai, penguatan pengelolaan keuangan daerah penting karena sekitar 35%-40% dari total belanja publik Indonesia dikelola di tingkat subnasional.

Belanja tersebut mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Namun, sistem pengelolaan keuangan publik yang masih terfragmentasi serta perbedaan kapasitas fiskal dan administratif antardaerah menjadi tantangan.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, hingga kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui program ADIL, ADB akan mendukung penguatan koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui peningkatan transparansi fiskal dan pemanfaatan sistem digital.

Program tersebut juga memasukkan aspek perlindungan hak-hak sipil. Salah satunya melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif terhadap perempuan dan anak perempuan serta integrasi risiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dukung RPJMN 2025-2029

ADB menyebut program ADIL dibangun berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Program ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045.

Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus memperkuat keberlanjutan lingkungan.

Dengan penguatan sistem fiskal dan digital di tingkat daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik di tengah sistem pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi.

Investasi Mini Refinery di Jateng Segara Terealisasi, Investor Asal Dubai Puji Gerak Cepat Ahmad Luthfi

Kamis, 17 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/investasi-mini-refinery-di-jateng-segara-terealisasi-investor-asal-dubai-puji-gerak-cepat-ahmad-luthfi/>

SEMARANG — Rencana investasi pembangunan mini refinery berkapasitas awal 10 ribu barel per hari senilai Rp5 triliun oleh investor asal Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, resmi berlanjut usai penandatanganan kerja sama antarbadan usaha.

Komisaris Nusantara Petroleum and Petrochemical, Talal Ourfali, menilai dukungan penuh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mempercepat proses rencana investasi mini refinery di Kabupaten Jepara.

Penjajakan yang berlangsung hampir satu tahun itu, kini berlanjut pada penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Perumda Aneka Usaha Jepara.

“Ini termasuk cepat, karena Pak Gubernur mendukung total,” kata Talal, se usai penandatanganan kerja sama di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/9/2026).

Dijelaskan, proses tersebut dimulai dari kedatangan pihak investor ke Jawa Tengah. Komunikasi kemudian berlanjut hingga tercapai kesepakatan awal, yang ditindaklanjuti melalui kerja sama antarbadan usaha. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat membantu realisasi investasi tersebut.

Talal menyampaikan, perusahaan menargetkan pengembangan kapasitas hingga 60 ribu barel per hari serta membuka peluang bisnis lain setelah investasi awal berjalan.

Gubernur Jawa tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mengawal kelanjutan kerja sama tersebut.

“Tentu saya sebagai gubernur sangat mengizinkan sekali, dan akan kita support terkait dengan kegiatan ini,” katanya dalam arahan.

Untuk mempercepat tindak lanjut, Luthfi menyatakan telah menghubungi Pertamina, dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah itu diarahkan untuk mendukung kepastian pasokan minyak mentah, seiring persiapan infrastruktur proyek.

“Termasuk minyak mentahnya harus jelas dan pasti,” tegasnya.

Luthfi menilai, komitmen investor tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap Jawa Tengah, di tengah tantangan global. Dia berharap, investasi itu dapat meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Di saat geopolitik, di saat tekanan fiskal, Jawa Tengah masih menjadi tujuan investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan, calon investor telah meninjau lahan dan lokasi pendaratan kapal untuk pengangkutan minyak. Lokasi tersebut dinilai cocok, sedangkan pemenuhan pasokan bahan baku masih membutuhkan dukungan.

Melalui kerja sama ini, pengembangan mini refinery diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memperkuat peran BUMD dan potensi pendapatan asli daerah Jepara. (Humas Jateng)*ul

Buka Job Fair MTQ 2026, Pemprov Jateng Pastikan Bukan Formalitas dan Tanpa Jastip

Kamis, 17 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/buka-job-fair-mtq-2026-pemprov-jateng-pastikan-bukan-formalitas-dan-tanpa-jastip/>

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Job Fair dalam rangkaian MTQ Nasional XXXI 2026. Kegiatan yang berlangsung dua hari, 17-18 September tersebut dipastikan bukan sekadar kegiatan formalitas, dan tidak ada praktik titip-menitip atau intervensi dalam penerimaan tenaga kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jateng, Candra Yulawan mengatakan, job fair tersebut diikuti sekitar 40 perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan berdasarkan kualifikasi pencari kerja, dan kewenangan pihak perusahaan untuk menentukan lolos dan tidaknya calon pekerja.

“Lowongannya lebih dari 3.000, ada sekitar 300 jabatan. Ini job fair kedua tahun 2026, setelah sebelumnya kami mengadakan job fair dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah,” kata Candra, Kamis (17/9/2026).

Menurut Candra, Pemprov Jateng juga memastikan setiap proses rekrutmen dapat dipantau melalui mekanisme yang disiapkan bersama perusahaan. Pencari kerja akan mendapatkan informasi mengenai tahapan seleksi, termasuk apakah mereka diterima, melanjutkan ke tahap berikutnya, atau tidak lolos.

“Kalau tidak diterima, bilang saja tidak. Jangan pelamar diberikan PHP. Menunggu itu paling enggak enak. Kalau ada seleksi selanjutnya, sampaikan seleksi selanjutnya, batas akhirnya kapan,” terangnya.

Candra menegaskan, tidak ada intervensi dalam proses penerimaan tenaga kerja, termasuk praktik titip-menitip. Menurutnya, kesempatan kerja terbuka bagi pencari kerja yang memenuhi kualifikasi, baik warga Jawa Tengah maupun dari daerah lain.

“Tidak ada sama sekali. Saya ketua timnya job fair. Tidak ada namanya titip-menitip,” tegas Candra.

Dia menyebut, pendaftar secara daring sebelum pelaksanaan job fair, telah mencapai sekitar 1.260 orang. Antusiasme tersebut menunjukkan kebutuhan pencari kerja terhadap informasi, dan akses lowongan masih tinggi.

“Ini sebagai upaya penyerapan tenaga kerja. Sebenarnya kalau dilihat antara penganggur dengan lowongan, banyak lowongan. Tinggal kadang-kadang kita memilih berdasarkan passion, tempat kerja, atau tempat tinggal,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan HR Recruitment PT Polygroup Manufaktur Indonesia, Rizka Anlina. Menurutnya, perusahaan membuka lebih dari 15 jenis lowongan dalam job fair tersebut, dengan kebutuhan tenaga kerja yang secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 20 orang.

“Untuk pelamar sendiri, kita murni sesuai kualifikasi. Tidak ada sangkut paut apa pun. Disesuaikan dengan pengalaman dan lowongan yang relevan dengan bidang pencari kerja,” katanya.

Rizka mengatakan, keberadaan job fair membantu perusahaan mendapatkan calon tenaga kerja dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Perusahaan juga membuka kesempatan bagi fresh graduate, salah satunya untuk posisi admin produksi.

“Untuk para pencari kerja, yakin saja sama diri kalian sendiri. Asalkan punya skill, kemampuan dan niat, tidak usah mendengarkan isu-isu yang kurang baik di luar sana,” jelasnya.

Sementara itu, peserta Job Fair, Oktaviani, mengaku sengaja datang karena baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Lulusan akuntansi tersebut berharap mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan, sekaligus menjadi ruang untuk mengembangkan pengalaman.

“Kalau saya jurusan akuntansi, pinginnya mengembangkan pengalaman di bidang akuntansi supaya bisa berkembang lebih lanjut,” katanya.

Menurut Oktaviani, keberadaan job fair memudahkannya dalam mencari informasi, karena dapat menemukan banyak pilihan perusahaan dalam satu tempat. Dia berharap, salah satu lowongan yang dilamar dapat menjadi pekerjaan, yang sesuai dengan lingkungan dan pengembangan pengalamannya.

“Harapannya bisa diterima kerja,” tandasnya. (Wk/UI, Diskomdigi Jateng)

Empat Event Disiapkan untuk Gerakkan Ekonomi Kota Magelang

Kamis, 17 September 2026

Penulis: Prokompim, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/empat-event-disiapkan-untuk-gerakkan-ekonomi-kota-magelang/>

KOTA MAGELANG — Rangkaian event akan digelar sepanjang September hingga November 2026 di Kota Magelang. Ini sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi dan kehidupan kota.

Bukan sekadar agenda hiburan, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendatangkan masyarakat, menghidupkan pelaku usaha, sekaligus menggaungkan Kota Magelang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (16/9/2026).

“Event adalah nafas, denyut nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Empat agenda yang disiapkan yakni Borobudur Indonesia Expo 2026, Magelang Flower Festival 2026, Merti Gunung Tidar 2026, serta Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jawa Tengah Magelang Open Master Championship.

Rangkaian dimulai dengan Borobudur Indonesia Expo yang berlangsung 17–20 September 2026 di Alun-Alun Kota Magelang.

“Alun-alun memang epicentrum kegiatan-kegiatan di Kota Magelang,” paparnya.

Event bertema “Membangun Bersama, Memperkuat Ekonomi Masyarakat” ini mempertemukan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, pariwisata, investasi, kementerian, serta pemerintah daerah di kawasan Borobudur. Kegiatan ini ditargetkan dihadiri oleh 40.000 pengunjung.

Aktivitas kota berlanjut melalui Magelang Flower Festival (MFF) pada 25 Oktober–1 November 2026. Bunga atau flora diangkat sebagai kekuatan budaya, pariwisata, kreativitas, edukasi, sekaligus ekonomi.

“Sejumlah kegiatan akan mengisi festival, mulai dari seni, pameran, karnaval, fesyen hingga edukasi flora dan aktivitas masyarakat,” papar Damar.

Dua agenda yang menjadi bagian dari festival adalah Senam ASRI yang menargetkan 10.000 peserta pada 30 Oktober serta Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026.

Setelah itu, Merti Gunung Tidar digelar 6–8 November 2026. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan tradisi, tetapi menjadi bagian dari upaya merawat Gunung Tidar sebagai warisan sejarah, budaya, spiritual, dan ekologis Kota Magelang.

Lanjut Damar, masyarakat menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Sebanyak 192 RW se-Kota Magelang direncanakan membawa tumpeng sebagai simbol gotong royong dan kebersamaan, disertai rangkaian resesik, ritual dan doa, kirab budaya, pagelaran kesenian, serta pembagian tumpeng dan kembul bujana.

Sementara itu, sektor olahraga ada Magelang Open Master Championship pada 13–15 November 2026 di Samapta Aquatic Stadium Kota Magelang. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota Magelang itu ditargetkan diikuti 1.000 atlet dari klub-klub renang se-Jawa Tengah.

Selain rangkaian event, Pemkot Magelang juga akan membangun Monumen Paku Bumi di simpang Bayeman dalam waktu dekat. Monumen ini dirancang tidak sekadar memperkuat wajah kota, tetapi juga membawa filosofi paku sebagai simbol kekuatan, keteguhan, persatuan, dan fondasi kokoh pembangunan Kota Magelang.

“Monumen Paku Bumi diharapkan menjadi landmark ikonik, jadi identitas visual Kota Magelang yang mudah dikenali, sekaligus memperkuat citra dan daya tarik Kota Magelang,” imbuhnya.

Realisasi pajak kendaraan bermotor Jateng capai 56,56 persen

Kamis, 17 September 2026 08:17 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/645508/realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-jateng-capai-5656-persen>

Semarang (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah mencatat realisasi penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor hingga September 2026 sudah mencapai 56,56 persen.

"Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sampai September sudah Rp2,47 triliun dari target Rp4,3 triliun," kata Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi di Semarang, Rabu.

Berdasarkan jumlah tersebut, kata dia, penerimaan yang berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor baru sudah mencapai 64 persen dari target Rp2,1 triliun.

Realisasi penerimaan asli daerah (PAD) hingga September 2026 mencapai 62,90 persen dari target Rp15,7 triliun.

Ia menuturkan dengan sisa sekitar empat bulan, akan diupayakan realisasi PAD sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Dengan kondisi ekonomi dan politik saat ini tentu berpengaruh terhadap pencapaian target," katanya.

Pada 2025 masih terdapat piutang pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar Rp2,4 triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah paradigma dalam upaya peningkatan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.

"Kalau pakai sistem sanksi agak stagnan, maka kami memakai sistem reward untuk meningkatkan animo masyarakat dalam membayar pajak," katanya.

Bapenda Jateng Mulai Pantau Dampak Pertumbuhan Kendaraan Listrik ke PAD

Kamis, 17 September 2026 21:33 WIB

Penulis: Rezanda Akbar D, Editor: Vito

<https://jateng.tribunnews.com/bisnis/1266700/bapenda-jateng-mulai-pantau-dampak-pertumbuhan-kendaraan-listrik-ke-pad>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perkembangan kendaraan listrik di Jateng mulai menjadi perhatian dari sisi pendapatan daerah, menyusul sektor kendaraan bermotor masih menjadi satu sumber penerimaan andalan.

Meski demikian, hingga kini Bapenda Jateng belum memiliki target khusus nominal penerimaan pajak yang berasal dari mobil listrik, dengan perubahan ekosistem otomotif yang terus berlangsung.

"Pemda perlu memastikan transformasi industri otomotif tetap dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan penerimaan daerah," kata Kepala Bapenda Jateng, Muhammad Masrofi, dikutip Tribun Jateng, Kamis (17/9).

Menurut dia, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi satu komponen besar dalam pendapatan asli daerah (PAD) Jateng.

Selain dua jenis penerimaan itu, Masrofi menuturkan, PAD juga berasal dari pajak rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta sejumlah penerimaan lain. "Yang paling besar PKB dan BBNKB," ujarnya

Pada 2026, Jateng menargetkan PAD sebesar Rp 15,7 triliun. Hingga saat ini, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp 9,8 triliun atau 62,90 persen dari target. Artinya, masih terdapat sekitar Rp 5,9 triliun penerimaan yang harus dikejar hingga akhir tahun.

Masrofi menyatakan, kondisi ekonomi dapat memengaruhi penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.

"Kondisi ekonomi, kondisi politik itu juga berpengaruh terhadap pendapatan kita, terutama dari pajak kendaraan bermotor," ucapnya.

Ia menyebut, penerimaan dari BBNKB itu mencakup kendaraan baru roda dua dan roda empat. Bapenda memproyeksikan realisasi BBNKB kendaraan baru dapat mencapai sekitar 93 persen hingga akhir 2026.

"Untuk kendaraan baru, baik roda dua maupun roda empat, BBNKB 1 sudah mencapai angka realisasi 63 persen. Ini masih tersisa empat bulan," ujarnya.

Masrofi menegaskan, BBNKB kendaraan baru berbeda dengan tunggakan PKB. BBNKB 1 dikenakan terhadap kendaraan baru, sedangkan tunggakan pajak berkaitan dengan kewajiban PKB kendaraan yang telah terdaftar.

"Tidak ada piutang, tidak ada tunggakan pajak. Yang ada tunggakan pajak adalah pajak kendaraan bermotor," jelasnya. (Rezanda Akbar D)

Gelombang PHK Terjadi di Jateng, DPRD Petakan Penyebab dan Siapkan Langkah Mitigasi

Kamis, 17 September 2026 20:56 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1266693/gelombang-phk-terjadi-di-jateng-dprd-petakan-penyebab-dan-siapkan-langkah-mitigasi>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Jawa Tengah kini tengah memantau gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di berbagai daerah.

Mereka melakukan pemantauan dengan menerjunkan Komisi E yang membidangi ketenagakerjaan agar memetakan penyebab dan mencari solusi dari persoalan tersebut.

"Betul, kami suruh Komisi E untuk melakukan konsolidasi apa penyebabnya (gelombang PHK)," jelas Ketua DPRD Jateng Sumanto kepada Tribun, Kota Semarang, Kamis (17/9/2026).

Dari pemetaan itu, pihaknya ingin memetakan penyebabnya dan melakukan langkah mitigasi. Tujuannya, agar gelombang PHK ini bisa ditekan.

"Komisi E sedang berdiskusi tentang itu minimal tidak terjadi (kenaikan PHK) yang tajam," terang Sumanto

Selain itu, lanjut Sumanto, pihaknya juga tidak ingin adanya praktik PHK secara serampangan. Terlebih, proses PHK yang melanggar regulasi.

"Kami mengantisipasi PHK-PHK yang tidak sesuai dengan aturan," bebernya.

Ia juga mengajak pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota ikut turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota diharapkan bisa memberikan kontribusi supaya ini jangan berlanjut," terangnya.

Sudah Ada 7 Ribu Lebih Buruh di-PHK

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz mengatakan, jumlah buruh yang di-PHK dari Januari hingga awal September ini mencapai sekitar 7.315 orang.

Mayoritas buruh yang terkena PHK dari sektor tekstil, garmen dan perkayuan.

"Kami baik melalui Dinas Ketenagakerjaan provinsi maupun kabupaten/kota mengawal agar PHK ini pilihan terakhir, perusahaan sebelum melakukan PHK harus melakukan langkah-langkah pencegahan di antaranya melakukan penghematan," katanya.

Ketika langkah-langkah tersebut telah dilakukan tetapi perusahaan hingga akhirnya melakukan PHK. Maka, Dinas Ketenagakerjaan akan mengawal proses pemberian hak-hak buruh seperti pesangon, upah terutang, Jaminan Hari Tua (JHT) maupun hak-hak lainnya.

"Kami juga akan mengakseskan buruh yang kena PHK ke lowongan pekerjaan perusahaan lainnya yang membutuhkan," terangnya.

Menurutnya, fenomena PHK tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor seperti mismanajemen, kenaikan bahan baku, dan kondisi geopolitik global.

"Sebabnya banyak terutama geopolitik global yang berpengaruh pada buyer (pemesan produk)," tambahnya. (Iwn)

PAD Jateng Baru Tercapai 62 Persen, Kondisi Politik Pengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 17 September 2026 20:18 WIB

Penulis: Val, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1266688/pad-jateng-baru-tercapai-62-persen-kondisi-politik-pengaruhi-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah tahun 2026 baru menyentuh angka 62,90 persen atau sekitar Rp9,8 triliun dari target keseluruhan sebesar Rp15,7 triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui bahwa dinamika kondisi ekonomi hingga situasi politik sangat memengaruhi capaian penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, menyebutkan bahwa PKB bersama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi penyumbang porsi terbesar bagi PAD, berdampingan dengan pajak rokok, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Alat Berat.

"Yang paling besar PKB dan BBNKB," ungkap Masrofi, Kamis (17/9/2026).

Mengingat masih ada sisa target sekitar Rp5,9 triliun yang harus dikejar hingga akhir tahun, Masrofi menegaskan pentingnya stabilitas eksternal untuk menjaga tren penerimaan.

"Kalau kondisi ekonomi, kondisi politik itu juga berpengaruh terhadap pendapatan kita, terutama dari pajak kendaraan bermotor," jelasnya.

Di sisi lain, penerimaan BBNKB untuk kendaraan baru (BBNKB 1) roda dua maupun roda empat saat ini telah terealisasi sekitar 63 persen.

Bapenda optimistis angka tersebut dapat menembus target 93 persen hingga penghujung 2026.

Masrofi memperjelas bahwa BBNKB kendaraan baru tidak memiliki risiko piutang.

Hal tersebut berbeda dengan kewajiban PKB berkala yang kerap menyisakan pajak tertunggak pada kendaraan yang sudah terdaftar.

"Tidak ada piutang, tidak ada tunggakan pajak (di BBNKB 1). Yang ada tunggakan pajak adalah pajak kendaraan bermotor," tegasnya.

Tantangan penerimaan daerah ke depan juga dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik di Jawa Tengah.

Meski Bapenda belum merinci angka pasti kontribusi pajak dari mobil listrik, perubahan ekosistem otomotif ini terus dipantau agar transformasi energi ramah lingkungan tetap berjalan selaras dengan keberlanjutan PAD Jawa Tengah. (*)